

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2017

Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

"Planning for a better Babel"



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun RKPD Tahun 2017 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 atau disingkat RKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Kebijakan Umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
13. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja;
- c. sumber pendanaan dan prakiraan maju.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2017 berfungsi sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja-PD;
 - b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Provinsi Tahun Anggaran 2017;
 - c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2017.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2017 untuk:
 - a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD;
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;

- d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD;
- f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program PD yang ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017; dan
 - c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*) keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2017.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2017.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017.

(5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2017.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

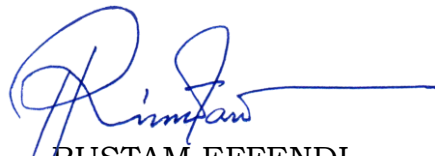
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juni 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 21
SERI E

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 I
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.8
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I.9
1.5. Maksud dan Tujuan	I.10
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	 II
2.1. Kondisi Umum Daerah	II.1
2.1.1. Aspek Geografidan Demografi	II.1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II.1
A. Luas dan Batas Wilayah	II.1
B. Letak dan Kondisi Geografis	II.3
C. Topografi	II.5
D. Geologi	II.6
E. Hidrologi	II.7
F. Klimatologi	II.8
G. Flora dan Fauna	II.9
H. Penggunaan Lahan	II.9
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II.10
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II.18
2.1.1.4. Demografi	II.20

	Halaman
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.21
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II.21
A. Pertumbuhan PDRB, Struktur Perekonomian dan PDRB per Kapita	II.21
B. Laju Inflasi	II.26
C. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan	II.29
D. Indeks Ketimpangan Williamson	II.30
E. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	II.30
F. Perkembangan Nilai Investasi	II.33
G. Jumlah Kriminalitas	II.34
H. Perkembangan Sosial	II.34
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II.37
A. Angka Melek Huruf	II.37
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II.38
C. Angka Partisipasi Kasar.....	II.40
D. Angka Kematian Bayi	II.41
E. Usia Harapan Hidup	II.43
F. Rasio Penduduk yang Bekerja	II.43
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	II.46
A. Seni Budaya	II.46
B. Pemuda	II.47
C. Olahraga	II.47
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II.48
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II.48
A. Urusan Pendidikan	II.48
1. Angka Partisipasi Sekolah	II.48
2. Angka Partisipasi Murni	II.50
a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah.....	II.50
b. Rasio Murid dan Guru	II.51
B. Urusan Kesehatan	II.52
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.56
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II.58

Halaman

E. Urusan Perhubungan	II.59
F. Urusan Lingkungan Hidup	II.61
G. Urusan Pertanahan	II.62
H. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.62
I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II.63
J. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.64
K. Urusan Sosial	II.64
L. Urusan Tenaga Kerja	II.65
M. Urusan Penanaman Modal	II.65
N. Urusan Kebudayaan	II.66
O. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II.66
P. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II.66
Q. Urusan Pangan	II.67
R. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.67
S. Urusan Komunikasi dan Informatika	II.67
T. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II.67
U. Urusan Statistik	II.68
V. Urusan Persandian	II.68
W. Urusan Perpustakaan	II.68
X. Urusan Kearsipan	II.68
Y. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II.69
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II.71
A. Urusan Pertanian	II.71
B. Urusan Kehutanan	II.72
C. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	II.72
D. Urusan Pariwisata	II.73
E. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II.74
F. Urusan Perdagangan	II.74
G. Urusan Industri	II.75
H. Urusan Ketransmigrasian	II.75
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II.75

	Halaman
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II.75
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II.75
B. Nilai Tukar Petani	II.76
C. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)	II.77
D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II.77
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II.78
A. Luas Wilayah Produktif	II.78
B. Infrastruktur	II.78
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II.79
A. Tindak Kriminalitas	II.79
B. Jumlah Demonstrasi	II.80
C. Kemudahan Perizinan	II.80
D. Pengenaan Pajak Daerah	II.81
E. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha	II.82
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya manusia	II.82
A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)	II.82
B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	II.83
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II.83
2.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD	II.207
2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	II.243
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah	II.243
A. Urusan Wajib	II.243
B. Urusan Pilihan	II.251
2.5.1. Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II.253
2.1.5.1. <i>Sustainability Development Goals</i> (SDGs)	II.253
2.1.5.2. Standar Pelayanan Minimal	II.253
2.1.5.3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	II.255
2.1.5.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.255
2.1.5.5. Tata Kelola Pemerintahan	II.258

BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN	III
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi	III.1
3.1.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III.1
3.1.1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	III.8
3.1.1.3.	PDRB Perkapita	III.10
3.1.1.4.	Struktur Sektor Ekonomi	III.11
3.1.1.5.	Produk Struktur Pengeluaran dalam PDRB	III.13
3.1.1.6.	Tingkat Inflasi	III.13
3.1.1.7.	ICOR	III.15
3.1.1.8.	Tingkat Investasi	III.16
3.1.1.9.	Ekspor dan Impor.....	III.17
3.1.2.	Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan	III.18
3.1.2.1.	Pengangguran.....	III.18
3.1.2.2.	Kemiskinan	III.18
3.1.2.3.	Ketimpangan Regional	III.19
3.1.2.4.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	III.20
3.1.3.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017 ...	III.21
3.1.3.1.	Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2016 dan 2017	III.21
3.1.3.2.	Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung 2016 dan 2017.....	III.22
3.1.3.3.	Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017	III.23
3.1.4.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III.24
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.24
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III.27
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.29
3.2.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III.29
3.2.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III.31
3.2.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III.35

	Halaman
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV
4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017	IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.	IV.5
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	IV.8
4.2.1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional.....	IV.11
4.2.2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV.36
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	IV.37
4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Pembangunan	IV.65
4.4.1. Prioritas Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan Koperasi Komoditi	IV.65
4.4.2. Prioritas Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	IV.71
4.4.3. Prioritas Penguatan <i>Rural Urban Linkages</i>	IV.72
4.4.4. Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan...	IV.76
4.4.5. Prioritas SATAM EMAS	IV.81
4.4.6. Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	IV.82
4.4.7. Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan.....	IV.84
4.4.8. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	IV.88
4.4.9. Prioritas Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang.....	IV.91
4.4.10. Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	IV.93
4.4.11. Prioritas Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	IV.95
4.4.12. Prioritas Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	IV.98
4.4.13. Prioritas Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur.....	IV.104
A. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs	IV.115
4.5. Prioritas Pembangunan Kewilayahan.....	IV.117
4.5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	IV.121
4.5.2. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034	IV.121



Halaman

BAB V	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF	V
5.1.	Rencana Program Prioritas	V.1
A.	Program yang dilaksanakan setiap SKPD.....	V.1
B.	Urusan Wajib	V.1
C.	Urusan Pilihan	V.6
5.2.	Pagu Indikatif.....	V.257
5.3.	Dukungan Rencana Program Terhadap Prioritas Provinsi	V.258

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	II.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	II.2
Tabel	II.2	Jumlah Pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.3
Tabel	II.3	Nama dan Kondisi Pulau Berpenghuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.3
Tabel	II.4	Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.10
Tabel	II.5	Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.17
Tabel	II.6	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.18
Tabel	II.7	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015	II.21
Tabel	II.8	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Tahun 2011-2015 (juta rupiah)	II.22
Tabel	II.9	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015, Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (Persen)	II.24
Tabel	II.10	Distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015, Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dengan Migas (Persen)	II.24
Tabel	II.11	Distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015, Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)	II.25
Tabel	II.12	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2015	II.28
Tabel	II.13	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d. 2015	II.30
Tabel	II.14	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d. 2015	II.31
Tabel	II.15	Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014	II.31
Tabel	II.16	Perkembangan Nilai Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015	II.33
Tabel	II.17	Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.34

Halaman

Tabel	II.18	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d 2015	II.34
Tabel	II.19	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	II.35
Tabel	II.20	Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.36
Tabel	II.21	Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014	II.36
Tabel	II.22	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 + di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d 2015	II.37
Tabel	II.23	Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.39
Tabel	II.24	Perkembangan APK SD/MI dan APM SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015	II.40
Tabel	II.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015	II.40
Tabel	II.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015	II.41
Tabel	II.27	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2014	II.41
Tabel	II.28	Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.42
Tabel	II.29	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.42
Tabel	II.30	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.43
Tabel	II.31	Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.43
Tabel	II.32	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014	II.44
Tabel	II.33	Data Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014	II.45
Tabel	II.34	Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 (Persen)	II.45

Tabel	II.35	Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2014	II.46
Tabel	II.36	Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2014	II.47
Tabel	II.37	Jumlah Perkumpulan 6 (Enam) Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014	II.48
Tabel	II.38	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d.2014/2015	II.49
Tabel	II.39	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	II.50
Tabel	II.40	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014	II.51
Tabel	II.41	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.51
Tabel	II.42	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.52
Tabel	II.43	Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.52
Tabel	II.44	Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.53
Tabel	II.45	Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.54
Tabel	II.46	Perkembangan Jumlah Puskesmas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.55
Tabel	II.47	Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.55
Tabel	II.49	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015.....	II.57
Tabel	II.50	Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015	II.57
Tabel	II.51	Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang	II.58
Tabel	II.52	Persentase Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Atap Terluas Bukan Ijuk per Kabupaten / Kota Tahun 20011 – 2015	II.59

Halaman

Tabel	II.53	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015	II.60
Tabel	II.54	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	II.61
Tabel	II.55	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	II.61
Tabel	II.56	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.63
Tabel	II.57	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014	II.63
Tabel	II.58	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	II.64
Tabel	II.59	Perkembangan TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015	II.65
Tabel	II.60	Luas Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dari Tahun 2008– 2014.....	II.72
Tabel	II.61	Angka Konsumsi RT per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.76
Tabel	II.62	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014.....	II.76
Tabel	II.63	Rasio Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.77
Tabel	II.64	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013	II.77
Tabel	II.65	Rasio Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012	II.78
Tabel	II.66	Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015 ...	II.78
Tabel	II.67	Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) menurut Jenis Kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012-2016	II.79
Tabel	II.68	Jumlah Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.80
Tabel	II.69	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2015	II.81
Tabel	II.70	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014	II.83
Tabel	II.71	Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014	II.83

Tabel	II.72	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015	II.85
Tabel	II.73	Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	II.203
Tabel	II.74	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.208
Tabel	II.75	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.243
Tabel	II.76	Target Pelaksanaan SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.254
Tabel	II.77	Tabel Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan 2015	II.257
Tabel	II.78	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II.259
Tabel	III.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, 2013-2017 (juta rupiah)	III.2
Tabel	III.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, 2013-2017 (juta rupiah)	III.3
Tabel	III.3	Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)	III.6
Tabel	III.4	Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2017 Atas Dasar Harga Konstan (Juta rupiah)	III.7
Tabel	III.5	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 – 2017	III.9
Tabel	III.6	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013– 2017	III.12
Tabel	III.7	Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2017 (persen)	III.13
Tabel	III.8	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2011-2015	III.14
Tabel	III.9	Laju Inflasi Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2015	III.14
Tabel	III.10	Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2015	III.16
Tabel	III.11	Angka Tingka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012–2017	III.18
Tabel	III.12	Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011–2016)	III.20
Tabel	III.13	Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010–2017)	III.21
Tabel	III.14	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d tahun 2017	III.28

Tabel	III.15 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d Tahun 2018	III.33
Tabel	III.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2018	III.36
Tabel	IV.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017	IV.5
Tabel	IV.2 Target Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dan 2017	IV.7
Tabel	IV.3 Matriks Indikator Sasaran	IV.7
Tabel	IV.4 Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017	IV.12
Tabel	IV.5 Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017	IV.13
Tabel	IV.6 Program Prioritas RKPD Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2017	IV.14
Tabel	IV.7 Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017	IV.36
Tabel	IV.8 Memperhatikan RKP tahun 2017 dan pencapaian SPM korelasi antara strategi dan arah kebijakan dalam RKPD Tahun 2017	IV.56
Tabel	IV.9 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan Koperasi Komoditi	IV.66
Tabel	IV.10 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan koperasi komoditi ...	IV.67
Tabel	IV.11 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	IV.71
Tabel	IV.12 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	IV.72
Tabel	IV.13 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Penguatan <i>Rural Urban Linkages</i>	IV.72
Tabel	IV.14 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Penguatan <i>Rural Urban Linkages</i>	IV.73
Tabel	IV.15 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	IV.77
Tabel	IV.16 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	IV.77
Tabel	IV.17 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas SATAM EMAS	IV.81

	Halaman
Tabel IV.18 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas SATAM EMAS .	IV.81
Tabel IV.19 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	IV.83
Tabel IV.20 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	IV.83
Tabel IV.21 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan.....	IV.85
Tabel IV.22 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan.....	IV.85
Tabel IV.23 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	IV.89
Tabel IV.24 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	IV.89
Tabel IV.25 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang.....	IV.91
Tabel IV.26 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang.....	IV.91
Tabel IV.27 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	IV.93
Tabel IV.28 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	IV.94
Tabel IV.29 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah.....	IV.96
Tabel IV.30 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	IV.96
Tabel IV.31 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	IV.98
Tabel IV.32 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	IV.99
Tabel IV.33 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur.....	IV.105
Tabel IV.34 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	IV.106
Tabel IV.35 Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Merespon Program SDGs.....	IV.116

Halaman

Tabel	IV.36	Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034	IV.122
Tabel	IV.37	Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah.....	IV.156
Tabel	V.1	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka	V.8
Tabel	V.2	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka	V.20
Tabel	V.3	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka	V.43
Tabel	V.4	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Bangka	V.54
Tabel	V.5	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka	V.55
Tabel	V.6	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka	V.68
Tabel	V.7	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka	V.81
Tabel	V.8	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka	V.87
Tabel	V.9	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka	V.94
Tabel	V.10	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Bangka	V.100
Tabel	V.11	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka	V.101
Tabel	V.12	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Bangka	V.107
Tabel	V.13	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka	V.109
Tabel	V.14	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka	V.115

Tabel	V.15	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka	V.116
Tabel	V.16	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka	V.122
Tabel	V.17	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Bangka	V.129
Tabel	V.18	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka	V.134
Tabel	V.19	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka	V.138
Tabel	V.20	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Statistik Kepulauan Bangka	V.144
Tabel	V.21	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Bangka	V.145
Tabel	V.22	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka	V.146
Tabel	V.23	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka	V.152
Tabel	V.24	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka	V.156
Tabel	V.25	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka	V.158
Tabel	V.26	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka	V.165
Tabel	V.27	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka	V.167
Tabel	V.28	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka	V.178
Tabel	V.29	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka	V.184
Tabel	V.30	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka	V.190
Tabel	V.31	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Bangka	V.195
Tabel	V.32	Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka	V.198

Tabel	V.33 Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka	V.199
Tabel	V.34 Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	V.257
Tabel	V.35 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	V.259

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi.....	I.5
Gambar	I.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD	I.8
Gambar	II.1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.2
Gambar	II.2 Peta Topografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.6
Gambar	II.3 Peta Geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.7
Gambar	II.4 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.8
Gambar	II.5 Peta Curah Hujan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.9
Gambar	II.6 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.17
Gambar	II.7 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.17
Gambar	II.8 Peta Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.20
Gambar	II.9 Perkembangan Jumlah Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010–2015	II.20
Gambar	II.10 PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015 (rupiah).....	II.26
Gambar	II.11 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan Tahun 2010-2015.....	II.27
Gambar	II.12 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2015	II.28
Gambar	II.13 Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjungpandan, Palembang dan Nasional Tahun 2010 – Tahun 2015.....	II.29
Gambar	II.14 Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014	II.30
Gambar	II.15 Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Prov. Kep. Babel dengan Nasional Tahun 2013	II.32
Gambar	II.16 Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional dan Kab/Kota Tahun 2012	II.32
Gambar	II.17 Grafik Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2015.....	II.33
Gambar	II.18 Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.37
Gambar	II.19 Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015	II.38

Halaman

Gambar	II.20 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014	II.39
Gambar	II.21 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014*	II.44
Gambar	II.22 Tingkat Penggangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013	II.44
Gambar	II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008/2009 s.d 2012/2013	II.49
Gambar	II.24 Perkembangan Angka Penyakit Tahun 2012 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.54
Gambar	III.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2017	III.8
Gambar	IV.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2012 – 2017.....	IV.1
Gambar	IV.2 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012 – 2017	IV.2
Gambar	IV.3 Posisi Tema Pembangunan RKPD Tahun 2017 Terhadap Nasional dan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV.4
Gambar	IV.4 Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal	IV.118
Gambar	IV.5 Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012/2013.....	IV.118
Gambar	IV.6 Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Terhadap Fokus dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2017	IV.120



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Hal penting lain yang diperhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional sehingga perlu diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui proses penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.
Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD.
Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
 - a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan dalam rangka penyelarasan terhadap:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renja-PD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-PD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau

sebelum MusrenbangRKPD provinsi dilaksanakan.

- 3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
- 4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- 5) SinergidenganRKP.

3. Perumusan rancangan akhir RKPD.

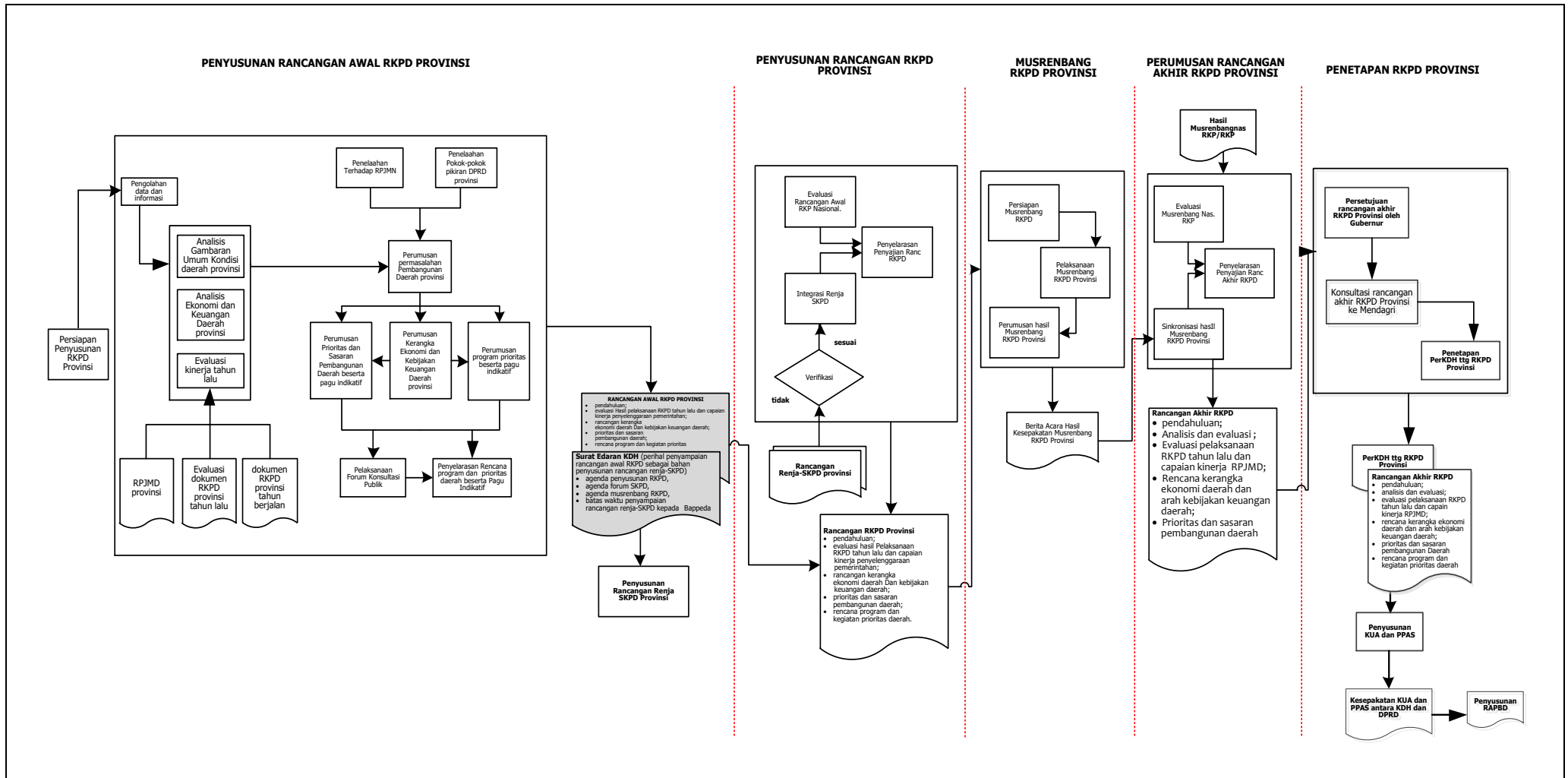
Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja-PD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2012-2017 dan juga merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

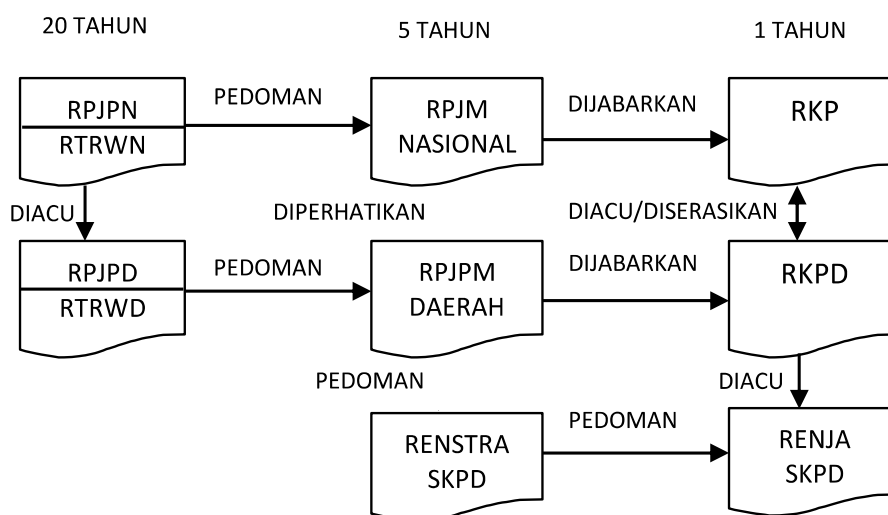
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I.2

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD



Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2015) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2016), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2017 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2015) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2017, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2016.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2017 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2017.



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

BAB II

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN**

BAB II**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN****2.1 Kondisi Umum Daerah****2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi****2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

A. Luas dan Batas Wilayah

Provinsi ini secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
- Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Luas wilayah mencapai 81.725,23 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Gambar II.1.

Tabel II.1

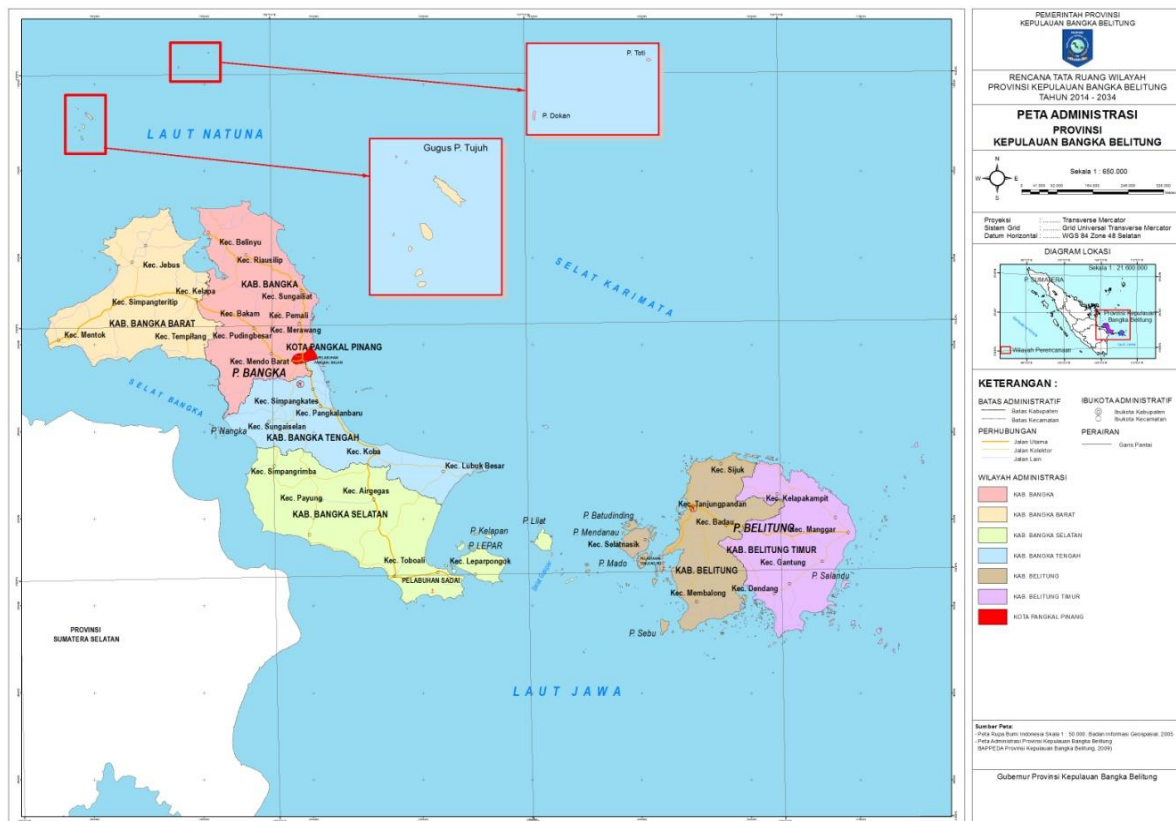
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	8	62	15	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	60	4	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	56	7	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	50	3	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	42	7	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	39	0	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	0	42	118,80
Luas Daratan					16.424,23
Luas Laut					65.301,00
Provinsi Kep. Babel		47	309	78	81.725,23

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2015

Gambar II.1.

Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

B. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang kaya akan sumberdaya laut. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 470 buah pulau yang tersebar di 6 Kabupaten dan wilayah perairan provinsi, dengan 51 buah diantaranya pulau berpenghuni. Daftar pulau dan pulau berpenghuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel II.2 dan Tabel II.3.

Tabel II.2.
Jumlah Pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Verifikasi	Berpenghuni
(1)	(2)	(3)
Kabupaten Bangka	48	1
Kabupaten Bangka Barat	89	0
Kabupaten Bangka Tengah	20	6
Kabupaten Bangka Selatan	59	8
Kabupaten Belitung	111	15
Kabupaten Belitung Timur	141	18
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	2
JUMLAH	470	50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2011

Tabel II.3.
Nama dan Kondisi Pulau Berpenghuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten	Kecamatan	Nama Pulau	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
BANGKA	Belinyu	Penyusuk	Ada penunggu suar
BANGKA SELATAN	Pulau Besar	Besar	Ada penunggu suar, luas 18.241 ha, 90 menit dari Sadai, air bersih tadah hujan
	Toboali	Dapur	Ada penunggu suar, 30 menit dari Sadai, listrik genset, air bersih tadah hujan
	Lepar Pongok	Tinggi	Berpenghuni, 40 KK, luas 312 ha, 15 menit dari Sadai, ada dermaga
		Panjang	Berpenghuni, 50 KK, luas 92,58 ha, air bersih, jalan semen, SD, 15 menit dari Sadai
		Kelapan	Berpenghuni, 50 KK, 30 menit dari Sadai, luas 362,21 ha, listrik genset, telepon satelit, sumur air tawar, jalan, dermaga, SD, masjid.
		Lepar	Berpenghuni 3 dusun, 6.000 jiwa, luas 25.416,380 ha, 60 menit dari Sadai, Listrik PLN, air bersih sumur, jalan bisa untuk mobil, dermaga, SD, SMP, pasar, masjid dan kantor desa
		Celagen	Berpenghuni, 1.500 Jiwa
		Liat	Berpenghuni 1 dusun, luas 4.651,882 ha, 5.000 jiwa, 1.30 menit dari Sadai, air bersih, listrik genset, SD

Kabupaten	Kecamatan	Nama Pulau	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
BANGKA TENGAH	Koba	Ketawai	Berpenghuni, luas 57,53 ha, 2 KK penjaga perkebunan kelapa, 90 menit dari Kurau, jalan semen, listrik genset, air bersih
		Gusung Asam	berpenghuni, 16 KK, luas 8,56 ha, 120 menit dari Kurau
		Bebuar	Berpenghuni, 3 KK, dahulu banyak penduduk, ada bekas gedung SD dan mushola, luas 25,067 ha
	Pangkalanbaru	Semujuur	berpenghuni, luas 57,11 ha, 30 KK, 75 menit dari Kurau, jalan semen, listrik genset, air bersih
	Sungai Selan	Nangka	berpenghuni, 320 jiwa, 64 KK, ada SD, luas 344,51 ha, 2 jam dari Sungai Selan, jalan berbatu, listrik genset, daerah berbukit, tanaman cengkih, durian, nangka,
		Pelepas	berpenghuni petugas mercusuar, ada mercusuar, luas 11,75 ha
BELITUNG	Selat Nasik	Mendanau	Berpenghuni, Ibukota kecamatan Selatnasik, luas 12.097 ha, 2.335 jiwa, 3,61 mil laut (2 jam) ke kota Belitung. Ada listrik, telepon celluler (XL), air bersih, jalan beraspal, dermaga, masjid, SD, SMP, SMA, Puskesmas, Kantor Desa, Pos Keamanan dan Penginapan Wisma Mendanau
		Aur	Berpenghuni
		Gersik	Berpenghuni, tempat pembuatan kapal
		Kuil	Berpenghuni
		Kalangbau	Berpenghuni
		Buntar	Berpenghuni, 1 dusun
		Naduk	Berpenghuni dekat peternakan mutiara. Luas 2.352,18 ha, 3,63 mil laut (3 jam) dari kota Belitung. Cocok untuk kawasan konservasi, budi daya laut dan peternakan.
		Sebongkok	Berpenghuni, luas 339,76 ha, 3,38 mil laut dari Kota Belitung (2 jam). Potensi Terumbu Karang dan padang lamun
	Tanjungpandan	Kalimambang	Berpenghuni 140 jiwa, terdapat 1 dusun, luas 38,93 ha, 2,64 Mil Laut.
	Sijuk	Lengkuas	Berpenghuni penjaga mercusuar, luas 5,39 ha, 4,56 mil laut, ada listrik genset dan air bersih
	Badau	Rengit	Berpenghuni, luas 244,80 ha, Terdapat 1 dusun
		Ruk	Berpenghuni, 179, 18 ha, 60 jiwa, Tempat usaha kerang mutiara
	Membalong	Betangan	Berpenghuni satu dusun, 3.457 jiwa, luas 12.097,18 ha, 1,78 mil laut dari kota Belitung
		Seliu	Berpenghuni satu desa (1.229 jiwa), luas 1.678,30 ha, 2,01 mil laut, ada listrik, air bersih, telepon celluler XL, jalan beraspal, dermaga, masjid, SD, puskesmas, kantor desa.
		Semedang	Berpenghuni, satu desa (550 jiwa), luas 23,30 ha,

Kabupaten	Kecamatan	Nama Pulau	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
			ada mercusuar, 23,39 mil laut, 3 jam, listrik genset, jalan beraspal, dermaga, SD, masjid, puskesmas, Kantor Desa,
BELITUNG TIMUR	Dendang	Ketapang	berpenghuni, 60 KK, 193 jiwa, kelapa dan pohon ketapang
		Batun	berpenghuni, 83 KK, 254 jiwa, penduduk mayoritas suku Buton
	Gantung	Air Masin	berpenghuni, 1 KK, 3 jiwa banyak pohon ulin dan kelapa
		Sekunyit	berpenghuni, 70 KK, 212 jiwa, kelapa, SD
		Rotan	Berpenghuni tidak tetap, kelapa, bakau
		Tepi	berpenghuni 2 jiwa, kelapa
		Long	Berpenghuni 307 jiwa, 101 KK, SD dan Puskesmas Pembantu, Kelapa Beringin, luas 8,91 ha, 18,51 mil laut
		Tapok	berpenghuni 1 keluarga besar 16 jiwa, luas 46,45 ha, 0,25 mil laut, kelapa, dan keramba jaring apung
		Sekepar	berpenghuni (musiman), kelapa, ada villa
		Ayam Besar	berpenghuni, budidaya rumput laut, kelapa dan pepaya
	Manggar	Melidang	berpenghuni, 1 KK, kelapa
		Bukulimau	1 desa, 1.295 jiwa, 197 KK, luas 12,71 ha, 6,54 mil laut dari kota Belitung laut, listrik genset, telepon celluler XL, jalan semen, dermaga, masjid, puskesmas, Kantor Desa
		Mempirak	berpenghuni, 1 KK
		Gerisik	berpenghuni, 18 KK, luas 2,44 ha, 29,07 mil laut dari kota Belitung
		Tempuling	berpenghuni 12 jiwa, kelapa
		Berlian	berpenghuni, 84 jiwa, bakau dan kelapa
		Pesemut	ada penjaga mercu suar
		Memperang	Berpenghuni, 6 KK
Provinsi		Bangka	Berpenghuni, PULAU BESAR
		Belitung	Berpenghuni, PULAU BESAR

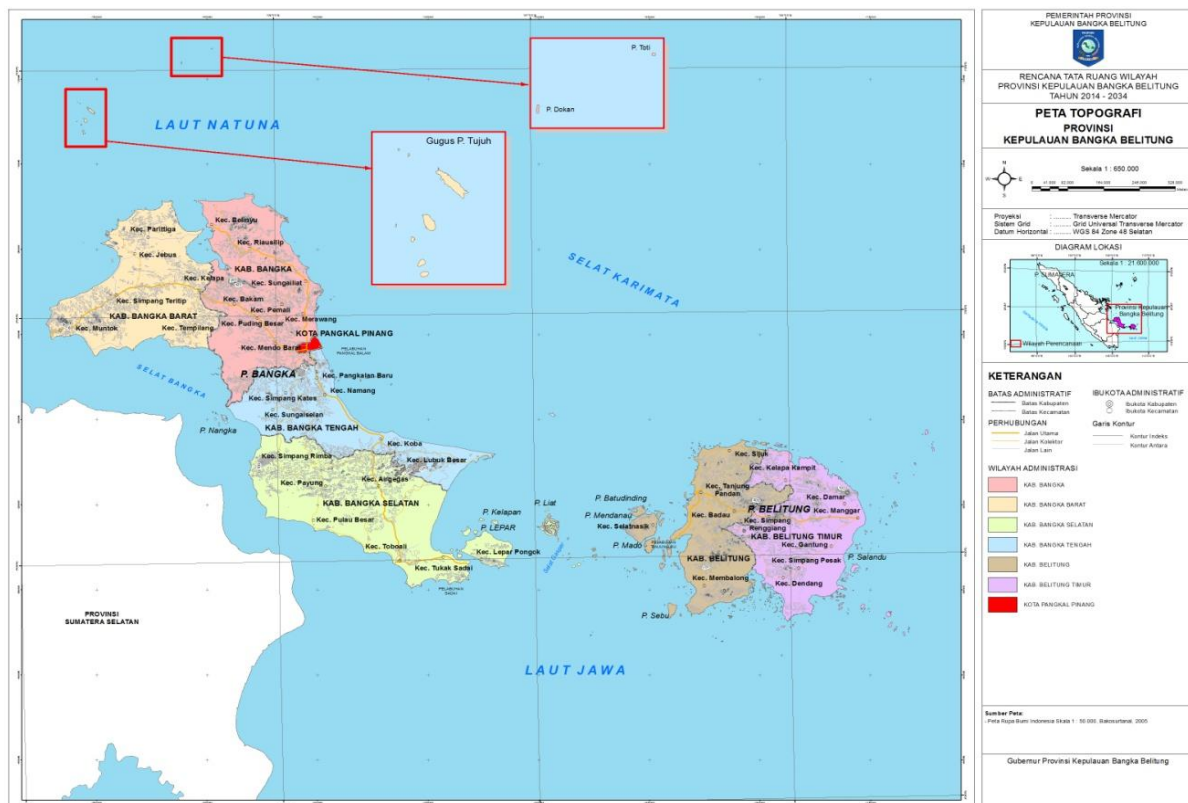
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2011

C. Topografi

Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah Rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk gunung Maras mencapai 699 meter, gunung Tajam ketinggiannya kurang lebih 500 meter diatas permukaan laut. Untuk daerah perbukitan seperti bukit Menumbing ketinggiannya mencapai kurang lebih 445 meter dan bukit Mangkol dengan ketinggian sekitar 395 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar II.2
Peta Topografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

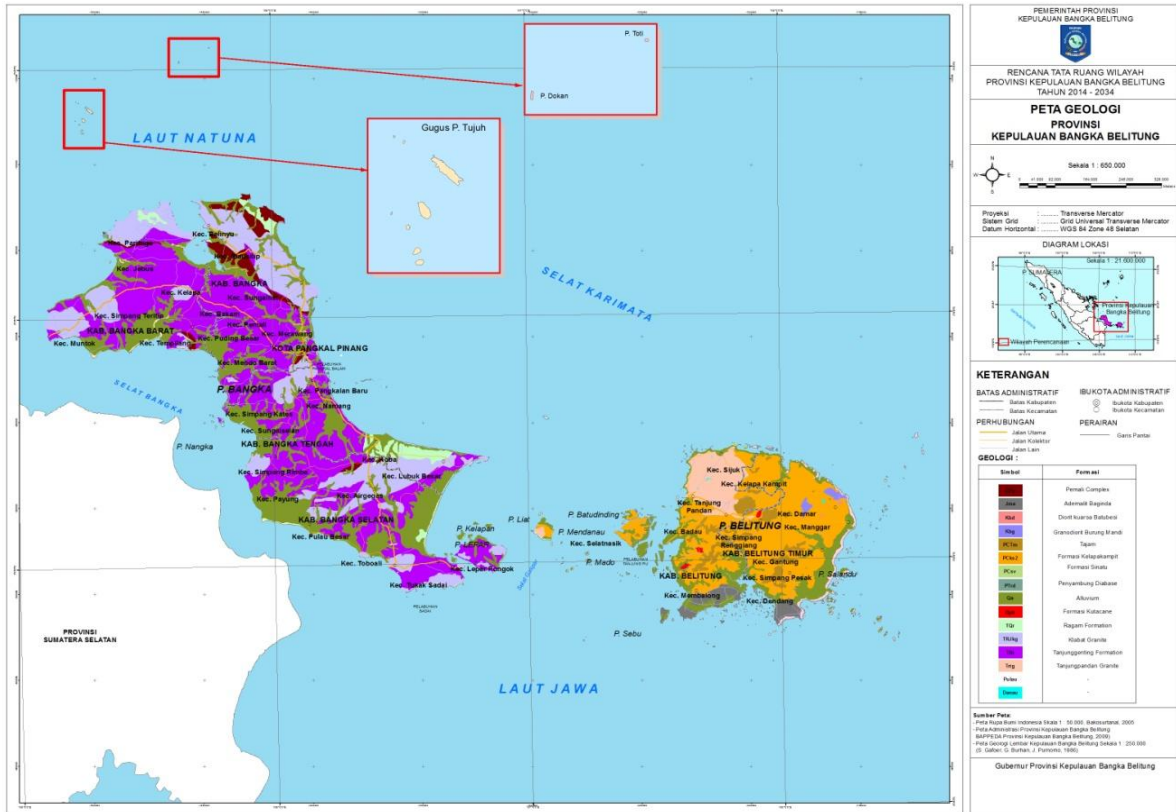


Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

D. Geologi

Keadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam Rata-rata dibawah 5, akan tetapi memiliki kandungan aluminium yang sangat tinggi. Didalamnya mengandung mineral bijih timah (*tin*), kaolin, kuarsa (*quartz*). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa lebih putih dan butirannya lebih kecil dibandingkan pasir biasa. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Gambar II.3

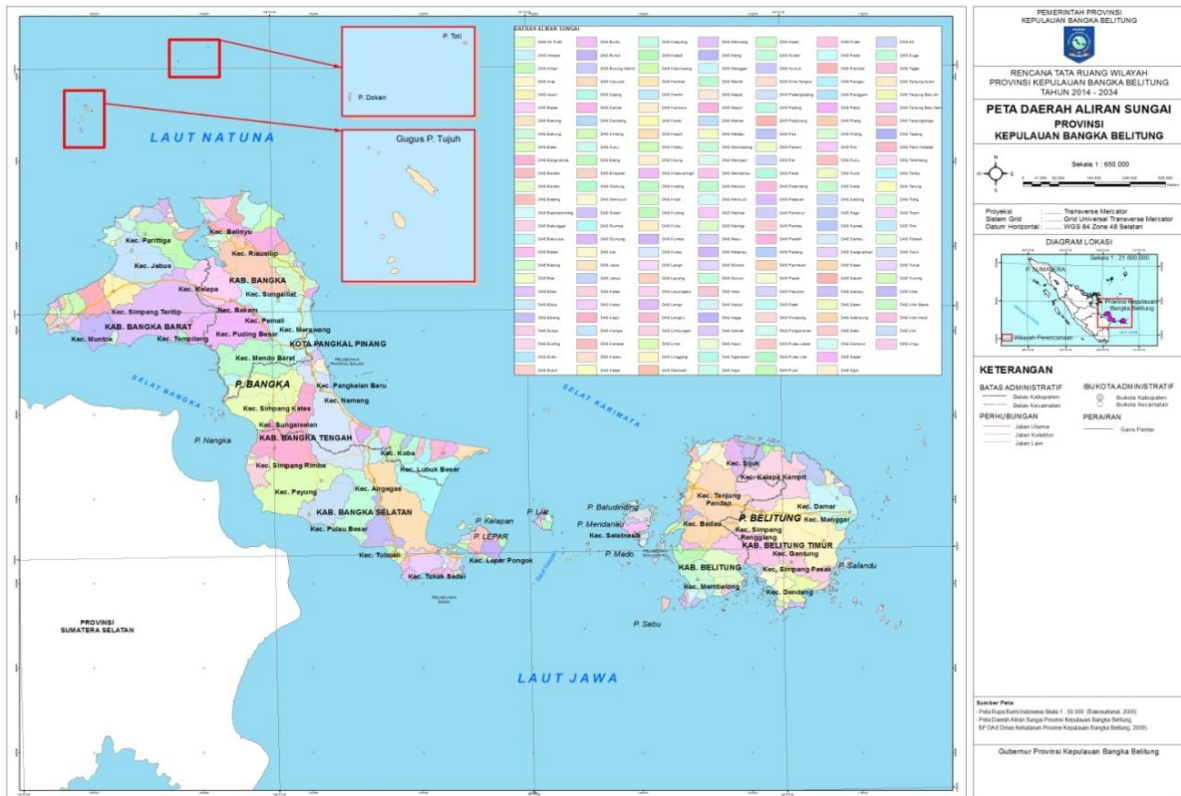


Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

E. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalannya Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang dan Sungai Sembulu.

Gambar II.4
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

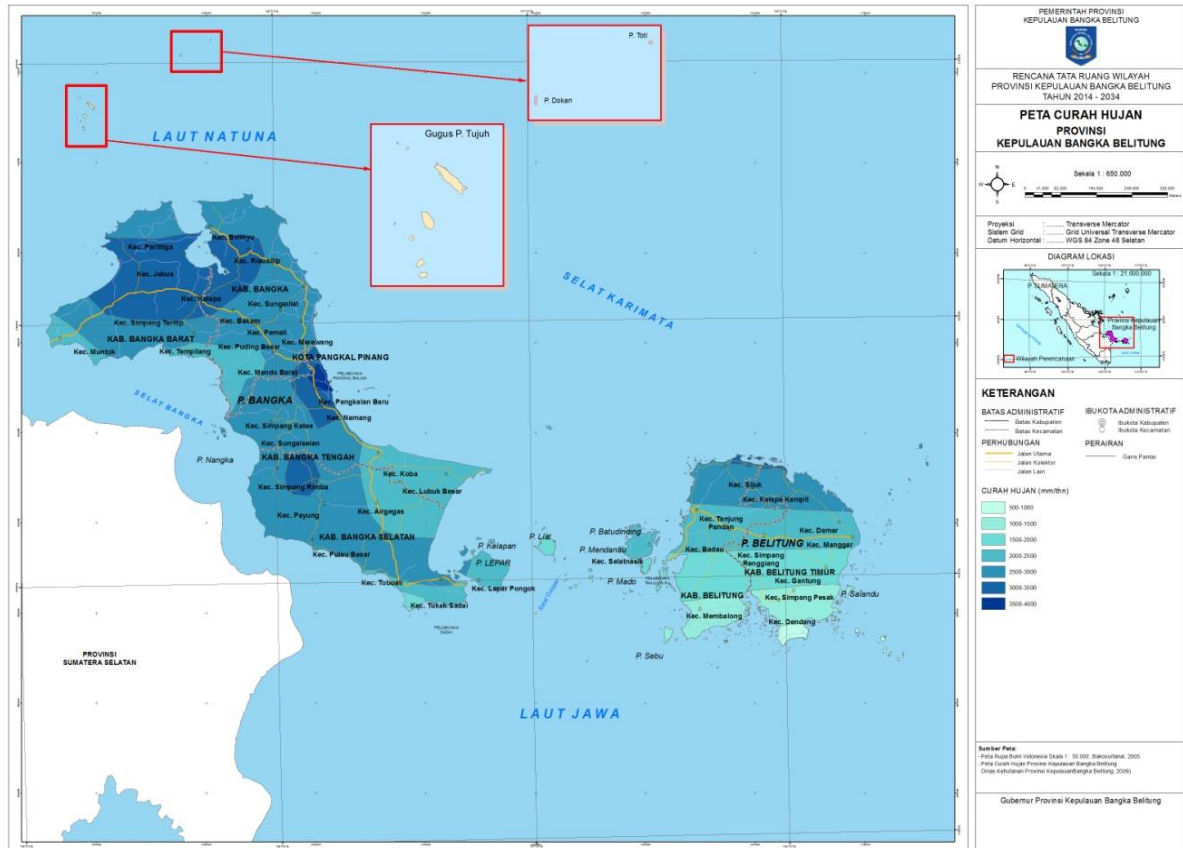


Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

F. Klimatologi

Kepulauan Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Sepanjang tahun 2014 bulan kering terjadi selama 9 bulan yaitu bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November yang ditandai dengan curah hujan di bawah 200 mm. Sedangkan bulan basah hanya terjadi pada bulan Januari, April dan Desember, dengan curah hujan 225 hingga 312,5 mm.

Gambar II.5
Peta Curah Hujan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

G. Flora dan Fauna

Di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh bermacam-macam jenis kayu berkualitas yang diperdagangkan ke luar daerah seperti: kayu Meranti, Ramin, Mambalong, Mandaru, Bulin, dan Kerengas. Tanaman hutan lainnya adalah: Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Meranti rawa, Mentagor, Mahang, Bakau dan lain-lain. Hasil hutan lainnya merupakan hasil ikutan terutama madu alam dan rotan. Madu Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan madu pahit.

Fauna di Kepulauan Bangka Belitung lebih memiliki kesamaan dengan fauna di Kepulauan Riau dan semenanjung Malaysia daripada dengan daerah Sumatera. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemui di Kepulauan Bangka Belitung antara lain: Rusa, Beruk, Monyet, Lutung, Babi, Tringgiling, Kancil, Musang, Elang, Ayam Hutan, Pelanduk, berjenis-jenis ular dan Biawak.

H. Penggunaan Lahan

Luas lahan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 mencapai 67,95 persen dari luas daratan atau setara dengan 1.116.111 ha. Lahan perkebunan mendominasi lahan pertanian sebesar 29,76 persen.

Luas lahan sawah dan lahan ladang yang berpotensi ditanami padi hanya berkisar 11.521 ha dan 48.960 ha. Sementara itu, luas lahan sawah yang telah memiliki irigasi hanya 5.731 ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.4.

Tabel II.4
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	LAHAN PERTANIAN	1.091.763
I.1.	Lahan Sawah	13.262
a.	Irigasi	2.276
b.	Tadah hujan	7.663
c.	Pasang surut	826
d.	Lebak	2.497
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.078.501
a.	Tegal	109.820
b.	Ladang	44.085
c.	Perkebunan	334.698
d.	Hutan rakyat	71.323
e.	Pengembalaan	4.235
f.	Sementara tidak diusahakan	126.272
g.	Lain-lain	388.068
II.	LAHAN BUKAN PERTANIAN	550.651
a.	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	550.651
JUMLAH		1.642.414

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, kawasan budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

A. Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dilakukan melalui:

- penataan batas kawasan peruntukan hutan produksi;
- identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi);
- peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;
- peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan;
- pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi;
- pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan peruntukan hutan produksi (kayu dan non kayu); dan
- pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan peruntukan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

- a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 77.841 (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu) Ha;
- b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.884 (enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) Ha;
- c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 84.990 (delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) Ha;
- d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.154 (seratus enam ribu seratus lima puluh empat) Ha;
- e) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.377 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) Ha; dan
- f) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 57.638 (lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan) Ha.

B. Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui :

- a) penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional;
- b) pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c) penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah;
- d) penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya;
- e) meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura;
- f) mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala;
- g) penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- h) penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan;
- i) penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar;
- j) pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- k) penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
- l) membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri atas:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
 - (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
 - (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
 - (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
 - (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
 - (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
 - (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
 - (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.
- b) Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
 - (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
 - (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
 - (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
 - (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
 - (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha; dan
 - (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha;
- c) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
 - (1) Perkebunan Besar meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
 - (2) Perkebunan rakyat meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.
- d) Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
 - (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
 - (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;

- (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
- (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
- (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
- (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah kabupaten/kota perlu menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui :

- a) penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan;
- b) menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap;
- c) pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
- d) pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
- e) penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan);
- f) pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap; dan
- g) pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :

- 1. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- 2. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas:

- a) Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas:
 - (1) PPN Sungailiat;
 - (2) PPN Tanjungpandan.
- b) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas :
 - (1) PPI Bangka Kota;
 - (2) PPI Permis;
 - (3) PPI Pulau Pongok;
 - (4) PPI Batubetumpang;

- (5) PPI Tanjung Sangkar;
- (6) PPI Ketapang;
- (7) PPI Batu Dinding Belinyu;
- (8) PPI Kurau;
- (9) PPI Manggar;
- (10) PPI Muntok;
- (11) PPI Sadai;
- (12) PPI Selat Nasik;
- (13) PPI Pulau Seliau;
- (14) PPI Sungai Selan;
- (15) PPI Tanjung Binga;
- (16) PPI Toboali;
- (17) PPI Selendang; dan
- (18) PPI Dendang.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan:

- a) Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha;
- b) Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan
- c) Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

D. Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :

- a) memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi;
- b) peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis;
- c) memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi;
- d) identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- e) memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat; dan
- f) memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- (a) Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- (b) Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

E. Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui :

- a) menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung;
- b) membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri;
- c) membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri;

- d) penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan; dan
- e) mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Penetapan kawasan peruntukan industri yang meliputi:

- a) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c) Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d) Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e) Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f) Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g) Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

F. Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan melalui:

- a) identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh;
- b) penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung;
- c) revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada;
- d) pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
- e) peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a) Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - (1) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - (2) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - (3) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - (4) Taman wisata laut;
 - (5) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - (6) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b) Wisata budaya, Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - (1) Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
 - (2) Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;

- (3) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
 - (4) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya *tangible* maupun *intangible* yang ada di kabupaten/kota;
 - (5) Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - (6) Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c) Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

G. Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara berikut :

- a) penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan;
- b) penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota;
- c) penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan;
- d) identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Penetapan kawasan peruntukan permukiman dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

H. Kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

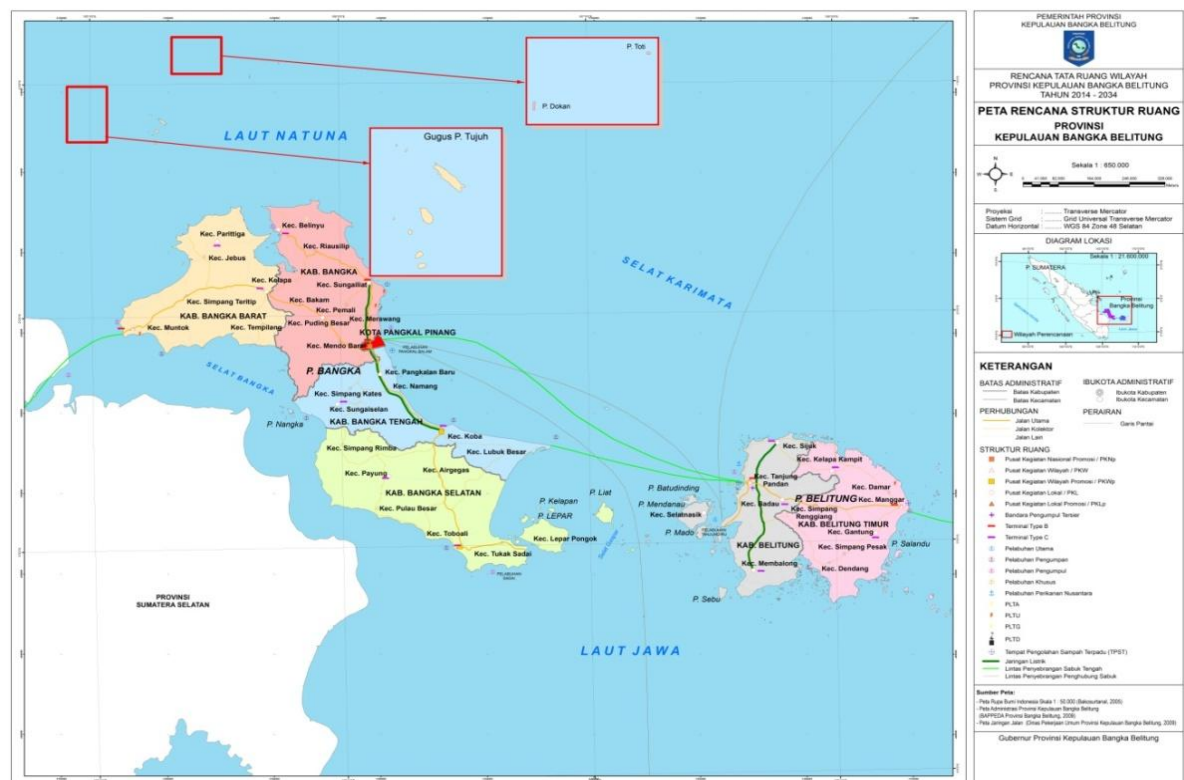
- a) Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b) Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- c) Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- d) Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

Gambar II.6
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar II.7
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Permasalahan bencana yang rawan terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari bencana alam, non alam, serta bencana sosial. bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir, angin puting beliung dan tersambar petir, bencana non alam berupa KLB DBD, sedangkan bencana sosial meliputi kerusuhan yang diakibatkan oleh konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung potensi bencana yang pernah terjadi dapat dilihat pada Tabel II.5

Tabel II.5.
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Korban	Menderita	Dipindahkan	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banjir	19	0	0	0	892	0	0	0	0	0	0
Kebakaran	230	1	9	1	79	0	0	7	44	11	6
Kabut asap	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angin puting beliung	16	0	1	0	143	0	0	1	18	21	109
Tersambar petir	8	3	9	3	32	0	0	8	0	1	14
KLB DBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerusuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	316	4	19	4	1.146	0	0	16	62	33	123

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia 2015

Tabel II.6.
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)
Bangka	Kebakaran, Kabut Asap, Puting Beliung	Sedang
Bangka Tengah	Banjir, Kabut Asap, Kebakaran, Puting Beliung	Rendah, sedang
Bangka Selatan	Banjir, Kabut Asap, Kebakaran	Sedang
Bangka Barat	Banjir, Kabut Asap, Kebakaran, Puting Beliung	Sedang
Belitung	Kabut Asap, Kebakaran, Puting Beliung, tersambar petir	Sedang
Belitung Timur	Banjir, Kabut Asap, Kebakaran, Puting Beliung	Rendah
Pangkalpinang	Banjir, Kabut Asap, Kebakaran, Puting Beliung	Sedang, tinggi

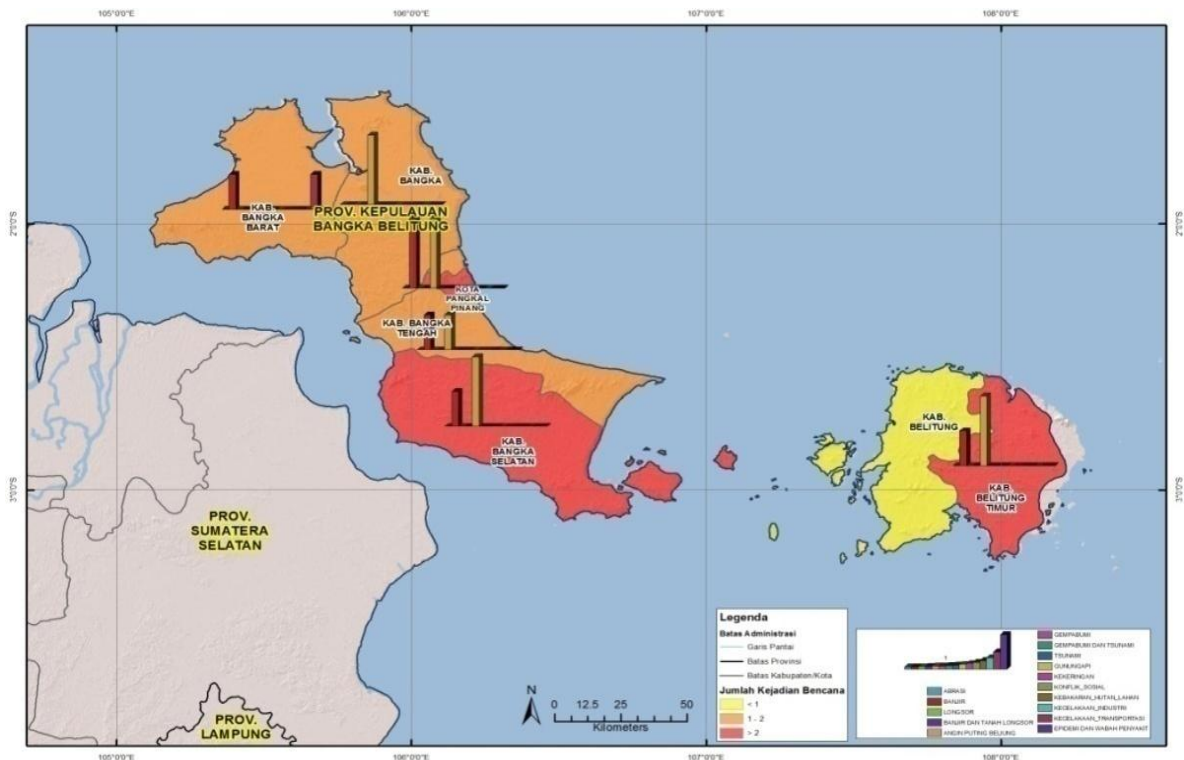
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bencana banjir telah terjadi sebanyak 19 (sembilan belas) kejadian di tahun 2015. Di kota Pangkalpinang jumlah kejadian terjadi sebanyak 1 kali dan tidak ada korban jiwa, di perkiraan ketinggian air rata-rata 1 meter sedangkan di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 kejadian dan tidak ada korban jiwa hanya rumah yang tergenang serta jalan raya yang putus sepanjang kurang lebih 3 meter, Bangka Barat 7 kejadian dan tidak ada korban jiwa dengan Ketinggian air rata-rata 50 cm, Bangka Selatan terjadi sebanyak 5 kejadian dan tidak ada korban jiwa hanya diperkirakan ketinggian air 50 - 100 cm.
2. Di tahun 2015 jumlah kejadian bencana kebakaran terjadi sebanyak 230 kejadian lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebanyak 125 kejadian. Secara keseluruhan bencana kebakaran yang terjadi di kabupaten/kota tidak ada korban jiwa maupun bangunan/rumah penduduk yang berdampak.
3. Untuk kejadian Bencana kabut asap pada tahun 2015 terjadi sebanyak 44 kejadian. Menurut informasi hampir di setiap kabupaten/kota mengalami permasalahan terhadap kabut asap dan di perkiraan karena adanya faktor kebakaran hutan yang berkepanjangan. Pada bencana ini tidak ada korban jiwa maupun rumah penduduk yg terdampak, hanya mengganggu aktivitas penerbangan.
4. Di tahun 2015 kejadian bencana puting beliung terjadi sebanyak 16 kejadian. Kabupaten yang mengalami kejadian tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 kejadian. Menurut data Kabupaten/Kota kejadian puting beliung tidak ada korban jiwa dan rata-rata hanya mengalami rumah rusak ringan.
5. Kejadian bencana alam di tahun 2015 yang diakibatkan oleh tersambar petir berpotensi terjadi hampir di setiap Kabupaten. Di tahun ini bencana yang diakibatkan oleh tersambar petir terjadi sebanyak 8 kejadian. Tingkat kejadian tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 kejadian. Menurut data kejadian ini menyebabkan korban tewas dan rumah mengalami rusak ringan.

Untuk mengetahui tingkat kejadian bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar II.8.

Gambar II.8
Peta Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

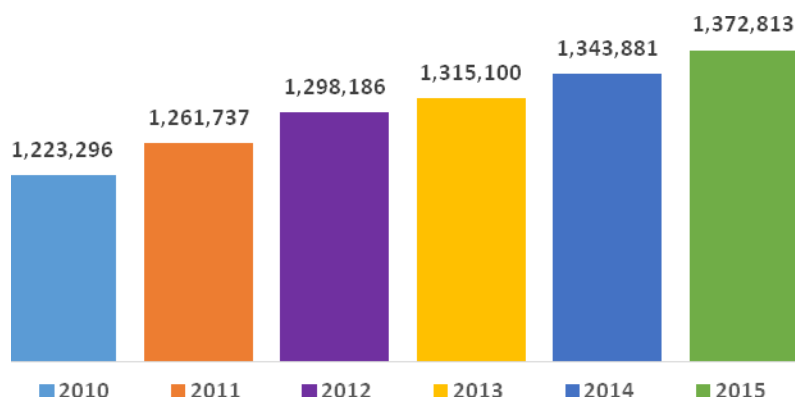


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.1.1.4 Demografi

Berdasarkan data terbaru Jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung menurut kabupaten/kota pada tahun 2015 sebesar 1.372.813 jiwa, sebagaimana yang tergambar pada Gambar II.9.

Gambar II.9
Perkembangan Jumlah Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010–2015



Sumber: BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan distribusi penduduk, sebaran besar penduduk mendiami wilayah Pulau Bangka, tepatnya berada di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,70 persen (Tabel II.7).

Tabel II.7

Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bangka	311.085	22,66	105
Belitung	175.048	12,75	76
Bangka Barat	196.598	14,32	70
Bangka Tengah	180.903	13,18	82
Bangka Selatan	193.583	14,10	54
Belitung Timur	119.394	8,70	48
Pangkalpinang	196.202	14,29	1.652
Kepulauan Bangka Belitung	1.372.813	100,00	84

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 adalah 84 jiwa per km². Konsentrasi penduduk tertinggi berada di Kota Pangkalpinang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.652 jiwa per km², sangat berbeda dibandingkan kabupaten lainnya yang mempunyai kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa per km² atau lebih rendah. Bahkan Belitung Timur mempunyai kepadatan penduduk yang hanya sebesar 48 jiwa per km².

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum kondisi masyarakat dengan berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan pengangguran.

A. Pertumbuhan PDRB, Struktur Perekonomian dan PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Untuk menghitung angka PDRB digunakan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran.

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 yang diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 60.992,08 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun

2014 sebesar 56.373,62 miliar rupiah. Begitupula dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan dari 44.159,44 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 45.961,46 miliar rupiah di tahun 2015.

Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,08 persen. Dari sisi produksi diketahui bahwa pertumbuhan PDRB tertinggi di capai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,78 persen, jasa pendidikan 9,75 persen, dan jasa lainnya 8,12 persen sedangkan yang terendah adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yaitu 1,74 persen dan industri pengolahan yaitu 1,35 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit sebesar 7,03 persen, impor luar negeri sebesar 6,86 persen, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,80 persen sedangkan pertumbuhan negatif adalah ekspor luar negeri-19,56 persen dan net ekspor antar daerah-27,17 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung melambat bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 4,67 persen. Dari sisi produksi, kondisi ini disebabkan karena sumber pertumbuhan dari tiga lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap nilai PDRB, tidak terlalu besar yaitulapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,10 persen, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,56 persen, dan diikuti oleh administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 0,48 persen, sementara empat belas lapangan usaha lainnya hanya menciptakan pertumbuhan sebesar 1,94 persen. Dilihat dari sisi pengeluaran terjadi penurunan komoditas ekspor antara lainlogam timah akibat adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Timah yang menyebabkan terhentinya kegiatan ekspor pada bulan Agustus 2015, penurunan ekspor untuk komoditas ikan, lada, dan karet akibat lesunya perekonomian global sehingga berpengaruh pada perlambatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Gambaran mengenai perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2011 – 2015, sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut dibawah ini:

Tabel II.8
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Tahun 2011-2015 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.070.641	8.111.873	9.269.574	10.834.412	12.000.841
B. Pertambangan dan Penggalian	6.810.151	6.975.347,	7.097.644	7.622.606	7.738.525
C. Industri Pengolahan	10.321.935	11.043.826	12.088.178	12.883.045	12.885.275
D. Pengadaan Listrik dan Gas	26.151	27.089	27.336	41.187	48.834
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	7.296	8.155	9.149	10.371	12.058
F. Konstruksi	2.927.077	3.523.145	4.139.267	4.711.024	5.291.650
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.477.835	6.193.487	6.671.668	7.571.544	8.602.106
H. Transportasi dan Pergudangan	1.349.922	1.577.156	1.864.593	2.128.953	2.462.982
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	852.232	992.568	1.152.121	1.321.437	1.459.417

J.	Informasi dan Komunikasi	634.381	708.586	770.240	849.135	949.707
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	615.803	728.770	902.449	998.520	1.086.052
L.	Real Estate	1.178.229	1.388.288	1.602.870	1.836.553	1.981.642
M, N.	Jasa Perusahaan	99.908	116.138	134.448	153.990	169.628
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.993.797	2.243.456	2.618.023	3.042.826	3.524.055
P.	Jasa Pendidikan	823.969,23	997.993,51	1.172.218	1.366.491	1.649.659
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	417.347,05	487.637,43	552.657	629.863	712.368
R,S,T,U	Jasa Lainnya	242.367	276.713	315.929	371.658	426.289
PDRB		40.849.043	45.400.228	50.388.364	56.373.615	60.992.088

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.9

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015, Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (Persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,94	6,47	6,85	9,22	5,86
B. Pertambangan dan Penggalian	3,06	0,10	-0,64	1,99	1,74
C. Industri Pengolahan	3,72	3,04	3,45	1,30	1,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,22	10,19	4,80	9,29	5,77
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,82	5,73	4,19	4,95	5,75
F. Konstruksi	8,94	13,61	8,96	4,00	5,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,35	7,09	5,76	4,44	4,07
H. Transportasi dan Pergudangan	9,53	8,80	7,23	5,96	5,78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,83	7,75	6,89	7,47	3,42
J. Informasi dan Komunikasi	8,11	8,64	8,97	6,85	7,34
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	16,38	7,35	16,68	5,26	4,35
L. Real Estate	11,28	10,58	7,98	7,72	2,85
M, N. Jasa Perusahaan	9,88	7,82	6,80	7,01	4,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,33	5,34	7,55	7,33	9,78
P. Jasa Pendidikan	6,99	8,76	9,98	7,06	9,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,29	11,43	7,31	5,98	6,23
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,61	7,87	6,84	7,95	8,12
PDRB	6,90	5,50	5,20	4,67	4,08

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.10

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015, Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (Persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Konsumsi Rumah Tangga	4,87	5,46	6,20	6,07	5,80
B. Konsumsi LNPR	7,74	10,34	9,94	12,81	7,03
C. Konsumsi Pemerintah	8,19	6,11	5,68	5,88	4,45
D. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,40	4,95	4,91	4,87	4,36
E. Perubahan Inventori	-25,88	-23,34	3,38	10,91	-1,20
F. Ekspor Barang dan Jasa	44,16	-10,57	6,73	14,69	-19,56
G. Impor Barang dan Jasa	20,03	-10,00	-26,77	13,82	6,86
H. Net Ekspor Antar Daerah	57,84	-17,98	11,71	21,78	-27,17
PDRB	6,90	5,50	5,20	4,67	4,08

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan sektor terhadap PDRB tersebut dapat dilihat seberapa jauh kebijakan yang telah dilakukan tepat sasaran. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Selain itu dapat diperoleh informasi sektor dominan dan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan.

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 dari sisi produksididominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 21,13 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,68 persen, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,10 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB ADHB terbesar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 53,59 persen, kontribusi ekspor sebesar 34,68 persen dan pembentukan modal bruto sebesar 23,50 persen.

Bila diamati lebih lanjut, dari sisi produksi terjadi pergeseran struktur perekonomian dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian ke Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini pun sesuai dengan penurunan distribusi pengeluaran ekspor barang dan jasa yang signifikan yang secara rinci dapat diamati pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel II.10

Distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015, Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dengan Migas (Persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,31	17,87	18,40	19,22	19,66
B. Pertambangan dan Penggalian	16,67	15,36	14,08	13,52	12,69
C. Industri Pengolahan	25,27	24,33	23,99	22,85	21,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,07	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

F. Konstruksi	7,17	7,76	8,21	8,36	8,67
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,41	13,64	13,24	13,43	14,10
H. Transportasi dan Pergudangan	3,30	3,47	3,70	3,78	4,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,19	2,29	2,34	2,39
J. Informasi dan Komunikasi	1,55	1,56	1,53	1,51	1,54
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,51	1,61	1,79	1,77	1,78
L. Real Estate	2,88	3,06	3,18	3,26	3,25
M, N. Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,27	0,27	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,88	4,94	5,19	5,40	5,78
P. Jasa Pendidikan	2,02	2,20	2,33	2,42	2,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,07	1,10	1,12	1,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,59	0,61	0,63	0,66	0,70
PDRB dengan Migas	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.11

Distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015, Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)

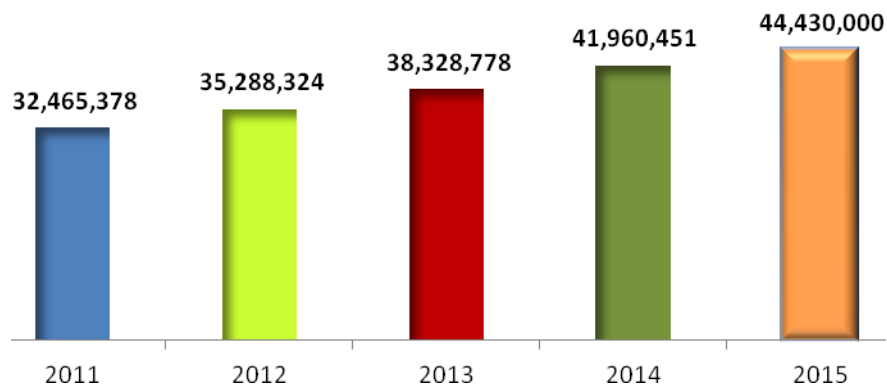
Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Konsumsi Rumah Tangga	49,35	49,89	51,27	52,01	53,59
B. Konsumsi LNPRT	0,49	0,52	0,55	0,60	0,64
C. Konsumsi Pemerintah	9,88	10,12	10,42	10,23	10,39
D. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	21,58	21,64	22,17	22,03	23,50
E. Perubahan Inventori	3,16	2,27	2,30	2,17	1,91
F. Ekspor Barang dan Jasa	63,45	55,97	55,66	49,49	34,68
G. Impor Barang dan Jasa	3,52	3,05	2,27	2,42	2,28
H. Net Ekspor Antar Daerah	-44,39	-37,36	-40,10	-35,11	-22,43
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Sementara itu, nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mencapai 44,43 juta rupiah meningkat bila dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 41,96 juta rupiah. Namun selama periode tahun 2011- 2015, PDRB per kapita tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan terendah itu hanya meningkat sebesar 2,47 Juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2014 naik sebesar 3,63 juta rupiah, tahun 2013 naik sebesar 3,04 juta, tahun 2012 naik sebesar 2,82 juta.

Gambar II.10

PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015 (rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera hanya mencapai 3,54 persen mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,66 persen. Dampak bencana kabut asap, kemarau panjang, kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik setidaknya berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, menurunnya harga minyak mentah dunia serta perlambatan perekonomian global membawa dampak bagi Indonesia termasuk wilayah Sumatera.

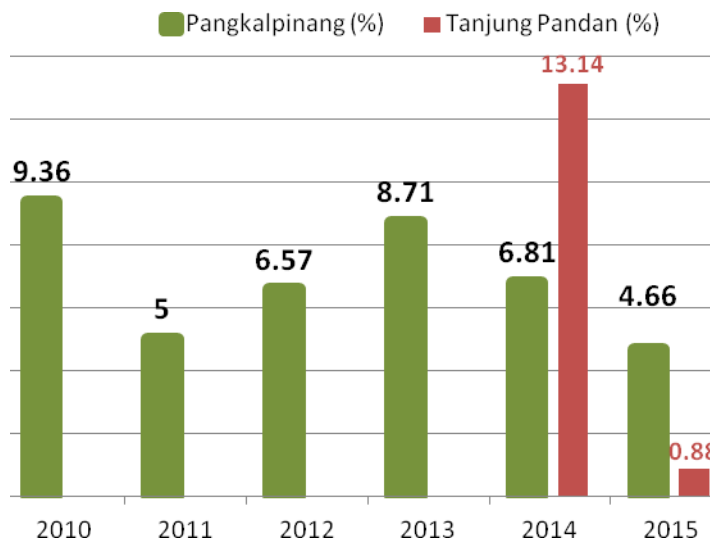
Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2015 terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Delapan provinsi (termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) mengalami peningkatan pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya di Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Aceh). Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kepulauan Riau sebesar 6,02 persen, diikuti oleh Sumatera Barat sebesar 5,41 persen, dan Bengkulu 5,14 persen. Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan kedelapan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,08 persen berada di atas Provinsi Riau 0,22 persen dan Provinsi Aceh yang mengalami kontraksi -0,72 persen.

B. Laju Inflasi

Dalam periode waktu tahun 2010-2013, terjadi fluktuasi inflasi di Kota Pangkalpinang tetapi dalam kurun waktu 2013-2015, tingkat inflasi turun signifikan seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Begitupula dengan angka inflasi Kota Tanjungpandan yang mulai dihitung di tahun 2014, angka inflasi turun sangat signifikan pada tahun 2015. Data inflasi dimaksud sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini:

Gambar II.11

Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Pada tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Bangka terjadi anomali angka inflasi antara Kota Pangkalpinang dan kota Tanjungpandan. Walaupun sama-sama mengalami penurunan angka inflasi yang signifikan, tetapi perbedaan besar terlihat antara inflasi Pangkalpinang sebesar 4,66 persen sedangkan Tanjungpandan hanya 0.88 persen. Hal ini menunjukkan harga kelompok pengeluaran di Pangkalpinang lebih tinggi daripada di Tanjung Pandan.

Jika dicermati menurut kelompoknya pada Tabel II.12, perbedaan mencolok ditunjukkan oleh kelompok bahan makanan yang mejadi penyumbang angka inflasi tertinggi di Pangkalpinang sebesar 1.68%, sementara itu di Tanjung Pandan justru mengalami deflasi terendah sebesar -1.30 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran lainnya yang berbeda signifikan antara dua kota ini adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan dan pendidikan, rekreasi dan olahraga.

Sumbangan komoditi dengan persentase relatif besar penyumbang inflasi dipangkalpinang adalah rokok kretek filter, akademi perguruan tinggi, ikan kerisi, ikan kembung, angkutan udara, batu, kerupuk ikan, bawang merah, tariff listrik, sekolah dasar, bahan bakar rumah tangga, dan mie kering instan. Sementara komoditi penyumbang deflasi dengan persentase relatif besar antara lain bensin, cabai merah, cabai rawit, dan daging babi.

Sedangkan di Tanjung Pandan, sumbangan komoditi dengan persentase relatif besar antara lain angkutan udara, daging ayang ras, beras, nasi dengan lauk, dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan komoditi dengan sumbangan deflasi adalah bensin, cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kangkung, ikan kembung, ikan selar, ikan kerisi, ikan bulat.

Tabel II.12.

Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2010-2015

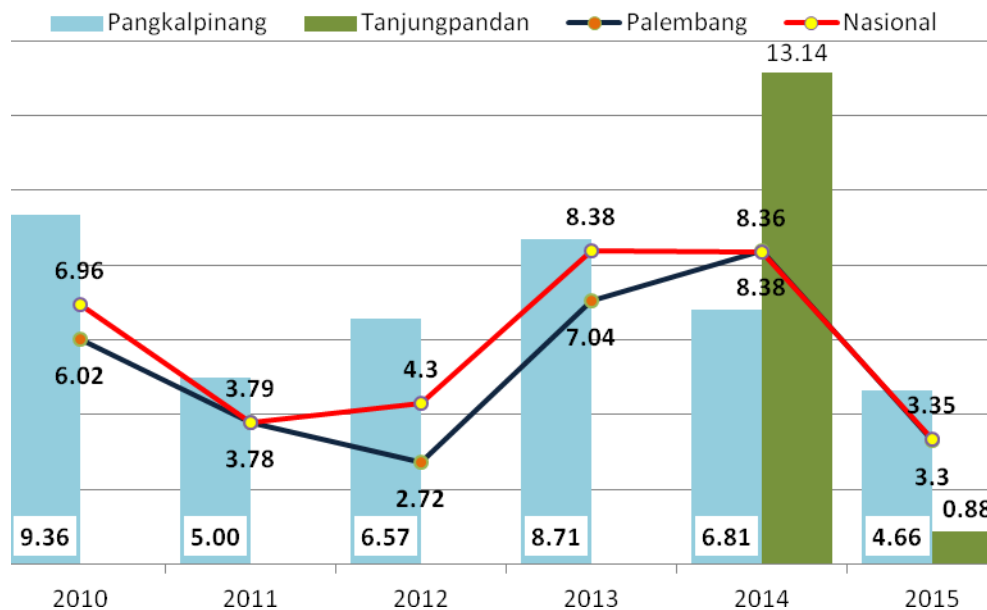
Kelompok Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	
						Pangkalpinang	Tanjung Pandan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	9,36	5,00	6,57	8,71	6,81	4,66	0,88
1. Bahan Makanan	17,68	-0,50	8,50	11,08	3,39	1,68	-1,30
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,01	5,32	7,95	6,82	8,63	1,46	0,85
3. Perumahan	4,08	7,52	5,81	9,20	8,85	0,93	0,68
4. Sandang	4,86	8,83	5,79	1,63	6,61	0,10	0,11
5. Kesehatan	2,98	7,09	5,19	5,08	8,13	0,23	0,16
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	21,33	8,73	10,31	3,77	6,65	0,57	0,42
7. Transportasi dan Komunikasi	0,68	10,55	-0,11	11,17	6,98	-0,3	0,06

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

*Angka sementara

Tahun 2015, inflasi Pangkalpinang relatif tinggi yaitu 4,66 persen bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,35 persen dan Kota Palembang sebagai wilayah yang terdekat sebesar 3,30 persen, sedangkan Kota Tanjungpandan paling rendah dengan inflasi 0,88 persen. Kondisi ini tentunya jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana inflasi Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi Palembang sebesar 8,38 persen dan Nasional 8,31 persen. Sedangkan Tanjung Pandan justru memiliki tingkat Inflasi tertinggi 13,41 persen. Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada gambar berikut ini:

Gambar II.12
Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjungpandan, Palembang dan Nasional Tahun 2010 – Tahun 2015



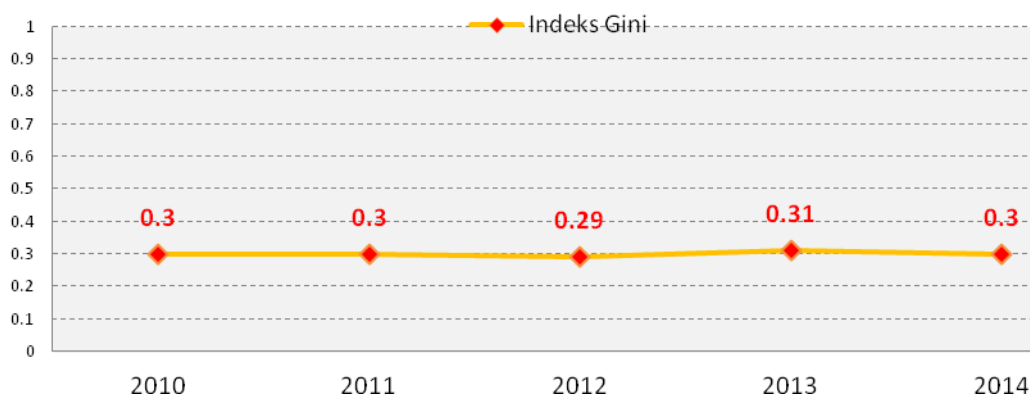
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Catatan: Inflasi Kota Tanjung Pandan Mulai Dihitung Pada Tahun 2015

C. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan

Pada Gambar di bawah terlihat bahwa Rasio Gini cenderung menurun dari 0,30 pada tahun 2011 menjadi 0,29 pada tahun 2012 dan naik kembali pada tahun 2013 sebesar 0,31. Fenomena penurunan Rasio Gini sebagaimana yang ditampilkan pada gambar II.13 menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata.

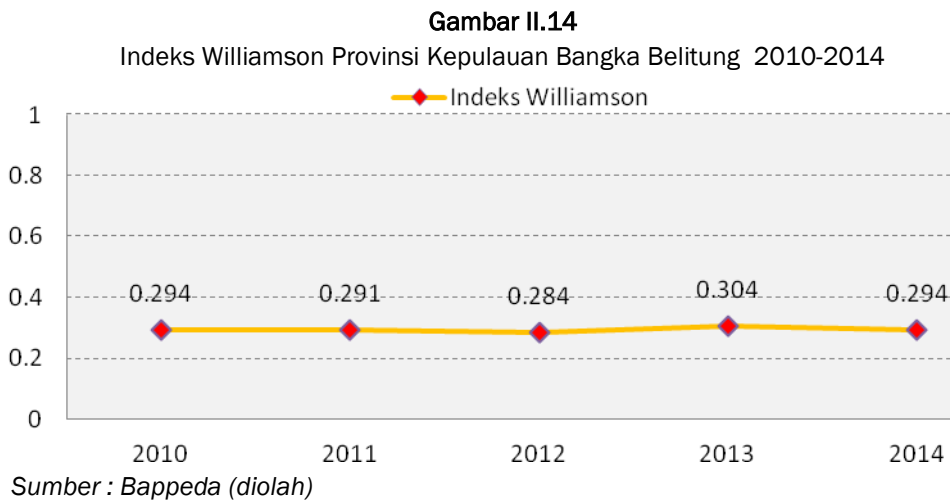
Gambar II.13
Indeks Gini
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

D. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2009 angka indeks sebesar 0,297 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284, dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304 dan kembali menurun menjadi 0,294. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah mendekati merata. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar II.14 berikut:



E. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 66.62 ribu orang (4,83%) dibandingkan tahun 2014 sebesar 67.23 ribu orang (4,97%). Berarti selama periode tahun 2014-2015 persentase penurunan penduduk miskin sebesar 0,14 persen, sedangkan untuk garis kemiskinan tahun 2015 sebesar 529.979 per kapita mengalami kenaikan sebesar 12,8 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 469.814 per kapita. Sementara indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kecenderungan naik dari 0,60 tahun 2014 menjadi 0,89 pada tahun 2015. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin tahun 2015 makin menjauhi garis kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Tabel II.13
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,16	5,37	5,25	4,97	4,83
2.	Jumlah Penduduk Miskin	65.550	70.210	70.90	67,23	66.620
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	243.729	382.412	427.081	469.814	529,979
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,84	0,65	0,62	0,60	0,89

Sumber: BRS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.14

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,35	3,37	3,47	3,04	2,77
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,91	6,69	6,97	6,84	6,83

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Secara keseluruhan persentase tingkat kemiskinan di provinsi kepulauan Bangka Belitung Selama periode tahun 2015 sebesar 4,83 persen. Untuk daerah perkotaan tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 3,04 persen menjadi 2,77 pada tahun 2015. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan di pedesaan juga mengalami penurunan sebesar 6,84 persen pada tahun 2014 menjadi 6,83 persen pada tahun 2015. Jika di lihat dari kedua data tingkat kemiskinan tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan cukup tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini bisa disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa masih minim dan mayoritas masyarakat di pedesaan masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor tambang dan pertanian. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel II.15

Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

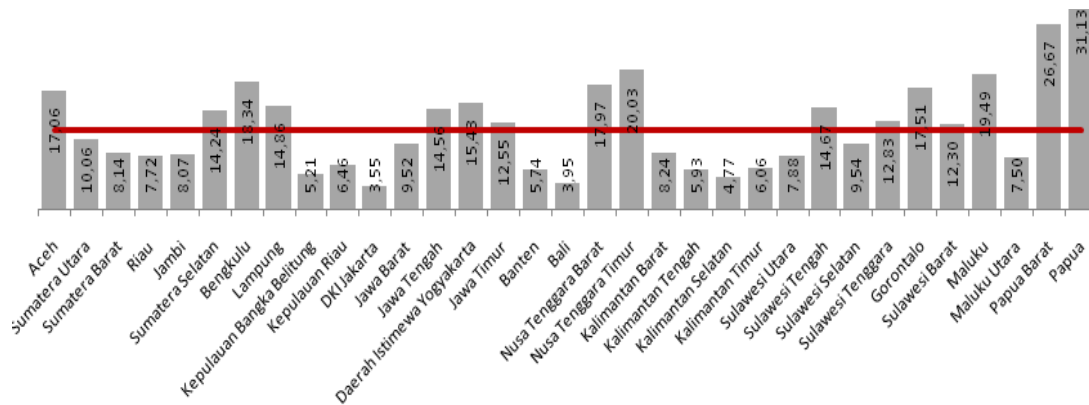
No.	Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	5,20	15,90	375.653	0,71	0,23
2.	Kab. Belitung	7,36	12,70	563.475	0,64	0,10
3.	Kab. Bangka Barat	3,15	6,10	388.493	0,32	0,04
4.	Kab. Bangka Tengah	5,27	9,41	512.240	0,82	0,22
5.	Kab. Bangka Selatan	3,87	7,39	364.504	0,37	0,06
6.	Kab. Belitung Timur	6,68	7,87	492.652	0,89	0,19
7.	Kota Pangkalpinang	4,04	7,81	509.246	0,42	0,07

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Berdasarkan Tabel II.15 di atas, pada tahun 2014 dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin dan indeks keparahan kemiskinan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat, dimana persentase penduduknya hanya 3,15 persen.

Sementara itu berdasarkan data kemiskinan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2015 adalah persentasenya berada di bawah rata-rata wilayah induknya (nasional).

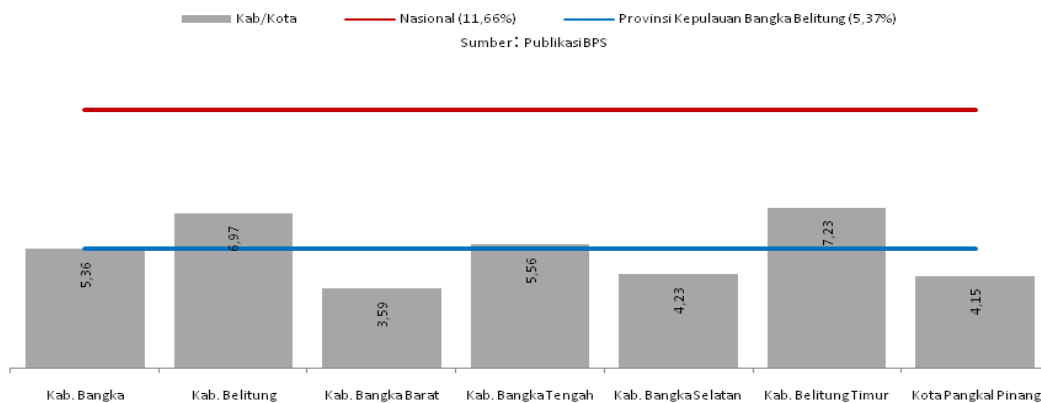
Gambar II.15
Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Prov. Kep. Babel dengan Nasional
Tahun 2015



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Gambar II.16 memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang tajam dalam tingkat kemiskinan (%) antar wilayah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur perlu mendapat perhatian khusus dalam intervensi kebijakan, karena tingkat kemiskinan (%) berada jauh di atas rata-rata provinsi.

Gambar II.16
Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional dan Kab/Kota
Tahun 2015

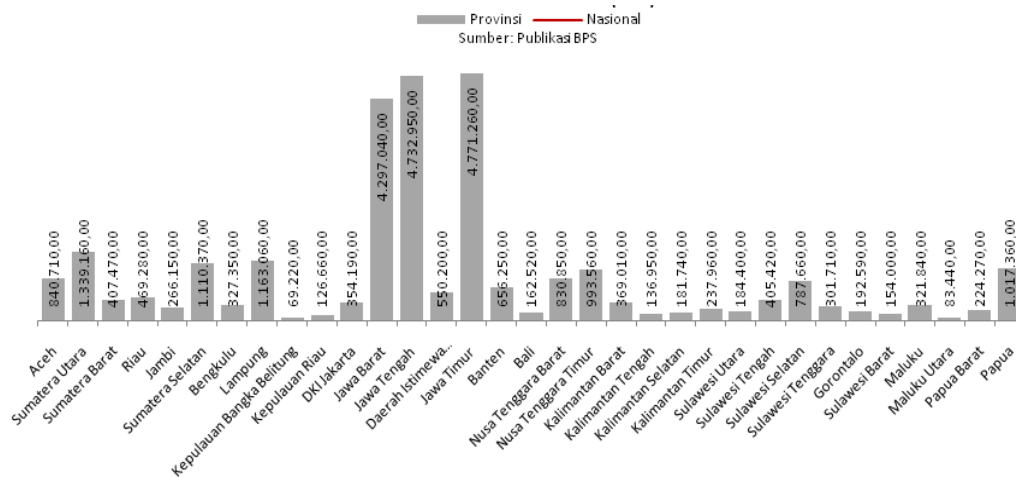


Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 66.620 jiwa sedangkan nasional berjumlah 28.513.57 jiwa.

Gambar II.17

Grafik Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2015



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

F. Perkembangan Nilai Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2015 realisasi jumlah dan nilai proyek asing lebih tinggi dibandingkan dengan dalam negeri.

Tabel II.16
Perkembangan Nilai Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015

Investasi		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
PMA	Jumlah Proyek	19	30	26	35	56	76
	Nilai (juta rupiah)	303.090	146.050	59.183,38	112.392,59	105.043,80	1.033.250
PMDN	Jumlah Proyek	8	9	3	8	8	28
	Nilai (juta rupiah)	812.760,50	836.731,14	533.460,80	608.204,40	615.407,90	1.023.730

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013 & 2015

*BP2TPM 2015

G. Jumlah Kriminalitas

Dalam penciptaan iklim investasi, jumlah kriminalitas di suatu daerah menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data lima tahun terakhir, tindak pidana menurut jenisnya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk kasus psikotropika perlu mendapat perhatian khusus karena menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Adapun perkembangan jumlah tindak pidana menurut jenisnya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.17.

Tabel II.17
Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

No	Jenis Tindak Pidana	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Narkoba	172	180	188	227	107
2.	Pembunuhan	9	9	9	9	2
3.	Penculikan	0	0	0	0	0
4.	Seksual	51	42	40	58	22
5.	Penganiayaan	205	133	73	88	25
6.	Pencurian	188	166	148	188	71
7.	Perampokan	0	0	0	0	0
8.	Pemerasan	18	9	3	8	6
9.	Penipuan	146	156	182	124	81
10.	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	1
11.	Pembakaran	5	7	9	15	3
12.	Penyelundupan	0	3	5	5	3
13.	Lain-lain	1831	1949	1501	1756	495
Total		2625	2654	2158	2478	816

*Data sampai dengan bulan Mei 2016

Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung, 2016

H. Perkembangan Sosial

Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) semakin tahun terus mengalami kenaikan populasinya. Berdasarkan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah penyandang sebanyak 38.710 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2015 sebanyak 52.346. Adapun perkembangan data sosial disajikan pada Tabel II.18 dan Tabel II.19

Tabel II.18
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	38.710	29.177	38.506	43.968	52.346

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.19
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No.	Jenis PMKS	Total
(1)	(2)	(3)
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	218
2	Anak Terlantar (AT)	2.006
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	257
4	Anak Jalanan	30
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	577
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah)	95
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	30
8	Lanjut Usia Terlantar	3.743
9	Penyandang Disabilitas	4.856
10	Tuna Susila	105
11	Gelandangan	4
12	Pengemis	0
13	Pemulung	95
14	Kelompok Minoritas	16
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	174
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	204
17	Korban Penyalahgunaan Napza	478
18	Korban Trafficking	8
19	Korban Tindak Kekerasan	124
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	1.040
22	Korban Bencana Sosial	17
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.798
24	Fakir Miskin (FM)	33.192
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	96
26	Komunitas Adat Terpencil	10
Total Keseluruhan PMKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		52.346

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jika di lihat secara keseluruhan dari semua jenis masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menunjukkan bahwa jumlah PMKS tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2014–2015. untuk PMKS yang mengalami kenaikan cukup tinggi terdapat pada penduduk fakir miskin sebanyak 33.192 jiwa tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebanyak 24.448 jiwa. Berarti selama satu tahun ada kenaikan sebanyak 8.744 jiwa penduduk yang termasuk dalam kategori miskin/tidak mampu. Selanjutnya untuk penduduk lanjut usia terlantar juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 2.958 menjadi 3.743 jiwa pada tahun 2015. Dengan bertambahnya jumlah PMKS setiap tahun dikhawatirkan ke depannya akan berakibat pada konflik sosial serta berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat.

Berdasarkan data Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, sedangkan untuk jumlah keluarga yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu keluarga sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera 3+. Adapun gambaran data dapat dilihat pada tabel II.20 dan tabel II.21 berikut:

Tabel II.20

Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pra Sejahtera	11.652	11.840	10.462	8.667	10.948
2.	Sejahtera 1	41.392	35.769	33.228	30.487	31.085
3.	Sejahtera 2	133.459	144.377	141.694	161.569	139.589
4.	Sejahtera 3	127.348	149.937	127.141	159.803	113.030
5.	Sejahtera 3+	5.271	5.863	9.333	32.909	30.270

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Tabel II. 21

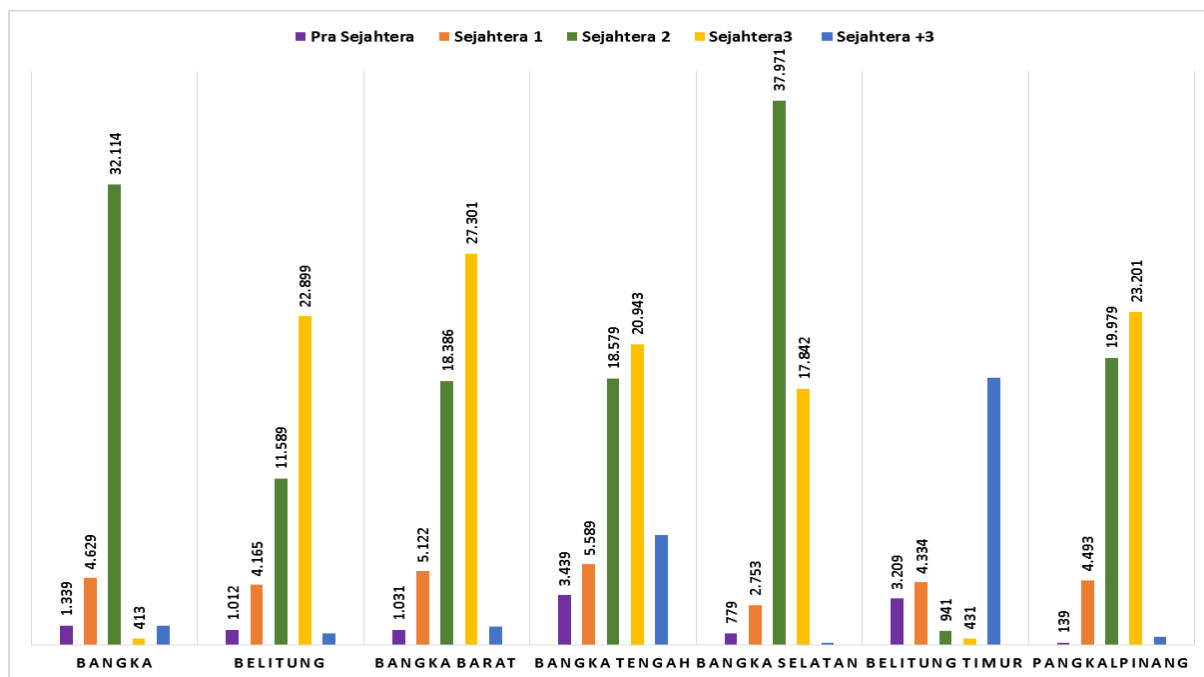
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

No.	Kab/Kota	Pra Sejahtera	Sejahtera 1	Sejahtera 2	Sejahtera 3	Sejahtera +3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	1.339	4.629	32.114	413	1.305
2	Belitung	1.012	4.165	11.589	22.899	791
3	Bangka Barat	1.031	5.122	18.386	27.301	1.264
4	Bangka Tengah	3.439	5.589	18.579	20.943	7.614
5	Bangka Selatan	779	2.753	37.971	17.842	149
6	Belitung Timur	3.209	4.334	941	431	18.634
7	Pangkalpinang	139	4.493	19.979	23.201	513
	Prov.Kep. Babel	10.948	31.085	139.589	113.030	30.270

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Gambar II.18

Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Jika dilihat secara keseluruhan menurut kabupaten/kota, banyaknya keluarga masih di dominasi oleh keluarga sejahtera 2 yang mendiami wilayah Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 37. 971 keluarga.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Salah satu indikator untuk melihat pencapaian terlaksananya pendidikan dengan baik dapat diketahui melalui tingkat angka melek huruf yang semakin baik. Tingkatan angka melek huruf penduduk suatu wilayah akan mampu memberikan gambaran tingkat kualitas penduduk wilayah tersebut secara umum. Berikut perkembangan Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada Tabel.22 dan Gambar II.19.

Tabel II.22.

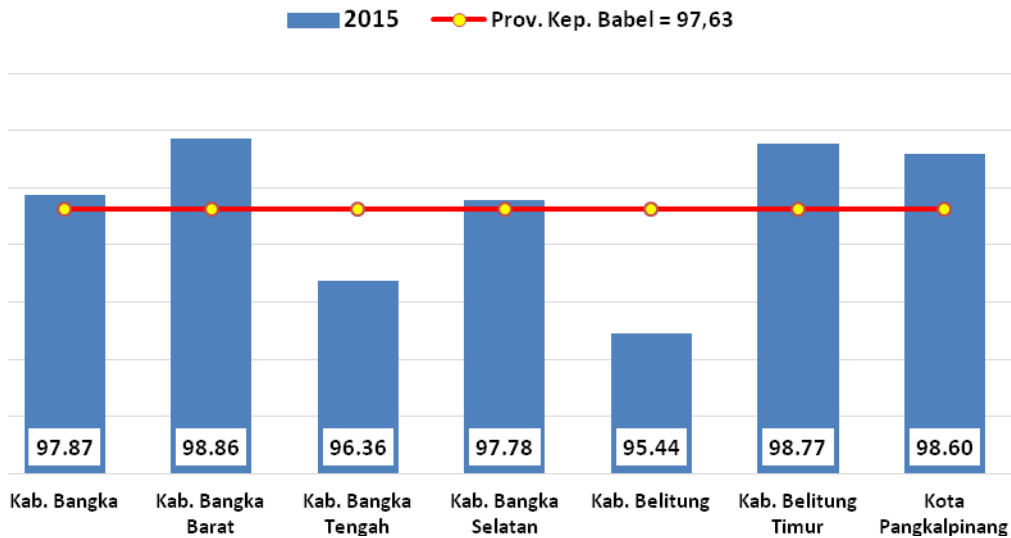
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 +
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011 s.d 2015

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Bangka	96,65	96,71	96,80	98,24	97,87
2	Kab. Bangka Barat	96,57	96,57	97,65	98,68	98,86
3	Kab. Bangka Tengah	93,59	93,85	94,08	95,15	96,36
4	Kab. Bangka Selatan	95,95	96,79	96,81	97,29	97,78

5	Kab. Belitung	93,66	93,68	94,60	95,71	95,44
6	Kab. Belitung Timur	96,71	96,74	97,63	98,92	98,77
7	Kota Pangkalpinang	98,20	98,22	98,30	99,26	98,60
Provinsi Kep.BangkaBelitung		95,83	95,88	96,44	97,60	97,63

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Gambar II.19.
Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan persentase angka melek huruf periode tahun 2014-2015 di Kabupaten/kota menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk yang mampu membaca hanya sebesar 0,03 persen. Hal ini berarti penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikategorikan belum bebas buta huruf. Kemungkinan bisa disebabkan karena masih ada penduduk berusia diatas 15 tahun yang sudah berusia lanjut dan beranggapan jika kebutuhan untuk bisa membaca dan menulis berkaitan dengan kepentingan bekerja, sehingga apabila mereka sudah berumur tua dan pekerjaannya tidak memerlukan kecakapan membaca dan menulis, maka mereka akan berpikir membaca atau menulis bukan suatu kebutuhan yang penting. Tantangannya adalah untuk membuka wawasan bahwa baca dan tulis merupakan modal awal untuk meningkatkan taraf hidup dan tidak kalah penting dibandingkan kebutuhan lainnya.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tabel II.23

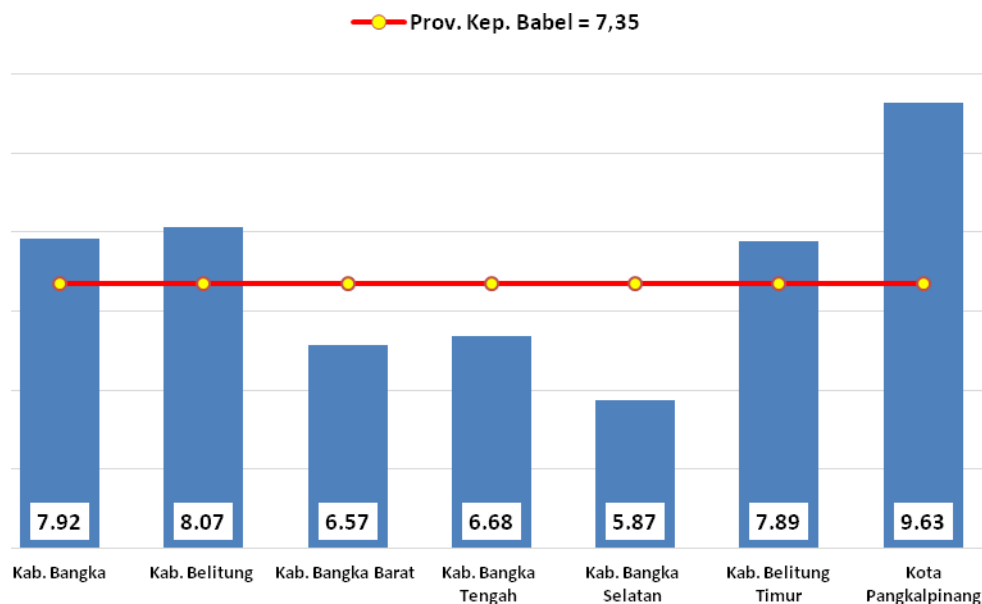
Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Bangka	7,25	7,54	7,76	7,88	7,92
2	Kab. Belitung	7,28	7,33	7,42	8,02	8,07
3	Kab. Bangka Barat	5,99	6,16	6,30	6,43	6,57
4	Kab. Bangka Tengah	6,31	6,35	6,50	6,65	6,68
5	Kab. Bangka Selatan	5,34	5,39	5,44	5,83	5,87
6	Kab. Belitung Timur	6,96	7,24	7,51	7,83	7,89
7	Kota Pangkalpinang	9,46	9,51	9,56	9,62	9,63
Provinsi Kep.Bangka Belitung		7,07	7,19	7,25	7,32	7,35

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

Gambar II.20

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di tiap kabupaten/kota belum terlihat adanya pemerataan. Jika dilihat dari tahun 2010-2014 terlihat masih tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan. Bahkan perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain. Capaian 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melampaui angka nasional yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung.

C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang sekolah tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Perkembangan APK dan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebarannya pada tahun 2010/2011 – 2014/2015 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.24, Tabel II.25 dan Tabel II.26.

Tabel II.24

Perkembangan APK SD/MI dan APM SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	118,64	93,91	113,37	92,82	116,01	96,80	114,22	94,64	113,00	91,41
2	Belitung	111,72	91,68	109,67	91,26	108,81	90,16	107,16	88,43	108,64	88,65
3	Bangka Barat	119,70	94,83	118,92	98,33	118,10	98,70	109,16	88,87	108,11	83,56
4	Bangka Tengah	116,32	93,58	116,41	94,24	111,68	91,03	115,13	96,50	111,77	90,00
5	Bangka Selatan	114,34	94,91	114,47	97,46	110,89	96,20	109,18	94,57	110,66	93,44
6	Belitung Timur	108,48	89,19	106,21	89,74	114,19	96,74	113,45	94,60	133,80	112,31
7	Pangkalpinang	121,69	98,64	121,10	102,51	130,21	109,64	126,62	102,67	125,17	99,42
Provinsi Kep.Bangka Belitung		116,42	94,05	114,64	95,27	115,72	97,01	109,97	95,72	114,28	92,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.25

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	96,89	72,49	94,17	60,94	100,86	66,14	96,79	64,75	96,32	64,28
2	Belitung	97,67	75,08	90,99	65,78	106,45	64,55	104,34	63,62	107,18	64,90
3	Bangka Barat	89,36	66,45	85,68	67,85	98,23	62,02	83,22	51,15	77,77	52,73
4	Bangka Tengah	90,80	65,36	96,80	62,75	85,24	52,87	92,61	62,95	89,60	54,92
5	Bangka Selatan	92,54	70,36	88,24	64,57	91,07	64,18	86,40	62,26	79,75	57,23
6	Belitung Timur	99,60	72,16	80,80	56,68	100,43	63,55	105,51	87,54	111,80	92,42
7	Pangkalpinang	113,27	82,91	102,07	71,50	107,20	68,33	121,92	77,84	116,75	73,87
Provinsi Kep.Bangka Belitung		97,16	72,26	92,07	64,24	99,77	63,33	73,38	63,83	95,08	63,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.26

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010/2011 s.d 2014/2015

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	73,57	57,07	94,17	58,76	68,82	46,55	73,09	51,54	101,99	71,92
2	Belitung	71,16	55,09	66,88	36,90	76,76	50,81	75,12	49,96	75,11	49,95
3	Bangka Barat	62,66	48,16	55,60	40,53	71,00	47,87	55,57	38,55	60,59	41,75
4	Bangka Tengah	61,93	47,98	61,04	37,05	57,98	35,57	60,59	41,75	55,57	38,55
5	Bangka Selatan	55,59	42,20	55,49	35,17	53,92	37,25	44,90	33,09	44,90	33,09
6	Belitung Timur	62,62	48,13	65,13	35,16	64,30	36,14	77,98	67,46	76,60	66,27
7	Pangkalpinang	113,33	85,83	125,02	82,30	123,00	81,70	109,51	72,59	109,51	72,41
Provinsi Kep. Bangka Belitung		72,84	55,93	76,06	47,57	73,28	48,18	68,50	50,80	74,73	52,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

D. Angka Kematian Bayi

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.27

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran
Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2014

No	Kabupaten/ Kota	2011		2012		2013		2014	
		Bayi	Bayi	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	9,19	9,19	9,19	9,80	6,96	16,2	5,35	6,73
2	Belitung	15,78	15,78	15,78	16,78	14,75	14,16	12,91	13,81
3	Bangka Tengah	9,96	9,96	9,96	10,23	4,95	4,95	5,74	6,74
4	Bangka Barat	10,50	10,50	10,50	12,00	9,21	8,48	7,61	7,87
5	Bangka Selatan	7,63	7,63	7,63	8,45	8,84	7,74	7,37	8,42
6	Belitung Timur	9,62	9,62	9,62	10,63	14,73	12,84	10,22	11,15
7	Kota Pangkalpinang	6,71	6,71	6,71	7,20	4,73	3,48	2,92	3,16
Prov. Kep. Bangka Belitung		9,67	9,67	9,67	10,45	8,52	7,60	6,92	7,78
Nasional		3,40	4,00	3,40	4,00	3,40	4,00	3,40	4,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel II.27, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2011-2014 di Kabupaten/Kota menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 angka

kematian bayi mengalami penurunan sebanyak 6,92 dibandingkan tahun 2013 sebanyak 8,52, sedangkan untuk kematian balita pada tahun 2013 sebanyak 14,16 dan tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 13,81. Hal ini berarti selama periode satu tahun ada penurunan angka kematian bayi sebanyak 1,6 dan kematian balita sebanyak 0,35. Jika dilihat secara keseluruhan, pada tahun 2015 angka kematian bayi dan kematian balita yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung sebesar 12,91 untuk kematian bayi dan 13,81 pada kematian balita. Sementara untuk posisi terendah angka kematian bayi sebanyak 2,92 dan balita sebanyak 3,16 terdapat di Pangkalpinang.

Tabel II.28

Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	0	0,69	0,72	0,78	0,72
2	Belitung	0	2,05	0	0,01	0
3	Bangka Tengah	0,07	2,11	0,05	0,11	0,05
4	Bangka Barat	0,13	2,67	0,20	0,17	0,20
5	Bangka Selatan	0,15	0,46	1,75	0,92	1,75
6	Belitung Timur	0,12	4,12	0,25	0,18	0,25
7	Kota Pangkalpinang	0,05	1,26	0,31	0,19	0,31
Kepulauan Bangka Belitung		0,06	1,66	0,26	0,26	0,26

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Tabel II.29

Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	131,77	62,02	107,16	121,03	107,00
2	Belitung	199,27	99,04	167,84	176,99	120,05
3	Bangka Tengah	209,52	170,84	215,29	82,554	149,81
4	Bangka Barat	107,53	228,08	174,96	124,41	104,96
5	Bangka Selatan	141,64	156,45	109,02	107,12	105,26
6	Belitung Timur	223,59	210,53	151,90	92,081	46,45
7	Kota Pangkalpinang	130,79	198,76	74,53	124,6	48,63
Kepulauan Bangka Belitung		154,24	149,83	137,56	119,69	100,88

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Angka kematian ibu pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2014 daerah yang mengalami penurunan tingkat angka kematian ibu, yaitu pada Kota Pangkalpinang.

E. Usia Harapan Hidup

Berdasarkan data menurut Kabupaten/Kota tahun 2010-2014 Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 sebesar 69,72 tahun. UHH tertinggi masih

berada di Kota Pangkalpinang 72,31 tahun dan untuk UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 66,56 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010 hingga tahun 2014 angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan.

Tabel II.30

Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,28	70,35	70,40	70,45	70,47
Belitung	70,04	70,10	70,15	70,20	70,22
Bangka Barat	69,24	69,32	69,39	69,44	69,46
Bangka Tengah	69,75	69,83	69,90	69,95	69,98
Bangka Selatan	66,19	66,31	66,41	66,51	66,56
Belitung Timur	70,88	70,94	70,98	71,01	71,03
Pangkalpinang	72,18	72,22	72,26	72,29	72,31
Prov. Kep. Bangka Belitung	69,15	69,31	69,48	69,64	69,72

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

F. Rasio Penduduk yang Bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Untuk Persentase jumlah pencari kerja mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 22.914 menjadi 32.736 pada tahun 2014. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari tahun 2010 – 2013 mengalami penurunan namun tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 636.959 dibandingkan tahun 2013 sebesar 619.700. Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut.

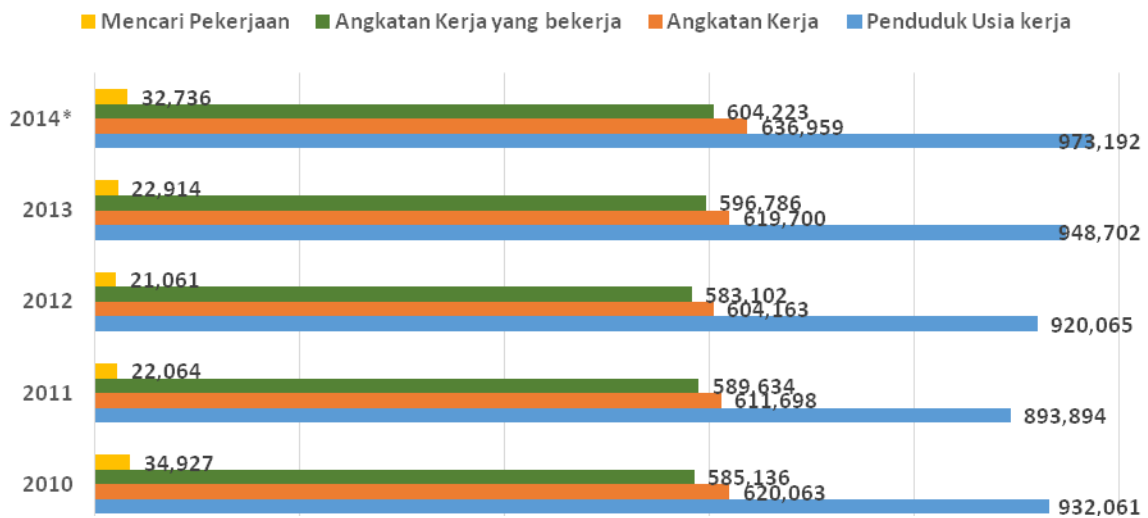
Tabel II.31

Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	932.061	893.894	920.065	948.702	973.192
2.	Angkatan Kerja	620.063	611.698	604.163	619.700	636.959
3.	Angkatan Kerja yang bekerja	585.136	589.634	583.102	596.786	604.223
4.	Mencari Pekerjaan	34.927	22.064	21.061	22.914	32.736

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Gambar II.21
Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010 s.d 2014*



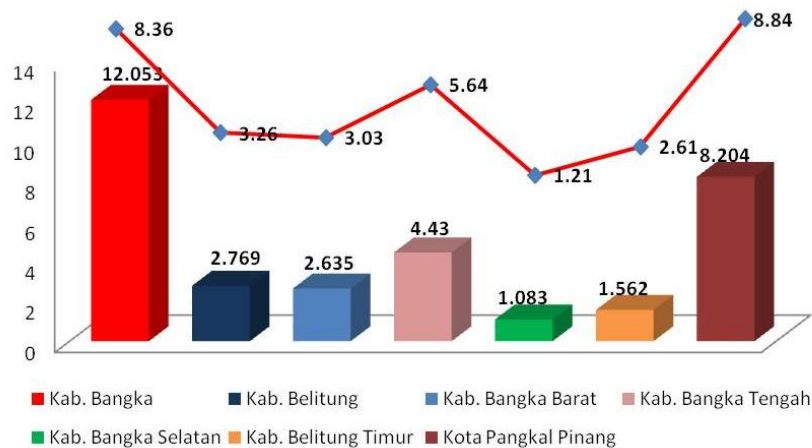
Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Tabel II.32
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010 s.d 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.53	68.43	65.67	65.32	65.45
2.	Tingkat Pengangguran	5.63	3.61	3.49	3.70	5.14

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Gambar II.22
Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2014



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014

Berdasarkan data yang telah ditampilkan, pada bidang ketenagakerjaan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pertengahan tahun 2014 menunjukkan adanya kenaikan tingkat pengangguran ke level 5,14 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 32.736 orang, angka ini meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 3,70 dengan jumlah pengangguran sebanyak 22.914 orang. Angka tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang dengan 8,84 persen dengan jumlah 8.204 orang dan yang terendah berada di Kabupaten Bangka barat dengan 1,21 persen dengan jumlah 1.083 orang. Namun yang perlu untuk mendapat perhatian adalah kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka yang pada tahun 2013 sebesar 4,26 persen dengan jumlah 5.900 orang menjadi sebesar 8,36 persen dengan jumlah sebesar 12.053 orang pada tahun 2014 itu berarti naik sebesar 104,29 persen.

Tabel II.33

Data Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia kerja	TPAK	Angkatan Kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangg uran	Tingkat Pengangg uran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	220.272	65,46	144.181	132.128	12.053	8,36
2.	Kab. Belitung	126.662	67,08	84.969	82.200	2.769	3,26
3.	Kab. Bangka Barat	136.813	63,48	86.854	84.219	2.635	3,03
4.	Kab. Bangka Tengah	135.701	62,48	78.532	74.102	4.430	5,64
5.	Kab. Bangka Selatan	133.833	67,12	89.823	88.740	1.083	1,21
6.	Kab. Belitung Timur	86.961	68,79	59.821	58.259	1.562	2,61
7.	Kota Pangkal Pinang	142.950	64,90	92.779	84.575	8.204	8,84
Prov. Kep. Bangka Belitung		973.192	65,45	636.959	604.223	32.736	5,14

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya walaupun ada sedikit perubahan persentase di setiap sektor. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2012 yaitu dari 28,06 persen menjadi 31,41 persen ini dipicu karena semakin membaiknya harga lada di pasaran sehingga memberi motivasi bagi masyarakat untuk menanam lada. Namun penurunan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertambangan yaitu dari 21,28 persen tahun 2013 menjadi 17,50 persen pada tahun 2014 hal ini karena semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah.

Tabel II.34

Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 (Persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer :					
1. Pertanian	32,72	25,93	28,60	28,06	31,41

Lapangan Pekerjaan Utama	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Pertambangan	20,00	25,19	22,10	21,28	17,50
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	4,47	5,46	6,20	6,06	5,88
4. Listrik, Gas dan Air	0,13	0,24	0,30	0,35	0,21
5. Bangunan	4,45	4,55	5,40	4,99	5,16
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	21,48	18,98	19,90	18,49	20,45
7. Angkutan, Pergudangan & Telekomunikasi	2,58	2,24	2,40	2,90	2,86
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	0,93	1,90	1,80	1,93	2,19
9. Jasa Kemasyarakatan	13,23	15,51	13,40	15,94	14,35
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2015

2.1.2.3 . Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

A. Seni Budaya

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu, Maras Taun, Beripat, dsb. Pelestarian nilai-nilai seni dan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tak lepas dari peran grup kesenian yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana yang tergambarkan pada Tabel II.35. Kendati pun demikian hingga saat ini belum ada satu pun gedung kesenian di Provinsi ini.

Tabel II.35
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Grup Kesenian	106	114	169	217	217	231
2.	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Tabel II.36
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2014

No	Grup Kesenian	Pangkalpinang	Bangka	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Bangka Barat	Belitung	Belitung Timur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sanggar	40	30	19	21	23	44	40
2.	Grup Rabana	-	20	-	-	-	-	-
3.	Grup Dambus	-	19	-	-	-	-	-
4.	Perkumpulan Barongsai	-	-	-	1	-	1	2
Jumlah		40	69	19	22	23	45	42

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

B. Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio - ekonomi dan politik.

Pemuda adalah aset dan sumber daya yang terus dipanggil untuk berpartisipasi dalam komunitas dan juga isu-isu keuangan, disamping memberikan pelayanan pada masyarakat yang berefek pembelajaran keterampilan untuk bekerja bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Pemuda dijadikan mitra bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi untuk berkarya. Disamping itu pemuda juga mesti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perubahan di dalam komunitasnya.

C. Olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelakupembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007 – 2014 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 Ha untuk pembangunan *Sport Center*, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Data yang diperoleh dari SKPD yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat, sebanyak 987 perkumpulan, terdapat 94 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 124 perkumpulan

di Kabupaten Belitung, 105 perkumpulan di Kabupaten Bangka Barat, 92 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 383 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 107 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 82 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (423 perkumpulan), kemudian bola voli (246 perkumpulan), bulutangkis (158 perkumpulan), pencak silat (67 perkumpulan), bola basket (74 perkumpulan), dan atletik (19 perkumpulan).

Tabel II.37

Jumlah Perkumpulan 6 (Enam) Cabang Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No	Cabang Olahraga	Bangka	Belitung	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Atletik	2	3	2	1	7	2	2	19
2	Sepakbola	34	66	64	36	133	65	25	423
3	Bola Voli	9	15	20	23	159	10	10	246
4	Bola Basket	25	15	7	2	8	10	7	74
5	Bulutangkis	15	19	10	20	59	15	20	158
6	Pencak silat	9	6	2	10	17	5	18	67
Jumlah		94	124	105	92	383	107	82	987

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah salah satu urusan wajib bagi pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam tujuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan bahwa *stakeholder* pendidikan menganggap pendidikan adalah kebutuhan hidup yang penting. Hal ini dipertegas lagi melalui angka partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada berbagai jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Berdasarkan data, Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya disemua jenjang pendidikan yang ada. Perkembangan APS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010/2011 – 2014/2015, sebagaimana yang tercantum pada Tabel II.38 dan Gambar II.23.

Tabel II.38

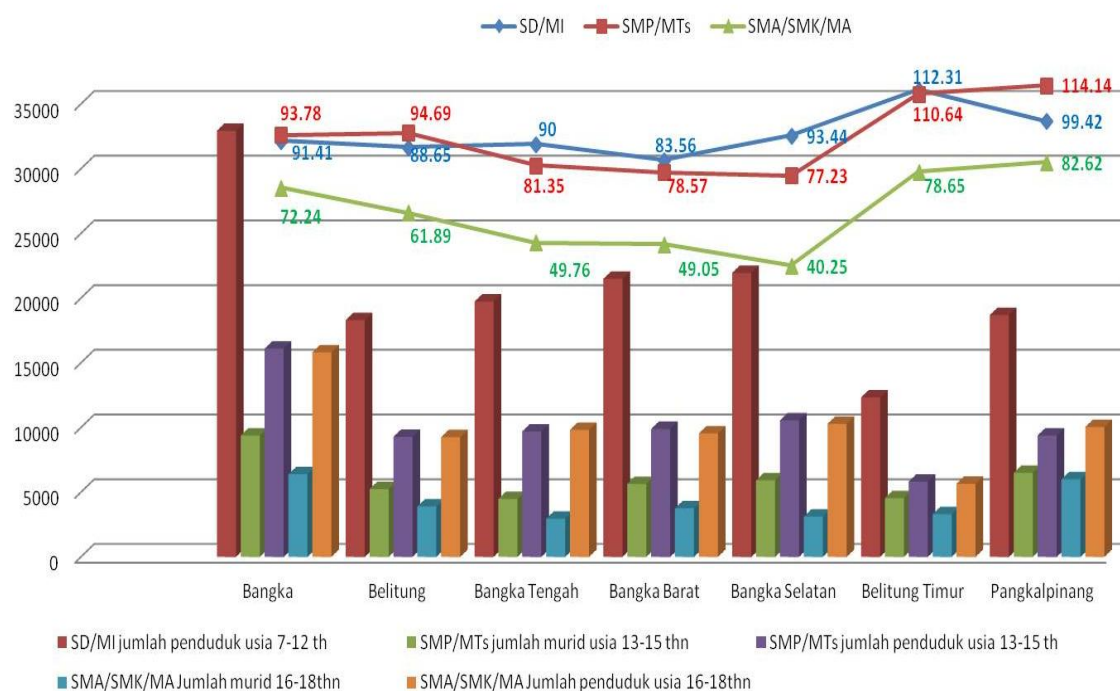
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010/2011 s.d.2014/2015

No	Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	126.973	131.465	153.832	149.999	135.712
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	135.784	138.919	141.915	146.526	146.526
1.3.	APS SD/MI	93,51	94,63	108,40	102,37	102,59
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	37.859	40.859	57.500	59.893	41.875
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	57.742	62.001	62.850	65.640	65.640
2.3.	APS SMP/MTs	65,56	65,90	91,49	91,24	91,24
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	29.380	25.430	36.420	37.878	31.945
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	56.592	54.729	61.593	60.657	60.657
3.3.	APS SMA/SMK/MA	51,91	46,46	59,13	62,45	62,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Gambar II.23

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APS pada berbagai jenjang pendidikan di kabupaten/kota tahun 2015 ditampilkan pada Tabel II.38.

Tabel II.39
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No	Kabupaten /Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS	jumlah murid 16-18thn	jumlah penduduk usia 16-18thn	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	30.754	32940	91,41	9.391	16.098	93,78	6.389	15.809	72,24
2	Belitung	15.918	18306	88,65	5.241	9.286	94,69	3.896	9.265	61,89
3	Bangka Tengah	17.293	19741	90,00	4.490	9.702	81,35	2.952	9.826	49,76
4	Bangka Barat	20.152	21494	83,56	5.644	9.889	78,57	3.754	9.543	49,05
5	Bangka Selatan	20.455	21958	93,44	5.927	10.553	77,23	3.114	10.296	40,25
6	Belitung Timur	11.475	12333	112,31	4.550	5.823	110,64	3.302	5.652	78,65
7	Pangkalpinang	18.804	18697	99,42	6.498	9.389	114,14	6.003	10.047	82,62
Jumlah		134.851	145.469	92,62	41.741	70.740	91,24	29.410	70.438	62,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan data pada Tabel II.38, Tabel II.39 dan Gambar II.29, maka pada jenjang pendidikan SD/MI, Kabupaten yang memiliki APS terendah adalah Kabupaten Bangka Barat dan yang tertinggi adalah Kabupaten Belitung Timur, sementara itu pada jenjang SMP/MTS, Kabupaten dengan nilai APS terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dan yang tertinggi adalah Kota Pangkalpinang, sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA Kabupaten dengan nilai APS terendah adalah Kabupaten dan yang tertinggi adalah Kota Pangkalpinang.

2. Angka Partisipasi Murni

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tersebut. Dukungan di dalam pendidikan diwujudkan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengindikasikan daya serapan sekolah berbanding dengan peserta didik sebagaimana tertera pada Tabel II.40.

Tabel II.40

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk 16-18 tahun	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	183	35.949	50,91	51	13.352	38,20	32	16.354	19,57
2	Belitung	126	18.748	67,21	29	8.513	34,07	16	8.275	19,34
3	Bangka Tengah	95	20.582	46,16	23	7.993	28,78	14	9.123	15,35
4	Bangka Barat	136	21.769	62,47	48	8.785	54,64	20	8.729	22,91
5	Bangka Selatan	88	24.684	35,65	31	9.839	31,51	17	8.395	20,25
6	Belitung Timur	105	14.463	72,60	22	5.944	37,01	12	4.413	27,19
7	Pangkalpinang	85	19.966	42,57	26	8.424	30,86	22	8.974	24,52
Prov. Kep. Bangka Belitung		818	156.161	52,38	230	62.850	36,60	133	64.263	20,70

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

b. Rasio Murid dan Guru

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dan Gambar berikut.

Tabel II.41

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD/MI							
1.1.	Jumlah Guru	8.255	9.356	9.561	9.687	9.905	9.843	9.767
1.2.	Jumlah Murid	148.494	151.827	155.774	159.256	161.533	163.325	161.932
1.3.	Rasio	17,99	16,23	16,29	16,44	16,31	17	
2	SMP/MTs							
2.1.	Jumlah Guru	3.295	3.571	3.790	3.753	3.934	4.063	4.005
2.2.	Jumlah Murid	48.550	49.158	51.101	53.538	58.517	62.411	60.101
2.3.	Rasio	14,73	13,77	13,48	14,27	14,87	15	
3	SMA/SMK/MA							
3.1	Jumlah Guru	2.977	3.124	3.290	3.306	3.458	3.407	3.444
3.2.	Jumlah Murid	34.938	34.072	27.213	38.356	41.999	45.330	42.930
3.3.	Rasio	11,73	10,90	8,27	11,60	12,15	13	12,86

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014

B. Urusan Kesehatan

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.42, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

Tabel II.42
Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	62,99	68,01	30,55	83,3	81,39	87,7	73.82
2	Belitung	52,33	11,84	48,15	15,5	78,44	75,6	73.73
3	Bangka Tengah	80,70	17,74	62,21	60,8	78,87	48,2	38.68
4	Bangka Barat	69,77	85,24	70,86	78,5	54,66	87,4	77.58
5	Bangka Selatan	96,76	11,94	13,41	62,7	73,80	76,4	75.18
6	Belitung Timur	42,72	2,42	25,49	48,6	72,39	100	73.82
7	Kota Pangkalpinang	11,42	5,37	13,29	50,6	91,84	92,0	86.72
Kepulauan Bangka Belitung		58,28	28,29	36,69	60,00	76,38	80,2	71.24

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.43
Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	9,47	4,05	1,71	1,77	1,67	0,97	0.63
2	Belitung	6,31	3,20	2,72	2,61	1,97	0,66	0.24
3	Bangka Tengah	5,06	6,81	5,91	8,27	4,28	2,13	0.39
4	Bangka Barat	18,50	16,58	14,10	8,62	4,52	4,23	1.98
5	Bangka Selatan	8,87	14,83	4,93	5,64	2,08	0,66	0.66
6	Belitung Timur	6,61	9,62	5,03	0,95	1,58	0,57	0.25
7	Kota Pangkalpinang	10,43	7,35	1,48	1,02	0,67	0,39	0.17
Kepulauan Bangka Belitung		9,47	8,46	4,82	4,10	2,36	1,39	0.68

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang dilaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa populasi berisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah dengan epidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko).

Dari kegiatan serosurvey pada populasi berisiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67%, Bangka 3.94%, sedangkan di dua kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 disajikan dalam Tabel II.44 berikut:

Tabel II.44
Perkembangan Prevelensi HIV
(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	0,99	0	0	8,33	3,94	3,94	53,00
2	Belitung	4,67	4,67	0,56	2,70	1,80	0	34,00
3	Bangka Tengah	14,58	0	8,11	2,50	0,01	0	14,00
4	Bangka Barat	9,09	2,37	4,94	0	0	0	19,00
5	Bangka Selatan	0,00	2,27	0	3,17	9,84	1,08	15,00
6	Belitung Timur	2,04	2,84	3,85	0,20	0,02	2,17	3,00
7	Kota Pangkalpinang	10,99	0	1,96	6,98	10,33	6,67	67,00
Kepulauan Bangka Belitung		5,53	3,0	8,11	8,33	10,33	13,86	205,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwapeningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang dilaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.

Tabel II.45

Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
per 100.000 penduduk(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

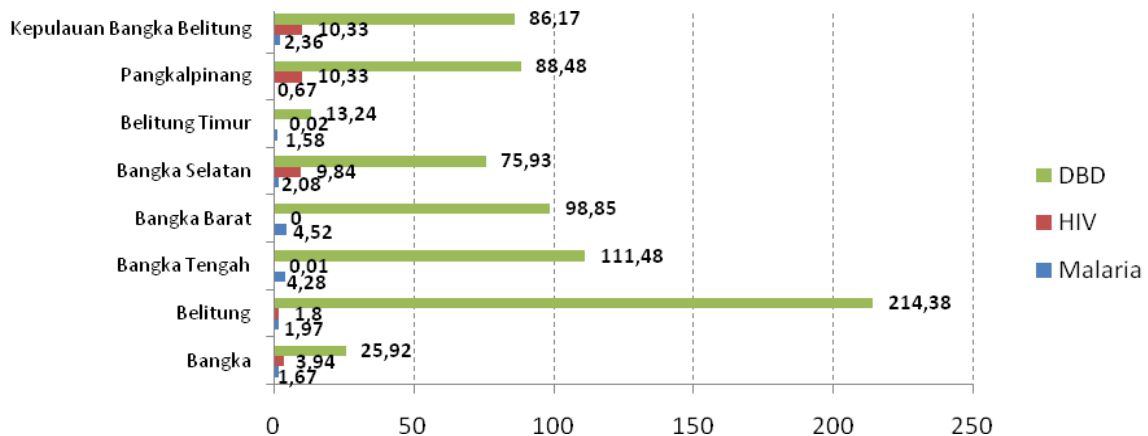
No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	4,13	20,82	8,08	5,60	25,92	43,15	94
2	Belitung	38,04	15,02	56,94	19,88	214,38	111,81	24
3	Bangka Tengah	2,13	51,04	38,22	3,33	111,48	87,21	46
4	Bangka Barat	14,30	27,78	40,12	49,10	98,85	66,72	95
5	Bangka Selatan	3,17	9,44	4,15	46,95	75,93	26,47	40
6	Belitung Timur	12,46	56,42	21,16	22,66	13,24	7,72	8
7	Kota Pangkalpinang	11,86	55,07	49,89	29,17	88,48	27,68	17
Kepulauan Bangka Belitung		11,25	31,43	29,37	27,93	86,17	53,4	324

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2008-2014 cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya, meskipun di beberapa daerah kabupaten/kota mengalami penurunan. Pada tahun 2014, kenaikan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka kenaikan terbesar terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Adapun daerah yang mengalami penurunan terdapat di Kabupaten Belitung. Secara umum, perkembangan angka penyakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008-2014, ditampilkan pada Gambar II.24.

Gambar II.24

Perkembangan Angka Penyakit Tahun 2014
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk

memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.46 dan Tabel II.47.

Tabel II.46
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	11	11	11	11	11	12	12
2	Belitung	9	9	9	9	9	9	9
3	Bangka Tengah	7	7	7	7	7	7	8
4	Bangka Barat	6	6	8	8	8	8	8
5	Bangka Selatan	6	7	8	8	9	9	9
6	Belitung Timur	6	6	6	6	6	6	6
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	9	9	9
Kepulauan Bangka Belitung		54	55	58	58	59	60	61

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Tabel II.47
Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	2010		2011		2012		2013		2014	
		Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	11	35	11	37	11	36	12	36	12	36
2	Belitung	9	31	9	31	9	31	9	31	9	31
3	Bangka Tengah	7	17	7	21	7	18	7	18	8	18
4	Bangka Barat	8	19	8	19	8	19	8	19	8	19
5	Bangka Selatan	8	28	8	28	9	29	9	29	9	29
6	Belitung Timur	6	18	6	17	6	18	6	18	6	18
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	7	9	19	9	19	9	19
Prov. Kep. Bangka Belitung		58	167	58	160	59	169	60	169	61	169

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015

Tabel II.48
Perkembangan Jumlah Dokter di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

Wilayah	2010			2011			2012			2013			2014		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	G	U	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Prov. Kep. Babel	4	2	0	6	1	0	10	0	1				3	1	0
Bangka	63	11	17	60	13	17	60	11	22	9	61	16	67	5	33
Belitung	36	8	3	40	10	2	41	10	4	10	40	6	42	11	14
Bangka Tengah	30	5	0	39	7	2	42	7	4	7	44	5	42	5	7
Bangka Barat	31	6	2	38	5	2	54	5	4	7	36	3	52	11	5

Wilayah	2010			2011			2012			2013			2014		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	G	U	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bangka Selatan	24	4	0	27	5	0	27	6	0	7	23	3	27	7	4
Belitung Timur	14	1	0	34	5	0	34	8	2	10	32	4	39	9	4
Pangkalpinang	59	17	30	61	17	41	61	21	51	19	56	42	69	25	49
Jumlah	261	54	52	305	63	64	329	68	88	69	292	79	341	74	116

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014

Keterangan :

U : Dokter Umum

G : Dokter gigi

Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.48 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang sumber daya air, keciptakaryaan, dan kebinamargaan. Di bidang sumber daya air, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan sumber daya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Bidang kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus jalan provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan jaringan jalan yang ada di wilayah Bangka Belitung. Sedangkan bidang keciptakaryaan melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Dengan tersedianya irigasi, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya.

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantab.

Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2015 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel II.49 dan berikut:

Tabel II.49

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015

Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Jenis Permukaan			
1. Diaspal	600,40	896,33	1 496,73
2. Kerikil	0,00	0,00	0,00
3. Tanah	0,00	3,00	3,00
02. Kondisi Jalan			
1 Baik	539,17	387,33	926,50
2 Sedang	52,72	441,89	494,61
3 Rusak	7,20	58,60	65,80
4 Rusak Berat	1,30	11,51	12,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan data diatas, terdapat 58,60 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak dan 441,89 km kondisi jalan dalam keadaan sedang. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel II.50

Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2015

Jenis Kontruksi	Negara	Provinsi	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu	0,00	81,30	81,30
2. Beton Bertulang	1 804,03	2 876,90	4 680,93
3. Rangka baja	992,15	474,00	1 466,15
Jumlah/Total	2015	2 796,18	3 432,20
	2014	2 273,98	3 969,85
	2013	2 228,00	3 444,80
	2012	2 173,00	2 123,40
	2011	2 262,00	1 522,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pada penataan ruang, dikaitkan dengan tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan. Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. Di samping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang (RTRW).

Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang didalam table II.51 berikut.

Tabel II.51
Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	11.57
Ketaatan terhadap RTRW	87.50	95.00	100.00	100.00
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)	na	3.50	6.89	17.20
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015)

Berdasarkan table II.50 diatas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja urusan penataan ruang cenderung meningkat dan berada diatas target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2016 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK PAriwisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Upaya mengatasi penurunan *backlog* (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi masalah perumahan berupa tersedianya Rumah Sederhana, Layak Huni dan Sehat. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 13.016 rumah tidak layak huni.

Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2015 masih terdapat 1,38 persen rumah penduduk di Kepulauan Bangka Belitung yang masih menggunakan atap ijuk. Hal tersebut sebagaimana yang digambarkan pada table II.52 berikut.

Tabel II.52

Persentase Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Atap Terluas Bukan Ijuk per Kabupaten / Kota Tahun 20011 – 2015

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	98.72	95.13	97.24	98.68	99.09
Belitung	97.83	96.93	98.14	98.31	98.92
Bangka Barat	96.02	94.82	97.14	98.79	98.77
Bangka Tengah	97.61	94.82	97.14	98.79	98.37
Bangka Selatan	95.77	92.99	93.04	97.3	95.98
Belitung Timur	96.52	97.52	99.69	98.43	99.72
Kota Pangkalpinang	98.54	99.48	100.00	100.00	99.64
Kepulauan Bangka Belitung	97.21	95.83	95.83	98.67	98.62

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui kegiatan Bedah Rumah Program SATAM EMAS.

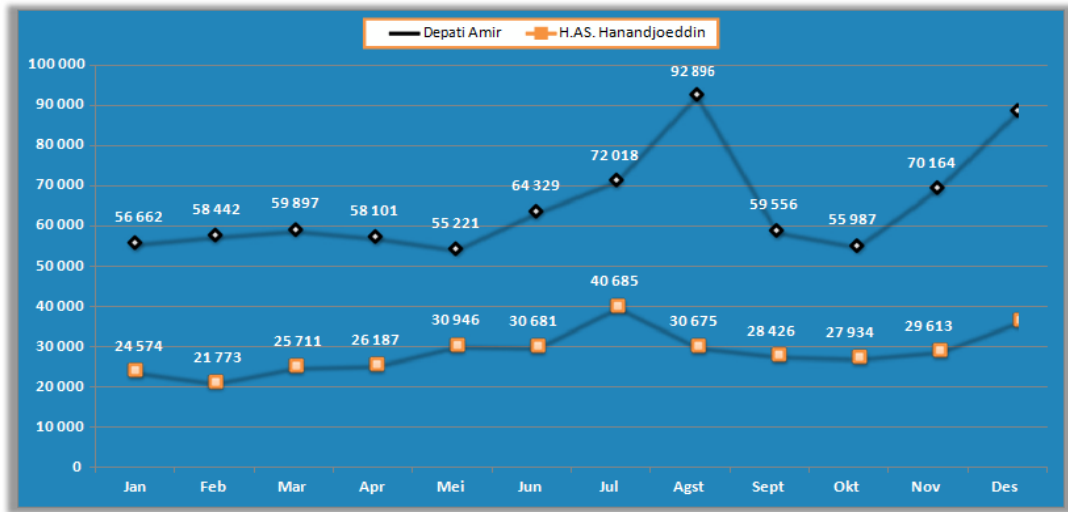
E. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional.

Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.25.

Gambar II.25

Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada table II.53 berikut:

Tabel II.53

Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jenis Pelayaran	Jumlah Kapal (Unit)	Berat (Grt)
(1)	(2)	(3)
1. Luar Negeri		
a. Reguler	-	-
b. Nonreguler	4	3.261
2. Pelayaran Dalam Negeri	102	159.704
3. Pelayaran Rakyat	2.503	2.909.102
4. Pelayaran Perintis	313	62.118
5. Kapal Negara/Tamu	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 masih didominasi oleh pelayaran rakyat yaitu sebanyak 2.503 unit dengan berat total 2.909.102 Grosston.

Disisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2011 – 2015 yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tersaji pada table II.54.

Tabel II.54

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan
di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jenis Kendaraan					
	Sedan	Bus	Jeep	Pickup	Truck	Motor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	2 615	39 543	4 275	17 701	8 499	325 432
2014	2 610	35 599	4 295	17 096	8 237	328 114
2013	2 648	31 137	4 325	16 640	8 124	333 802
2012	2 672	26 006	4 036	15 604	7 585	325 196
2011	2 273	19 859	3 424	11 897	6 061	279 735

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan table tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki pertumbuhan adalah kendaraan jenis pickup dan bus. Peningkatan ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain, kendaraan roda dua mengalami kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2013 – 2015.

F. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai target daerah yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada table II.55.

Tabel II.55

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011 – 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKLH	61.19	58.17	59.29	60.21	60.56

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, 2015

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat setiap tahunnya, namun demikian peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan demikian maka masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

G. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan yang berpengaruh terhadap realisasi pembangunan lainnya, terutama pembangunan fisik konstruksi. Status tanah menjadi hal pokok yang harus diselesaikan pada saat realisasi fisik pembangunan sarana pemerintah daerah yang dibiayai dari dana APBD. Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota untuk mendukung salah satu sasaran pokok pembangunan yaitu “tersedianya lahan untuk pelayanan dasar yang layak”. Indikator kinerja luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan seluas 6.567.221,67 M² pada Tahun 2013. Pada tahun 2012 dilaksanakan ganti Rugi dan Bangunan Untuk Kepentingan Umum Seluas 680.749,86 M². Urusan Pertanahan diselenggarakan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

H. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan urusan kependudukan ini adalah Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, *updating* dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.56 dan Tabel II.57.

Tabel II.56

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

NO	Kabupaten/kota	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Bangka	46.56	46.85	57.39	52,85	58,07	59,40	62,01
2.	Belitung	45.36	45.81	49.27	49,21	49,37	48,56	40,16
3.	Bangka Barat	42.41	43,00	53.32	56,29	58,28	54,81	55,57
4.	Bangka Tengah	46.07	46.56	52.92	44,54	45,08	54,93	54,29
5.	Bangka Selatan	42.40	42.49	39.16	43,77	45,79	37,80	37,13
6.	Belitung Timur	47.29	47.87	42.25	47,21	49,65	50,11	63,33
7.	Kota Pangkal Pinang	47.59	48.12	49.60	50,01	55,20	56,10	55,44
Prov. Kep. Bangka Belitung		44.11	44.86	55.62	56,03	56,54	57,29	56,12

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Tabel II.57

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2014

No	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Bangka	58,17	58,50	59,65	60,08	60,75	61,65	86,92
2.	Belitung	56,67	56,80	58,01	58,32	58,87	59,80	87,19
3.	Bangka Barat	59,07	59,11	59,74	60,25	60,72	61,32	88,52
4.	Bangka Tengah	54,69	55,23	56,46	56,89	57,43	58,13	90,60
5.	Bangka Selatan	49,30	49,46	50,36	51,29	51,75	52,83	82,52
6.	Belitung Timur	59,29	59,69	60,84	61,25	61,75	62,36	85,52
7.	Kota Pangkal Pinang	64,49	65,15	65,70	66,19	66,72	67,56	85,37
Prov. Kep. Bangka Belitung		59,69	60,05	60,36	60,79	61,38	62,38	87,74

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional, IPD masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 30, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka pangkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

J. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relative lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2011 – 2015 adalah sebagaimana disajikan pada table II.58.

Tabel II.58

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan (%)	2,28	2,25	2,22	2,19	2,15

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa sejak tahun 2011 terjadi trend penurunan pertumbuhan. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung.

K. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyelenggaraan urusan social di Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka

L. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kepulauan Bangka Belitung, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Gambaran mengenai perkembangan TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2011 – 2015 adalah sebagaimana disajikan pada table II.59.

Tabel II.59
Perkembangan TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 – 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,40	65,67	62,91	65,45	66,71

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015

Berdasarkan data pada table II.59 dapat diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan trend yang meningkat.

M. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: “Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menyajikan data terkini (*up to date*) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, Terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, Tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima, peningkatan transparansi dan mutu pelayanan yang cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meningkatkan sarana prasarana yang memadai.

N. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

O. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olah raga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 6 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dispora melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itumerupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradasi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

P. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2012–2017 terus mengalami peningkatan di berbagai aspek, diantaranya terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Penanganan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi, terjalinnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal (Polri, TNI, Kejaksaan, Kemenkumham, dan BIN daerah Bangka Belitung). Operasional Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencegahan dini dan deteksi dini untuk menangani terjadinya konflik sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melaksanakan pemantauan terhadap pemilukada Bupati dan wakil Bupati serentak tahun 2015 di 4 (empat) Kabupaten (Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Seklatan dan Belitung Timur). Adapun keterbatasan dari pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain: minimnya anggaran fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), kurangnya sarana penunjang kegiatan intelijen Kesbangpol di lapangan, lemahnya koordinasi kegiatan bersama lintas sektor, dan kurang sinkronnya pelaksanaan program/kegiatan antara Badan Kesbangpol Provinsi dengan Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota dikarenakan persoalan kebijakan pimpinan.

Q. Urusan Pangan

Ketergantungan yang tinggi terhadap pangan dari luar yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat ketahanan pangan daerah masih menjadi permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karenanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan menjadi sangat prioritas untuk dilakukan melalui beberapa aspek seperti: ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local, pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan.

R. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa dan stabilitas Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

S. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal, belum optimalnya pengembangan layanan e-Gov yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan eGov yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) nasional.

T. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengembangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

U. Urusan Statistik

Pada urusan statistic, terutama statistic sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta up-dating data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

V. Urusan Persandian

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas keamanan dan ketertiban yang antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (information assurance)”.

W. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada kendala-kendala antara lain budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat, masih terbatasnya lembaga perpustakaan, sarana dan prasarana termasuk koleksi buku pustaka; dan tenaga pengelola perpustakaan terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

X. Urusan Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Y. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada.

Perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan implementatif dalam arti mempunyai tujuan dan antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif dalam arti menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti Gas Rumah Kaca, SDGs serta muatan yang bersifat spesifik dan kekinian.

Beberapa permasalahan berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain belum optimalnya upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah yang meliputi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

2) Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat beberapa hal mendasar yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah, yaitu: belum optimalnya perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, masih rendahnya pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan dengan masih diperolehnya WDP pada opini pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Belum optimalnya

peningkatan PAD, masih belum terinfonya pendapatan daerah yang diperoleh melalui dana perimbangan pada saat proses penyusunan perencanaan, menyebabkan asumsi pendapatan pada penyusunan APBD sering mengalami ketidaksesuaian dengan kebutuhan belanja daerah.

3) Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karenanya, fungsi pengawasan hendaknya dimulai dari proses perencanaan yang dapat dilakukan melalui reviu terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran.

4) Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, beberapa hal yang harus emndapatkan perhatian antara lain: masih minimnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, belum optimalnya pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan, masih diperlukannya peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi dan masih lemahnya koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

5) Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa hal yang sampai saat ini masih harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah adalah perlunya penyusunan road map SIDA dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDA dan peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pertanian

Fokus urusan pertanian antara lain adalah tingkat ketergantungan Masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok yaitu tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi. BPS mencatat, produktivitas padi pada tahun 2014 sebesar 2,36 ton/ha terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir sementara kebutuhan semakin meningkat, bahkan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi mengemukakan produksi padi tahun 2014 hanya mampu memenuhi 13,16 persen kebutuhan daerah. Begitupula dengan tanaman palawija walaupun beberapa komoditas mengalami peningkatan produksi tetapi pertumbuhannya tidak terlalu besar. Beberapa komoditas palawija dengan peningkatan produksi adalah ketela pohon yaitu 18,57 ton/ha atau naik sebesar 4,42 persen dan kacang tanah 1,08 ton/ha atau naik 2,77 persen, sedangkan komoditas jagung dan ubi jalar relatif stabil dengan produksi masing-masing mencapai 3,36 ton/ha dan 7,79 ton/ha. Peranan sektor tanaman pangan terhadap PDRB masih relatif kecil yaitu 0,51 persen.

Selain itu, beberapa jenis komoditas tanaman hortikultura masih didatangkan dari luar terutama untuk jenis sayur-sayuran. Hal ini disebabkan karena produksi dari komoditas tersebut masih sangat rendah seperti cabe, cabe rawit, tomat, buncis, daun bawang, bayam, bahkan produksi bawang merah hanya 3 ton/ha/th. begitupula untuk buah-buahan lokal, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi yang signifikan terutama duku, nenas, dan pisang walaupun ada yang meningkat seperti durian, mangga dan manggis tetapi produksinya tidak bisa dikatakan tinggi. Selain produksi yang rendah, tidak ada jaminan harga pasar yang pas bila komoditas jenis ini ditanam oleh masyarakat lokal khususnya manggis yang merupakan salah satu komoditas unggulan. Sejauh ini kontribusi tanaman hortikultura terhadap PDRB hanya mencapai 1,98 persen.

Pada tahun 2014 salah satu sektor pertanian yang signifikan berkontribusi terhadap nilai PDRB adalah tanaman perkebunan yang mencapai 8,82 persen. Tiga komoditas unggulan merupakan perkebunan rakyat yaitu lada, kelapa sawit, dan karet. Produksi karet meningkat dibandingkan tahun 2013 menjadi 1,35 ton/ha atau naik 9,3 persen sedangkan produksi lada turun 6,7 persen menjadi 1,53 ton/ha dan kelapa sawit turun 4,1 persen menjadi 3,03 ton/ha. Disamping produktivitas yang cenderung menurun, jenis komoditas ini merupakan komoditas ekspor sehingga harga sangat dipengaruhi oleh pasar dunia dan tidak bisa diprediksi. Perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor menyebabkan harga yang cenderung turun pada tahun 2015 bahkan karet dan kelapa sawit tidak menunjukkan kenaikan harga yang menggembirakan, begitupula dengan lada yang di awal tahun sempat mencapai 180.000 – 190.000 ribu rupiah di tingkat petani tetapi kecenderungannya menurun di akhir tahun menjadi ±150.000 ribu rupiah. Selain harga yang tidak stabil, mata rantai yang terlalu panjang menyebabkan ketimpangan harga yang diterima oleh petani, pengumpul dan pengusaha besar.

Disamping hal-hal diatas, salah satu permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah isu alih guna lahan terutama untuk lahan perkebunan lada dan karet. Aktivitas penambangan baik legal ataupun ilegal akan meninggalkan sekitar 30 persen kolong dan lahan sub optimal yang sulit untuk ditumbuhi dengan baik oleh dua komoditas unggulan ini. Apalagi diidentifikasi kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk menanam kelapa sawit dibandingkan dua komoditas ini hal ini dapat dilihat dari luasnya areal tanam kelapa sawit rakyat yang semakin luas dibandingkan dengan luas area kedua komoditas tersebut.

B. Urusan Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut SK.798/MENHUT-II/2012 2012 tercatat 659.014 Ha dengan rincian menurut Tabel II.60 di bawah ini:

Tabel II.60
Luas Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dari Tahun 2008–2014

Luas Kawasan Hutan	2008 (Ha)	2009 (Ha)	2010 (Ha)	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hutan Produksi	428.181	466.090	466.090	466.090	432.884	432.882,82	432.883,52
Hutan Lindung	195.740.	156.730	156.730	156.730	189.965	189.972,25	189.983,25
Hutan Konservasi	33.589	34.690	34.690	34.690	35.473	35.472,19	35.453,89
Hutan Produksi Konversi	N/A	N/A	N/A	N/A	692	692,59	692,59
Jumlah	461.770	657.510	657.510	657.510	659.014	659.019,85	659.013,52

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

Berdasarkan surat keputusan tersebut tingkat kekritisan lahan pada Hutan Lindung dengan klasifikasi sangat kritis seluas 642,42 ha dan kritis 31.827,59 ha, Hutan Produksi dengan klasifikasi sangat kritis seluas 59.108,74 ha dan kritis seluas 1,48 ha, Hutan Produksi Konversi dengan klasifikasi lahan sangat kritis seluas 257,24 ha, dan Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan klasifikasi sangat kritis 5,55 ha dan kritis 1.136,23 ha. Angka ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor seperti industri, pertambangan dan lainnya.

Berdasarkan data tersebut fokus urusan kehutanan adalah kerusakan kawasan hutan akibat aktivitas penambangan dan perambahan hutan baik legal maupun ilegal, belum jelasnya data mengenai luas kerusakan kawasan hutan yang memang perlu direhabilitasi maupun reklamasi yang telah dilakukan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan serta masalah kepemilikan lahan setelah reklamasi. Selain itu aktivitas perkebunan rakyat dengan cara membakar juga menimbulkan isu lingkungan terutama kabut asap.

Di lihat dari sisi PDRB, kontribusi sektor kehutanan relatif sangat kecil yaitu hanya berkisar 0,34 persen setiap tahunnya hal ini mengindikasikan potensi kehutanan terutama produk ikutannya yang menjual seperti madu pahit dan jamur pelawan belum dioptimalkan sementara kegiatan penebangan kayu untuk junjung maupun pertukangan ditakutkan mengancam keberlanjutan ekosistem hutan tersebut.

C. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang

secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan tanpa migas terhadap PDRB mencapai 12,74 persen. Proporsi terbesar di sumbang oleh pertambangan bijih logam yang mencapai 9,40 persen begitupula dengan industri logam dasar yang memberikan kontribusi sebesar 13,49 persen, tidak mengherankan mengingat timah merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejak berlakunya otonomi daerah terjadi eksploitasi bijih timah secara besar-besaran baik legal maupun ilegal. Berdasarkan data yang bersumber dari PAM PT.Timah jumlah penambangan tanpa izin yang berada di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Timah saja sekitar 1.315 unit. Maraknya penambangan timah ilegal inipun berbanding lurus dengan menjamurnya jumlah smelter timah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, masalah tumpang tindih lahan atas izin usaha pertambangan yang diberikan hingga aktivitas penambangan timah ilegal yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan baik didarat maupun di laut.

Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat memerlukan ketersediaan energi listrik guna mendukung perekonomian daerah. Hingga bulan September tahun 2015, rasio elektrifikasi provinsi sudah mencapai 102,61%, tetapi rasio elektrifikasi desa baru mencapai 99,74%. Sementara itu daya mampu pembangkit sebesar 188.8 MW dengan beban puncak 157 MW, walaupun daya mampu berada diatas beban puncak tetapi untuk kondisi ideal, beban mampu harus 30% diatas beban puncak sehingga bila terjadi kerusakan pada salah satu unit pembangkit maka tidak akan terjadi pemadaman bergilir. Kondisi ini tentunya menjadi faktor penghambat tumbuhnya investasi terutama untuk pengembangan produk hilirisasi dan pengembangan pariwisata.

D. Urusan Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata tahun 2014 terhadap nilai PDRB sebesar 2,27 persen meningkat 0,27% dibandingkan tahun 2013. Beberapa hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal.

Selain itu, kurang dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 285.329 meningkat 19,68 persen dibandingkan

tahun sebelumnya. Tetapi pertumbuhan ini tidak bisa dikatakan tinggi mengingat banyaknya potensi wisata bahari dan wisata budaya yang dimiliki. Disamping itu juga, jarak tempuh dan transportasi menuju tempat wisata menjadi faktor penghambat tumbuhnya kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

E. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan memberikan peranan signifikan terhadap nilai PDRB. Pada tahun 2014 sektor ini berkontribusi sebesar 6,50 persen tetapi dari sisi pertumbuhan melambat dalam lima tahun terakhir. Produksi ikan tangkap sebesar 203.284,40 ton meningkat dibandingkan tahun 2013 tetapi tidak menunjukkan angka yang signifikan begitupula produksi ikan budidaya dengan besaran 4.198,62 ton yang justru mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap maupun budidaya juga menurun 2,89 persen menjadi 19.568 rumah tangga dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, sampai dengan bulan September 2015 kelompok nelayan budidaya hanya berjumlah 127 kelompok nelayan, dari jumlah total tersebut 87% merupakan budidaya air tawar.

Beberapa faktor penghambat antara lain rentang koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di era otonomi daerah ini, belum optimalnya dukungan dana yang dialokasikan pada sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih belum optimalnya penempatan sumber daya manusia yang sesuai latar belakang pendidikan pada dinas teknis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah konflik kepentingan antar sektor, yaitu antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan, khususnya di wilayah laut dan pesisir. Adanya aktifitas penambangan di wilayah laut telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang pada akhirnya berdampak pada nelayan baik dari jumlah tangkapan maupun jarak yang semakin jauh untuk melaut.

F. Urusan Perdagangan

Tantangan di sektor Perdagangan antara lain adalah dengan diberlakukannya AFTA atau pasar bebas maka produk – produk dari luar negeri bebas memasuki pasar dalam negeri sehingga menimbulkan persaingan ketat dalam meningkatkan mutu produk dari barang yang dihasilkan. Masih tingginya persentasi penggunaan dan peredaran UTP yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh karena belum di Tera/ Tera Ulang akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pelaku usaha tentang arti pentingnya Metrologi dalam transaksi perdagangan sehingga di perlukan adanya penyuluhan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai kemetrolgian. Pembentukan UPTD Metrologi di Kab/Kota harus di percepat sehingga pelayanan kemetrolgian dapat lebih merata sampai ke pelosok daerah yang belum terjangkau oleh UPTD Provinsi.

Kelemahan urusan perdagangan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam usaha pembinaan dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan; - Kurangnya profesionalisme aparatur; - Peralatan laboratorium sudah sangat tua; -

Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh lapangan; - Adanya rangkap kewenangan antara pelayanan dan pengawasan pada UPT Metrologi.

G. Urusan Perindustrian

Beberapa isu – isu strategis yang diperkirakan berpengaruh terhadap aktivitas industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Belum ada unit Kerja Kemetrolgian Legal di Daerah Tk. II Kabupaten/Kota.
2. Belum terlaksananya pemisahan kewenangan antara kewenangan pelayanan dengan kewenangan pengawasan.
3. Belum optimalnya pengawasan mutu oleh Laboratorium Penguji Mutu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pengembangan standarisasi belum optimal.
5. Belum tertibnya pelaksanaan ketentuan Ekspor Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Industri pengolahan potensi sumber daya alam masih bersifat hulu.
7. Belum optimalnya pengelolaan / pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Belum terbentuknya *cluster* industri prioritas.

H. Urusan Transmigrasi

Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear and clean*, masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layakdikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya.
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya.
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada.
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi.
5. Membangun keterkaitan antara Kota dan desa di kawasan transmigrasi.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. BPS pun mencatat bahwa pada bulan September 2014 rata-rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi bahan makanan sebesar 534.816 rupiah/bulan atau 48,96% dari total pengeluaran dalam satu bulan. Sementara itu total

pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada Tabel II.61.

Tabel II.61
Angka Konsumsi RT per Kapita
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Total					
1	Pengeluaran RT	17.984.595	20.157.180	22.650.829	25.835.499	29.321.258
2	Jumlah RT	288.432	292.332	296.332	298.971	314.339*
3	Rasio	62.35	68.95	76.43	86,41	93,28

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2015

* Statistik PLN 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa konsumsi rumah tangga masyarakat Kepulauan Bangka Belitung meningkat signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, pengeluaran konsumsi rumah tanggameningkat sebesar 13,49 persen dibandingkan tahun 2013.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. Rasio nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.62.

Tabel II.62
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	107,69	117,57	121,70	123,52	118,81	122,06
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	112,43	118,55	122,73	122,89	116,18	107,45
3	Rasio	0,96	0,99	0,99	1,01	1,02	1,14

Sumber: BRS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui NTP mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2015 meningkat sebesar 11 persen dibandingkan tahun 2014. Naiknya nilai NTP ini menunjukkan daya beli petani di pedesaan jugasemakin tinggi. Naiknya NTP menunjukkan indeks harga yang diterima petani (It) meningkat sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) menurun. Meningkatnya It didukung oleh naiknya It subsektor pertanian yaitu perkebunan rakyat, hortikultura, pangan dan peternakan sedangkan turunnya Ib disebabkan oleh kecenderungan menurunnya indeks konsumsi rumah tangga.

C. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan tentang konsumsi rumah tangga non pangan per keluarga. Konsumsi non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.63.

Tabel II.63
Rasio Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Total pengeluaran RT non pangan	9.527.726	10.844.985	12.265.354	14.068.305	15.974.051
2.	Total pengeluaran	17.984.595	20.157.180	22.650.829	25.835.499	29.321.258
3.	Rasio	1,88	1,86	1,85	1,84	1,84

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2014 pengeluaran rumah tangga untuk non pangan mengalami peningkatan 13,55 persen dibandingkan tahun 2013 walaupun rasionya relatif samadan cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tabel diatas juga menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan mencapai 54,48 persen lebih tinggi dari pada konsumsi pangan.

D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.64.

Tabel II.64
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	1.110	4.604	2.061	19.664	12.532
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	13	5	17	39	40
3	Rasio daya serap tenaga kerja	85,38	920,80	121,23	504,20	313,30

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.65.

Tabel II.65
Rasio Luas Wilayah Produktif
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	12.350 Ha	282.719 Ha	0.04
2	Kabupaten Bangka Barat	15.560 Ha	266.501 Ha	0.06
3	Kabupaten Bangka Selatan	18.155 Ha	342.553 Ha	0.05
4	Kabupaten Bangka Tengah	23.741 Ha	188.895 Ha	0.13
5	Kabupaten Belitung	46.225 Ha	183.144 Ha	0.25
6	Kabupaten Belitung Timur	40.709 Ha	269.982 Ha	0.19
7	Kota Pangkalpinang	-	11.880 Ha	0.00
Jumlah		156.740 Ha	1.485.674 Ha	0.11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

B. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.66.

Tabel II.66
Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2015

No	Infrastruktur	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,60	4,07	4,25	5,83	3,21	3,08
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	22	22	26	26	26	26
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	75	75	100	100
4.	Persentase Penduduk berakses air minum	15,02	15,19	29,29	64,98	46,22	55,46
5.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	65,69	69,9	69,13	67,95	80,96	88,97
6.	Persentase rumah tangga yang	48,06	62,76	92,81	80,96	88,96	87,80

No	Infrastruktur	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	menggunakan listrik						
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,67	0,61	0,65	0,66	0,68	0,75
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,87	0,84	0,93	0,95	0,90	0,94

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Tindak Kriminalitas

Jumlah kejadian tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2012 terdapat 2.625 kasus kriminal, pada tahun 2015 tercatat ada 2.478 kasus. Berdasarkan jenis kejahatan, kasus yang paling kerap terjadi antara lain narkotik dan obat-obatan terlarang (narkoba), pencurian, penipuan dan kejahatan seksual. Kasus paling dominan adalah penyalahgunaan narkoba. Terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2012 (Tabel II.58). Posisi geostrategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memungkinkan akses masuk barang (legal maupun ilegal) dari berbagai titik masuk. Selain itu peredaran narkoba yang cenderung masif di dalam maupun luar daerah, memerlukan perhatian serius. Tindak kriminalitas mempengaruhi secara langsung keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan pada umumnya merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Tabel II.67

Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) menurut Jenis Kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012-2016

No	Jenis Kriminalitas	Tahun									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	172	157	180	158	188	197	227	192	107	54
2	Pembunuhan	9	6	9	5	9	8	9	10	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	seksuaal	51	12	42	39	40	28	58	55	22	13
5	Penganiayaan	205	73	133	91	73	46	88	53	25	8
6	Pencurian	188	72	166	65	148	71	188	77	71	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	18	3	9	4	3	2	8	6	6	2
9	Penipuan	146	78	156	52	182	82	124	63	81	20
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Pembakaran	5	1	7	6	9	9	15	8	3	0
12	Penyelundupan	0	0	3	3	5	5	5	4	3	0
13	Lain-lain	1831	1027	1949	1262	1501	834	1756	1021	495	182
Total		2625	1429	2654	1685	2158	1282	2478	1489	816	302

*Data sampai dengan bulan Mei 2016

Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung, 2016

B. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.59. Pada Bidang Politik, terjadi peningkatan cukup tajam pada jumlah demonstrasi yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dari data jumlah demonstrasi per Mei 2016 sudah tercatat ada 12 demonstrasi. Padahal sepanjang tahun lalu, dimana dilaksanakan pemilihan kepala daerah (bupati) secara serentak di 4 (empat) Kabupaten, tercatat total terjadi 3 (tiga) demonstrasi saja. Pada tahun 2017 terdapat agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian perlu kesiapan dan berbagai upaya agar kontestasi politik tetap berjalan dalam suasana yang kondusif. Pada Bidang Ekonomi juga perlu diwaspadai meningkatnya ketidakpuasan masyarakat yang diungkapkan melalui demonstrasi. Terdapat kasus pemogokan kerja sampai dengan tahun 2015 dan diharapkan melambatnya ekonomi hingga saat ini tidak sampai berakibat pada pemogokan kerja.

Tabel II.68
Jumlah Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bidang politik	2	1	5	3	12
2	Bidang Ekonomi	8	7	10	24	15
3	Pemogokan kerja	4	1	2	3	-
4	Jumlah unjuk rasa	14	9	17	30	27

*Data sampai dengan bulan Mei 2016

Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung, 2016

C. Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi

para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

D. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Dasar hukum pengenaan pajak antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomer 34 Tahun 2000 dan UU Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tabel II.69

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013-2015

URAIAN	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pajak Kendaraan Bermotor	151.034. 970.754,20	149.719. 572.524,00	155.769. 428.882,00	162.036. 291.096,00	157.552. 961.226,00	172.239. 977.887,00
Bea Balik Nama Kend. Bermotor	143.964.317. 500,00	154.884.483. 572,00	134.458.011. 317,00	139.175.293. 731,00	118.085.668. 781,00	110.239.080. 050,00
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	135.136.441. 670,00	139.313.507. 235,30	156.222.691. 663,46	163.479.972. 233,53	157.685.218. 641,98	165.429.315. 662,00
Pajak Air Permukaan	3.171.787.33 6,88	3.544.635.70 0,98	3.450.862.67 3,28	4.036.065.90 8,35	3.608.467.05 3,84	4.680.319.82 4,22
Pajak Rokok	-	-	49.302.000.0 00,00	39.534.993.9 27,00	63.911.698.6 69,00	54.176.241.1 37,00

Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

E. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Salah satu implikasi dari otonomi daerah adalah kemunculan banyak peraturan daerah (perda) baru yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Yang menjadi persoalan, banyak perda yang dibuat *grusa-grusu* atau berwawasan sempit, sehingga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Lebih penting dari itu, banyak di antara ratusan bahkan ribuan perda baru di berbagai kota, kabupaten dan provinsi yang dinilai memberatkan pengusaha, sehingga menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan otonomi, daerah berlomba-lomba meningkatkan PAD dengan membuat perda-perda baru. Justru karena itulah kemudian timbul masalah, karena selain kurang adanya pengawasan juga lemah dalam koordinasi. Mereka hanya melihat kepentingannya, seakan tidak peduli pada daerah lain atau pun peraturan yang ada di pusat. Proses yang terlalu cepat cenderung mengabaikan aturan serta dampak negatif lain. Ada beberapa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendukung iklim usaha antara lain :

- a. Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera.
- b. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan.
- c. Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel.
- d. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Babel.
- e. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan BUMD Pt. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung.
- g. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
- h. Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam proses percepatan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah memberikan gambaran secara tidak langsung terhadap kualitas daerah. Rasio tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan seperti ditampilkan pada Tabel II.70.

Tabel II.70
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	18.106	27.797	28.822	1.940	3.217
2.	Jumlah penduduk	1.223.296	1.261.737	1.298.168	1.315.123	1.343.881
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	0.0148	0.0220	0,0222	14.751	23.938

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Berdasarkan Tabel II.70 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2010 dan mengalami penurunan pada tahun 2011, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2012 seperti terlihat pada tabel II.71 berikut.

Tabel II.71
Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	360.592	190.699	382.658	369.912	377.995
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	44.629	21.063	47.360	49.520	50.602
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	405.221	211.762	430.018	419.432	428.597
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	818.075	1.049.975	868.330	895.691	915.284
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	0,495	0,202	0,331	0,468	0,468

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kondisi ideal terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Pentahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana

pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah:

- a) Gagal dalam proses lelang.
- b) Duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain, sehingga beberapa kegiatan APBD tidak dilaksanakan.
- c) Terbatasnya waktu pelaksanaan
- d) Belum selesainya dokumen perencanaan, seperti DED, kajian lingkungan.
- e) Belum sepakatnya isi substansi dari beberapa Perda, sehingga beberapa perda belum ditetapkan.
- f) Belum selesainya pembebasan lahan.
- g) Akibat kondisi geografis dan cuaca.
- h) Akibat terlambatnya pasokan material dari luar daerah/luar negeri.
- i) Adanya perubahan dan pelepasan kepemilikan aset.
- j) Berkurangnya peserta diklat atau pelatihan yang hadir.
- k) Berkurangnya klaim terhadap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan.
- l) Selain itu juga terdapat sisa-sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sector/lintas instansi/lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan proiritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPd sampai tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel II. 72 dibawah ini yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana capaian target program kegiatan sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD 2012-2017.

Tabel II. 72

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
01	WAJIB										
01 01	PENDIDIKAN										
01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini										
		APK PAUD	50,04%	19,22%	31,87%	31,87%	100%	37,97%	37,97%	75,88%	DINDIK
		Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA Terakreditasi min B)	2	1	1	1	100%	2	2	100,00%	DINDIK
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
		APK SD/MI	116,26%	116,22%	116,23%	116,23%	100%	116,26%	116,26%	100,00%	DINDIK
		APK SMP/MTs	97,96%	92,38%	94,63%	99,77%	105%	95,75%	95,75%	97,74%	DINDIK
		APM SD/MI	97,00%	95,07%	95,84%	97,01%	101%	96,23%	96,23%	99,21%	DINDIK
		APM SMP/MTs	84,00%	64,35%	72,21%	72,21%	100%	76,14%	76,14%	90,64%	DINDIK
		Angka DO SD/MI	0,30%	0,45%	0,39%	0,39%	100%	0,36%	0,36%	83,33%	DINDIK
		Angka DO SMP/MTs	0,40%	1,21%	0,72%	0,72%	100%	0,60%	0,60%	66,67%	DINDIK
		Persentase Kelulusan SD/MI	100,00%	93,58%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	DINDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase Kelulusan SMP/MTs	99,35%	98,32%	99,86%	99,86%	100%	99,27%	99,27%	99,92%	DINDIK
		Angka Melanjutkan SD/MI	100,00%	96,20%	97,72%	97,72%	100%	100%	100%		DINDIK
		Angka Melanjutkan SMP/MTs	100,00%	94,32%	99,54%	99,54%	100%	99,27%	99,27%	99,27%	DINDIK
		Angka Mengulang SMP/MTS	0,45%	0,79%	0,70%		100%	0,62%	0,62%	0,62%	DINDIK
		Angka Mengulang SD/MI	4,00%	7,74%	6,81%		100%	5,87%	5,87%		DINDIK
01 01 18	Program Pendidikan Non Formal										
		Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C			8.452			9.172	9.172		DINDIK
		Angka Buta Aksara	2,50%	4,37%	3,60%	3,60%	100,00%	3,25%	3,25%		DINDIK
		Persentase Kelulusan UNPK	78,00%	60,00%	86,40%						DINDIK
		Persentase Pengangguran Terlatih	19,23%	15,21%	17,88%	17,88%	100,00%	18,31%	18,31%		DINDIK
01 01 22	Program Manajemen Layanan Pendidikan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel	2 Dok	2 Dok	2 Dok			2 Dok	2 Dok		DINDIK
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan	4 Dok	4 Dok	4 Dok			3 Dok	3 Dok		DINDIK
		Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	3 Dok	3 Dok	3 Dok			3 Dok	3 Dok		DINDIK
01 01 28	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi										
		APK SMA/MA/SMK	95,95%	76,25%	84,14%	84,14%	100,00%	89,60%	89,60%		DINDIK
		APM SMA/MA	75,00%	47,66%	58,60%	58,60%	100,00%	61,06%	61,06%		DINDIK
		Angka DO SMA/MA	0,31%	2,52%	1,26%	1,26%	100,00%	1,66%	1,66%		DINDIK
		Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA	99,00%	98,65%	99,90%	99,90%	100,00%	99,43%	99,43%		DINDIK
		Angka Mengulang Pendidikan Menengah	0,60%	0,90%	0,83%	0,83%		0,75%	0,75%		DINDIK
		Persentase Kelulusan Siswa SMK	99,00%	98,20%	99,90%	99,90%	100,00%	99,70%	99,70%		DINDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Siswa Miskin Berprestasi yang melanjutkan	750 Org	0	159 Org						DINDIK
02	WAJIB										
2 2 1	KESEHATAN										
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
		Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota.	100	101	100			100	100	100%	Dinkes
2 2 2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
		Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU)	27	36	33			31	31	115%	Dinkes
		Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU)	98	96,6	97			97,5	97,5	99%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Dasar (IKU)	28	36	33			31	31	111%	Dinkes
		Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM)	100		100			100	100	100%	Dinkes
2 2 3	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
		Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU)	70		60			60	60	85,71%	Dinkes
		Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU)	40		28			30	30	75,00%	Dinkes
2 2 4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentasi Belita Yang ditimbang Berat Badan (IKU)	78		60			65	65	83,33%	Dinkes
2 2 5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU)	90		80			85	85	94,44%	Dinkes
		Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas	74		64			68	68	91,89%	Dinkes
2 2 6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
		Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU)	1	3,75	3			2	2	200,00%	Dinkes
		Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU)	46	24,11	52			51	51	110,87%	Dinkes
		Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU)	10	7,15	10			10	10	100,00%	Dinkes
		Persentase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan	90		90			90	90	100,00%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 2 8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100		100			100	100	100,00%	Dinkes
2 2 9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.										
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku)	100		100			100	100	100,00%	Dinkes
2 2 11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										
		Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)	9,7		6,8			7,5	7,5		Dinkes
		Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)	34,4		28,2			29,7	29,7		Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)	337,6		264,2			282,5	282,5		Dinkes
		Rasio Bidan per 100.000 penduduk (IKU)	96		75,8			80,8	80,8		Dinkes
2 2 12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	28	9,54	33			31	31	111%	Dinkes
2 2 13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase)	100	43	80			85	85	85,00%	Dinkes
2 2 14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	85	51	65			70	70	82,35%	Dinkes
2 2 15	Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak										
		Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU)	27	36	33			31	31	115%	Dinkes



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	28	36	33			31	31	111%	Dinkes
2 2 16	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU)	100	101	100			100	100	100%	Dinkes
2 2 17	Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS))	100	71	60			100	100	100%	Dinkes
2 2 18	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes	1). Cakupan pelayanan Laboratorium	95	71	75			80	80	84%	Dinkes
2 2 19	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan										
		Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)	9,7	6,2	6,8			7,5	7,5	77%	Dinkes
		Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)	34,3	26,8	28,2			29,7	29,7	87%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)	337,6	245,9	264,2			282,5	282,5	84%	Dinkes
		Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU)	96	70,8	75,8			80,8	80,8	84%	Dinkes
2 2 20	Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana	100	101	100			100	100	100%	Dinkes
02	WAJIB										
2 2 1	KESEHATAN										
2 2 2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
		Tersedianya Jasa Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis	265	266	265			265	265	100%	RSJ
		Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien	95	77	80			85	85	89%	RSJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	22	15	16			18	18	82%	RSJ
		Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial	500	351	385			420	420	84%	RSJ
		Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak	170	151	155			160	160	94%	RSJ
		Jumlah Pelayan Rumah Sakit	25	21	20			22	22	88%	RSJ
2 2 7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
		Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI))	50% (Madya)	6 pelayanan	25% (Pratama)			37,50%	37,50		RSJ
		Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima	100% (BLUD Penuh)								RSJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun	7		4			5	5	71,43%	RSJ
		Jumlah Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima	1								RSJ
		Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit	1								RSJ
2 2 9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.										
		Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan	60		45			50	50	83,33%	RSJ
		Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia	85		70			75	75	88,24%	RSJ
		Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	45		40			40	40	88,89%	RSJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Gudang Obat/apotik									RSJ
		Jumlah Ruang Terapi Yang Dikembangkan	2								RSJ
		Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit	1								RSJ
		Jumlah Gedung Dapur Bersih	1								RSJ
		Jumlah Gedung Trauma Center	1								RSJ
		Jumlah Ruang Laboratorium	2								RSJ
		Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit	1								RSJ
		Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi	5		1			1	1	20,00%	RSJ
		Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit	1								RSJ
		Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis	1								RSJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi	1								RSJ
		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	1					1	1	100,00%	RSJ
		Jumlah Billing Sistem Yang Tersedia	1		1						RSJ
		Jumlah Ruang Rawat Inap Yang Dikembangkan	2		1						RSJ
		Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan	2		1						RSJ
		Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun	1		1						RSJ
2 2 10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit	1		1	0		1	1	100%	RSJ
		Jumlah Pemeliharaan Rutin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit	1		1			1	1	100%	RSJ
		Jumlah Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah	1		1						RSJ
		Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara	3		3			3	3	100%	RSJ
		Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan terkalibrasi	3		3			3	3	100%	RSJ
	WAJIB										
	PEKERJAAN UMUM										
2 3 1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan										
		Jalan yang terbangun	12,00	100%	3 km			3 km	3,00	25,00%	Dinas PU
		Jembatan yang terbangun sepanjang 366 meter	1.870,00		375 km			374,00	374,00	20,00%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Peningkatan jalan dan jembatan provinsi sepanjang 53,61 km	125,00		25 km			25,00	25,00	20,00%	Dinas PU
2 3 2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan provinsi yang terpelihara dengan baik	874,33 km	Pemeliharaan jalan sepanjang 816.2 km	874,33 km			874,33 km	874,33 km	100%	Dinas PU
2 3 3	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan			-							
		Terpeliharanya jalan/jembatan yang dilakibatkan bencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat	3,00	100%	1 unit			1 unit	1,00	33,33	Dinas PU
2 3 4	Program Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan	Tersedianya dokumen database jalan dan jembatan provinsi	7 Dokumen dengan 24,19% total panjang jalan provinsi	4 dokumen dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi	1 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	29%	Dinas PU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 3 5	Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan	1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium	31 % alat-alat berat dan alat laboratorium	2 unit alat-alat berat alat lab			2 unit alat-alat berat alat lab	2 unit alat-alat berat alat lab	100%	Dinas PU
2 3 6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan	7.572	1.000 Ha	1,214 Ha			1,429 Ha	1,429 Ha	19%	Dinas PU
2 3 7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Terwujudnya layanan air baku untuk air minum	75 Ha	6 Ha	15 Ha			20 Ha	20 Ha	27%	Dinas PU
2 3 8	Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air	98 Ha	5 Ha	16 Ha			20 Ha	20,00	#VALUE!	Dinas PU
2 3 9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah	Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah	Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20%	3 kws di 20 ksk/ksp/ksn			3 kws di ksk/ksp/ksn	3 kws di ksk/ksp/ksn	100%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 3 10	Program Pengendalian Banjir	Terwujudnya sistem pengendalian banjir	52.515 M ²	2.000 M ¹	10,938 M			8,099 M	8,099 M	15%	Dinas PU
2 3 11	Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersedia infrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial	3 kws di ... ksk/ksp/ksn	Jumlah Jaringan jalan di kws strategis, khusus dan potensial 35% kws minapolitan/agropolitan, KEK dll	3 kws di 20 ksk/ksp/ksn			3 kws di ... ksk/ksp/ksn	3 kws di ... ksk/ksp/ksn	100%	Dinas PU
2 3 12	Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan	Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan									
			6 kws di 3 kab	Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45%	2 kws di 3 kab			2 kws di 3 kab	2 kws di 3 kab	100%	Dinas PU
			35 desa	Luas kawasan kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 %	35 desa			35 desa	35 desa	100%	Dinas PU
			10 desa di 6 kab	Jumlah Desa terlayani air minum 45%	30 desa di 6 kab			30 desa di 6 kab	30 desa di 6 kab	100%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
			6 desa/6 kab	Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30%	10 desa di 6 kab			10 desa di 6 kab	10 desa di 6 kab	100%	Dinas PU
			6 desa/6 kab	Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45%	6 desa/6 kab			6 desa/6 kab	6 desa/6 kab	100%	Dinas PU
	URUSAN WAJIB										
	PERUMAHAN										
2 4 1	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan	Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	135 unit di 7 kab/kota	terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani	135 unit di 7 kab/kota			135 unit di 7 kab/kota	135 unit di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
2 4 2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR	7 kws di 7 kab/kota	terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan sanitasi	7 kws di 7 kab/kota			7 kws di 7 kab/kota	7 kws di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
2 4 3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terwujudnya sapsras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat	50 desa di 7 kab/kota	terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapsras perumahan dan permukiman	50 desa di 7 kab/kota			50 desa di 7 kab/kota	50 desa di 7 kab/kota	100%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 4 4	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Tertanganinya lingkungan perumahan dan kws permukiman yang terkena dampak bencana alam/sosial	7 kws di 7 kab/kota	terdapat perumahan dan kws permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana	7 kws di 7 kab/kota			7 kws di 7 kab/kota	7 kws di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
01 07	URUSAN WAJIB										
	PERUHUBUNGAN										
2 7 1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
		Pengembangan pelabuhan tanjung belikat			1.000						DISHUB
		Pengembangan pelabuhan tanjung batu			1.000						DISHUB
		Pengembangan status bandara depati amir menjadi internasional	Tersedianya kajian pengembangan bandara dan penambahan area		1.000			peluasan lahan untuk bandara			DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Bangka Belitung	Pemenuhannya pelabuhan pengumpul dan pengumpan		750 persiapan pengembangan pelabuhan			750 persiapan pengembangan pelabuhan	750 persiapan pengembangan pelabuhan		DISHUB
		Riontisan pengadaan angkutan laut	terpenuhinya angkutan laut hingga 55%		45			50	50		DISHUB
2 7 2	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ										
		Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%		Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi			Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi	Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi	100%	DISHUB
					pemeliharaan rutin 2 (dua) jembatan timbang			pemeliharaan rutin 2 (dua) jembatan timbang	pemeliharaan rutin 2 (dua) jembatan timbang	100%	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Tersedianya angkutan umum yang nyaman dan memenuhi standar	Tersedianya angkutan massal sebanyak 18 unit		Peremajaan angkutan massal 4 unit			Peremajaan angkutan massal 4 unit	Peremajaan angkutan massal 4 unit	100%	DISHUB
		Peningkatan fasilitas pelayanan angkutan umum AKDP dan AKAP	Tersedianya terminal terpadu sebanyak 2 terminal dan pengembangan terminal AKDP sebanyak 3 terminal		Evaluasi kinerja terminal AKDP dan penetapan terminal terpadu			Pengembangan terminal AKDP 2 kab	Pengembangan terminal AKDP 2 kab	100%	DISHUB
		Peningkatan pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan setiap tahun	Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 70%		Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55%			Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 60%	Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 60%	100%	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Peningkatan kualitas pemeriksaan dan pengawasan terhadap kelebihan muatan angkutan barang	Pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang dalam keadaan baik		pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang			pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang	pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang		DISHUB
2 7 3	Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan										Dinas Perhubungan
		Pembangunan terminal	Terlaksananya pembangunan terminal di 7 kab/kota		Peningkatan status terminal yang ada			Peningkatan status terminal yang ada	Peningkatan status terminal yang ada	100%	DISHUB
		pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk	Terpenuhinya dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk hingga 35%		25			30	30	100%	DISHUB
		Rehabilitasi dermaga tukak sadai	Rehabilitasi dermaga tukak sadai hingga 100%					Dermaga tukak sadai	Dermaga tukak sadai	100%	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		peningkatan pelabuhan beserta pembanguna sarana penunjang pelabuhan tanjung batu	Peningkatan pelabuhan beserta pembanguna n sarana penunjang pelabuhan tanjung batu hingga 100%		90			95	95	100	DISHUB
		Pengembangan bandara depati amir			100					100	DISHUB
1.08.1.08.02	URUSAN WAJIB										
	LINGKUNGAN HIDUP										
1.08.1.08.02.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
		Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan	7 Kab/Kota	1 kab/kota	4 Kab/Kota			5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	71%	BLHD
		Cakupan pelayanan persampahan	3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel	35% TPA Regional yang belum mendapat penanganan (sharing pemerintah pusat)	Lanjutan penyelesaian n 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel			Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel	Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel	100%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1.08.1.08.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup										
		Terpantaunya status mutu air	7 smbr air	3 smbr air	4 smbr air	7 smbr air	175%	5 smbr air	9 smbr air	180%	BLHD
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup	18 org	9 org	12 org	7 org	58%	14 org	6 org	43%	BLHD
		Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat	1500 org	241 org	750 org	780 org	104%	1000 org	0 org	0%	BLHD
		Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	18 kasus	1 kasus	5 kasus	5 kasus	100%	3 kasus	7 kasus	233%	BLHD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL	50 keg	7 keg	25 keg	14 keg	56%	35 keg	16 keg	46%	BLHD
		Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota	100%	7 kab/kota	0 kab/kota	0%	BLHD
		Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL	45 keg/usaha	19 keg/usaha	30 keg/usaha	7 keg/usaha	23%	35 keg/usaha	0	0%	BLHD
		Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	BLHD
1.08.1.08.02.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
		Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	8 jaringan	1 jaringan	4 jaringan	0 jaringan	0	6 jaringan	0 jaringan	0%	BLHD
		Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	BLHD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam	terbentuknya dan beroperasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam	terbentuknya 1 unit KPHP model di bangka tengah	terbentuknya 2 unit KPHP model di bangka tengah			terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka	terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka	100,00%	DISHUT
1.08.1.08.02.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya status mutu udara	7 Kota	2 kota	4 kota	7 kota	175%	5 kota	7 kota	140%	BLHD
1.08.1.08.02.19	Program pengelolaan ruang terbuka hijau										
		Tingkat kualitas lingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu	14 KSP (30%)	1 KSP (0%)	RTH 4 KSP			RTH 4 KSP	RTH 4 KSP	28,57%	Dinas PU
		7 Kab/Kota	1 kab/kota	1 kab/kota	0 kab/kota	0%	1 kab/kota	0kab/kota	0%	7 Kab/Kota	BLHD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
11	URUSAN WAJIB										
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1 11 20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat										
		Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)		4,6% (2 dari 43 SKPD)	4,6% (2 dari 43 SKPD)	100%	9,3% (4 dari 43 skpd)	9,3% (4 dari 43 skpd)	50%	BPPKBPA
		Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	23,3 % (10 dari 43 SKPD)	16,3 % (7 dari 43 SKPD)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)	100%	18,6% (8 dari 43 skpd)	18,6% (8 dari 43 skpd)	80%	BPPKBPA
		Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	32 Instansi	30 Instansi	30 Instansi		100%	30	30	94%	BPPKBPA
1 11 21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan		100%	1 kebijakan	1 kebijakan	100%	BPPKBPA
		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	6,06%	5,90%	5,96%	5,96%	491,36%	5,99%	5,99%	99%	BPPKBPA
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	6,54%	6,17%	6,31%	6,31%	381,30%	6,38%	6,38%	98%	BPPKBPA
1 11 22	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak										
		Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak	3 kebijakan	1 kebijakan	3 kebijakan		100%	2 kebijakan	2 kebijakan	67%	BPPKBPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	11 instansi	11 instansi	11 instansi		100%	11 instansi	11 instansi	100%	BPPKBPA
		Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	2 Kab/Kota	0	1 Kab/Kota		100%	1 kab/kota	1 kab/kota	50%	BPPKBPA
1 11 23	Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga										
		Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan		100%	1 kebijakan	1 kebijakan	100%	BPPKBPA
		Tingkat prevalensi peserta KB aktif	78,76%	81,62%	78,72%	78,72%	100%	78,73%	78,73%	100%	BPPKBPA
		Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	10,69%	12,03%	12,69%	12,69%	100%	12,19%	12,19%	114%	BPPKBPA
1 01 3	URUSAN WAJIB										
	BIDANG SOSIAL										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 01 26 3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial										
		Persentase pmks penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jasmani sosial		14.745 orang	550 orang			550 orang	550 orang	7%	Dinkesos
		Persentase desa yang di interpendi program		6,70%	10,3%			10,3%	10,3%		Dinkesos
		Persentase kelurahan yang 10% intervensi program		106%	10			10%	10%		Dinkesos
1 01 27 3	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan										
		Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan									Dinkesos

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial									Dinkesos
		Persentase desa yang diintervensi program									Dinkesos
		persentase kelurahan yang diintervensi program									
1 01 27 3	Program Rehabilitasi Sosial		1.475								
		Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial	7,375 orang		1,474 orang			1,475 orang	1,475 orang		Dinkesos
		Persentase desa yang diintervensi program			6,7%			6,7%	6,7%	-	Dinkesos



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase kelurahan yang di intervensi program			6			6%	6%		Dinkesos
X X2 1	URUSAN WAJIB										
	KETENAGAKERJAAN										
2 14 1	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja										
		Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing		1	60			60	60		Disnakertrans
		Jumlah peserta pemagangan Perusahaan.		1	100			100	100		Disnaker trans
		Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri.		1	50			50	50		Disnaker trans
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompetensi	1000 orang	1001 Org	200 orang			200 orang	200 orang	20%	Disnaker trans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru (pasca lulusan pelatihan BLKI)	800 orang	801 Org	160 orang			160 orang	160 orang	18,73%	Disnaker trans
		Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	700 orang	701 Pelaku Usahadi 35 Desa	140 orang			140 orang	140 orang	20%	Disnaker trans
		Pembinaan Desa Produktif	35 desa	36 desa 701 orang	7 desa 140 org			7 desa 140 org	7 desa 140 org	100,00%	Disnaker trans
2 14 2	Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja										Disnaker trans
		Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan	750 orang		150 orang			150 orang	150 orang	20,00%	Disnaker trans
		Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pendesaan dan perkotaan	750 orang		150 orang			150 orang	150 orang	20,00%	Disnaker trans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna	750 orang		150 orang			150 orang	150 orang	20,00%	Disnaker trans
		Pemberdayaan pendamping tenaga -kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga	100 orang		20 orang			20 orang	20 orang	20,00%	Disnaker trans
2 14 3	Program Pengembangan HI dan Jamsostek										Disnaker trans
		Jumlah PP yang disahkan	660 PP		70 PP			105 PP	105 PP	15,91%	Disnaker trans
		Jumlah perajian kerja bersama (PKB) yang terdaftar	554 PKB		70 PKB			105 PKB	105 PKB	18,95%	Disnaker trans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan di tempat kerja	765 Prshn		70 PKB			105 PKB	105 PKB	13,89%	Disnaker trans
		Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) rintip diperusahaan	475 Prshn		80 Prshn			90 Prshn	90 Prshn	18,95%	Disnaker trans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Pembinaan lembaga kerjasama (LKS) tripartif di kab/kota	7 kab/kot		7 kab/kota			7 kab/kota	7 kab/kota	100,00%	Disnaker trans
		Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar Pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama	75%		75			75	75	100,00%	Disnaker trans
		Jumlah Tk yang bekerja dalam hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek	50,356 Tk		350 Tk			350 Tk	350 Tk	0,70%	Disnaker trans
		Jumlah TK luar hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek	1000 Tk		200 Tk			200 Tk	200 Tk	20,00%	Disnaker trans
		Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah	865 Prshn		35 Prshn			35 Prshn	35 Prshn	4,05%	Disnaker trans



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 14 4	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sitem Pengawasan Ketenagakerjaan										Disnaker trans
		Jumlah pekerja anak yang ditarik BPTA	500 anak		100 anak			100 anak	100 anak	20,00%	Disnaker trans
		Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak	50%		10			10	10	50,00%	Disnaker trans
		Kerjasama penerapan norma kerja perempuan dan anak	50%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	20,00%	Disnaker trans
		Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan	55%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	18,18%	Disnaker trans
		Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja	50%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	20,00%	Disnaker trans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat	70%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	14,29%	Disnaker trans
		Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (jk dan jkk)	100%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	10,00%	Disnaker trans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	60%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	16,67%	Disnaker trans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, berjana tekan, listrik, konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran	50%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	20,00%	Disnaker trans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya	70%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	14,29%	Disnaker trans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Kualitas teknis pemeriksa norma ketenagakerjaan	85%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	11,76%	Disnaker trans
		Kerjasam lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan	100%		naik 10%			naik 10%	naik 10%	10,00%	Disnaker trans
2 14 5	Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Persentase instrastuktur yang terbangun	100%		17			19	19	19%	Disnaker trans
2 14 6	Program Perencanaan Tenaga Kerja										Disnaker trans
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD	95%		60			70	70	70%	Disnaker trans
0 2	URUSAN WAJIB										
2 4	PENATAAN RUANG										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 2 4 1	Program Perencanaan Tata Ruang	Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unit review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj, Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Fasilitas Percepatan Legislasi RTRW Kab/Kota	2 RDTR KSP			1 RDTR KSP & 2R Semua KSP	1 RDTR KSP & 2R Semua KSP	100%	BAPPEDA
1 2 4 2	Program Pemanfaatan Ruang	Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1	Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek	Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona laut			Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut	Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut	100%	BAPPEDA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 2 4 3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung	40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota	6 PPNS Prov. Kep. Babel/Kab/ Kota	Peningkatan kapasitas 40 PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR			Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR	Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR	100%	BAPPEDA
0 10	URUSAN WAJIB										
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
1 06 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah										
		a). Tersedianya Perda/Pergub mengenai laporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah dalam lingkup SKPD Provinsi	1 Perda/Pergub terkait Pelaporan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah		1 Perda/Pergub	1 Perda/Pergub					BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		b). Tersedianya Sistem Pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah berbasis IT pada beberapa sektor pelaporan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2008	Tersedianya Sistem Pelaporan berbasis e-government terhadap pelaporan penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah					1 Sistem Pelaporan e-Government			
		c). Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutakhiran Sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan	Selarasnya instrumen Evaluasi Pelaporan dengan Dokumen Perencanaan yang baru								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 06 16	Program Kerjasama Pembangunan										
		-	kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta	4 (tiga) kerjasama antarprovinsi	2 (dua) kerjasama	2 (dua) kerjasama		penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	BAPPEDA
1 06 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh										
		Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh	data dan kebijakan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya data wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya roadmap dukungan Prov. Kep. Bangka Belitung dalam pelaksanaan MP3EI Koridor Sumatera			Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh	Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh	100%	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis	-	1(satu) Perda RTR	1(satu) Perda RTR		Perda RTR Kawasan Strategis	Perda RTR Kawasan Strategis	100%	BAPPEDA
1 06 20	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Jumlah kebijakan bidang perekonomian									BAPPEDA
1 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	22 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	22,73%	BAPPEDA
1 06 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi										
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	23 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	5 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	26,09%	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
06 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	5 dokumen		3 dokumen	3 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100%	BAPPEDA
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 27	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana										
		Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk	100%	114%	42%			56%	56%	56%	BPBD
		Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	200%	100%			100%	100%	100%	BPBD
2 20 28	Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana	100%	200%	100%			100%	100%	100%	BPBD
		Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana	100%	125%	50%			75%	75%	75%	BPBD
		Rasio Relawan dengan jumlah penduduk di daerah rawan bencana	75%	105%	20%			40%	40%	53%	BPBD
2 20 29	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana										
		Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon	50%	100%	20%			30%	30%	60%	BPBD
		Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana	70%	100%	30%			40%	40%	57%	BPBD
1 15	URUSAN WAJIB										
	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH										
1 15 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif										Dinas KUMKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM			-	-	-				
1 15 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah ragam kemasan KUMKM	9 Jenis	2 Jenis					2 jenis		Dinas KUMKM
		Meningkatnya jumlah usaha menengah, kecil dan mikro			-						
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah										Dinas KUMKM
		Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan	Kredit Perbankan=2,60T, dana BUMN/CSR=28M, Daba Pemerintah=70M, dana LPDB=2M	kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M	kredit perbankan=2,60T, dana BUMN/CSR=28M, Daba pemerintah=70M, dana LPDB=2M				kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamin Kredit, dan BUMN	Lembaga perbankan=8, lembaga penjamin kredit=1, BUMN=14, 20 Pasar	Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3	-				Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3	100%	
		Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota	20 Pasar	4 pasar	-				4 pasar	20%	
		Jumlah OVOP UMKM	12	2	12				2	17%	
2 15 8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM (KUMKM)										Dinas KUMKM
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi & UMKM (KUMKM)	Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit)	DED Balatkop		-	-					Dinas KUMKM
		Gedung Promosi dan Bisnis UMKM dan Koperasi	1 unit gedung promosi dan bisnis		-	-			1 unit gedung promosi dan bisnis	100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM	Pedesaan = 375, Perkotaan = 678	Pedesaan= 305, perkotaan= 644	Pedesaan= 375, perkotaan= 678	-			Pedesaan= 305, perkotaan= 644	81% 100%	
		Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan	Perikanan=32%, Perkebunan=48%, Pariwisata=7%, Perdagangan =236%, Pangan=85%	Perikanan=22%, perkebunan=28%, pariwisata=2%, perdagangan=188%, pangan=60%					Perikanan=2%, perkebunan=28%, pariwisata=2%, perdagangan=188%, pangan=5%	100%	
		Persentase koperasi aktif	80%	178%	-	-			178%	222%	
		Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal	25 produk	1					1 produk	4%	
2 15 7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan				-						Dinas KUMKM
		Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60%		12%	-	-		560 Koperasi			
1 15 19	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Jumlah SDM Koperasi dan SDM KUMKM yang terlatih	103.837 orang	101.837 org	103.837 orang	380		-	102.217	98%	Dinas KUMKM



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 02 6	URUSAN WAJIB										
	BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH										
1 02 15 6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing	Terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor		terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor			Tersebar nya informasi promosi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 7 kab/kota di 7 (tujuh) sektor unggulan daerah	Tersebar nya informasi promosi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 7 kab/kota di 7 (tujuh) sektor unggulan daerah	100%	BPPTPM
1 02 16 6	Program Peningkatan Iklim Investasi	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	10 laporan kegiatan penanaman modal dan terselesaikan 5 permasalahan penanaman modal		terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor			100 buku	100 buku	100%	BPPTPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 02 17 6	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana	Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	data potensi investasi yang tersedia belum lengkap	tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			1 peta potensi	1 peta potensi	100%	BPPTPM
1 02 18 6	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat	60 standar operasional prosedur	tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan penanaman modal	60 standar operasional prosedur			10 kali terbit, 3 radio, 150 buku, 8 rim leaflet, 16 buah spanduk	10 kali terbit, 3 radio, 150 buku, 8 rim leaflet, 16 buah spanduk	80%	BPPTPM
	URUSAN PILIHAN										
	PARIWISATA										
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
		1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB									DISBUDPAR
		2. Jumlah wisatawan mancanegara ke daerah (ribu orang/wisman)									DISBUDPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		3. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara									DISBUDPAR
		4. Jumlah kegiatan promosi luar negeri									DISBUDPAR
		5. Jumlah kegiatan promosi dalam negeri									DISBUDPAR
		6. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam negeri									DISBUDPAR
		7. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di pasar luar negeri									DISBUDPAR
		8. Produktivitas investasi pemasaran luar negeri									DISBUDPAR
		9. Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri									DISBUDPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		10. Jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata KIE dan minat khusus									DISBUDPAR
		11. Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata daerah									DISBUDPAR
		12. Jumlah peserta Widyawisata Pengenalan (Familiarization Trip)									DISBUDPAR
3 2 2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
		Jumlah desa sebagai desa wisata (Destinasi)	95		95			7 desa			DISBUDPAR
		Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana pendukung pariwisata	75%								DISBUDPAR
3 2 3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase Kemitraan dengan pelaku wisata									DISBUDPAR
		Jumlah SDM Desa yang menjadi tenaga kerja di sektor Pariwisata									DISBUDPAR
		1. Jumlah peserta pelatihan manajemen dan teknis									DISBUDPAR
		2. Jumlah SDM yang kompetensinya meningkat/bersertifikasi									DISBUDPAR
		3. Jumlah partisipasi kegiatan forum kerjasama dan implementasinya									DISBUDPAR
3 2 4	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya										
		1. Kontribusi sektor EKSB terhadap PDRB									DISBUDPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKSB									DISBUDPAR
		3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKSB terhadap daerah									DISBUDPAR
		4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif									DISBUDPAR
		5. Jumlah pengembangan ruang kreatif									DISBUDPAR
		6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring									DISBUDPAR
		7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar									DISBUDPAR
		8. Jumlah pelaku kreatif EKSB yang mengalami peningkatan									DISBUDPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif									
		9. Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan kerja dan pengetahuan terkait EKSB									DISBUDPAR
3 2 5	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK										
		1. Kontribusi sektor EMDI terhadap PDRB									DISBUDPAR
		2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKMDI									DISBUDPAR
		3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKMDI terhadap daerah									DISBUDPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif									DISBUDPAR
		5. Jumlah pengembangan ruang kreatif									DISBUDPAR
		6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring									DISBUDPAR
		7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar									DISBUDPAR
		8. Jumlah pelaku kreatif EKMDI yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif									DISBUDPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		9. Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi									DISBUDPAR
		10. Jumlah pusat kreatif yang terbentuk atau direvitalisasi									DISBUDPAR
	URUSAN WAJIB										
	KEBUDAYAAN										
2 17 1	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Persentase budaya yang dilestarikan									DISBUDPAR
2 17 2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase budaya yang dilestarikan	80% kekayaan budaya telah dikelola dengan baik	150%	60%			70%	70%	88%	DISBUDPAR
2 17 3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase budaya yang dilestarikan									DISBUDPAR
2 17 4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kemitraan dengan pelaku budaya									DISBUDPAR
2 17 5	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman	Persentase cagar budaya dan museum yang dilestarikan									DISBUDPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase pengunjung pada museum									
2 17 6	Program Pembinaan Seni dan Perfilman	Persentase hasil karya seni dan perfilman									DISBUDPAR
2 17 7	Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya										DISBUDPAR
2 17 8	Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Persentase pemberdayaan komunikasi pemerhati sejarah dan budaya									DISBUDPAR
1 01 8	URUSAN WAJIB										
	PEMUDA DAN OLAHRAGA										
1 01 16 8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda	1428 pemuda	317 pemuda	287 pemuda			287 pemuda	287 pemuda	20%	Dispora
1 01 17 8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan	370 pemuda	137 pemuda	74 pemuda			74 pemuda	74 pemuda	20%	Dispora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 01 18 8	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba	250 pemuda	71 pemuda	50 pemuda			50 pemuda	50 pemuda	20%	Dispora
1 01 19 8	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga	15 kali	6 kali	2 kali			3 kali	3 kali	20%	Dispora
1 01 20 8	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga										
		Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS)	28 even	25 even	5 even (POPDA, POPWIL, Rekreasi, SKJ dan HAORNAS)			6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)	6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)	100%	Dispora
		Jumlah atlet dan pelatih yang dibina	333 orang	76 orang	70 orang			70 orang	70 orang	21%	Dispora



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 01 21 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 Sarpras	2 GOR	4 Sarpras : Lapangan Sepak Bola Pendamping, Kolam Renang, GOR Mini, dan Pondoka Atlet			2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis	2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis	100%	Dispora
1 01 22 8	Program Pembinaan Generasi Muda										
		Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda	160 pemuda	161 pemuda	32 pemuda			32 pemuda	32 pemuda	20%	Dispora
		Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5 kali	6 kali	1 kali			1 kali	1 kali	20%	Dispora
1 01 1 9	URUSAN RUTIN										
	BIDANG KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 19 1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan										Kesbanglinmas
		persentase desa yang diinterpendi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (dari jumlah total desa)			25%			30%	30%	100%	
1 16 1 9	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal										Kesbanglinmas
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa)			0			30%	30%	100%	
1 17 1 9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan									Kesbanglin mas



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 18 . 1 9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan									Kesbanglin mas
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Menurunnya tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat									Kesbanglin mas
1 19 . 1 9	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan										Kesbanglin mas
		Persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total)			40%			50%	50%		
1 21 . 1 9	Program Pendidikan Politik Masyarakat										Kesbanglinmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok)			25%			30%	30%	100%	
	Program Kemitraan Kamtibmas										Kesbanglinmas
		Persentase kemitraan yang dilaksanakan dalam kamtibmas			50%			60%	60%	100%	
	Program Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Terciptanya Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah									Kesbanglinmas
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 1	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terwujudnya peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu		Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPUD	Terlaksananya monev persiapan Pemilu DPRD, terlaksananya verifikasi dan terbitnya SK Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD			Terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD	Terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD	100%	Biro Pemerintahan
2 20 2	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah				Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/ Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev persiapan Pilkada 4 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/ Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev persiapan Pilkada 4 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	Biro Pemerintahan
2 20 3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
		Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari	- Belum terlaksananya pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah	Terlaksananya pelaksanaan TP di 2 Kab/Kota serta peningkatan kualitas			Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan	Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan	100%	Biro Pemerintahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
			Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan atau Desa/ Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan pelaksanaan keuangan di daerah	Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, masih kurangnya pemahaman oleh SDM tentang aturan-aturan pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah provinsi dan belum optimalnya penyampaian laporan keuangan	SDM sebanyak 80 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota			terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota	terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah				Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev persiapan Pilkada 4 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/ Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev persiapan Pilkada 4 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	Biro Pemerintahan
			- Terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah,	-Belum terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah, belum terlaksananya rakor pengembangan sumber	- Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kali monitoring 7 kabupaten/ kota, terlaksananya			-Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kali monitoring 7 kabupaten/ kota, terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman 80	-Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kali monitoring 7 kabupaten/ kota, terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
			terwujudnya koordinasi yang baik dengan aparat instansi terkait dan tercapainya peningkatan pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah	pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, belum terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah, belum tersedianya data base	ya dua kali rapat koordinasi dan meningkatn ya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 40 peserta dan meningkatn ya pengembangan sumber pendapatan daerah yang			peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 50 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan	80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 50 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
					potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan						
2 20 4	Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH										
		Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)	41 SKPD	9 SKPD	6 SKPD			7 SKPD	7 SKPD	17%	Inspektorat, Biro Organisasi
2 20 6	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		LAKIP (Nilai C)	LAKIP (Nilai C)			LAKIP (Nilai C)	LAKIP (Nilai C)	10%	Biro Organisasi, Inspektorat,
2 20 8	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terwujudnya optimalisasi perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah	Terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, pengelolaan daerah yang berbatasan dan penanggulangan potensi konflik antar daerah yang berbatasan	Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum adanya database potensi kerjasama daerah, dan masih kurangnya pemahaman aparat pelaksana kerjasama tentang kerjasama daerah	Terfasilitasi nya proposal bidang yang akan dikerjasamakan, terfasilitasi nya materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama serta tersusunnya Perda tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah			Terpublikasinya peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota	Terpublikasinya peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota	100%	Biro Pemerintahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 20 9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan									Biro Hukum
2 20 10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah	Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah serta masih belum tertatanya urusan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 3 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 12 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 4 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 4 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	100%	Biro Pemerintahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
					provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota						
2 20 11	Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Perda Kab/Kota yang dievaluasi dan diverifikasi									Biro Hukum
2 20 12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan serta kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan	Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurahan, terselenggara penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur			Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurahan, terselenggara penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur	Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurahan, terselenggara penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur	100%	Biro Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
			sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur/SDM tersebut								
2 20 13	Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan		43 SKPD (ABK); 43 SKPD (Peta Jabatan);	42 SKPD (rumpun jabatan)			42 SKPD (anjab)	42 SKPD (anjab)	100%	Biro Organisasi
2 20 14	Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah		Dokumen SOP, SPM, Maklumat, IKM, SP Belum disusun, TND belum disosialisasikan	42 SKPD (SOP, SP, SPM, TND) 30 SKPD (Maklumat, IKM)			42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM)	42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM)	100%	Biro Organisasi
2 20 15	Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar	61 Perda	62 PERDA (2007 s/d 2011)	12 Perda			12 Perda	12 Perda	19%	Biro Hukum
2 20 16	Program Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada aparatur/masyarakat									Biro Hukum
2 20 17	Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah Perda/Pergub yang terkait dengan pelayanan publik									Biro Hukum
2 20 18	Program Penataan dan Dokumentasi Hukum	Jumlah Perda/Pergub yang sudah ditata dan didokumentasikan									Biro Hukum
2 20 19	Program Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi Penyuluhan Hukum/Perundang-undangan yang dilakukan									Biro Hukum
2 20 20	Program Penataan di bidang Administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Naskah Akademik yang disusun/dibuat									Biro Hukum
2 20 21	Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas	Terwujudnya kinerja pelaporan	Masih rendahnya kinerja pelaporan Kepala Daerah	Tersusunnya a pelaporan Kepala			Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah	Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah	100%	Biro Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		penyelenggaraan kepala daerah	Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah	serta kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem pelaporan Kepala Daerah	Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah			yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah	yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah		
2 20 22	Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD			16 Dinas			23 UPTD	23 UPTD	100%	Biro Organisasi
2 20 23	Program pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD			2 Kab			1 Kab	1 Kab	100%	Biro Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 20 24	Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD			16 Dinas			23 UPTD	23 UPTD	100%	Biro Organisasi
2 20 32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
	URUSAN WAJIB										
	SOSIAL										
2 13 4	Program Pembinaan Generasi Muda	Jumlah Pemuda yang mengikuti bimbingan teknis kepemudaan	520	1	428			456	456	88%	Biro Kesra
2 13 5	Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama										Biro Kesra
2 13 6	Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial	Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel		1							Biro Kesra
2 13 7	Program Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah	Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal	90%	130%	70%			75%	75%	83%	Biro Kesra
2 13 8	Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika	Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur	90%		70%			75%	75%	83%	Biro Kesra



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 13 9	Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama	90%		70%			75%	75%	83%	Biro Kesra
2 13 10	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni	60		12			12	12	20%	Biro Kesra
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 1	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah										
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30 Diklat	31 Diklat	6 Diklat			6 Diklat	6 Diklat	199%	Sekretariat DPRD
		Lamanya proses pembahasan Perda/Pergub			3 Bulan			3 Bulan	3 Bulan	100%	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terwujudnya Peningkatan Kapasirtas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									Sekretariat DPRD
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 4	Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH										
		jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah									Inspektorat, Satpol PP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah									
		jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti	4.659 Rekomendasi	3535 Rekomendasi	215 Rekomendasi			220 Rekomendasi	220 Rekomendasi	5%	Inspektorat, Satpol PP
		Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)	41 SKPD	9 SKPD	6 SKPD			7 SKPD	7 SKPD	17%	Inspektorat, Biro Organisasi
2 20 5	Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjeangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya									Inspektorat, Badan Diklat, BKD
		a. Pegawai sudah sertifikasi penjeangan JFA/P2UPD	84 orang	46 Orang	7 orang			8 orang	8 orang	10%	Inspektorat, Badan Diklat, BKD
		b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat	277 orang	41 Orang	46 orang			48 orang	48 orang	17%	Inspektorat, Badan Diklat, BKD
		Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan									Inspektorat, Badan Diklat, BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 20 6	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi										
		adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan	2 sistem	1 Sistem	1 Sistem			0 Sistem	0 Sistem	0%	Inspektorat
		Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		LAKIP (Nilai C)	LAKIP (Nilai C)			LAKIP (Nilai C)	LAKIP (Nilai C)	10%	Biro Organisasi, Inspektorat,
2 20 7	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penanganan pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan	27 kasus	4 kasus	5 kasus			5 kasus	5 kasus	19%	Inspektorat
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
	KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 5	Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan										
		Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejian jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya									Inspektorat, Badan Diklat, BKD
		a. Pegawai sudah sertifikasi penjejian JFA/P2UPD	84 orang	46 Orang	7 orang			8 orang	8 orang	10%	Inspektorat, Badan Diklat, BKD
		b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat	277 orang	41 Orang	46 orang			48 orang	48 orang	17%	Inspektorat, Badan Diklat, BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan									Inspektorat, Badan Diklat, BKD
2 20 30	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan	275	1	55			55	55	20%	Badan Diklat/BKD
2 20 31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur									Badan Diklat/BKD
		Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan									Badan Diklat/BKD
2 20 32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
		Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	85		1			0			BKD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terlaksananya penempatan dan promosi pegawai melalui proses Assesment Center	100%		40%			60%			BKD
		Terwujudnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja (berdasarkan job grading)	100%		100%			0			BKD
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 5	Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan										
		Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejang									Inspektorat, Badan Diklat, BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya									
		a. Pegawai sudah sertifikasi penjejaan JFA/P2UPD	84 orang	46 Orang	7 orang			8 orang	8 orang	10%	Inspektorat, Badan Diklat, BKD
		b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat	277 orang	41 Orang	46 orang			48 orang	48 orang	17%	Inspektorat, Badan Diklat, BKD
		Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan									Inspektorat, Badan Diklat, BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 20 30	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan	275	1	55			55	55	20%	Badan Diklat/BKD
2 20 31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur									Badan Diklat/BKD
		Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan									Badan Diklat/BKD
2 20 32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
		Persentase pegawai yang mendapat pengembangan kapasitas	1960		390			400			Badan Diklat
		Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	280		0			120			Badan Diklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
		Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%		70%			65%			Sekretariat DPP/KORPRI
2 20	URUSAN WAJIB										
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
2 20 2	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		peningkatan fasilitasi pelayanan pemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi)	5 kali acara halal bihalal	5 kali acara halal bihalal	1 kali acara halal bihalal			1 kali acara halal bihalal	1 kali acara halal bihalal	100%	Kantor Perwakilan Bangka Belitung
1 21	URUSAN WAJIB										
	BIDANG KETAHANAN PANGAN										
1 21 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan										Badan Ketahanan Pangan
		Persentase cadangan pangan pemerintah	100%	1	75%			100%	100%	100%	
		Skor pola pangan harapan	95	80,7	83,9			90,3	90,3	95%	
		Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel	253	36	45			50	50	20%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Meningkatkan ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%)	95%	1,7	80%			80%	0,8	84%	
		Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun	15 desa	-	3 desa			3 desa	3 desa	20%	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa)	75 desa	61	3			3	3	4%	
2 22	URUSAN WAJIB										
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
2 22 1	Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa										
		Persentase BUMDes yang aktif	100%	110%	50%			70%	70%	70%	BPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah pasar desa yang aktif	50 desa	3 desa	10 Desa			15 desa	15 desa	30%	BPMD
		PKK aktif (Jumlah seluruh PKK)	100%	185%	90%			90%	90%	90%	BPMD
		Posyandu aktif (Jumlah seluruh posyandu)	100%	190%	95%			95%	95%	95%	BPMD
		Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang berfungsi (jumlah keseluruhan desa)	90%	130%	50%			75%	75%	83%	BPMD
		Prosentase pasar desa yang aktif	100%	110%	50%			70%	70%	70%	BPMD
2 22 2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)	90%	100%	30%			45%	45%	50%	BPMD
		Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)		200%	100%			100%	100%	100%	BPMD
2 22 3	Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan										BPMD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan)	100%	150%	60%			75%	75%	75%	
		Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..kondisi skr 6 kelompok))	0,6%	0,21%	0,35%			0,40%	0,40%	66,67%	
2 22 5	Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG										
		Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan)	100%	110%	50%			70%	70%	70%	BPMD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa)	100%	110%	40,00%			60%	60%	60%	BPMD
		Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG	55%	115%	30%			40%	40%	73%	BPMD
# 22 6	Program Beras Miskin Gratis (Raskintis)	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)	100%	200%	100%			100%	100%	100%	BPMD
X 1	URUSAN WAJIB										
	BIDANG PERPUSTAKAAN										
1 1.26 15 .01	Progam Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan										
		Persentase Sistem Kearsipan yang diterapkan									BPAD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 1.26 16 .01	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah										
		Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan									BPAD
1 1.26 17 .01	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan										
		Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan									BPAD
1 1.26 18 .01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi										
		Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan	180 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan	40 desa/kelurahan			40 desa/kelurahan	40 desa/kelurahan	22%	BPAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
1 1.26 21 .01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
		Persentase desa/kelurahan yang diinterpendi pengembangan budaya baca	592 Desa	66 Desa	115 Desa			115 Desa	115 Desa	19%	BPAD
		Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan	105 Desa/Kel	1	21 Desa/Kel			21 Desa/Kel	21 Desa/Kel	20%	BPAD
		Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina	680 Org	1	120 Org			160 Org	160 Org	24%	BPAD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan										
		Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan	680 org	1 org	160 org			160 org	160 org	24%	BPAD
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase sistem kearsipan yang diterapkan									BPAD
2	URUSAN WAJIB										
2 25	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2 25 1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
		Terpenuhnya infrastruktur dan komunikasi dan infomatika di tujuh Kab/Kota		-	-	-					DISKOMINFO
2 25 2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi										
		Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel		1 Paket							DISKOMINFO
		Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI		1 Paket							DISKOMINFO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota		50 org							DISKOMINFO
		Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika		1 keg							DISKOMINFO
		Tersedianya data Monev Kab/Kota		1 paket							DISKOMINFO
		Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos dan Telekomunikasi		1 keg							DISKOMINFO
2 25 3	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika										
		Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika		1 Paket							DISKOMINFO
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Postel melalui Bimtek dan Pelatihan		1 Paket							DISKOMINFO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan		1 Paket							DISKOMINFO
		Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk aptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian		1 Paket							DISKOMINFO
2 25 4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media										
		Tersedianya Majalah Kominfo Prov.		1 Paket							DISKOMINFO
		Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui konfrensi pers		1 Paket							DISKOMINFO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terjaganya kelestarian budaya/tradisi masyarakat lokal melalui Pekan Informasi		1 Keg							DISKOMINFO
2 25 5	Program Optimalisasi Pemanfaat Teknologi Informasi										DISKOMINFO
2 25 6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat										DISKOMINFO
2	URUSAN WAJIB PILIHAN										
2 2	BIDANG PERTANIAN										
2 02 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani										DISTANBUNAK
		Persentase kelompok tani yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok tapi miskin)	-	150%	100%	25%	25%	-	175%	-	
2 02 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan										DISTANBUNAK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan	6	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan	-	-	Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan dalam mendukung peningkatan mutu dan daya saing produksi perkebunan	-	-	
2 02 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak										DISTANBUNAK
		Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas	Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung	2	Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung	27,5%		Penyebaran penyakit ternak dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak dapat diminimalisir	Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung	-	
	Program Peningkatan produksi hasil peternakan										DISTANBUNAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin)	-		-	-	-	Meningkatnya hasil produksi dari sektor peternakan	-		
	Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan										DISTANBUNAK
		Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan		-	-	-	-	-	-	
2 02 24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan										
		Pengembangan kawasan perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna	Sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna dirasa belum memadai	-	-	-	Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan dalam mendukung peningkatan mutu dan daya saing produksi perkebunan	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna	100%	DISTANBUNAK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada	Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan		-	-	-	Terlaksananya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis dalam peningkatan mutu dan daya saing hasil produksi perkebunan (2 Kegiatan)	Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan	100%	DISTANBUNAK
	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan										
		Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai	Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi belum memadai	Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan			Bantuan sarana penanggulangan OPT sebanyak 1 paket bantuan pestisida dan 1 paket bantuan Agens Hayati	Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	100%	DISTANBUNAK
		Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper)	Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada		Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada			Meningkatnya luasan tanaman menghasilkan dari tanaman lada seluas 500 Ha	Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada	100%	DISTANBUNAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi	Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan		Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan			-	Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan	100%	DISTANBUNAK
		Pengembangan gembilik	25ha		5ha			5ha	5ha	100%	DISTANBUNAK
		Jumlah bibit unggul yang berhasil dikembangkan									DISTANBUNAK
		Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang dibina)									DISTANBUNAK
	BIDANG PERTANIAN										
2 02	URUSAN WAJIB PILIHAN										
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya	100 kelompok	21 kelompok (s.d 2014)	100 kelompok			20 kelompok	41 kelompok	41%	Bakorluh
		Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dengan metode percontohan	95 kelompok	20 kelompok (s.d 2014)				30 Penyuluh	20 kelompok	21%	Bakorluh
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha										
		Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Penyuluh	31 Penyuluh (s.dd 2014)							Bakorluh
		Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya	750 Orang	20 kelompok	750 Orang			150 Orang	-	-	Bakorluh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan										
		Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi dalam berbagai media cetak	30 Judul Leaflet, 15 Judul Brosur	7 judul leaflet, 3 Judul Brosur (s.d 2014)							Bakorluh
		Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 kabupaten/kota se-Prov. Babel	30 unit BPP/BPK	7 unit BPP/BPK (s.d 2014)	6 unit BPP/BPK			6 unit BPP/BPK	11 unit BPP/BPK	36,37%	Bakorluh
3	URUSAN PILIHAN										
3 2	KEHUTANAN										
3 2 1	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah kelompok usaha masyarakat sekitar kawasan hutan yang didampingi	4 kelompok		4 kelompok			Kelompok pemegang izin IUPHHK-HTR 6 kab		100%	DISHUT
		Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat	6 kabupaten					6 kabupaten		100%	DISHUT
3 2 2	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat										
		Terencananya pengelolaan DAS terpadu	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu ada 1 unit satuan wilayah pengelolaan (SWP) DAS Ajang Mabat-Macung	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas				Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu ada 1 unit satuan wilayah pengelolaan (SWP) DAS Ajang Mabat-Macung	100%	DISHUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
			kesejahteraan masyarakat di								
		Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan	Terbentuknya tim pengendali rehabilitasi dan reklamasi hutan provinsi kep. Babel					Terbentuknya tim pengendali rehabilitasi dan reklamasi hutan provinsi kep. Babel	100%	DISHUT
3 2 3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan										
		Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat	Keputusan menteri kehutannya Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tentang penunjukan Kawasan hutan wilayah provinsi kepulauan bangka belitung seluas 657,510 Ha dan hasil penelitian tim terpadu	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya				Keputusan menteri kehutannya Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tentang penunjukan Kawasan hutan wilayah provinsi kepulauan bangka	100%	DISHUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
			dilaksanakan secara optimal	penyelesaian subtansi kehutanan dalam rangka penyusunan RTRWP.	hutan dapat dilaksanakan secara optimal				belitung seluas 657,510 Ha dan hasil penelitian tim terpadu penyelesaian subtansi kehutanan dalam rangka penyusunan RTRWP.		
3 2 4	Program perlindungan dan konservasi SDA										
		Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dari 10 polisi kehutanan (PNS)	Penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (Honoror)	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)			terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan	Penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (Honoror)	100%	DISHUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan lindung, dan kepastian bentuk pengolahan kawasan hutan konservasi dalam rangka terselenggaranya pelayanan Publik kerjasama konservasi alam	Terbentuknya dan beroperasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi pemanfaatan SDA dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam	Penetapan 2 wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) oleh Menteri Kehutanan, 6 lokasi hutan konservasi dan penetapan 3 kawasan lindung (di kab. Bangka Tengah, Kab Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang)				Terlaksananya konservasi	Penetapan 2 wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) oleh Menteri Kehutanan, 6 lokasi hutan konservasi dan penetapan 3 kawasan lindung (di kab. Bangka Tengah, Kab Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang)	100%	DISHUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
0 03 2	URUSAN PILIHAN										
	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
0 03 15 2	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan dan Energi										
		DBH Sektor Migas (milyar rupiah)	30	8,9	30						DISTAMBEN
		DBH Sektor Tambang (milyar rupiah)	325	89,59	325			6			DISTAMBEN
		Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK)	300.000	0							DISTAMBEN
		Jumlah SPBG (unit)	2	0	2						
0 03 16 2	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan										
		Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung	200 laporan	-	200 laporan	-		40 laporan	40 laporan	100%	DISTAMBEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
0 03 17 2	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan										
		PLT Hybrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur	PLT Hybrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur		PLT Hybrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu)			PJU 100 unit;	PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 300 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms	100%	DISTAMBEN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
					Peraturan Gubernur						
		Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan									
		Jumlah desa mandiri energi	3 desa								DISTAMBEN
		Tingkat penerapan hemat energi	32% Penghematan								DISTAMBEN
		Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan	2 PLTU								DISTAMBEN
0 03 22 2	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah										
		Tersedianya laporan pelaksanaa program reklamasi dan pasca Tamban sebanyak 75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang	75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang	-	75 lap, 1 Pergub mineral, 65 pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas			Tersedianya data yang dijadikan dasar perhitungan jaminan Reklamasi para pemegang IUP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			DISTAMBEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi	pertambangan dan energi		SDM di bidang pertambangan dan energi.						
	Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi*)	Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkat provinsi	1 Perda		1 perda						DISTAMBEN
	Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *)	Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal	24.000		8 unit energi alternatif			Pengembangan energi alternatif (2 unit)	Pengembangan energi alternatif (2 unit)	100%	DISTAMBEN
2.05 01	URUSAN WAJIB										
2.05 01	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.05 01 15	Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan										
		Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta Ha)	400 Ha	3000 Ha				4000 Ha	7000 Ha	100%	DKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil terluar yang dikelola(pulau)	12 Pulau	10 Pulau				1 Keg	10 Pulau	83%	DKP
2.05 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan										
		Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	68,581	62,046	62,046			224	62.270	91%	DKP
		nilai tukar pembudidayaan ikan(NTPi) Provinsi	127	125	127			-	125	98%	DKP
2.05 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap										
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	181,000	169	181.000			166.035	166.204	92%	DKP
		Nilai tukar Nelayan (NTN)	127	122	-						DKP
2.05 01 26	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan										
		Jumlah unit pengolahan ikan	2.800	2200	-	-	-	15	2.215	79%	DKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
		Nilai ekspor Hasil Perikanan (USD/tahun)	24.120.000	17.370.000	24	-	-	-	17.370.000	72%	DKP
		Konsumsi Ikan(kg/kap/th)	49	47	-	-	-	48	48	97%	DKP
		Jumlah Kredit yang difasilitasi KKMB(milyar)	1,6	1,4	-	-	-	-	1,4	88%	DKP
2 07	URUSAN PILIHAN										
	PERINDUSTRIAN										
2 07 01 16	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah										
		jumlah unit usaha industri kecil dan menengah sebanyak 7145 unit	7.145		7145	-	-	-			Disperindag
		total nilai investasi industri kecil dan menengah(RP.Milyar)	1.780,182		363	-	-	-			Disperindag
2 07 01 18	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan sebanyak 5 jenis	7	1	-	-	-	-	-	-	Disperindag

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 07 01 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial										
		Jumlah OVOP IKM percontohan	7	2	-	2		-	4	57%	Disperindag
		Jumlah forum pembentukan OVOP	5	1	-	1		-	2	40%	Disperindag
2 07 01 20	Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)										
		Jumlah Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	7	1	5	2	40%	-	3	43%	Disperindag
	PERDAGANGAN										
2 07 01 16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan										
		Jumlah kecamatan yang terlayani sebanyak 50 kecamatan	50	47	-				47	94%	Disperindag
		Retribusi Tera (Rp. Juta)	1221	242	1221				242	20%	Disperindag



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
2 07 01 16	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri										
		Jumlah pedagang UMKM sebanyak 1378 pedagang	6670	1338	1378				1338	20%	Disperindag
		Jumlah Pasar Percontohan sebanyak 7 unit	18,000	3	7				3	17%	Disperindag

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Dari jumlah program pada program utama sebanyak 204 program dengan jumlah kegiatan total sebanyak 1.599 kegiatan, terdapat 81 kegiatan yang capaian fisiknya tidak selesai 100%, atau 5,6% dari seluruh kegiatan yang ada. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.73
Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

SKPD	No	Judul Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
BIRO HUKUM	1	Evaluasi RAPERDA Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR	85
	2	Penyelesaian Sengketa TUN Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan PEMDA	50
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3	Penyusunan Profil Dinas Pemuda dan Olahraga	73,71
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTUNAN	4	Keikutsertaan pada Event Penyuluhan Tingkat Nasional Regional	67,84
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	Pembentukan Pengurus Forum Koordinasi OVOP Provinsi	85,71
	6	Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	85
INSPEKTORAT DAERAH	7	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah Di bawahnya	0
BAPPEDA	8	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (REVIEW NSDA).	0
	9	Studi Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10	Identifikasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	0
	11	Pengadaan Kebutuhan Lab.BBIS Pemali	80
	12	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	60
	13	Pendataan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang P2HP	0
	14	Pengadaan Bantuan Peralatan dan Pengolahan Hasil Perikanan	0
	15	Profil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Bangka Belitung Tahun 2012	0
	16	Temu Koordinasi UMLKM, KKMB (Tenaga Pendamping) dan Pihak Perbankan	0
DINAS PERHUBUNGAN	17	Penyusunan DED Pelabuhan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Batu	0

SKPD	No	Judul Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	18	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	5,48
	19	Fasilitasi Penyelesaian Kredit Usaha Ekonomi Kerakyatan	0
DINAS PEKERJAAN UMUM	20	Perencanaan Pembangunan Jembatan	50
	21	Pembangunan Jembatan Batu Rusa II	88,7
	22	Pembangunan Jembatan	96,72
	23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	96,96
	24	Inspeksi Kondisi Jalan	48
	25	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	50
RUMAH SAKIT JIWA	26	Pendidikan/Pelatihan Informal	80
	27	Pembuatan Izin Mendirikan Rumah Sakit	40
	28	Pembuatan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) Rumah Sakit	70
	29	Pengembangan tipe rumah sakit	87
	30	Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit	0
	31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap	34
RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	32	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	70,83
	33	Cetak dan Pengandaan Formulir Rumah Sakit Provinsi	65,94
	34	Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai RS	45,80
	35	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, dan Pakaian Khusus (bagi pegawai dan pasien RS)	50,49
	36	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	92,90
	37	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Rumah Sakit Umum Provinsi	36,69
	38	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pegawai RS Provinsi	43,79
	39	Pengadaan Instalasi Telepon RS Provinsi	40
	40	Pembangunan Pintu Gerbang Pos Jaga dan Portal RS Provinsi	0
	41	Pembangunan Garasi Mobil RS Provinsi	0
	42	Pengadaan Instalasi Genset RS	0
	43	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	70,83
	44	Pemeliharaan Instalasi Oksigen Sentral	0
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	45	Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0
	46	Survey Pemetaan Sumber Daya Mineral Non Timah	0
DINAS PENDIDIKAN	47	Perluasan dan Peningkatan mutu Pendidikan TK/RA	91,98
	48	Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA	93,57
	49	Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK	98
DINAS KESEHATAN	50	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	0
	51	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan	0



SKPD	No	Judul Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
		dalam Penggunaan Obat Rasional	
	52	Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai	70
	53	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	0
	54	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat	50
	55	Percepatan Pelaksanaan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	0
	56	Pertemuan Pembentukan Jejaring Laboratorium Malaria	0
	57	Survey Dinamika Penularan	0
	58	Pemeliharaan Kantor Malaria Centre	0
	59	Pelaksanaan BIAS	33,3
	60	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Program dalam rangka Eliminasi Malaria	0
	61	Investigasi Pelacakan Kasus PD3I (Campak, TN, AFP, Difteri)	33,3
	62	Pertemuan Koordinasi Surveilans Epidemiologi	0
	63	Penguatan Program Kesehatan Matra	85,71
	64	Peningkatan Kapasitas Management Vektor bagi Petugas Kabupaten/Kota	0
	65	Pertemuan Penguatan Jejaring Layanan HIV/AIDS	0
	66	Mobile Klinik HIV dan IMS	20
	67	Pertemuan Programatik Manajemen of Drug Resistance Tuberkulosis di Babel	0
	68	Monitoring Evaluasi Programatik Manajemen of Drug Resistance Tuberkulosis	0
	69	Konsultasi dan Koordinasi Mitra Kerja	0
	70	Pertemuan Pembuatan Mapping Kasus Malaria dalam Menentukan Fokus Eliminasi	0
	71	Pembinaan Terpadu Program Kesehatan	40
	72	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	50
	73	Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan dan Spesialis Baru	50
	74	Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium	50
	75	Honorarium Tim Jabatan Fungsional dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus	97
	76	Peningkatan Kualitas Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan	0
	77	Pengadaan IPAL dan Incenerator	50
	78	Peningkatan Kemampuan Bidan dalam Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan di RS PONEK dan Puskesmas PONEK	0
	79	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	0
	80	Fasilitasi dan Evaluasi Petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi	0

SKPD	No	Judul Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	81	Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	33,33

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Untuk program/kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan target kinerja hasil, adalah di luar kegiatan-kegiatan yang capaiannya kurang dari 100% di atas. Sehingga jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada TA 2014 adalah 1.518 kegiatan atau 94,4%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah:

- Gagal dalam proses lelang.
- Duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain, sehingga beberapa kegiatan APBD tidak dilaksanakan.
- Terbatasnya waktu pelaksanaan
- Belum selesainya dokumen perencanaan, seperti DED, kajian lingkungan.
- Belum sepatatnya isi substansi dari beberapa Perda, sehingga beberapa perda belum ditetapkan.
- Belum selesainya pembebasan lahan.
- Akibat kondisi geografis dan cuaca.
- Akibat terlambatnya pasokan material dari luar daerah/luar negeri.
- Adanya perubahan dan pelepasan kepemilikan aset.
- Berkurangnya peserta diklat atau pelatihan yang hadir.
- Berkurangnya klaim terhadap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan.
- Selain itu juga terdapat sisa-sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sector/lintas instansi/lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan proiritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di

bawah 100% dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterkaitan dengan kegiatan yang lain dengan mendukung upaya pencapaian target RPJMD, maka perlu dialokasikan pada tahun berikutnya.
- b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harus tetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan.
- c) Untuk lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditingkatkan sinkronisasi dan sinergi kegiatan yang dibiayai dari seluruh sumber pembiayaan.
- d) Agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan, maka perlu ditingkatkan fungsi pengendalian terhadap seluruh kegiatan oleh masing-masing kepala SKPD.
- e) Untuk pelaksanaan kegiatan fisik yang memerlukan dukungan perencanaan teknis, maka penyusunan dokumen teknisnya dilakukan sebelum pekerjaan fisik dianggarkan atau dilaksanakan dan disosialisasikan pada awal tahun anggaran.

2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Merupakan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Paripurna Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihannya. Selanjutnya hasil Reses ini akan dipilah berdasarkan kabupaten/kota, program dan kegiatan, SKPD penanggungjawab dan kewenangan dari program/kegiatan yang diusulkan. Secara lengkap pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada tabel II.74.

Tabel II. 74

Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	URUSAN WAJIB				
1	Pendidikan				
		Bantuan Beasiswa Bagi Putra-Putri Desa Dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Desa Terak-Bateng	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan Alat-Alat Marching Band	SMKN 1 Pangkalan Baru- Bateng	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan Buku untuk proses belajar	SMKN 1 Pangkalan Baru- Bateng	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan solusi Bagi Siswa SMA yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi Orang Tau Tidak Mampu	SMKN 1 Pangkalan Baru- Bateng	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Sosialisasi bantuan kurikulum 2013 tentang Pelajaran Mandiri	SMKN 1 Namang	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan Ruang Multimedia yang menyediakan WIFI	SMKN 1 Namang	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan Fasilitas Belajar seperti Meja dan Kursi	SMKN 1 Namang	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan Fasilitas Infokus di Setiap Ruang Kelas	SMKN 1 Namang	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan ruangan kelas musik	SMKN 1 Namang	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan WC Baru dan Sumur Bor	SMKN 1 Namang	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Permintaan Perubahan Jam Belajar yang berlaku sampai jam 4 Sore	SMKN 1 Namang	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi sampai Perguruan Tinggi	SMKN 1 Arung Dalam Koba-Bateng	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan Seragam Sekolah berupa Jilbab untuk Siswi	SMAN 1 Lubuk Besar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan WC Baru dan Sumur Bor	SMAN 1 Lubuk Besar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Permintaan Perubahan Jam Belajar yang berlaku sampai jam 4 Sore	SMAN 1 Lubuk Besar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan bagi siswa/siswi yang terjerat Narkoba	SMAN 1 Lubuk Besar	Dinas Pendidikan	diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bantuan penambahan ruang kelas di SD 12 Payung	SD 12 Payung-Basel	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan Pembangunan Pagar Pengaman SD 12 Payung	SD 12 Payung-Basel	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan penyediaan jaringan internet di SMKN 1 Payung	SMKN 1 Payung-Basel	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Permohonan stadion olahraga di SMA I Payung	SMKN 1 Payung-Basel	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Penambahan tunjangan untuk guru	Kec.Payung-Basel	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pembangunan Gedung TK	Kec.Payung-Basel	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Penyediaan Jaringan Internet	Kec.Air Gegas-Basel	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengadaan Bus untuk anak-anak sekolah	Kec.Air Gegas-Basel	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Penyediaan meubeler di SMP Istiqomah	Kec.Air Gegas-Basel	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Kebijakan terkait seringnya PNS yang baru bekerja dipindah tugaskan	Kab.Bangka Selatan	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Kebijakan terkait dengan tenaga honorer putra daerah yang belum diangkat jadi PNS	Kab.Bangka Selatan	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK 2 Tanjung Pandan, yaitu : Pengaspalan jalan di dalam lokasi sekolah, Bantuan Sumur Bor, mini hatchery rumah tangga, alat berat rental 5 jam, lapangan futsal	Tanjung pandan-Belitung	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengangkatan Guru Honorer menjadi PNS di SMK 2 Tanjungpandan	Tanjung pandan-Belitung	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan subsidi biaya transportasi kepada murid yang berada di Kepulauan	Kecamatan Selat Nasik-Belitung	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Advokasi terhadap keluhan wali murid terhadap pungutan pihak sekolah untuk gaji tenaga honorer sekolah	Desa Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pembangunan SMA atau SMK baru, karena jumlah daya tampung terbatas	Membalong-Belitung	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan 5 unit rumah dinas untuk guru yang domisilinya di luar daerah	Desa Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu disertai dengan sosialisasi yang terbuka	Desa Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bantuan Sarana dan Prasarana di SMK 1 Manggar, yaitu : parkir, WC siswa, Ruang penunjang dan peralatan komputer, lapangan basket, laboratorium bahasa, sanggar budaya, dan buku pelajaran	Manggar-Belitung Timur	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan BOS untuk siswa berprestasi yang akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi	Manggar-Belitung Timur	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Sertifikat tanah SMK 1 Manggar	Manggar-Belitung Timur	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Bantuan Sarana dan Prasarana di SMP 1 Simpang Renggang, yaitu : Pengadaan Drum Band dan pagar sekolah	Simpang Renggang-Belitung TImur	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Fasilitasi Honor Guru TPA dan PAUD	Simpang Renggang-Belitung TImur	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pendirian Sekolah Perikanan Di Belitung TImur	Gantung-Belitung Timur	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pembangunan UBB cabang Belitung	Gantung-Belitung Timur	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pembangunan Asrama mahasiswa UBB asal belitung dan belitung Timur	Bangka (usulan Beltim)	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Penambahan lokal untuk PAUD	Desa Burung Mandi Damar-Belitung timur	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Rehabilitasi ruang yang kurang memadai	Desa Bias Kec.Tempilang - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pengadaan alat penunjang pendidikan	Desa Bias Kec.Tempilang - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Permasalahan Pencairan bantuan BOS	Desa Bias Kec.Tempilang - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Penanganan Izin operasional Madrasah Aliyah PONPES Sangku	Kec.Tempilang - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Intensif Guru TPA dari provinsi	Kec. Jebus - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pemberian Insentif Guru TK/TPA	Kec. Jebus - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Penyerahan kewenangan SMA/SMK Kabupaten ke Provinsi	Kec. Mentok - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Permohonan bantuan proses pencairan penghasilan tambahan agar dipercepat	Kec. Muntok - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pengajuan bantuan insentif guru	Desa Rajek, Desa Belar, dsb Kec. Muntok - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengajuan pengangkatan honorer guru K2	Kec. Muntok - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengajuan insentif bagi guru honorer	Kec. Muntok - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Peningkatan gaji & tunjangan guru PAUD dan TK/TPA	Desa Mancung Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Permasalahan dana BOS, dana DABA & dana fasilitasi agar dapat direalisasikan tepat waktu	Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengadaan buku-buku sekolah	Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pembangunan pagar sekolah SDN 06	Desa Mancung Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pembangunan parkir sekolah SDN 07	Desa Kayu Arang Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Permasalahan dana DABA & dana Fasilitasi agar dapat direalisasikan tepat waktu	Desa Sinar sari Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Peningkatan kesejahteraan guru PAUD, TK & SDN	Desa Sinar sari Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengembangan pendidikan luas sekolah seperti buta aksara	Desa Sinar sari Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pemberian bantuan biaya bagi mahasiswa/i Universitas Terbuka yang terkendala ekonomi	Desa Sinar sari Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pembangunan pos PKBM di setiap Kabupaten	Desa Sinar sari Kec. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Usulan penentuan insentif berdasarkan masa kerja karena guru TK rata-rata tamatan SMA sedangkan pemberian insentif harus S1	Kel. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Evaluasi dana BOS dan Fasilitasi karena masih banyak anak-anak yang tidak terima bantuan	Kel. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Permasalahan pencairan dana bantuan yang terlambat	Kel. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Rehabilitasi gedung sekolah	Kel. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengadaan bantuan mebeluer	Kel. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pembangunan sumur bor di sekolah	Kel. Kelapa - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pemberian bantuan beasiswa bagi pelajar kurang mampu tetapi berprestasi	Desa Air Kuang Kec. Jebus - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pembangunan gedung PAUD & TK	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengajuan kenaikan insentif guru PAUD & TK	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pengajuan kenaikan insentif guru PAUD & TK	Desa Tugang Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Penambahan ruang guru & mushola SDN 19	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Rehabilitasi gedung PAUD	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pembangunan SMK perikanan & kelautan	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang teritip - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pengadaan bantuan buku-buku (pertanian, peternakan, perkebunan & pertambangan)	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Adanya tindak lanjut terhadap permasalahan kekerasan antara junior & senior di di Pesantren Darul Abrol	Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip - Babar	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Pembangunan conblok halaman PAUD	Desa Terentang Kec. Kelapa	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Penambahan insentif para guru TPA	Desa Air Duren-Bangka	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan pembangunan TPA/TPQ	Desa Mabat-Bangka	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Fasilitas perpustakaan	Desa Air Duren-Bangka	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan buku paket	Kel.Rambak -Bangka	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan BOS dari Pemerintah	Desa Air Ruai-Bangka	Dinas Pendidikan	diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Guru-guru TPA meminta bantuan perbaikan gedung, perbaikan WC dan pemasangan PAM	Kel. Kudai- Bangka	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
		Bantuan pengembangan TPA/PAUD	Desa Mangka- Bangka	Dinas Pendidikan	diakomodir
		Pendirian sebuah madrasah	Kel. Sri Pemandang-Bangka	Dinas Pendidikan	Tidak diakomodir
2	Kesehatan				
		Regulasi Kebijakan Kemudahan Akses dan Pengurusan BPJS dan Pengaktifan Kembali Jamkesda	Desa Perlang-Bateng	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Kemudahan Akses dan Pengurusan BPJS dan Pengaktifan Kembali Jamkesda	Desa Terak-Bateng	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Kemudahan Akses dan Pengurusan BPJS dan Pengaktifan Kembali Jamkesda	Desa Keretak-Bateng	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pembangunan Posyandu dan pemberian insentif kepada pengelola Posyandu Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan	Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Insentif untuk kader Posyandu	Desa Air Seruk Sijuk-Belitung	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Sosialisasi BPJS dan fasilitasnya mengingat banyak sekali keluhan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	Desa lalang Manggar-Belitung Timur	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pemberian bantuan kepada pasien kurang mampu yang dirujuk ke Rumah Sakit di luar Belitung	Desa Lalang Manggar-Belitung timur	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Peningkatan layanan BPJS	Kec. Tempilang - Babar	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Peningkatan layanan BPJS	Kec. Jebus - Babar		diakomodir
		Permohonan JAMKESDA agar tidak dihapuskan	Kec. Jebus - Babar	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pelayanan kartu BPJS	Kec. Jebus - Babar	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Peningkatan layanan BPJS	Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Peningkatan status puskesmas tempilang menjadi puskesmas rawat inap	Kec. kelapa - Babar	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Kec. kelapa - Babar	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Pemberian penghargaan bagi pelaku medis yang berprestasi	Kec. kelapa - Babar	Dinas Kesehatan	diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberian bantuan ambulance	Kec. kelapa - Babar	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Peningkatan kesejahteraan tenaga perawat honorer	Kec. kelapa - Babar	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pembangunan polindes di Dusun Rangkui	Desa Kayu arang Kec. Kelapa - Babar	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Peningkatan status dan pemberian bantuan peralatan puskesmas Desa Kundi	Kec. Simpang Teritip	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pengurusan jaminan kesehatan BPJS masih sulit	Desa Mabat-Bangka	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Tidak ada WC umum yang memadai	Desa Cit-Bangka	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Biaya pengobatan masih di pungut biaya oleh rumah sakit meskipun terdaftar sebagai anggota BPJS	Desa Cit-Bangka	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pengajuan pembangunan pagar Puskesmas	Desa Air Duren-Bangka	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Pembangunan Posyandu ataupun Puskesmas Pembantu	Kel.Matras -Bangka	Dinas Kesehatan	Tidak diakomodir
		Banyak peserta BPJS tidak mampu bayar setoran	Kel.Srimenanti-Bangka	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Masih terdapat masyarakat yang belum menjadi peserta ASKES	Desa Air Ruai-Bangka	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pengadaan obat-obatan untuk Puskesmas	Desa Puding Besar-Bangka	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Pengobatan Katarak lebih diintensifkan	Kel.Srimenanti-Bangka	Dinas Kesehatan	diakomodir
		Perkembangan dan keberadaan RSUP	Desa Air Anyir-Bangka	Dinas Kesehatan	diakomodir
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		Penyediaan Air Bersih (terutama musim kemarau)	Desa Terak	Dinas PU	diakomodir
		Pengerukan Muara Sungai Desa Sungai Selan	Desa Sungai Selan-Batang	Dinas PU	diakomodir
		Bantuan infrastruktur/jalan dari desa Teru-Desa Riding Panjang ($\pm$ 6 km)	Desa Teru-Batang	Dinas PU	
		Bantuan Penyaluran Air dari PAM terutama musim kemarau	Desa Teru-Batang	Dinas PU	diakomodir
		Bantuan Infrastruktur fisik	Desa Kulur-Batang	Dinas PU	diakomodir
		Masyarakat juga dilibatkan dalam pengerjaan pelebaran jalan terutama bagi masyarakat yang lahannya terkena	Desa Kulur-Batang	Dinas PU	Tidak diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dampak pelebaran jalan			
		Normalisasi aliran sungai didesa Kulur	Desa Kulur-Bateng	Dinas PU	diakomodir
		Bantuan Sumur BOR terutama musim kemarau	Desa Melabun-Bateng	Dinas PU	diakomodir
		Bantuan pengaspalan jalan di Desa Serdang Jelutung II	Desa Serdang Jelutung II-Basel	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Perbaikan jembatan yang rusak di Desa Sebagian, Permis, Rajik	Desa Sebagian, Desa Permis, Desa Rajik- Basel	Dinas PU	diakomodir
		Peningkatan jalan tanah puru menjadi tanah aspal di Desa Jangkrik Dusun II, Dusun III dan Dusun IV	Desa Jangkrik-Basel	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Peningkatan Jalan menuju pantai desa Berigin dan peningkatan jalan menuju air panas sampai desa Permis	Desa Berigin & Permis-Basel	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Plateker Pemandian Air Panas	Kec. Simpang Rimba-Basel	Dinas Pu	diakomodir
		Perbaikan jalan di Kecamatan Simpang Rimba yang banyak Bergelombang	Kec. Simpang Rimba-Basel	Dinas Pu	diakomodir
		Bantuan pelebaran jalan di Desa Malik	Desa Malik-Kec. Payung-Basel	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Bantuan Penyediaan Air Bersih	Kec. Payung-Basel	Dinas PU	diakomodir
		Perbaikan Lapangan Bola	Kec. Payung-Basel	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pengaspalan makam jalan krlo panting	Kec. Payung-Basel	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Penyediaan air bersih	Kec. Tukak Sadai	Dinas PU	diakomodir
		Percepatan peningkatan jalan aspal tahun 2016 (600 m)	Kec. Tukak Sadai	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pengadaan Sumur Bor di Desa Terak	Desa Terak-Sadai	Dinas PU	diakomodir
		Bantuan Pengaspalan Jalan Tanjung Pauh ± 4 Km	Tanjung Pauh-Tukak Sadai	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Bantuan Pelebaran Jalan Simpang Air Gegas-Payung	Simpang Air Gegas-Payung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Keluhan Air PAM yang sering tidak mengalir	Simpang Air Gegas-Payung	Dinas PU	diakomodir
		Perpanjangan Kabel Dalam Laut (Pulau Salemba-Pulau Pongok)	Simpang Air Gegas-Payung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Perbaikan jalan yang sering menyebabkan kecelakaan	Kab. Bangka Selatan	Dinas PU	Tidak diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rehabilitasi Kolong	Air Ketekok-Tanjung Pandan	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan Saluran Drainase dan platdeker di Jalan dr. Susilo Tanjung Pandan	Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung	Dinas PU	diakomodir
		Perbaikan jalan lingkungan di Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung	Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Bantuan Mobil Sampah dan Tong Sampah	Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan Saluran Irigasi sepanjang 600 m	Desa Kacang Butor-Belitung	Dinas PU	diakomodir
		Perbaikan akses jalan menuju Gunung Tajam dan juga jalan pemakaman di dusun Air Penggantung	Desa Kacang Butor-Belitung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan Talud di daerah langganan banjir 2 km (dari km 21 sampai km 23)	Desa Kacang Butor-Belitung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Perbaikan jalan desa Air Seruk	Desa Air Seruk-Belitung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Rehabilitasi Dermaga Ulin	Membalong-Belitung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Perbaikan Ruas Jalan Simpang Rusa-Kembiri dan Kembiri-Tanjung Rusa	Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan Irigasi Permanen Dusun Sabung	Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Dinas PU	diakomodir
		Pembuatan embung permanen untuk perendaman lada dusun Sabung	Desa Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Dinas PU	diakomodir
		Pemenuhan kebutuhan Air minum bagi masyarakat (termasuk bantuan sumur Bor)	Desa Air Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembuatan talud di Rt 03/02 karena termasuk daerah rawan banjir	Desa Air Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembuatan talud di Rt 06/03 Air lintang sepanjang 2 km karena termasuk daerah rawan banjir	Desa Air Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perbaikan jalan provinsi sepanjang 1 km disertai pembangunan talud di Dusun Bira	Desa Air Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Jalan menuju tempat pariwisata Bukit Bangka sepanjang 5 km	Desa Air Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Perbaikan jalan provinsi dan pembuatan talud 500 m yang melewati Dusun Padang	Desa Air Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembuatan talud sepanjang 400 m di desa Jaya karena rawan banjir	Desa Air Kelubi Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Perbaikan jembatan rusak di Desa Pangkal lalang	Desa lalang Manggar-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pengadaan Air Bersih di Desa Renggiang	Simpang renggiang-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Irigasi untuk persawahan 48 ha desa lintang	Desa lintang Simpang Renggiang-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Jalan Tembus Desa Lintang-Jangkar Asam	Desa lintang Simpang Renggiang-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Drainase dan Talud di desa Simpang Tiga	Desa Simpang Tiga Simpang Renggiang-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Talud dan Drainase Aik tebat Desa Renggiang	Desa Renggiang Simpang Renggiang-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Saluran Drainase dan Pembuatan Talud Desa Batu penyu	Desa Batu Penyu Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pelebaran Jalan dari desa Ngarawan sampai desa Dinung	Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Sarana dan Prasarana Air Bersih dan MCK Desa Batu Penyu	Desa Batu Penyu Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Jalan lapangan Golf ke Pemda sepanjang 10 km	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pengaspalan Jalan Pantai Modong sepanjang 1,5 km (terkendala lewat hutan lindung)	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan Irigasi di kawasan transmigrasi Dusun	Desa Selingsing Gantung-Belitung	Dinas PU	diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Merantik	Timur		
		Pemasangan atribut proyek (papan informasi) di setiap pekerjaan	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan talud dan penyediaan air bersih untuk pulau terluar, pulau low.	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pengadaan Air Bersih di Desa Selumar dan Selingsing	Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Perbaikan Jalan di Dusun Selingsing	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pengadaan Air Bersih di Desa Burung Mandi	Desa Burung Mandi Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	diakomodir
		Pengadaan pemecah gelombang sepanjang 600 m di kawasan wisata Desa Burung Mandi	Desa Burung Mandi Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Penataan Lingkungan Desa Burung Mandi	Desa Burung Mandi Gantung-Belitung Timur	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan sumur BOR/sumur gali untuk mengatasi permasalahan air bersih	Kec.Tempilang - Babar		diakomodir
		penyediaan air bersih	Desa Limbung Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pengadaan pompa air	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan talud	Kec.Tempilang - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Permasalahan air PAM	Kec.Tempilang - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Jalan raya	Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pemeliharaan air PAM	Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Inspeksi kondisi jalan provinsi	Kec. Parit Tiga - Babar		diakomodir
		Pembangunan siring jalan	Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan TPA	Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan jembatan penghubung Simpang Dul	Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas PU	diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan sumur BOR di setiap RT	Desa Sinar Sari - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan sumur BOR di Dusun Buntek RT 12	Kel. Kelapa - Babar	Dinas PU	diakomodir
		pembangunan sumur BOR	Desa Tugang Kec. Kelapa	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan PAM	Desa Belo Laut Kec. Mentok - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan Talud dipinggir pantai karena dana Kabupaten terbatas	Desa Seberang Kec. Mentok - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan siring jalan sejak 2004 belum terealisasi	Desa Mancung Kec. Kelapa - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Penyediaan sarana air bersih	Desa Air Limau Kec. Mentok - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Penyediaan sarana air bersih	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Dinas PU	diakomodir
		Pengembangan air tipah untuk sumber air	Kec. Kelapa - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Peningkatan jalan pangkal kunyit (puru-aspal)	Desa Kayu Arang Kec. Kelapa - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Peningkatan jalan aspal sepanjang 8 Km baru terealisasi 2,5 Km	Desa Kayu Arang Kec. Kelapa - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan siring jalan tahun 2008 sepanjang 4000M & baru terealisasi 1500M tahun 2015	Desa Kayu Arang Kec. Kelapa - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Penyediaan sarana air bersih	Desa Simpang Gong Kec. Simpang teritip - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Penyediaan sarana air bersih	Desa Terentang Kec. Kelapa	Dinas PU	diakomodir
		Pengajuan pembangunan siring	Desa Sinar Sari - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Peningkatan jalan Jeragen	Kel. Kelapa - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan WC di tempat umum	Desa Limbung Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan aspal jalan menuju SDN	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan WC umum	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan siring disepanjang jalan	Desa Tugang Kec. Kelapa	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembangunan WC umum	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Penyediaan sarana air PAM	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip - Babar	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Desa Mabat-Bangka	Dinas PU	diakomodir
		Perbaikan fasilitas sarana dan prasarana air bersih	Desa Air Duren-Bangka	Dinas PU	diakomodir
		Pembangunan siring	Desa Air Duren-Bangka	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Banyak jalan-jalan belum diaspal	Desa Kayu Besi-Bangka	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Perbaikan jembatan penghubung	Desa Kayu Besi-Bangka	Dinas PU	diakomodir
		Sarana dan prasarana jalan akses belum memadai	Kel.Rebo-Bangka	Dinas PU	diakomodir
		Peningkatan jalan raya desa	Desa Jurung-Bangka	Dinas PU	diakomodir
		Pelebaran dan perbaikan jalan	Desa Tanjung Putat-Bangka	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Pembuatan plat deuker/got	Desa Pagarawan-Bangka	Dinas PU	Tidak diakomodir
		Kesesuaian RTRW terhadap kegiatan di sekitar Pantai Mondong	Desa Padang Manggar-Belitung Timur	Bappeda	diakomodir
		Penolakan rencana masuknya kapal isap produksi	Kel.Matras-Bangka	Bappeda	diakomodir
4	Perumahan Rakyat				
		pembangunan rumah layak huni	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Dinas PU	Tidak Diakomodir
		pembangunan rumah layak huni	Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip - Babar	Dinas PU	Tidak Diakomodir
		Pembangunan rumah layak huni	Kel.Matras-Bangka	Dinas PU	Tidak Diakomodir
6	Perencanaan				

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Fasilitasi Kebijakan Perencanaan/Usulan Desa yang tidak diakomodir oleh kabupaten	Desa Kulur	Bappeda	Tidak Diakomodir
		Bantuan Sosialisasi Program Pemerintah Daerah Yang tidak Sampai Ke desa dan cara mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi	Desa Kulur	Bappeda	Tidak Diakomodir
		Program Pelatihan tidak sampai ke Desa	Desa Kulur	Bappeda	Tidak Diakomodir
		Percepatan pembangunan di Kecamatan Tukak Sadai	Kec. Tukak Sadai-Basel	Bappeda	Diakomodir
7	Perhubungan				
		Permohonan Pemindahan Pelabuhan ke Muara	Desa Sungai Selan-bateng	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Pelabuhan Jeti di Tanjung Pauh (± 150 M)		Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Optimalisasi Pelabuhan Sadai	Kabupaten. Basel	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Dermaga khusus untuk menunjang pariwisata	Desa Keciput Sijuk-Belitung	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Pengerukan muara sungai Penarikan di Tanjung kelayang	Desa Keciput Sijuk-Belitung	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Perpanjangan Dermaga Tanjung Rusa 200 meter	Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Pengembangan trans Sumatra Kalimantan dan aktivasi KM Menumbing	Gantung-Belitung Timur	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Pengerukan muara sungai di Dusun Seberang	Gantung-Belitung Timur	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
		Tidak ada traffic lights (lampu lalu lintas)	Desa Air Ruai-Bangka	Dinas Perhubungan	Tidak Diakomodir
8	Lingkungan Hidup				
		Pelatihan Daur Ulang Sampah	Desa Air Ranyak-Belitung	BLHD	Diakomodir
		Pembersihan kolong seluas 5 ha yang banyak dipenuhi enceng gondok	Desa Padang Manggar-Belitung Timur	BLHD	Tidak Diakomodir
		Limbah kelapa sawit perusahaan	Desa Kayu Besi-Bangka	BLHD	Diakomodir
		Pencemaran air laut akibat penambangan kapal isap	Desa Air Hantu-Bangka	BLHD	Diakomodir
		Butuh bak sampah dan pelatihan mengenai pemanfaatan limbah	Kel.Sungailiat-Bangka	BLHD	Tidak Diakomodir
		Rusaknya ekosistem pantai oleh kapal isap	Kel.Kuto Panji-Bangka	BLHD	Diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Masalah limbah TI rajuk	Desa Kota Waringin-Bangka	BLHD	Diakomodir
		Aktivitas Kapal Keruk yang merusak pantai	Desa Deniang-Bangka	BLHD	Diakomodir
9	Pertanahan				
		Penyelesaian Sengketa Tanah	Desa Air Kelubi-Belitung Timur	Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan	Diakomodir
		Sosialisasi pembayaran PBB karena masyarakat mengeluh terhadap kenaikan pajak yang tinggi	Desa Padang Manggar-Belitung Timur	Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan	Diakomodir
		Sosialisasi dan pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Pengelolaan lahan yang berstatus hutan	Kel. Rebo-Bangka	Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Sengketa lahan perkampungan dengan pihak swasta	Desa Deniang-Bangka	Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan	Diakomodir
		Sengketa tapal batas Desa	Desa Kota waringin-Bangka	Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan	Diakomodir
		Pemanfaatan lahan	Kec.Sungailiat-Bangka	Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
10	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
		Kemudahan Pembuatan e-KTP untuk masyarakat pendatang	Desa Baskara-Bhakti	Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Pembuatan E-KTP tersendat karena alat-alatnya banyak	Kec.Air Gegas	Capil	Tidak Diakomodir
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan	Desa Sungai Selan – Bateng	BP3AKB	Tidak Diakomodir
		Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan	Desa Tanjung Gunung – Bateng	BP3AKB	Tidak Diakomodir
		Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan	Desa Batu Belubang – Bateng	BP3AKB	Tidak Diakomodir
		Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan	Desa Tugang	BP3AKB	Tidak Diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kec. Kelapa		
		Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	BP3AKB	Tidak Diakomodir
		Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan	Desa Terentang Kec. Kelapa	BP3AKB	Tidak Diakomodir
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
13	Sosial				
		Pembangunan Balai Masjid dan Pondok Pesantren	Desa Perlang – Bateng	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan Pembangunan Masjid	Desa Terak-Bateng	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan Anggaran untuk Infrastruktur Sosial seperti Masjid	Desa Sungai Selan	Desa Sungai Selan	Tidak Diakomodir
		Mengatasi Masalah Seringnya Kekerasan Anak	Pangkalan Baru-Bateng	BP3A KB	Diakomodir
		Permasalahan Kenakalan Remaja Khususnya Staus Pelajar	SMKN 1 Arung Dalam Koba-Bateng	BNN Provinsi	Tidak Diakomodir
		Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan Narkoba	SMKN 1 Arung Dalam Koba-Bateng	BNN Provinsi	Tidak Diakomodir
		Pelaksanaan reses rutin dilaksanakan di desa kulur	Desa Kulur-Bateng	Sekretariat Dewan	Diakomodir
		Tindaklanjut ubi racun oleh DPRD Provinsi	Desa Gunung Muda-Bangka	Sekretariat Dewan	Tidak Diakomodir
		Bantuan pengembangan KEK Desa Beriga dengan Prioritas Tenaga Kerja tamatan SMP/SMA di wilayah Bateng	Desa Kulur-Bateng	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan pembangunan masjid desa Kulur	Desa Kulur-Bateng	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Sosialisasi dan informasi kepada masyarakat desa kulur terkait proposal yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi tetapi tidak pernah ditindaklanjuti	Desa Kulur-Bateng	Biro Kesra	Diakomodir
		Bantuan dana terkait dengan perayaan hari jadi desa	Desa Melabun-Bateng	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Solusi terkait adanya Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima baju di saat Pilkada	Desa Melabun-Bateng	Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Masjid Baiturahman	Kec.Payung-Basel	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan Dana Daba untuk Peruntukan Perawatan Aspal	Kec. Tukak Sada	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Gedung dilengkapi mobile disamping kantor desa	Desa Terep Kec.Tukak Sada	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pelaksanaan reses dilaksanakan di desa-desa	Kec.Air Gegas	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan DABA untuk Kebutuhan Basel	Kab. Bangka Selatan	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Masjid At-taun (belum terealisasi)	Desa pelumpang jaya-Belitung	Sekretariat Daerah Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Rehabilitasi Surau dan Pembangunan TPA Nurul Iman	Desa Lesung Batang-Belitung	Sekretariat Daerah Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Tanah Pekuburan Martapura	Desa Lesung Batang-Belitung	Dinas Kesejahteraan Sosial	Diakomodir
		Pembangunan Surau dan perbaikan kerusakan tempat wudhu	Desa Kacang Butor-Belitung	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan TPA di dusun Kepayang	Desa Kacang Butor-Belitung	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan perbaikan masjid di Desa Suak Gual	Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik-Belitung	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Rehabilitasi Masjid Al-Jamaah Air Seruk	Desa Air Seruk Sujuk- Belitung	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan masjid dan musholla di RT 06/RW 03	Desa Kelubi Manggar-Belitung Timur	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Tempat Pendidikan Alquran di RT 02/02	Desa Kelubi Manggar-Belitung Timur	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Insentif Marbot Masjid dan Musholla	Desa Padang Manggar-Belitung Timur	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan masjid di desa lassar dan air batu	Desa Lassar dan Air Batu Membalong-Belitung	Sekretariat Daerah- Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Masjid al amin dusun Seberang Desa	Desa Selingsing Gantung-Belitung	Sekretariat Daerah-	Tidak Diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Selingsing	timur	Biro Kesra	
		Pembangunan masjid Al Anshor	Kec.Tempilang - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan mushola	Kec.Tempilang - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan tempat pemandian	Kec.Tempilang - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan masjid masjid Baitul Rahma yang sudah berumur $\pm$ 80 tahun	Desa Sangku Kec.Tempilang - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengadaan bantuan peralatan kantor BKPRMI	Kec. Jebus - Babar	Biro Umum	Tidak Diakomodir
		Pembangunan makam terpadu	Kec. Muntok - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan pagar kuburan	Kec. Muntok - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengadaan bantuan mobil jenazah untuk yayasan tulus bakti	Kec. Muntok - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pemberian bantuan perlengkapan baju dan perlengkapan barongsai di daerah kampung sawah	Kel. Tanjung Kec. Muntok - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan masjid	Kec. Muntok - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengadaan sumur bor sebanyak 6 titik, 1 titik di setiap RT	Kec. Muntok - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Masjid	Desa Mancung Kec. Muntok - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Koordinasi terkait pengembalian fungsi penghulu untuk mengantisipasi paham-paham yang tidak bertanggungjawab dimasyarakat	Desa Sinar sari - Babar	Dinas Sosial	Tidak Diakomodir
		Pemberian bantuan dana hibah untuk masjid	Desa Beruas - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan gedung TPA	Desa Beruas - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengajuan P2N (Penghulu) agar tetap diadakan	Desa Beruas - Babar	Dinas Sosial	Tidak Diakomodir
		Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin karena gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan	Desa Air Kuang Kec. Jebus - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Masjid	Desa Limbung Kec. Jebus - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Pagar & WC di area masjid	Desa Limbung	Biro Kesra	Tidak Diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kec. Jebus - Babar		
		Fasilitasi penyuluhan & tenaga pendidik keagamaan	Desa Tugang Kec. Kelapa	Dinas Sosial	Tidak Diakomodir
		Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin	Desa Tugang Kec. Kelapa	Biro Kesra	Diakomodir
		Pengembangan perluasan lahan untuk masjid	Desa Tugang Kec. Kelapa	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan pagar majelis taklim	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengembangan perluasan lahan untuk masjid	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengadaanpengeras suara masjid	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengajuan bantuan modal untuk mendirikan cuci mobil/motor & air isi ulang	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Pagar mushola	Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Kejelasan pencairan dana hibah TPA/TPQ	Kel.Sungailiat-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan tempat ibadah agama Kongfucu	Desa Air Duren-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Beras Miskin	Desa Air Duren-Bangka	Dinas Sosial	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Kesekretariatan Majelis Pencinta Islam	Desa Kayu Besi-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Sarana dan Prasarana Ponpes sangat minim	Desa Kayu Besi-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pagar masjid	Desa Kayu Besi-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan seperangkat rebana dan seragam pengajian	Kel.Srimenanti-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Kehadiran Anggota DPRD Provinsi dalam acara keagamaan	Desa Riding Panjang-Bangka	Setwan	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Pos Kamling	Kec.Sungailiat-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan menara masjid	Desa Air Ruai-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Mobil jenazah	Desa Air Ruai-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Honorarium guru TPA	Desa Air Ruai-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Kesulitan mendapatkan bantuan dana hibah	Desa Dalil-Bangka	Biro Kesra	Diakomodir
		Perbaikan gedung, WC dan PAM untuk TPA	Kel. Kudai-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Perbaikan tempat ibadah Klenteng	Desa Karang Panjang-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan pengecatan Masjid	Desa Puding Besar-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Sosialisasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah	Desa Air Anyir-Bangka	Biro Kesra	Diakomodir
		Pengembangan TPA/PAUD	Desa Mangka-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Musolla	Desa Air Ruai-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Masalah Ahmadiyah	Kel. Srimenanti-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan masjid, sumur bor, pagar dan ruangan	Kel. Srimenanti-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
14	Tenaga Kerja				
		Solusi Mengatasi PHK Karyawan	Pangkalan Baru-Bateng	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Fasilitasi pertemuan antara Perusahaan dan PHK karyawan di Desa Melabun (PHK disinyalir tidak sesuai dengan aturan)	Desa Melabun-Bateng	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Advokasi terhadap alokasi CSR PT. Alam Karya Sejahtera kepada masyarakat	Desa Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Fasilitasi dan advokasi terhadap hak-hak karyawan PT. SAP	Desa Kelubi Manggar-Belitung Timur	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja	Desa padang Manggar-belitung Timur	Disnakertrans	Diakomodir
		fasilitasi penggunaan tenaga lokal di perkebunan sawit	Kec. Tempilang - Babar	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		fasilitasi penggunaan tenaga lokal di perkebunan sawit	Desa Kayu arang Kec. Kelapa - Babar	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian Upah Minimum	Desa Kayu arang Kec. Kelapa - Babar	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Desa Air Kuang Kec. Jebus - Babar	Disnakertrans	Diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Desa Sinar sari - babar	Disnakertrans	Diakomodir
		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Desa Air Limau Kec. Mentok - Babar	Disnakertrans	Diakomodir
		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Desa Terentang Kec. Kelapa	Disnakertrans	Diakomodir
		Penyediaan alternatif lapangan pekerjaan	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga- Babar	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Pelatihan tentang pengembangan produksi hasil pertanian	Kel Jelitik-Bangka	Disnakertrans	Diakomodir
		Pelatihan pemanfaatan limbah sampah	Kel.Sungailiat-Bangka	Disnakertrans	Diakomodir
		Perjanjian kerja antara karyawan dengan PT.Sinarinto	Desa Pagarawan-Bangka	Disnakertrans	Diakomodir
		Pengutamaan perekrutan tenaga kerja lokal	Desa Mabat-Bangka	Disnakertrans	Tidak Diakomodir
		Pelatihan-pelatihan untuk pemuda	Desa Mabat-Bangka	Disnakertrans	Diakomodir
15	Pangan				
		Pengembangan usaha ketahanan pangan dan peternakan sapi	Desa Selingsing Gantung-Belitung timur	BKP	Tidak Diakomodir
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		Permodalan Koperasi Bagi Masyarakat yang Benar-Benar Butuh	Desa Tanjung Gunung-Bateng	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Bantuan Modal Industri Kreatif	Desa Sungai Selan-Bateng	Dinas KUMKM	Tidak Diakomodir
		Bantuan Peralatan bagi pengrajin kulit ikan pari	Desa Air Ranyak-Belitung	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Bantuan dan pendampingan bagi pengrajin khas Parang Badau	Kecamatan Badau-Belitung	Dinas KUMKM	Tidak Diakomodir
		Pendampingan usaha kerajinan untuk mendukung Pariwisata	Desa Air Seruk Sijuk-Belitung	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Fasilitasi bagi usaha Batako masyarakat yang belum memiliki CV	Desa Padang Manggar-Belitung Timur	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Fasilitasi Pengembangan UMKM Dusun Marang lepau	Damar-Belitung Timur	Dinas KUMKM	Diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberian bantuan permodalan, supervisi, serta kemasan bagi UKM berbasis kearifan lokal	Kec. Mentok - Babar	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Fasilitasi pengembangan KUBE untuk membantu ekonomi masyarakat	Kel. Kelapa - Babar	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Fasilitasi pengembangan usaha madu, beragam olahan & pemasaran serta dapat dijadikan icon Desa Tugang	Desa Tugang Kec. Kelapa - Babar	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pembuatan kue	Desa Air Limau Kec. Mentok - Babar	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Pengajuan bantuan mesin bagi pengrajin rotan	Desa Terentang Kec. Kelapa	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Desa Terentang Kec. Kelapa	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Bantuan untuk usaha kecil dan menengah	Kel.Jelitik-Bangka	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Bantuan untuk ibu-ibu dibidang usaha kecil dan menengah	Kel.Kudai-Bangka	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Bantuan dana dan alat perlengkapan untuk berdagang ikan	Kel.Sungailiat-Bangka	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Bantuan pengembangan usaha seperti suyak,tangguk,dll	Desa Mangka-Bangka	Dinas KUMKM	Diakomodir
		Pasar Desa	Desa Air Duren-Bangka	Dinas KUMKM	Diakomodir
17	Penanaman Modal				
18	Kebudayaan				
		Pengembangan Sanggar Tari	Desa Air Ranyak-Belitung	Disbudpar	Diakomodir
		Bantuan Dana untuk pentas seni budaya dan Panggung Permanen untuk pagelaran seni budaya	Kecamatan Badau-Belitung	Disbudpar	Diakomodir
		Pelestarian cagar budaya kelenteng	Kec. Muntok	Disbudpar	Diakomodir
		Adanya dukungan terhadap event budaya budaya seperti pesta adat Desa Kundi	Kec. Simpang Teritip	Disbudpar	Diakomodir
		Pengusulan klenteng menjadi cagar budaya	Desa Gunung Muda-Bangka	Disbudpar	Diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kepemilikan Aset wisata	Kel.Jelitik-Bangka	Disbudpar	Diakomodir
19	Kepemudaan dan Olah Raga				
		Bantuan Sarana Prasarana Bola Voli dan bola Kaki	Desa Bhaskara Bhakti	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan Pembangunan Fasilitas Panjat Tebing dengan luas lahan 7,2 Ha	SMKN 1 Pangkalan Baru-Bateng	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Lapangan Sepakbola	Desa Pelumpang Jaya-Belitung	Dispora	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Lapangan Sepakbola Dusun Marang Lepau	Desa Burung Mandi Damar-Belitung Timur	Dispora	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Kec. Jebus - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	Desa Beruas - Babar	Dispora	Tidak Diakomodir
		Pembangunan lapangan sepak bola & volley	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Penambahan luas lapangan sepak bola sekitar 100 meter	Desa Terentang Kec. Kelapa	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan peralatan olahraga bola voli	Desa Air Ruai-Bangka	Dispora	Tidak Diakomodir
		Bantuan renovasi lapangan bola basket	Desa Deniang-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan sarana dan prasarana olahraga bagi pemuda	Desa Karang Panjang-Bangka	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Bantuan Lapangan bola	Desa Cengkong Abang-Bangka	Dispora	Tidak Diakomodir
20	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
		Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Desa Kayu arang Kec. Kelapa - Babar	Kesbanglinmas	Tidak Diakomodir
21	Pemerintahan Umum dan Kepegawaian				
		Penyelesaian Batas Wilayah Desa Terak, Pasir Garam, Dan Desa Pedindang	Desa Terak, Pasir Garam, Dan Desa Pedindang- Bateng	Biro Pemerintahan	Diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penolakan terkait Isu Penjualan Pulau-Pulau Kecil	Desa Baskara Bhakti	Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Pengangkatan KADES Desa Air Jangkang	Desa Air Jangkang-Bateng	Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Bantuan Dana Hibah	Desa Kulur	Biro Kesra	Diakomodir
		Masalah tapal batas desa Serdang dan Sebagin	Desa Serdang-Sebagin-Basel	Biro Pemerintahan	Diakomodir
		Pemekaran Dusun Pancur I menjadi Desa, yang semula masih bergabung dengan Desa Padang	Desa Padang Manggar Belitung Timur	Setda-Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan khusus (memprioritaskan proposal pembangunan masjid, WC & pagar)	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan khusus (proposal pembangunan masjid yang belum terealisasi padahal sudah disetujui Gubernur)	Kec.Tempilang - Babar	Biro Kesra	Tidak Diakomodir
		Permintaan perizinan aktivitas pertanian di hutan produksi	Desa Cit-Bangka	Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Bantuan Gubernur ke pemerintah desa jangan dilaksanakan pada akhir tahun	Air Duren-Bangka	Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
		Dana Satam Emas 1,4 milyar tidak dapat digunakan karena juknis dan juklak tidak jelas	Kel.Kudai-Bangka	Biro Pemerintahan	Tidak Diakomodir
22	Perpustakaan				
		Pembangunan gedung perpustakaan	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip - Babar	BPAD	Tidak Diakomodir
		Fasilitas Perpustakaan desa minim	Air Duren-Bangka	BPAD	Tidak Diakomodir
23	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
		Bantuan Beras Miskin Kepada Masyarakat yang Benar-Benar Butuh	Desa Tanjung Gunung-Bateng	BPMPD	Diakomodir
		Pemberdayaan Masyarakat Pasca timah di dusun 3 rembikang	Desa Air Seruk Sijuk Belitung	BPMPD	Tidak Diakomodir
		Fasilitasi Relokasi masyarakat Dusun Sawak	Desa Selingsing Gantung-Belitung	BPMPD	Tidak Diakomodir
		Pengadaan pelatihan BPD	Kec.jebus - Babar	BPMPD	Tidak Diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Fasilitasi penyegaran kembali perangkat Desa bersama anggota BPD	Kec jebus - Babar	BPMPD	Diakomodir
		Penambahan kuota beras miskin	Kel.Matras-Bangka	BPMPD	Tidak Diakomodir
		Kesulitan Pemerintah desa mengelola dana Desa	Desa Air Anyir-Bangka	BPMPD	Diakomodir
		Sosialisasi program dan kegiatan pemerintah di desa	Kel.Jelitik-Bangka	BPMPD	Diakomodir
24	Statistik				
25	Kearsipan				
26	Komunikasi dan Informatika				
		Bantuan Sarana dan Prasarana Internet	SMKN 1 Pangkalan Baru-Bateng	Dinas Kominfo	diakomodir
		Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi di Pulau terluar, Pulau Low	Gantung-Belitung Timur	Diskominfo	diakomodir
		Pemasangan WI-FI di sekolah-sekolah oleh Pemerintah daerah	Kel.Kenanga-Bangka	Diskominfo	diakomodir
B.	URUSAN PILIHAN				
1	Pertanian				
		Bantuan Bibit karet, padi dan lada	Desa Tanjung Gunung-Bateng	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan Bibit lada, karet dan junjung lada	Desa Terak-bateng	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan di Sektor Perkebunan	Desa Sungai Selan-Bateng	Dispartanbunnak	Diakomodir Pusat
		Fasilitasi Pengembangan Rumput di Kebun Sawit Peternak Sapi	Desa Sungai Selan-Bateng	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Sosialisasi Program Bidang Pertanian (untuk mengajukan Proposal Pertanian)	Desa Teru-Bateng	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Solusi Bantuan terkait Isu hadirnya Lada Palsu dari luar daerah	Desa Teru-Bateng	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan Pupuk Subsidi	Desa Air Jangkang	Dispartanbunnak	Diakomodir
		Harga ubi yang di panen petani rendah padahal merupakan program pemerintah	Desa Kulur	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Solusi kebijakan terkait dengan rendahnya harga sawit	Desa Kulur	Dispartanbunnak	Diakomodir pusat



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Solusi kebijakan terkait dengan rendahnya harga karet	Desa Kulur	Dispartanbunnak	Diakomodir pusat
		Bantuan bibit sawit bagi petani	Desa Kulur	Dispartanbunnak	Diakomodir pusat
		Bantuan Bibit Lada	Desa Melabun-Bateng	Dispartanbunnak	diakomodir
		Bantuan obat/racun pembasmi serangga tanaman lada	Desa Melabun-Bateng	Dispartanbunnak	Diakomodir pusat
		Bantuan anggaran pertanian/perkebunan	Desa Lampur-Bateng	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Informasi tentang adakah aturan tentang harga TBS untuk tingkat petani	Desa Lampur-Bateng	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan traktor untuk petani	Desa Lampur-Bateng	Dispartanbunnak	Diakomodir pusat
		Permasalahan hilangnya 100 Ha lahan pertanian di Kec. Simpang Rimba	Kec. Simpang Rimba-Basel	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Permohonan pembuatan tempat lada	Kec. Payung-Basel	Dispartanbunnak	Tidak diakomodir
		Mohon pengadaan bibit lada	Kec. Payung-Basel	Dispartanbunnak	Tidak Diakomodir
		Bantuan Bibit Ternak (Bebek, Sapi, Ayam)	Desa Tanjung Gunung-Bateng	Distanbunak	Diakomodir pusat
		Bantuan Beternak Sapi	Desa Sungai Selan	Distanbunak	tidak diakomodir
		Pembangunan Pabrik Pengolahan Ikan	Kecamatan Tukak Sadai	Distanbunak	Tidak diakomodir
		Perluasan Kawasan Perkebunan Untuk Petani di Desa Tiram	Kecamatan Tukak Sadai	Distanbunak	Tidak diakomodir
		Penyediaan Gudang Penyimpanan Alat Pertanian	Kec.Air Gegas-Basel	Distanbunak	Tidak diakomodir
		Bantuan Bibit Lada	Kec.Air Gegas-Basel	Distanbunak	Tidak diakomodir
		Kebijakan Terkait Turunnya Ekspor Lada dan Sawit	Kec.Air Gegas-Basel	Distanbunak	Tidak diakomodir
		Bantuan dan bimbingan teknis bagi pengembangan hasil perkebunan nanas Badau	Kecamatan Badau-Belitung	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Peningkatan Jumlah pupuk NPK Subsidi dari jumlah eksisting saat ini 8 karung per tahun	Desa Kacang Butor-Belitung	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan Bibit dan pendampingan petani Lada	Desa Kacang Butor-Belitung	Distanbunnak	diakomodir
		Bantuan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan Sawit di desa Suak Gual	Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik-Belitung	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan pupuk subsidi	Desa Suak Gual Kecamatan Selat	Distanbunnak	Tidak diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nasik-Belitung		
		Sertifikasi Bibit Kelapa Sawit dan stabilisasi harga TBS yang menguntungkan petani	Desa Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan alat , pupuk, pestisida dan kapur kepada petani desa lassar dan air batu	Desa Lassar dan Air Batu Membalong-Belitung	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan alat berat untuk cetak sawah	Desa Lassar dan Air Batu Membalong-Belitung	Distanbunnak	Diakomodir pusat
		Bantuan kepada petani sayur	Desa Terong Manggar Belitung Timur	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan pengadaan mesin penetas telur dan pemberian bibit ternak unggulan	Desa Kurnia Jaya Manggar Belitung Timur	Distanbunnak	Diakomodir pusat
		Pemberian bibit dan pupuk lada	Desa Kurnia Jaya Manggar Belitung Timur	Distanbunnak	Diakomodir pusat
		Bantuan Bibit Lada dan Pupuk	Desa Kelubi Manggar-Belitung Timur	Distanbunnak	Diakomodir pusat
		Bantuan Bibit pertanian	Simpang Renggiang Belitung Timur	Distanbunnak	Diakomodir pusat
		Pemberian bibit lada dan pupuk	Desa Batu Penyu Gantung-Belitung timur	Distanbunnak	Diakomodir pusat
		Pembangunan Cetak Sawah 50 Ha Desa Batu Penyu	Desa Batu Penyu Gantung-Belitung timur	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Pemberian bibit lada dan pupuk	Desa Burung Mandi Damar-Belitung timur	Distanbunnak	Tidak diakomodir
		Pengadaan bibit kelapa	Kec Jebus - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Pengadaan bantuan bibit lada,karet & nira yang berkualitas	Kec. Kelapa - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Pengadaan pembukaan lahan sawah baru	Kec. Kelapa - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Penyaluran pupuk subsidi masih terbatas untuk jumlah & jenisnya	Desa Kayu arang Kec. Kelapa - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Peningkatan kualitas pupuk bersubsidi	Desa Kayu arang	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kec. Kelapa - Babar		
		Pengadaan bantuan bibit karet, lada, sawit & pupuk	Kec. Simpang Teritip	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Pengadaan bantuan bibit lada	Desa Limbung Kec. Jebus - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Desa Tugang Kec. Kelapa	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Fasilitasi Penyelesaian PT Bumi Permai Lestari terkait pemberian kontribusi kepada masyarakat	Desa Tugang Kec. Kelapa - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Fasilitasi penyelesaian penolakan PT.NAM terkait lahan	Desa Tugang Kec. Kelapa - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Pengadaan bantuan modal (bibit, penanam, perawatan, serta pupuk bersubsidi)	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Pengadaan bantuan (operasional, traktor, penyuluhan & bibit)	Desa Simpang Gong Kec.Simpang Teritip - Babar	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Pengadaan bantuan bagi peternak sapi	Desa Terentang Kec. Kelapa	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan bibit lada dan karet	Kel.Rebo-Bangka	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan bibit pertanian dan peternakan	Desa Air Anyir-Bangka	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Bantuan bibit tanaman dan pupuk	Kel.Kudai-Bangka	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Kendala masalah gudang penyimpanan pupuk subsidi	Desa jurung-Bangka	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Perlu adanya penataan irigasi di daerah pertanian	Desa Pagarawan-Bangka	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
		Perlu adanya Penyuluh Pertanian Lapangan	Desa Air Anyir-Bangka	Dispertenbunnak	Tidak diakomodir
3	Kehutanan				
		Pengkajian Ulang HTI	Desa Perlang, Kulur, Belimbing-Bateng	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengkajian Ulang HTI Desa Keretak	Desa Keretak-Bateng	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengajuan Penghentian HTI	Desa Sungai Selan-Bateng	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengkajian Ulang Izin Penggunaan lahan Produktif (perkebunan kelapa sawit,)	Desa Sungai Selan-Bateng	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bantuan Masalah HTI	Desa Kulur-Bateng	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengkajian Ulang Ijin HTI yang telah merugikan masyarakat	Desa Melabun-Bateng	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Penolakan HTI (PT.Lestari Jaya) terutama desa Gudang	Desa Gudang-Basel	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Penanganan konflik lahan hutan yang banyak ditanami sawit menyebabkan usaha perkebunan masyarakat terganggu. Pada akhirnya masyarakat berkebun di kawasan lindung Desa Kacang Butor	Desa Kacang Butor-Belitung	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Sosialisasi HKM sebagai salah satu model alternatif berusaha di kawasan hutan	Desa Air Seruk Sijuk-Belitung	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Kebijakan HKM untuk Hutan Lindung karena lahan di sekitar masyarakat sudah dibeli perusahaan sarwit	Desa Kelubi Manggar Belitung Timur	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Penyelesaian Sengketa HTI di desa Lintang dan Desa Renggang	Simpang Renggang-Belitung Timur	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Menolak Pembangunan HTI	Desa Bulin Kec. Tempilang - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Permasalahan HTI	Kec. Jebus - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Menolak Pembangunan HTI	Desa Menselek Kec. Jebus - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Permasalahan HTI	Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengajuan alih fungsi dari HTI ke HPL	Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengajuan alih fungsi hutan	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Menolak Pembangunan HTI baik di Desa Kundi & Desa Simpang Tiga	Kec. Simpang Teritip	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengajuan status hutan produksi menjadi hutan rakyat	Desa Limbung Kec. Jebus - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Permohonan agar hutan produksi dapat dikelola masyarakat & hutan rakyat diperluas	Desa Limbung Kec. Jebus - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengajuan untuk perluasan kawasan hutan rakyat agar dapat dimanfaatkan untuk pertanian & perkebunan	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengajuan status hutan produksi menjadi hutan rakyat	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Pengajuan lahan tidur untuk dijadikan taman kota	Desa Parit Tiga Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Terganggunya dominannya hutan produksi di suatu wilayah	Kel.Sungailiat-Bangka	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Sosialisasi mengenai kawasan hutan	Desa Gunung Muda-Bangka	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Kejelasan status hutan	Desa Karang Panjang-Bangka	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
		Memperjuangkan hutan produksi menjadi hutan rakyat	Desa Kotawaringin-Bangka	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral				
		Penutupan Aktivitas Penambangan Pasir Kuarsa	Desa Perlang- Bateng	ESDM	Tidak Diakomodir
		Evaluasi Aktivitas Penambangan dan Peninjauan Amdal PT MKM	Desa Tanjung Gunung-Bateng	ESDM	Tidak Diakomodir
		Aktualisasi Penyaluran Dana CSR PT MKM	Desa Tanjung Gunung-Bateng	ESDM	Tidak Diakomodir
		Pembangunan Penerangan/Lampu Jalan	Desa Terak-Bangka Tengah	ESDM	Tidak Diakomodir
		Pengaktifkan Kembali Kegiatan Pertambangan	Desa Sungai Selan-bateng	ESDM	Tidak Diakomodir
		Solusi Masalah Timah yang Menjadi Perekonomian Masyarakat	Desa Air Jangkang-Bateng	ESDM	Tidak Diakomodir
		Sosialisasi informasi tentang tata kelola perizinan Kapal Isap Produksi Terutama Batas Tambang	Desa Kulur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Solusi terhadap aktivitas penambang yang tidak memiliki ijin	Desa Kulur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Sosialisasi dan informasi terkait dengan ijin aktivitas penambangan di desa kulur khususnya di DAS	Desa Kulur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Permohonan Penambahan SUTP 150 kp	Kab.Basel	ESDM	Tidak Diakomodir
		Kemudahan dalam mendapatkan listrik	Lepar-Pongok-Kab.Basel	ESDM	Tidak Diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengadaan listrik gratis di dusun Pancur I yang semula sudah dijanjikan Distamben	Desa Padang Manggar-Belitung Timur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Perubahan pangkalan minyak menjadi pangkalan gas elpiji	Desa Lalang Manggar-Belitung Timur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Pelarangan dan penertiban operasi Tambang Laut	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Pengadaan lampu jalan di dusun seberang	Gantung-Belitung Timur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Operasionalisasi SPBU Dusun Selumar Desa Selingsing	Desa Selingsing Gantung-Belitung timur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Pemasangan sarana dan prasarana kelistrikan di Dusun Selumar	Desa Selingsing Gantung-Belitung timur	ESDM	Tidak Diakomodir
		Penyediaan jaringan listrik	Kec.Tempilang - Babar	Dinas Tamben	Tidak Diakomodir
		Penambahan jaringan listrik & di data masyarakat yang kurang mampu	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Dinas Tamben	Tidak Diakomodir
		Penyediaan jaringan listrik	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas Tamben	Tidak Diakomodir
		Penyediaan aliran listrik	Desa Tugang Kec. Kelapa	Dinas Tamben	Tidak Diakomodir
		Penyediaan aliran listrik	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang teritip - Babar	Dinas Tamben	Tidak Diakomodir
		koordinasi agar masyarakat di izin menambang di KP Timah	Kec.Tempilang - Babar	Dinas Tamben	Tidak Diakomodir
		Koordinasi agar masyarakat di izin mentailing khusus di daerah Bukit Buluh	Kec.Tempilang - Babar	Dinas Tamben	Tidak Diakomodir
		Pengajuan agar adanya tambang mandiri bagi masyarakat	Kec.Tempilang - Babar	Dinas Tamben	Tidak diakomodir
		Pengajuan agar masyarakat di izin mentailing	Kec.Tempilang - Babar	Dinas Tamben	Tidak diakomodir
		Penyediaan aliran listrik	Kel.Matras-Bangka	Dinas Tamben	diakomodir
		Kebutuhan bahan bakar minyak	Desa Riding Panjang-Bangka	Dinas Tamben	Tidak diakomodir
		Kurangnya pasokan listrik	Desa Gunung Muda-Bangka	Dinas Tamben	Tidak diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pariwisata				
		Pengembangan Objek Wisata Air Panas Keretak	Desa Keretak-Bateng	Disbudpar	Tidak diakomodir
		Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Danau Biru	Desa Air Ranyak-Belitung	Disbudpar	Tidak diakomodir
		Pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja pada hotel di TanjungPandan	Kelurahan Pal 1 TanjungPandan Belitung	Disbudpar	Tidak diakomodir
		Pengembangan Objek Wisata Bukit Tebalu seluas 52 Hektar	Desa Terong Manggar Belitung Timur	Disbudpar	Tidak diakomodir
		Perbaikan sarana prasarana (tempat ibadah) di sekitar objek wisata Tanjung Tinggi dan Tanjung Kelayang	Desa Terong Manggar Belitung Timur	Disbudpar	Tidak diakomodir
		Pembangunan infrastruktur pariwisata Desa Burung Mandi	Desa Burung Mandi Damar-Belitung timur	Disbudpar	Tidak diakomodir
		Permohonan agar diprioritaskan sebagai salah satu daerah tujuan wisata	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Disbudpar	Tidak diakomodir
		Belum Jelasnya status hak guna pantai dan izin dibidang pariwisata	Desa Air Anyir-Bangka	Disbudpar	Tidak diakomodir
5	Kelautan Dan Perikanan				
		Pengadaan Alat Tangkap Ikan dan Kepiting	Desa Tanjung Gunung-Bateng	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Bantuan dan Kajian Sektor Kelautan	Desa Sungai Selan-Bateng	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Bantuan bibit ikan air tawar untuk pemanfaatan kolong-kolong bekas timah	Kecamatan Badau-Belitung	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Bantuan kepada kelompok nelayan Desa Suak Gual	Desa Suak Gual Selat Nasik-Belitung	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Pengerukan Sungai Penarikan di Tanjung Kelayang	Desa Keciput Sijuk-Belitung	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Pengawasan penggunaan jaring trawl yang merugikan nelayan	Desa Keciput Sijuk-Belitung	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Pengaturan pemasangan jaring ikan agar tidak mengganggu kegiatan pariwisata di pulau-pulau	Desa Keciput Sijuk-Belitung	Dinas DKP	diakomodir
		Pencegahan pungutan liar yang dilakukan oknum Dirjen Perhubungan Laut di Pulau Lengkuas	Desa Keciput Sijuk-Belitung	Dinas DKP	diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberian Bantuan Perahu kecil, alat tangkap, GPS untuk nelayan	Desa Kurnia Jaya Manggar Belitung Timur	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Bantuan Alat dan pemberian kredit kepada Nelayan	Desa Lalang Manggar-Belitung Timur	Dinas DKP	diakomodir
		Bantuan teknis pengolahan daging kepiting	Desa Lassar dan Air Batu Membalong-Belitung	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Perbaikan sistem manajemen pembibitan ikan di Balai benih Ikan tanjung Rusa	Desa Tanjung Rusa Membalong-Belitung	Dinas DKP	diakomodir
		Bantuan alat tangkap/perahu 50 buah	Simpang Renggiang-Belitung Timur	Dinas DKP	Tidak diakomodir
		Sosialisasi ke masyarakat mengenai bantuan kapal nelayan	Desa Selingsing Gantung-Belitung Timur	Dinas DKP	diakomodir
		Pengadaan bantuan alat tangkap ikan	Desa Belo Laut Kec. Mentok - Babar	Dinas KP	diakomodir
		pengajuan proposal untuk bantuan kapal 30 GT	Desa Belo Laut Kec. Mentok - Babar	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Pembangunan kastorit untuk ikan & kerang	Kec. Mentok - Babar	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Pembangunan kastorit di Desa Kundi	Kec. Simpang Teritip - Babar	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Pemberian bantuan kerambah apung viber untuk ternak ikan kerapu	Kec. Simpang Teritip - Babar	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Pemberian bantuan alat tangkap modern	Desa Limbung Kec. Jebus - Babar	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Pemberian bantuan alat tangkap modern	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Pengajuan pembuatan sentra hasil melaut dan dukungan dalam pemasaran	Desa Kelabat Kec. Parit Tiga - Babar	Dinas KP	diakomodir
		fasilitasi bantuan penyuluhan & tenaga pendidik	Desa Tugang Kec. Kelapa	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Pembangunan tambatan perahu & dermaga	Desa Air Nyatoh	Dinas KP	Tidak diakomodir



No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kec. Simpang teritip - Babar		
		Bantuan alat tangkap berupa jaring/tebak	Desa Deniang-Bangka	Dinas KP	diakomodir
		Penyediaan bibit ikan	Desa Kotawaringin-Bangka	Dinas KP	diakomodir
		Bantuan alat-alat pengembangan budidaya kepiting bakau	Desa Penagan-Bangka	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Kapal trawl yang meresahkan nelayan	Desa Penagan-Bangka	Dinas KP	Tidak diakomodir
		Bantuan alat tangkap,perahu dan mesin perahu	Desa Penagan-Bangka	Dinas KP	diakomodir
6	Perdagangan				
		Kebijakan Stabilisasi Harga Lada	Desa Perlang-Bateng	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan Penurunan/subsidi Harga Sembako dan Bantuan Penyaluran Sembako	Desa Bhaskara Bakti	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan untuk Meningkatkan Harga Komoditas Karet	Desa Keretak-Bateng	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Pembangunan Pasar Desa Keretak (lahan sudah disiapkan)	Desa Keretak	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet	Kec. Tempilang - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Kec. Kelapa - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Desa Sinar Sari - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Kel. Kelapa - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Desa Beruas - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Kec. Simpang Teritip	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Desa Air Kuang Kec. Jebus - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga hasil pertanian	Desa Sungai Buluh Kec. Jebus - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Desa Air Limau Kec. Muntok	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	Dinas Perindag	Tidak diakomodir

No	Urusan	Program/Kegiatan	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kebijakan pengendalian harga karet & sawit	Desa Simpang Gong Kec. Simpang teritip - Babar	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet dipasaran	Desa Bakam-Bangka	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
		Kebijakan pengendalian harga karet dan pertimahan	Desa Pemali-Bangka	Dinas Perindag	Tidak diakomodir
7	Perindustrian				
		Bantuan alat produksi dan kelengkapan home industri berupa Mesin pemotong singkong, cupseller, dan mesin jahit	Desa Kurnia Jaya Manggar Belitung Timur	Disperindag	Tidak diakomodir
		Peningkatan kesadaran pelaku ekonomi bagi pengembangan perekonomian masyarakat	Desa Sinar sari - Babar	Dinas Perindag	diakomodir
8	Transmigrasi				

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, telah dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Perda RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijelaskan dalam tabel II.75 di bawah ini.

Tabel II.75
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Wilayah	Perda RTRW Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Bangka	Perda Nomor 1 Tahun 2013
2.	Kabupaten Bangka Tengah	Perda Nomor 48 Tahun 2011
3.	Kabupaten Bangka Barat	Perda Nomor 1 Tahun 2014
4.	Kabupaten Bangka Selatan	Perda Nomor 6 Tahun 2014
5.	Kabupaten Belitung	Perda Nomor 3 Tahun 2014
6.	Kabupaten Belitung Timur	Perda Nomor 13 Tahun 2014
7.	Kota Pangkal Pinang	Perda Nomor 01 Tahun 2012

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memperhatikan permasalahan seperti yang disajikan pada Tabel II.61 upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya disajikan sebagai berikut.

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan diantaranya adalah rata-rata lama sekolah yang masih berada dibawah rata-rata lama sekolah Nasional, masih tingginya angka putus sekolah, masih tingginya disparitas mutu pendidikan dan masih rendahnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pendidikan di semua kawasan, untuk semua umur dan semua golongan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan peran orangtua dan masyarakat dalam dunia pendidikan, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan di desa dan kota, meningkatkan akses pendidikan ke perguruan tinggi, serta mendorong masyarakat yang sudah masuk usia kerja yang belum menamatkan sekolah SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat untuk menamatkan program Paket A, Paket B dan paket C.

2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan diantaranya adalah angka harapan hidup masih dibawah rata-rata nasional, tingginya angka kematian bayi, masih terjadinya kasus gizi buruk dan rendahnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk, serta tingginya tingkat penderita penyakit tidak menular. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kesadaran akan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup menjadi 70 tahun sesuai dengan angka harapan hidup nasional, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, peningkatan pemahaman tentang pangan dan gizi, dan penambahan jumlah dokter khususnya dokter spesialis di rumah sakit dan Puskesmas serta memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pola hidup dan pola konsumsi yang sehat untuk pencegahan terhadap penyakit tidak menular.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pekerjaan umum diantaranya adalah masih kurangnya sarana jalan dan jembatan yang menghubungkan antara wilayah dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan provinsi tetangga yang berdekatan. Permasalahan yang secara langsung dirasakan terutama pasca banjir besar yang melanda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan beberapa ruas jalan baik Nasional dan Provinsi mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun ringan. Pendangkalan atau sedimentasi pada sungai-sungai pasca banjir menyebabkan sistem drainase menjadi buruk, terutama yang berada di area perkotaan. Permasalahan lain adalah masih adanya rumah belum layak huni dan belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi.

Strategi yang dapat dilakukan adalah segera melakukan pendataan secara komprehensif terhadap sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang rusak akibat banjir, dan melakukan perbaikan sesuai dengan skala prioritas, melakukan pengerukan pada sungai, dan melakukan reboisasi pada bagian hilir sungai. Meningkatkan pembangunan perumahan sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengembangan kawasan permukiman, serta meningkatkan rasio jaringan irigasi yang selama ini terpusat di Kabupaten Bangka Selatan.

Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah yang mencakup wilayah administratif dan wilayah fungsional yang tercermin dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunan daerah seyogyanya dilakukan melalui penataan ruang secara lebih terpadu dan terarah, agar sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam penataan ruang disebabkan karena RTRW belum dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan belum adanya SOP pengendalian pemanfaatan ruang.

Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam matra ruang yang tertata secara baik. Untuk itu dibutuhkan penataan ruang, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara terpadu, sinergi serta berkelanjutan. Selain itu, dokumen perencanaan spasial juga harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Upaya mengatasi penurunan *backlog* (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi masalah perumahan berupa tersedianya Rumah Sederhana, Layak Huni dan Sehat.

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui kegiatan Bedah Rumah Program SATAM EMAS.

5. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan perencanaan pembangunan adalah banyaknya program dan kegiatan yang tidak prioritas bahkan kurang manfaatnya masih terus diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tanpa mempertimbangkan kecukupan anggaran pembangunan. Oleh karena itu strategi perencanaan dengan pendekatan *money follow function* yang selama ini dijalankan harus diubah dengan pendekatan *money follows priority programme*. Sehingga program-program yang akan mendapatkan pembiayaan merupakan program-program yang jelas sekali manfaat hasilnya. Sementara itu persoalan tingkat keselarasan dan keserasian antardokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota serta belum optimalnya keterpaduan rencana pembangunan antarsektor dan antarwilayah tetap perlu menjadi perhatian. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi proses perencanaan, sehingga tingkat keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan semakin meningkat.

6. Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan diantaranya yaitu untuk transportasi darat berupa masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan jumlah penumpang yang terlayani oleh angkutan umum masih terbatas. Transportasi laut antar pulau kecil masih minim serta belum adanya pelabuhan yang dapat direkomendasikan untuk menunjang program nasional tol laut, untuk transportasi udara adalah belum terlaksananya operasional Bandara Depati Amir Pangkalan Baru dan Bandara H.A.S Hanandjoedin Tanjung Pandan sebagai Bandara Internasional sampai saat ini.

Strategi yang dapat dilakukan untuk permasalahan transportasi darat adalah dengan melakukan pendataan terhadap jumlah penumpang angkutan darat berdasarkan asal-tujuan (*origin-destination*) sehingga dapat dibuka trayek baru sesuai kebutuhan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas. Sementara untuk transportasi laut dengan melakukan kajian kebutuhan penyediaan transportasi antar pulau untuk mengetahui arus barang dan orang antar pulau, dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pelabuhan yang layak masuk dalam program tol laut yang diengkapi dengan data dan dokumen pendukung. Sedangkan untuk transportasi udara adalah upaya percepatan penyelesaian pembangunan bandara baru Depati Amir dan usulan ke pemerintah pusat terkait pembangunan fisik bandara HAS Hanandjoedin.

7. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diantaranya adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak terkendali yang

berakibat padarendahnya kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya frekuensi terjadinya bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya bencana banjir.

Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan antara lain: (1) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terutama kewaspadaan dan kepedulian terhadap bencana yang terjadi, (2) penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan, dan (3) optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

8. Pertanian

Permasalahan pertanian diantaranya masih ada lahan pemerintah yang terbengkalai, sering terjadi sengketa kepemilikan lahan, sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan serta tingginya biaya sertifikasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengelolaan dan pengamanan lahan milik pemerintah, mediasi penyelesaian sengketa lahan, kerjasama pengadaan lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), subsidi pembuatan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang kurang mampu.

9. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan kependudukan yaitu tingginya laju migrasi penduduk dari luar daerah, masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akte kelahiran termasuk yang belum memiliki e-KTP serta kualitas manusia yang sangat di pengaruhi oleh rata-rata lama sekolah masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pendataan penduduk dari luar daerah, penciptaan lapangan pekerjaan baru, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran termasuk e-KTP, serta mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh jenjang umur masyarakat.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya yaitu rendahnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender yang masih berada di bawah rata-rata nasional, masih adanya perdagangan manusia (*trafficking*), mempekerjakan anak dibawah umur dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu penerapan perencanaan yang responsif gender, pemberdayaan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan trafficking, peningkatan pengawasan di tempat-tempat hiburan, meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di semua wilayah (wajib belajar 12 tahun).

11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diantaranya adalah rendahnya persentase penduduk ber-KB dan tingginya angka kelahiran, kurangnya ketersediaan alat kontrasepsi, masih rendahnya masyarakat yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta peran serta laki-laki ber KB. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui program Dua Anak Lebih Baik, peningkatan persentase pencapaian target peserta ber-KB, dan peningkatan kesehatan ibu dan bayi, menjamin ketersediaan alat kontrasepsi, mendorong masyarakat untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta meningkatkan laki-laki untuk ber KB melalui peningkatan pelaksanaan KIE.

12. Sosial

Permasalahan sosial yang dihadapi yaitu masih tingginya persentase penduduk miskin di pedesaan, meningkatnya masyarakat pra sejahtera dan ti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak balita terlantar, anak terlantar, anak dengan disabilitas, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin. Upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan lapangan pekerjaan di pedesaan yang langsung menyasar masyarakat miskin di pedesaan, meningkatkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di desa dan di kota, peningkatan pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan program jaminan sosial bagi para PMKS, serta peningkatan pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat.

13. Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan produktifitas dalam menghadapi *ASEAN Economic Community*, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingginya tingkat ketergantungan lapangan kerja pada sektor pertambangan, serta masih kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang sifatnya sektor produksi komoditas untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari dan untuk diekspor keluar dengan produksi skala rumah tangga. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kerja dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil di semua sektor pembangunan, meningkatkan peluang investasi, meningkatkan fokus pada investasi yang padat karya serta mempersiapkan sektor selain tambang sebagai lokomotif perekonomian Bangka Belitung, serta mendorong peningkatan pelaksanaan pelatihan wirausaha berbasis komoditas konsumsi rumah tangga untuk penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu rendahnya persentase KUMKM produktif, minimnya koperasi di pedesaan, belum optimalnya pemanfaatan alokasi program CSR untuk UMKM, minimnya persentase penyerapan kredit UMKM, serta masih terbatasnya UMKM yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hak paten. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui pembentukan dan bantuan KUMKM, pembentukan dan peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi di pedesaan, pengembangan dan pembentukan koperasi komoditi, peningkatan kepedulian perusahaan untuk membantu UMKM terutama para petani dan nelayan, peningkatan target kuantitas dan kualitas kredit bagi UMKM, peningkatan target dan pencapaian kredit produktif non konsumtif, serta menginventarisasi jenis kebudayaan, hasil kerajinan tangan (hand craft) serta makanan dari Bangka Belitung yang dapat diajukan untuk memperoleh paten dan Haki, termasuk mendorong dosen-dosen dan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipatenkan.

15. Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal diantaranya yaitu minimnya informasi mengenai potensi unggulan daerah yang dilihat secara komprehensif, masih rendahnya tingkat kesadaran SKPD Teknis Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyerahkan proses perizinan kepada BP2TPM sehingga pelayanan terpadu satu pintu belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan kajian secara komprehensif terhadap potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu dalam rangka mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diharapkan agar SKPD teknis dapat menyerahkan kewenangan perizinan kepada BP2TPM.

16. Kebudayaan

Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu masih terbatasnya jumlah kebudayaan yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hak paten, belum terintegrasinya pengembangan kebudayaan yang masih dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri, serta belum terpetanya kontribusi budaya di dalam pembangunan apakah sebagai pendukung pariwisata, sebagai pembentuk jati diri daerah atau hal lainnya. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui menginventarisasi jenis kebudayaan, hasil kerajinan tangan (hand craft) serta makanan dari Bangka Belitung yang dapat diajukan untuk memperoleh paten dan Haki, termasuk mendorong dosen-dosen dan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipatenkan. Mensinergikan dengan meningkatkan koordinasi seluruh sektor yang mendukung pengembangan kebudayaan untuk mendukung sektor pariwisata, sebagai eksistensi jati diri daerah atau hal lainnya.

17. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pemuda dan olah raga yaitu masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana olah raga yang berstandar nasional dan internasional, belum optimalnya pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olah raga, belum produktifnya organisasi kepemudaan, minimnya penyelenggaraan turnamen tingkat daerah dan nasional sehingga upaya penelusuran atlet berbakat belum maksimal, serta masih sedikitnya wirausaha pemuda yang tercipta. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pembangunan dan peningkatan sarana olah raga, peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan serta peningkatan even dan turnamen olah raga, peningkatan pembibitan dan pembinaan olah raga serta peningkatan pembentukan wirausaha pemuda.

18. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang ada dalam urusan ini adalah terjadinya tindakan kriminalitas (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan) dan rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pemilukada serta adanya ormas yang melanggar undang-undang ormas terutama pelanggaran terhadap asas Pancasila (Gafatar dan HTI). Strategi yang dilaksanakan berupa koordinasi dengan jajaran Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) yang dituangkan dalam rapat bulanan jajaran pengurus Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) agar melakukan penggalangan/sosialisasi ke masyarakat terkait tindakan yang melanggar Ketentraman, ketertiban masyarakat, dan melaksanakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), melakukan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam proses demokrasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan melekat.

19. Persandian

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas keamanan dan ketertiban yang antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (information assurance)”.

20. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada kendala-kendala antara lain budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat, masih terbatasnya lembaga perpustakaan, sarana dan prasarana termasuk koleksi buku pustaka; dan tenaga pengelola perpustakaan terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

21. Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi

22. Pangan

Permasalahan yang dihadapi yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh, tingginya konsumsi beras, rendahnya produksi pangan, distribusi belum optimal, tingginya tingkat ketergantungan pangan dan peredaran bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk pertanian, peningkatan dan pengembangan profesionalitas penyuluh, penganekaragaman pangan, memperlancar distribusi bahan pangan, pemantauan peredaran bahan makanan, menjalin kerja sama dengan provinsi terdekat untuk menjamin suplai bahan pangan.

23. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan yang dihadapi diantaranya, masih adanya desa tertinggal yang harus diantaskan, lemahnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, belum adanya rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah desa, minimnya sarana prasarana pendukung di pedesaan serta masih sedikitnya BUMdes dan pasar desa yang ada di setiap desa. Strategi yang dapat dilakukan melalui mendorong pembangunan di semua desa tertinggal, meningkatkan pembentukan BUMdes untuk setiap desa, peningkatan pembangunan pasar desa di setiap desa, peningkatan tata kelola pemerintah desa, pendampingan penyusunan RPJMDes, peningkatan kompetensi aparatur desa serta penyediaan sarana prasarana yang memadai di pedesaan untuk mengangkat status desa menjadi desa mandiri.

24. Statistik

Permasalahan statistik yaitu, belum terpadunya pengelolaan data dan informasi daerah, belum tersedianya pusat data dan informasi, masih ada perbedaan data yang disajikan oleh penyedia data serta kurang tersedianya database di masing-masing SKPD secara time series. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pembentukan pusat data dan informasi daerah secara terpadu serta pembentukan forum data.

25. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a) Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah dan kondisi geografis Bangka Belitung yang berbentuk kepulauan serta keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika untuk akses pelayanan informasi publik sehingga menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata dan menjadi kendala dalam mewujudkan Bangka Belitung sebagai Cyber Islands.
- b) Strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, serta memperluas akses jaringan informasi dan komunikasi masyarakat.
- c) Belum optimalnya keterpaduan aplikasi-aplikasi sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing SKPD. Hal ini dikarenakan masih lemahnya koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SKPD lain dalam hal sosialisasi kegiatan

penyebarluasan informasi yang ada pada Diskominfo sehingga tidak banyak SKPD yang memanfaatkan kegiatan penyebaran informasi yang ada di Diskominfo.

26. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ini yaitu belum tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), belum selarasnya desain organisasi dalam mendukung kinerja RPJMD, rendahnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, masih belum efektifnya pola penempatan pejabat struktural. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan evaluasi perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan, menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mendorong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam mendukung *Good Governance and Clean Government*, melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan desain organisasi yang diarahkan kepada pencapaian kinerja RPJMD, menyusun rencana aksi dalam upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan, melakukan analisa secara komprehensif terhadap kebijakan dan kebutuhan akan penempatan pejabat struktural dan pegawai.

Strategi yang dapat dilakukan melalui perwujudan *e-Government* sehingga dapat meningkatkan koordinasi sistem informasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Urusan Pilihan

1. Pertanian

Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya nilai tukar petani, produksi komoditi pertanian, kualitas hasil pertanian, harga yang berfluktuasi, hama dan penyakit tanaman, semakin berkurangnya lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta belum optimalnya industri pengolahan hasil. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk pertanian, stabilisasi harga hasil pertanian, percepatan peningkatan produksi dan produktifitas padi, serta penetapan arah pengembangan pertanian berkelanjutan dan penerapan teknologi tepat guna dalam industri pengolahan hasil pertanian.

2. Kehutanan

Permasalahan kehutanan diantaranya yaitu rendahnya persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi, terbatasnya sumber daya aparaturnya pengawasan kehutanan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan, dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan perkebunan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui perlindungan dan perluasan tutupan hutan, perbaikan izin pertambangan timah yang memperhatikan ekosistem hutan, percepatan pemulihan lahan kritis dan lahan eks tambang serta melakukan rekrutmen tenaga polisi hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya ketersediaan energi, kapasitas pembangkit listrik masih rendah, kelangkaan bahan bakar terutama solar serta ketergantungan pada

sektor pertambangan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan kapasitas pembangkit, menyiapkan infrastruktur kelistrikan, peningkatan perawatan pembangkit listrik, penyelesaian pembangkit listrik yang sedang dibangun, mempersiapkan pembangkit-pembangkit listrik yang baru, memperlancar proses distribusi BBM, mempersiapkan sektor lain selain tambang sebagai lokomotif perekonomian Bangka Belitung, dan menggali potensi suplai energi yang ramah lingkungan.

4. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum terpadunya pengelolaan dan promosi pariwisata, belum optimalnya pemberdayaan budaya daerah dan destinasi wisata sebagai komoditi wisata, belum tersedianya transportasi umum menuju objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata, tingginya biaya transportasi dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbatasnya ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan keterbatasan SDM pariwisata yang berdaya saing. Hal yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusunan kalender wisata dan *travel pattern* secara terpadu, pemberdayaan budaya lokal, peningkatan dan penyediaan transportasi umum menuju objek wisata, peningkatan dan sosialisasi sadar wisata, serta melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan, pengembangan Desa Wisata, diklat SDM pariwisata, meningkatkan promosi dan kerja sama antarwilayah.

5. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya nilai tukar nelayan, serta belum optimalnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PDRB, rendahnya daya saing mutu produk. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk kelautan perikanan, dan peningkatan nilai tambah, percepatan peningkatan produksi dan produktifitas budidaya perikanan, stabilisasi harga hasil perikanan di pasar serta penetapan arah pengembangan perikanan berkelanjutan.

6. Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan yaitu tingginya tingkat ketergantungan kebutuhan bahan pokok terhadap daerah lain, ekonomi biaya tinggi, dan keterbatasan akses perdagangan dan distribusi. Upaya yang dapat dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra produksi, meningkatkan produksi lokal, dan memperlancar proses distribusi barang yang masuk ke Bangka Belitung.

7. Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kawasan industri dan industri hilir, belum optimalnya komoditas yang dapat dikelola menjadi industri hilir, minimnya produk hasil industri yang memenuhi standar, kemasan/packaging belum optimal. Upaya yang dapat dilakukan mempercepat pengembangan kawasan industri, pengembangan OVOP, pengembangan industri hilir, memperkuat kerja sama desa dan kota (*rural urban linkages*), meningkatkan kualitas hasil industri, standardisasi, dan pengembangan pasar lokal dan ekspor.

8. Transmigrasi

Permasalahan ketransmigrasian yang dihadapi meliputi sulitnya mencari lahan transmigrasi baru, masyarakat setempat mendorong untuk kepesertaan transmigrasi yang baru diharapkan dari masyarakat lokal, belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat transmigrasi, sarana dan prasarana di wilayah transmigrasi yang masih kurang, serta belum terpadunya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang termasuk wilayah transmigrasi lainnya. Upaya yang dapat dilakukan melalui Memetakan untuk lahan transmigrasi baru, Memasukan kepesertaan transmigrasi dari masyarakat lokal, meningkatkan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan antar tingkat pemerintahan guna percepatan pengembangan KTM.

2.5.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berikut beberapa permasalahan yang memiliki nilai prioritas bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya RPJMD 2012-2017, SDG's, SPM, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan.

2.5.1.1 Sustainability Development Goals (SDGs)

Setelah pelaksanaan MDGs periode 2010-2015, saat ini sedang digagas agenda pasca MDGs yaitu *Sustainability Development Goals (SDGs)* yang ruang lingkupnya lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda pasca 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environment development*). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Agenda pasca MDGs 2015 akan diputuskan pada sidang umum PBB yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara pada Bulan September 2015.

2.5.1.2 Standar Pelayanan Minimal

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM yg ditetapkan oleh Daerah, digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yg ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.

Walaupun secara umum target pencapaian SPM telah banyak berakhir pada tahun 2014, namun beberapa SPM yang masih tersisa tetap menjadi prioritas pembangunan tahun 2016 dan meskipun beberapa SPM telah melawati target waktu pencapaian namun indikator SPM tersebut tetap digunakan sebagai salah satu target kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel II.76 di bawah ini.

Tabel II.76
Target Pelaksanaan SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	SPM	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perumahan*)	2	3	2025
2	Pemdagri	3	6	2011
3	Sosial*)	4	14	2015
4	Kesehatan	4	18	2015
5	PP & PA*)	5	8	2014
6	Lingkungan Hidup*)	7	7	2013
7	KB & KS	3	9	2014
8	Ketenaga Kerjaan*)	5	8	2016
9	Pendidikan	2	27	2014
10	PU & PR	8	23	2014
11	Ketahanan Pangan*)	4	7	2015
12	Kesenian*)	2	7	2014
13	Kominfo	1	2	2014
14	Perhubungan*)	8	43	2014
15	Penanaman Modal*)	7	10	2014
Jumlah		65	192	

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dalam praktek penyelenggaraan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan pembangunan daerah terindikasi masih ada daerah yang belum menindaklanjuti kebijakan SPM dalam kegiatan perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan daerah. Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penerapan dan pelaksanaan SPM dalam pembangunan daerah antara lain:

1. Masih banyaknya aparat di pemerintahan daerah baik diprovinsi maupun di Kabupaten/kota yang belum memahami kebijakan SPM secara benar sehingga timbul anggapan bahwa kebijakan SPM bukan merupakan kebijakan yang menjadi prioritas;

2. Dengan pemahaman yang tidak benar tersebut maka kebijakan SPM tidak dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah, bahkan tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai;
3. Kebijakan SPM sebagai indikator kesejahteraan tidak dijadikan sebagai unsur penilaian kinerja pemerintahan daerah sehingga SPM tidak dijadikan salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah.

2.5.1.3 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2020.

Pemerintah provinsi mempunyai target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca untuk lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi dan limbah sebesar 25,99 % pada tahun 2020.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi RAD GRK:

1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pasal 6 menyebutkan untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD GRK. Sedangkan untuk kabupaten/kota tidak diwajibkan menyusun RAD GRK, padahal terkait kewenangan aksi mitigasi banyak dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
2. Ada SKPD yang tidak dapat melaksanakan aksi mitigasi karena terkendala aturan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah.

2.5.1.4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut.

Upaya penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 pada dasarnya adalah penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan RPJMD dan RPJMN. Berdasarkan jabaran dan sinkronisasi tersebut, maka prioritas pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah :

1. Ekonomi;
2. Sosial, Politik, dan Sumber Daya Manusia;
3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

4. Sarana dan Prasarana; serta
5. Pemerintahan.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2013 yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Tumpang tindih Tugas dan Fungsi di Kelembagaan serta distribusi beban kerja yang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga terdapat beban yang berlebihan pada sebuah SKPD begitu juga sebaliknya;
2. Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya Aparatur yang profesional. Pembenahan SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrasi yang kompeten;
3. Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih dalam kategori wajar dengan pengecualian (WDP) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang masih mendapat nilai "C"; dan
4. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif.

Untuk menjembatani persoalan-persoalan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan maksud untuk mendapatkan instrumen yang digunakan dalam memandu, mempersatukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, dan petunjuk untuk tercapainya perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Permen PAN dan RB nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara *online*. Implementasi pelaksanaan delapan area perubahan dengan mengetengahkan delapan program *quick wins* perlu dilakukan penyelarasan pencapaian sasaran dan strategi, komponen penilaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PMPRB terhadap pelaksanaan *Road Map* pada tahun 2014. Capaian hasil pelaksanaan delapan area perubahan berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu 39,41 kategori C dengan nilai angka > 30-50 dengan interpretasi kurang sehingga dirasa masih perlu banyak perubahan yang mendasar.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit (*enablers*)** dan **Hasil (*Result*)**. Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. PMPRB ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dapat dilihat hasil evaluasi dan perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2014 dan 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hasil pelaksanaan RB Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, merupakan kelanjutan pelaksanaan *road map* Reformasi Birokrasi dengan delapan program *quick wins* tahun 2014. Hasil pelaksanaannya secara bertahap dapat diwujudkan dalam reformasi birokrasi tahun 2015 dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar **60.36 (kategori B)** dengan interpretasi baik, jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi perubahan yang signifikan. Sedangkan untuk pelaksanaan, secara rinci fluktuatif perubahan hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel II.77 di bawah ini.

Tabel II.77
Tabel Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan 2015

No	Komponen	Keterangan	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Nilai	Persentase	Nilai	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Komponen Pengungkit (<i>Enablers</i>)	a. Manajemen Perubahan	3.21	64.23%	3.7	74.1%
		b. Penataan Peraturan Perundangan	2.71	54.25%	2.71	54.25%
		c. Penataan dan Penguatan Organisasi	4.33	72.22%	5.33	88.89%
		d. Penataan Tata Laksana	2.80	55.93%	3.05	60.93%
		e. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.52	43.45%	13.08	87.19%
		f. Penguatan Akuntabilitas	3.04	50.73%	3.58	56.67%
		g. Penguatan Pengawasan	4.24	35.31%	6.65	55.39%
		h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.86	47.62%	4.23	70.24%
JUMLAH			29.71		42.33	70.55%
2.	Komponen Hasil (<i>Result</i>)	a. Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi	7.70	0.38%	8.53	42.67%
		b. Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	2	20%	2	20%
		c. Kualitas Pelayanan Publik	0	0.0%	7.5	75%
JUMLAH			9.7084		18.03	60.11%
JUMLAH TOTAL			39.4178			60.36%

Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Biro Organisasi Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2015

Untuk mempertahankan pencapaian yang sudah diperoleh melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mendorong dan lebih melakukan fokus pada komitmen, peran dan tanggungjawab yang kuat dalam melaksanakan tugas, baik Tim Pokja Pelaksana maupun Pimpinan SKPD agar hasil Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kep. Bangk Belitung lebih optimal dan perubahan mendasar terutama pada area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tahun 2016 program *quick wins* absensi pegawai terintegrasi agar dapat terlaksana di tahun ini, diperlukan juga pembangunan e-government secara terintegrasi dan tidak secara parsial. Dalam penyelarasan *road map* reformasi birokrasi dan program *quick wins* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *road map* reformasi birokrasi 2015-2019 yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.5.1.5 Tata Kelola Pemerintahan

Penentuan indeks tata kelola pemerintah mencakup pengukuran pada arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Pada pemerintahan meliputi fungsi-fungsi kerangka kebijakan, penganggaran, koordinasi pembangunan, dan pengawasan pembangunan. Pada arena birokrasi meliputi pengumpul pendapatan daerah, pelayanan publik, pengatur kegiatan ekonomi. Pada arena masyarakat sipil meliputi fungsi advokasi dan pemberdayaan. Pada arena masyarakat ekonomi meliputi fungsi upaya perlindungan kepentingan bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha. Pada masing-masing arena dan fungsi tersebut ada indikator partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas.

Beberapa permasalahan yang masih tersisa berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan dibidang ketatalaksanaan, masih belum di dukung oleh sistem informasi yang berbasis pada teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan *Standard Operational Procedures* (SOP) yang telah di rancang akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal.

Disamping itu berkaitan dengan kearsipan dipandang belum maksimal di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Instansi yang menangani permasalahan kearsipan daerah diharapkan dapat melakukan percepatan dalam hal menunjang kearsipan di masing-masing SKPD, sejauh ini menurut hasil evaluasi Biro Organisasi, Instansi pengelola kearsipan masih berfokus pada arsip statis dan belum menyentuh arsip dinamis.

Biro Organisasi juga berupaya dalam mendorong dan meningkatkan SKPD untuk berbasis ISO9001:2008 yang berfokus standard pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini sesuai dengan fokus dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu pada Unit Pelayanan Satu Pintu dan Rumah Sakit, capaian yang telah diperoleh pada tahun 2015 antara lain:

1. Bidang Perizinan

Sucofindo International Certification Service di Tahun 2015 telah memberikan 2 (dua) buah sertifikat SNI ISO 9001:2008 dengan nomor sertifikat QSC 01361 kepada Unit PTSP dan sertifikat QSC 01362 kepada Kantor Samsat Kabupaten Bangka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

2. Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- a. RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan persiapan penilaian akreditasi Rumah Sakit, penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan persiapan penetapan kelas Rumah Sakit dengan meningkatkan pelayanan pada RS.
- b. RSJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan pelayanan telah menyelenggarakan penyediaan kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit serta pelayanan rehabilitasi mental sosial.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Tabel II.78.

Tabel II.78
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a. Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Wajib (Kesbangpol)	Jika tingkat kriminalitas menurun	Tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan melemahnya kondisi perekonomian.
	Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Wajib (Pemerintahan)	Jika sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan meningkat	Lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi.
	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Wajib (Perencanaan)	Jika keterkaitan perencanaan dan penganggaran meningkat	Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib (Pemerintahan)	Jika keselarasan perencanaan dan penganggaran secara politik dan teknokratik meningkat	Kurangnya sinerginya antar unsur pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib (Pemerintahan)	Jika implementasi Perda yang diterbitkan meningkat	- Kurangnya penerapan perda yang diterbitkan. - Belum tersediannya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perda di maksud.

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib (Pemerintahan)	Jika implementasi Pergub dan keputusan gubernur yang diterbitkan meningkat	3. Kurangnya penerapan Pergub dan Keputusan Gubernur yang diterbitkan. 4. Belum tersedianya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pergub dan Keputusan Gubernur dimaksud
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib (Hukum)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Rendahnya tingkat pelayanan publik
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib (Perencanaan)	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana strategis pemerintahan
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib (Keuangan Daerah)	Meningkatnya kualitas penilaian penyelenggaraan keuangan daerah	Belum tersusunnya data aset daerah
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib (Keuangan Daerah)	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber pembiayaan yang sah

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Wajib (Perencanaan dan Pengawasan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD	- Rendahnya kapasitas perencana di masing-masing SKPD - Rendahnya realisasi APBD - Rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD
	Pengelolaan potensi daerah	Pilihan	Meningkatnya kontribusi sektor terhadap PDRB	Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan daerah
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Meningkatnya inovasi daerah	Jumlah SDM fungsional perencana dan fungsional peneliti masih kurang
	b. Tataran Pelaksana Kebijakan			
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Wajib	Tersedianya dokumen pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	SOP belum diimplementasikan
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib	Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
	Tingkat capaian SPM	Wajib	Target SPM SKPD terkait tercapai	Belum ada kesesuaian antara program di SKPD untuk mencapai target SPM tersebut
	Penataan kelembagaan daerah	Wajib	Kesesuaian visi dan misi RPJMD dengan struktur organisasi kelembagaan daerah	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap visi dan misi RPJMD dalam penataan kelembagaan daerah
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib (Kepegawaian)	Tersedianya grand design kepegawaian daerah sesuai visi dan misi RPJMD	Belum optimalnya perencanaan kepegawaian (beban kerja, kompetensi)

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perencanaan pembangunan daerah	Wajib (Perencanaan Pembangunan)	Tercapainya indikator pembangunan daerah	- Perencanaan masih bersifat sektoral - Belum berlandaskan data dan informasi yang akurat - Belum optimalnya sinergi perencanaan dan penganggaran
	Pengelolaan keuangan daerah	Wajib (Keuangan Daerah)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru
	Pengelolaan barang milik daerah	Wajib (DPPKAD)	Tertibnya administrasi pengelolaan barang daerah	Banyaknya asset daerah yang tidak terdata
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Wajib	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan
II	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
	Kesejahteraan masyarakat	Wajib (Kesra)	- Menurunnya tingkat kemiskinan - Menurunnya tingkat pengangguran - Meningkatnya pembangunan manusia	Belum optimalnya sinergisitas program antar sektor, antar wilayah, dan antar hierarki pemerintahan
	Pelayanan umum	Wajib	Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan umum	Masih minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan umum
	Daya saing daerah	Wajib (Aspek Ekonomi, Hankam)	Meningkatnya investasi	- Belum optimalnya pelayanan terpadu - Belum memadainya ketersediaan infrastruktur strategis (energi, pelabuhan, air bersih)
III	Daerah Otonomi Baru			
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Wajib (Organisasi)	Tersusunnya SOTK sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD	Belum adanya dokumen perencanaan kebutuhan SOTK sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengisian personil	Wajib (Kepegawaian)	Terpenuhinya personil sesuai kebutuhan	Belum tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan pegawai
	Pengisian keanggotaan DPRD	Wajib	Terpenuhinya keanggotaan DPRD berbasis gender (keterwakilan perempuan)	Masih rendahnya kompetensi calon legislatif perempuan
	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan	Wajib	Terlaksananya semua urusan pemerintah daerah (wajib dan pilihan)	- Masih terjadinya tumpang tindih tupoksi - Belum efektifnya SOTK
	Pembiayaan	Wajib	Terlaksananya kebijakan program strategis sesuai dengan isu-isu daerah dan nasional	Dana yang tersedia belum sepenuhnya dapat membiayai penyelesaian isu-isu strategis
	Pengalihan aset dan dokumen	Wajib	Meningkatnya akuntabilitas status aset daerah	Belum tertibnya penatausahaan aset dan dokumen
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Wajib	Terwujudnya kesepakatan batas antarwilayah	Masih adanya kepentingan pengelolaan kewilayahan oleh masing-masing kepala daerah (kabupaten/kota)
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Wajib	Tersedianya sarana prasarana pemerintah untuk mendukung operasional pelayanan publik	- Masih ada SKPD yang belum memiliki kantor yang representatif - Belum terpadunya sistem teknologi informasi
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Wajib	-	-



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

BAB III

**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN**

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan misi pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 menjadi landasan bagi arah kebijakan perekonomian Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Bangka Belitung serta proyeksinya untuk tahun 2016 dan 2017.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2015 menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 beserta proyeksi tahun 2016 dan tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 dan Tabel III.2.

Tabel III.1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010,
2013-2017 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.269.574	10.834.412	12.000.841	12.524.668	13.947.267
B. Pertambangan dan Penggalian	7.097.644	7.622.606	7.738.525	8.104.197	7.504.454
C. Industri Pengolahan	12.088.178	12.883.045	12.885.275	13.140.740	13.902.414
D. Pengadaan Listrik dan Gas	27.336	41.187	48.834	50.810	56.562
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.149	10.371	12.058	12.703	13.345
F. Konstruksi	4.139.267	4.711.024	5.291.650	5.627.209	6.044.210
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.671.668	7.571.544	8.602.106	8.726.620	9.889.346
H. Transportasi dan Pergudangan	1.864.593	2.128.953	2.462.982	2.629.418	2.874.716
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.152.121	1.321.437	1.459.417	1.505.247	1.694.637
J. Informasi dan Komunikasi	770.240	849.135	940.707	978.093	1.090.695
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	902.449	998.520	1.086.052	1.127.647	1.210.312
L. Real Estate	1.602.870	1.836.553	1.981.642	2.064.157	2.290.460
M, N. Jasa Perusahaan	134.448	153.990	169.628	180.223	200.252
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.618.023	3.042.826	3.524.055	3.817.102	4.157.586
P. Jasa Pendidikan	1.172.218	1.366.491	1.649.659	1.816.458	1.972.714
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552.657	629.863	712.368	749.448	820.444
R,S,T,U. Jasa Lainnya	315.929	371.658	426.289	457.290	500.966
PDRB	50.388.364	56.373.615	60.992.088	63.512.028	68.170.383

Sumber: 2013-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*)2016-2017 Proyeksi Bappeda

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 60.992,088 milyar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp 56.373,615 milyar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2015 besarnya mencapai Rp 45.961,462 milyar, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar Rp 44.159,440 milyar.

Tabel III.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010,
2013-2017 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016)*	2017)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557.660	8.254.204	8.737.857	9.326.648	9.986.538
B. Pertambangan dan Penggalian	6.230.237	6.354.052	6.464.379	6.571.010	6.668.560
C. Industri Pengolahan	10.143.284	10.275.504	10.414.023	10.561.429	10.725.870
D. Pengadaan Listrik dan Gas	31.532	34.461	36.449	38.657	41.115
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.316	7.678	8.119	8.586	9.104
F. Konstruksi	3.414.740	3.551.379	3.748.038	3.997.097	4.268.018
G. Perdagangan Besar dan Eceran Motor	5.846.612	6.105.966	6.354.766	6.639.598	6.943.148
H. Transportasi dan Pergudangan	1.484.808	1.573.349	1.664.350	1.765.428	1.878.005
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	930.987	1.000.562	1.034.807	1.071.995	1.112.445
J. Informasi dan Komunikasi	740.153	790.872	848.950	911.293	979.552
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	728.335	766.646	799.974	836.490	876.581
L. Real Estate	1.312.637	1.413.993	1.454.363	1.500.038	1.549.502
M, N. Jasa Perusahaan	108.110	115.692	120.342	125.663	131.330
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.014.417	2.162.063	2.373.492	2.605.597	2.860.399
P. Jasa Pendidikan	903.741	967.552	1.061.848	1.170.508	1.290.288
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475.323	503.757	535.128	570.119	609.261
R, S, T, U. Jasa Lainnya	260.965	281.710	304.577	330.536	358.708
PDRB	42.190.857	44.159.440	45.961.462	48.030.688	50.288.424

Sumber: 2013-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*)2016-2017 Proyeksi Bappeda

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 (y on y) adalah sebesar 4,08 persen. Mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 4,67 persen. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional maupun perekonomian Sumatera pada umumnya. Adanya bencana kabut asap, kemarau panjang, kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik menjadi faktor-faktor penyebab perlambatan ekonomi.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada tahun 2015 berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 5,86 persen. Semula tahun 2014 sebesar Rp8.254.204 juta menjadi Rp8.737.857 juta. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian sejalan dengan program pemerintah daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan antara lain melalui program pencetakan sawah baru dan Program ketahanan pangan. Selain itu, pertumbuhan sektor ini disebabkan kondisi cuaca yang kondusif berdampak pada meningkatnya hasil tangkapan ikan nelayan dan meningkatnya harga lada. Sementara itu, harga komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan CPO masih terus menurun. Kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin berpihak kepada lahan usaha ini, diperkirakan akan menyebabkan lapangan usaha ini akan terus mengalami pertumbuhan yang semakin baik. Pada tahun 2016, diperkirakan PDRB sektor ini akan meningkat menjadi Rp9.326.648 juta dan semakin meningkat menjadi Rp9.986.538 juta pada tahun 2017.

Pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan tumbuh sebesar 1,74 persen, semula pada tahun 2014 sebesar Rp6.354.052 juta meningkat menjadi Rp6.464.379 juta pada tahun 2015. Mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan pada tahun 2014 yang tumbuh sebesar 1,99 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh melambatnya ekspor dan turunnya harga timah internasional dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya serta adanya pemberlakuan Permendag yang baru yaitu Permendag No.33 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor timah. Pada tahun 2016 dan 2017, diperkirakan sektor ini akan mengalami pertumbuhan yang juga masih tidak terlalu tinggi, jika memperhatikan trend pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 diperkirakan PDRB pada sektor ini akan mencapai Rp6.571.010 juta dan meningkat menjadi Rp6.668.560 juta pada tahun 2017.

Sementara itu, pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 1,35 persen. Sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 1,30 persen. Adapun pada tahun 2015, PDRB sektor ini adalah sebesar Rp10.414.023 juta. Menurunnya lapangan usaha pertambangan khususnya timah sebagai komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebabkan oleh menurunnya permintaan global dan harga komoditas timah yang masih rendah mengakibatkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami kecenderungan melambat selama beberapa tahun terakhir. Penerapan Permendag No.33 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor timah menyebabkan beberapa industri pengolahan timah (smelter) sempat tidak berproduksi karena menurunnya pasokan bahan baku timah sehingga industri pengolahan tumbuh terbatas pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017, jika regulasi yang mengatur tentang ketentuan ekspor timah tidak mengalami perubahan ditambah lagi dengan adanya kondisi perkembangan eksternal yaitu rendahnya harga dan permintaan global terhadap timah maka diperkirakan pertumbuhan PDRB pada sektor ini akan tetap mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2016 diperkirakan PDRB sektor ini adalah sebesar Rp10.561.429 juta dan Rp10.725.870 juta pada tahun 2017.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2015 4,07 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,44 persen. Meningkatnya aktivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat jelang akhir tahun belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ini secara kumulatif pada tahun 2015. Beberapa hal yang menyebabkan sektor ini tetap tumbuh antara lain : dibukanya pusat perbelanjaan modern pada pertengahan September 2015 yang turut mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Selain itu,

musim liburan sekolah mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bangka Belitung sehingga mendorong pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, pendaftaran kendaraan baru roda 4 (mobil dan truk) dan roda 2 sedikit membaik. Tapi disisi lain menurunnya penjualan kendaraan yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak melambatnya perekonomian dan prioritas konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan selain kendaraan yang menjadi salah satu penyebab sektor ini pada tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka pada tahun 2016 dan 2017, diperkirakan sektor ini akan tetap tumbuh menjadi sebesar Rp6.639.598 juta dan Rp6.943.148 juta.

Pada Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 5,54 persen pada tahun 2015, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 yang tumbuh sebesar 4,0 persen, pada tahun 2015 PDRB sektor konstruksi sebesar Rp3.748.038 juta. Pada tahun 2016 dan 2017, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang akan fokus pada pengembangan infrastruktur fisik diperkirakan akan membuat sektor konstruksi akan terus mengalami pertumbuhan yang positif. Diproyeksikan PDRB sektor konstruksi akan meningkat menjadi Rp3.997.097 juta pada tahun 2016 dan Rp4.268.018 juta pada tahun 2017.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 pada tahun 2015, mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,96 persen. Pada tahun 2015, PDRB sektor ini adalah sebesar Rp1.664.350 juta dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp1.765.428 dan sebesar Rp1.878.005 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini diperkirakan akan seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung dan liburan sekolah. Selain itu, pertumbuhan pada lapangan usaha ini juga disebabkan meningkatnya kegiatan pergudangan seiring dengan meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat pada hari raya keagamaan seperti Tahun Baru Islam. Maulid Nabi Muhammad, Hari Raya Natal dan Tahun Baru Masehi serta musim liburan sekolah. Namun disisi transportasi, arus penumpang angkutan laut di pelabuhan Pangkalbalam dan Tanjungpandan akan mengalami penurunan. Hal tersebut ditengarai disebabkan oleh adanya alternatif moda transportasi udara yang relatif murah sehingga penumpang angkutan laut menurun dan kemungkinan disebabkan tingginya gelombang laut. Sementara penumpang angkutan udara meningkat signifikan terutama pada musim liburan dan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum tumbuh meningkat sebesar 3,42 persen. Secara signifikan mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 7,47 persen. Pada tahun 2015, PDRB sektor penyediaan akomodasi makan minum adalah sebesar Rp1.034.807 dan pada tahun 2016, diperkirakan akan meningkat menjadi Rp1.071.995 juta dan terus meningkat menjadi Rp1.112.445 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan dan minum terkonfirmasi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung yang masih mengalami diakibatkan oleh kondisi cuaca yang kondusif termasuk disebabkan oleh kabut asap. Pada tahun 2016, sektor ini diperkirakan akan meningkat sehubungan dengan adanya beberapa event pariwisata, antara lain adalah Gerhana Matahari Total.

Lapangan usaha non-dominan lainnya yakni lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada 2015 yaitu 9,78 persen. Lapangan usaha jasa pendidikan tumbuh sebesar 9,75 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 6,23 persen dan jasa lainnya tumbuh sebesar 8,12 persen. Beberapa lapangan usaha tersebut memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, bahkan meningkat dibandingkan tahun 2014. Namun karena kontribusi terhadap pembentukan PDRB

secara akumulasi tidak besar, maka peningkatannya tidak cukup untuk meningkatkan PDRB secara signifikan.

Sementara itu, PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah. PDRB demikian itu disebut sebagai PDRB menurut penggunaan atau disebut PDRB menurut pengeluaran (*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*), atau biasa juga disebut sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi permintaan (*demand side*).

Pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran pada tahun 2015 terjadi pada beberapa komponen pengeluaran, kecuali pada perubahan inventori, ekspor luar negeri, dan net ekspor antar daerah yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,20 persen, 19,56 persen dan 27,17 persen. Penurunan ekspor luar negeri disebabkan menurunnya ekspor timah Bangka Belitung dan minyak nabati. Komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) sebesar 7,03 persen diikuti impor luar negeri barang dan jasa yaitu sebesar 6,86 persen, pengeluaran dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,80 persen.

Perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2013-2015 dan proyeksi tahun 2016-2017 dapat terlihat pada Tabel III.3 dan Tabel III.4 berikut:

Tabel III.3
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)

	Pengeluaran	2013	2014	2015	2016)*	2017)*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.833.874	29.321.100	32.686.683	34.415.854	37.391.455
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	278.911	339.516	389.651	413.117	456.742
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.249.824	5.768.626	6.339.383	6.660.723	7.198.792
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.172.572	12.983.531	14.330.832	15.704.815	16.878.987
5	Perubahan Inventori	1.157.990	1.224.294	1.167.768	940.636	1.145.262
6	Ekspor Luar Negeri	28.047.085	27.900.672	21.152.562	28.479.676	29.933.615
7	Impor Luar Negeri	1.146.115	1.366.238	1.392.465	1.455.444	1.561.102
8	Net Ekspor Antar Daerah	(20.205.778)	(19.797.887)	(13.682.325)	(21.647.350)	(23.273.369)
	PDRB	50.388.364	56.373.615	60.992.088	63.512.028	68.170.383

Sumber: 2013-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*)2016-2017 Proyeksi Bappeda

Tabel III.4
 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2017
 Atas Dasar Harga Konstan (Juta rupiah)

	Pengeluaran	2013	2014	2015	2016)*	2017)*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21.122.671	22.405.560	23.704.163	24.971.103	26.772.888
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	232.043	261.768	280.182	305.421	333.826
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.222.098	4.470.518	4.669.369	4.963.612	5.370.232
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.970.060	9.407.028	9.817.433	10.407.225	11.251.278
5	Perubahan Inventori	797.333	884.346	873.741	840.903	1.206.210
6	Ekspor Luar Negeri	23.716.450	27.201.531	21.880.821	25.880.821	29.995.287
7	Impor Luar Negeri	915.701	1.042.267	1.113.734	1.130.195	1.199.264
8	Net Ekspor Antar Daerah	(15.954.096)	(19.429.044)	(14.150.512)	(18.208.202)	(23.442.033)
	PDRB	42.190.857	44.159.440	45.961.462	48.030.688	50.288.424

Sumber: 2013-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
 *)2016-2017 Proyeksi Bappeda

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari sisi pengeluaran dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2015 yang sebesar Rp60.992,088milyar, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp32.686,683milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar Rp 389,651milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi konsumsi pemerintah sebesar Rp 6.339,383 milyar, pembentukan modal tambah bruto sebesar Rp14.330,832milyar, perubahan inventori sebesar Rp 1.167,768milyar, transaksi ekspor sebesar Rp. 21.152,562milyar dan impor sebesar Rp 1.392,465milyar.

Pada tahun 2016 diperkirakan sumber utama pertumbuhan dari sisi pengeluaran tetap akan bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pelaku usaha masih terlihat optimis untuk meningkatkan kinerja dari sisi volume.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan terus menguat pada tahun 2016 hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya Tingkat Keyakinan Konsumen di Kota Pangkalpinang yang masih menunjukkan optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2016 yang masih akan terjadi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Investasi pada tahun 2016 diperkirakan akan masih tetap tinggi terkait dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *row material* sumber daya mineral di Kepulauan Bangka Belitung serta adanya rencana penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis yang didukung oleh daya tarik investasi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah.

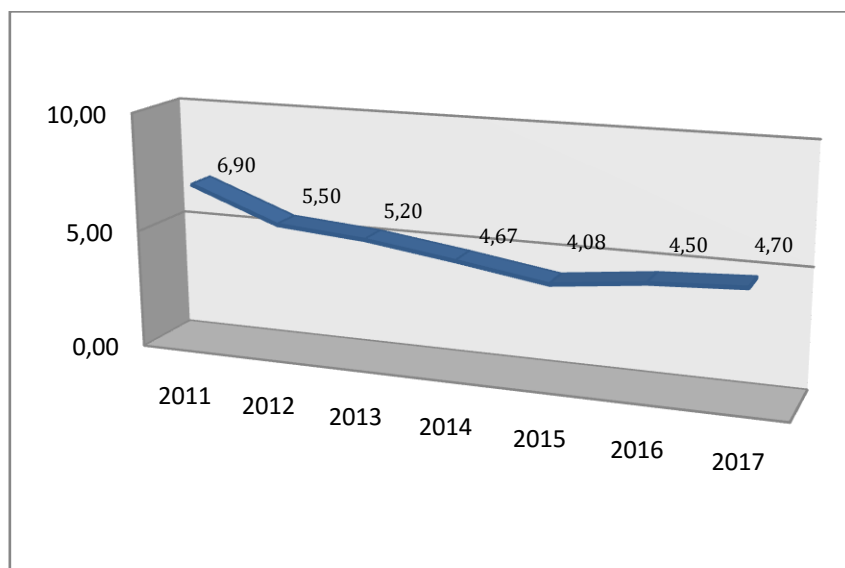
Ekspor diperkirakan akan naik seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tumbuh. Namun demikian, neraca perdagangan Kepulauan Bangka Belitung harus dijaga karena adanya kecenderungan aktivitas impor lebih tinggi daripada ekspor.

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,08persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang sebesar 4,67 persen. Kondisi ini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu adanya bencana kabut asap, kemarau panjang, kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik serta terjadinya perlambatan ekonomi global dan turunnya harga minyak mentah dunia yang membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung, namun pertumbuhan PDRB tahun 2016 akan didorong oleh stimulus fiskal terutama pembangunan proyek infrastruktur (investasi) dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat.

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan semakin baik. Pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti pula dengan adanya fenomena bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2015 tidak hanya semata-mata bergantung dari sub sektor industri pengolahan logam, hal ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan semakin meningkatnya pertumbuhan sub sektor makanan, minuman dan tembakau. Gambaran mengenai perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2011-2017 dapat terlihat pada Gambar III.1 sebagai berikut:

Gambar III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2017



Sumber: 2011-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
*)2016-2017 Proyeksi Bappeda

Berdasarkan lapangan usaha, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2013 - 2015 serta proyeksi pertumbuhan 2016 -2017 sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.5.

Tabel III.5
Laju Pertumbuhan PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013 – 2017

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.85	9.22	5.86	6.74	7.08
B.	Pertambangan dan Penggalian	-0.64	1.99	1.74	1.65	1.48
C.	Industri Pengolahan	3.45	1.30	1.35	1.42	1.56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.80	9.29	5.77	6.06	6.36
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.19	4.95	5.74	5.75	6.03
F.	Konstruksi	8.96	4.00	5.54	6.65	6.78
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	5.76	4.44	4.07	4.48	4.57
H.	Transportasi dan Pergudangan	7.23	5.96	5.78	6.07	6.38
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.89	7.47	3.42	3.59	3.77
J.	Informasi dan Komunikasi	8.97	6.85	7.34	7.34	7.49
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.68	5.26	4.35	4.56	4.79
L.	Real Estate	7.98	7.72	2.86	3.14	3.30
M, N.	Jasa Perusahaan	6.80	7.01	4.02	4.42	4.51
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.55	7.33	9.78	9.78	9.78
P.	Jasa Pendidikan	9.98	7.06	9.75	10.23	10.23
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.31	5.98	6.23	6.54	6.87
R, S, T, U	Jasa Lainnya	6.84	7.95	8.12	8.52	8.52
	PDRB	5.20	4.67	4.08	4.50	4.70

Sumber: 2010-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*)2016-2017 Proyeksi Bappeda

Pada tahun 2015, hampir semua sektor mengalami perlambatan, kecuali pada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada 2015 yaitu 9,78 persen. Lapangan usaha jasa pendidikan tumbuh sebesar 9,75 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 6,23 persen dan jasa lainnya tumbuh sebesar 8,12 persen, Informasi dan komunikasi sebesar 7,34 persen, Pengadaan listrik dan gas sebesar 5,77 persen dan Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang..

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2016-2017 dilihat dari sisi produksi, diproyeksikan masih tetap didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kemudian sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Transportasi dan Pergudangan. Kinerja sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan yang terjadi di semua subsektor yaitu perkebunan, tanaman, bahan makan, dan perikanan. Permintaan akan subsektor perkebunan, kelapa sawit, karet, lada, diperkirakan tetap tinggi, sehingga meningkatkan harga. Meski demikian, diperkirakan kondisi cuaca tetap akan membatasi produksi.

Pada tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 adalah sebesar 6,5 – 7 persen, dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, angka yang telah ditetapkan di RPJMN dan RKP tersebut maka sangat sulit untuk dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini. Pada tahun 2016, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung akan mengalami pertumbuhan yang positif

dan berada pada kisaran 4,5 – 4,8 persen, sementara pada tahun 2017 ekonomi Bangka Belitung diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,7 – 5 persen.

Sektor pertambangan dan industri yang berbasis timah diperkirakan akan tetap melambat, dimana harga komoditas timah pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan masih belum mebaik seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang masih lesu. Adanya pembatasan produksi timah oleh pemerintah, diperkirakan menjadi salah satu penghambat kinerja perekonomian secara umum. Namun demikian, permintaan timah untuk industri strategis masih tetap menjanjikan.

Sementara itu, sektor pertanian diperkirakan akan terus meningkat yang didukung meningkatnya produksi sawit dan padi. Harga CPO yang cukup stabil dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Demikian halnya dengan produktivitas padi yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya luas area tanam. Pada sisi yang lain, komoditas pertanian unggulan lainnya seperti lada juga diperkirakan akan terus meningkat. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah, adanya resiko terhadap penurunan harga karet yang dipicu oleh faktor eksternal, dimana Cina sebagai Negara tujuan ekspor karet Bangka Belitung saat ini tengah menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

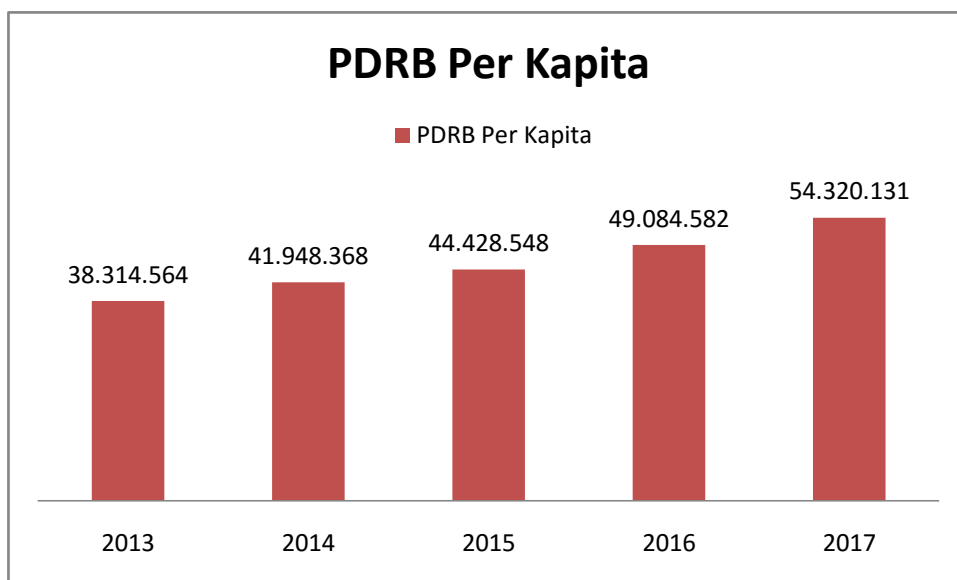
Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, pemerintah daerah harus segera melakukan langkah strategis guna mempercepat proses transformasi ekonomi dari yang berbasis pertambangan menjadi perekonomian yang berbasis potensi lokal lainnya sehingga pembangunan sektor dan sub sektor lain harus terus dipacu. Berdasarkan data dan berbagai kajian yang ada, beberapa sektor dan sub sektor yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi Bangka Belitung yaitu pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata sementara sektor industri dan sektor lainnya pun harus diarahkan pada sektor yang menjadi potensi lokal tersebut.

3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas

Dalam kurun waktu 2013-2015 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB perkapita penduduk berdasarkan Harga berlaku di Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan sebesar Rp44.428.548. Adapun gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar III.2.

Gambar III.2
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017
(dalam ribu)



Sumber: 2013-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
*)2016 dan 2017 Proyeksi Bappeda

Sementara itu pada tahun 2016 diproyeksikan PDRB per kapita Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kenaikan hingga Rp49.084.582 dan semakin meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp54.320.131

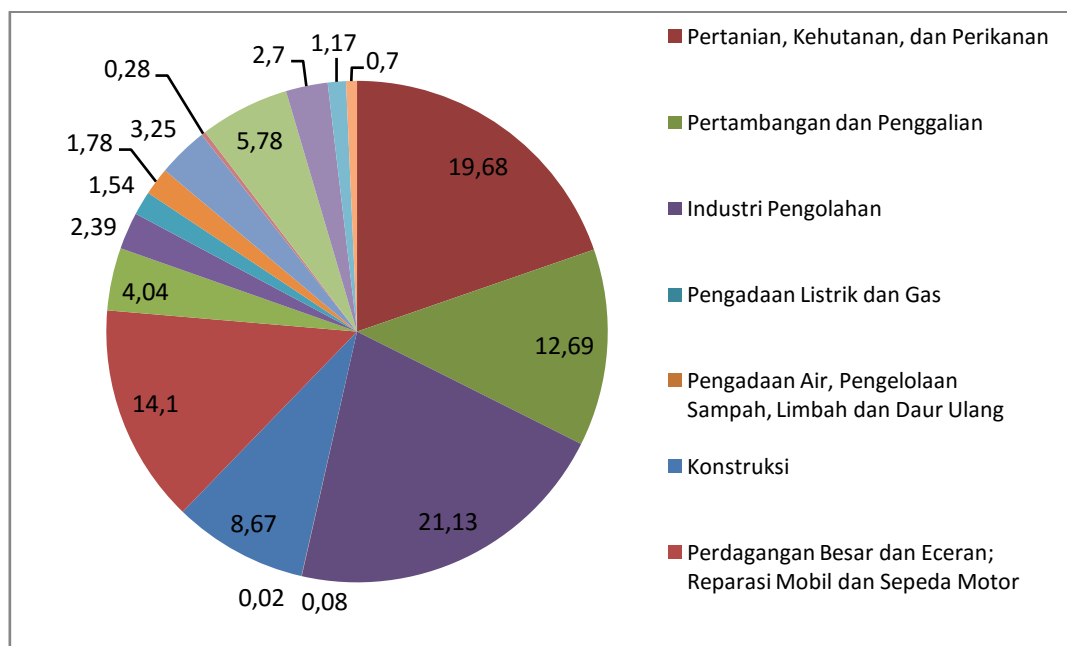
3.1.1.4 Struktur Sektor Ekonomi

Sementara dari struktur ekonomi, dimana gambaran dari struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2015 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi sebesar 21.13 persen namun mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 22.85 persen, kemudian kontribusi yang paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 sektor ini berada pada peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,68 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14.10 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12.69 persen.

Pada tahun 2015, terjadi pergeseran struktur perekonomian, dimana sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor menggeser sektor pertambangan dan penggalian yang berada pada posisi ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran mengenai distribusi persentase sektoral terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 dapat terlihat pada Gambar III.3. Struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah ini:

GambarIII.3
Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha
Kepulauan Bangka Belitung Tahun2015



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Sementara itu, pada tahun 2016 dan 2017, diperkirakan tidak akan terjadi lagi pergeseran struktur perekonomian, dimana sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor pertambangan dan penggalian akan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB, Hal ini sebagaimana tergambar pada Tabel III.6.

Tabel III.6
Distribusi Persentase PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013–2017

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016)*	2017)*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,40	19,22	19,68	19,72	20,46
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,09	13,52	12,69	12,76	11,01
C.	Industri Pengolahan	23,99	22,85	21,13	20,69	20,39
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,21	8,36	8,68	8,86	8,87
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,24	13,43	14,10	13,74	14,51
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,70	3,78	4,04	4,14	4,22
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,34	2,39	2,37	2,49
J.	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,51	1,54	1,54	1,60
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,77	1,78	1,78	1,78
L.	Real Estate	3,18	3,26	3,25	3,25	3,36

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016)*	2017)*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M, N.	Jasa Perusahaan	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	5,40	5,78	6,01	6,10
P.	Jasa Pendidikan	2,33	2,42	2,70	2,86	2,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,12	1,17	1,18	1,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,63	0,66	0,70	0,72	0,73
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*)2015-2016 Proyeksi Bappeda

3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013-2015 pada setiap komponen pengeluaran. Pada tahun 2015, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih komponen pengeluaran yang dominan dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 53.59 persen. Meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 52.01. Komponen pengeluaran lainnya yang meningkat adalah pada pembentukan modal tetap bruto, dimana pada tahun 2014 sebesar 22.03 persen dan meningkat menjadi 23,50 persen pada tahun 2015. Sementara itu, komponen pengeluaran lainnya cenderung mengalami penurunan. Termasuk ekspor yang juga diikuti dengan meningkatnya impor Kepulauan Bangka Belitung. Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2013 – 2017 adalah sebagaimana yang terdapat dalam Tabel III.7

Tabel III.7
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2017 (persen)

	Pengeluaran	2013	2014	2015*)	2016*)	2017*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,27	52,01	53.59	54,15	54,85
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,55	0,60	0.64	0,65	0,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,42	10,23	10.39	10,48	10,56
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,17	23.03	23.50	24,71	24,76
5	Perubahan Inventori	2,30	2,17	1.91	1,48	1,68
6	Ekspor Luar Negeri	55,66	49,49	34.68	44,81	43,91
7	Impor Luar Negeri	2,27	2,42	2.28	2,29	2,29
8	Net Ekspor Antar Daerah	- 40,10	-35,11	-22.43	(34,06)	(34,14)
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: 2013-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

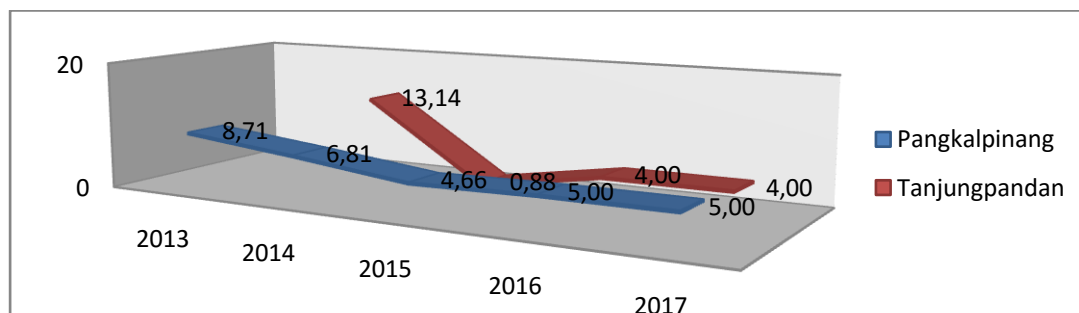
*)2016 dan 2017 Proyeksi Bappeda

3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2015, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 4,66 persen dan Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 0,88 persen *year on year* (Desember 2015 terhadap Desember 2014).

Gambar III.4

Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2013-2017



Sumber: 2013-2015 (BPS), *)2016-2017 (Proyeksi Bappeda)

Tabel III.8

Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2011-2015

Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	5,00	6,57	8,71	6,81	4,66
1. Bahan Makanan	-0,50	8,50	11,08	3,39	6,63
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau	5,32	7,95	6,82	8,63	7,92
3. Perumahan	7,52	5,81	9,20	8,85	3,74
4. Sandang	8,83	5,79	1,63	6,61	2,60
5. Kesehatan	7,09	5,19	5,08	8,13	5,50
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,73	10,31	3,77	6,56	8,62
7. Transportasi dan Komunikasi	10,55	-0,11	11,17	6,98	-2,04

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2015

Tabel III.9

Laju Inflasi Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2014-2015

Kelompok Pengeluaran	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Umum	13.14	0.88
1. Bahan Makanan	21.36	-4.52
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau	6.91	4.63
3. Perumahan	6.87	2.91
4. Sandang	12.03	1.26
5. Kesehatan	4.11	3.87
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15.35	8.07
7. Transportasi dan Komunikasi	20.47	0.42

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2015

Pada tahun 2016, diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai kisaran 4,0 persen untuk kota Pangkalpinang dan 5,0 persen untuk kota Tanjungpandan berdasarkan arahan RPJMN 2015-2019, dimana Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan

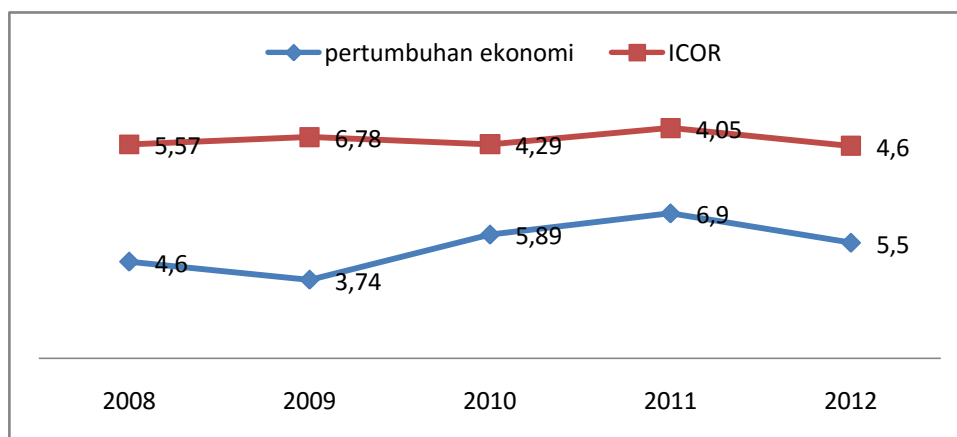
dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.

3.1.1.7 ICOR

Tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka *Incremental Capital - Output Ratio* (ICOR). Suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai ICOR-nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat, di mana ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tren ICOR diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2009 nilai ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,78 sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,74 persen. Ini mengindikasikan bahwa di tahun 2009 kegiatan ekonomi kurang produktif salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi di negara maju. Antara 2009 dengan 2010 terjadi proses perbaikan dari fungsi-fungsi produksi kegiatan ekonomi. Nilai ICOR mulai turun sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,5 persen dengan ICOR sebesar 4,6 persenkondisi ini menggambarkan terjadi perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang pertumbuhan ekonominya sebesar 6,9 persen dengan ICOR sebesar 4,05.

Gambar III.5
Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Proyeksi angka ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun selanjutnya diharapkan semakin cenderung untuk turun atau adanya perbaikan produktivitas aktivitas ekonomi diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian Bangka Belitung ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) yang pada akhirnya dapat mencapai target-target makroekonomi yang telah direncanakan. Pencapaian target-target makro ekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

ICOR Kepulauan Bangka Belitung menurut sektor dan sub sektor cenderung bervariasi. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian mempunyai ICOR relatif lebih baik dibanding sektor lainnya. Rendahnya angka ICOR sektor pertanian disebabkan oleh proses produksi yang pendek dan kecilnya proporsi investasi dibanding biaya antara (*intermediate cost*) dalam struktur ongkos usaha taninya. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran rendahnya ICOR disebabkan oleh perputaran modal yang cepat dan proses produksi yang sangat pendek khususnya subsektor perdagangan dan restoran. Rendahnya angka ICOR sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh faktor tidak banyaknya investasi baru yang masuk disebabkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan upaya pembatasan ekspor timah.

3.1.1.8 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.033,25 milyar dan investasi PMDN sebesar Rp 1.023,73 milyar. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar di dalam Tabel III.10

Tabel III.10
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2015

Investasi		2011	2012	2013	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMA	Jumlah Proyek	48	46	37	60	76
	Nilai (Rp Milyar)	146,05	59,18	81,52	615,45	1.033,25
PMDN	Jumlah Proyek	7	8	9	8	28
	Nilai (Rp Milyar)	514,40	533,46	543,3	615,45	1.023,73

Sumber: BP2TPM, 2015

Pada tahun 2016 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain

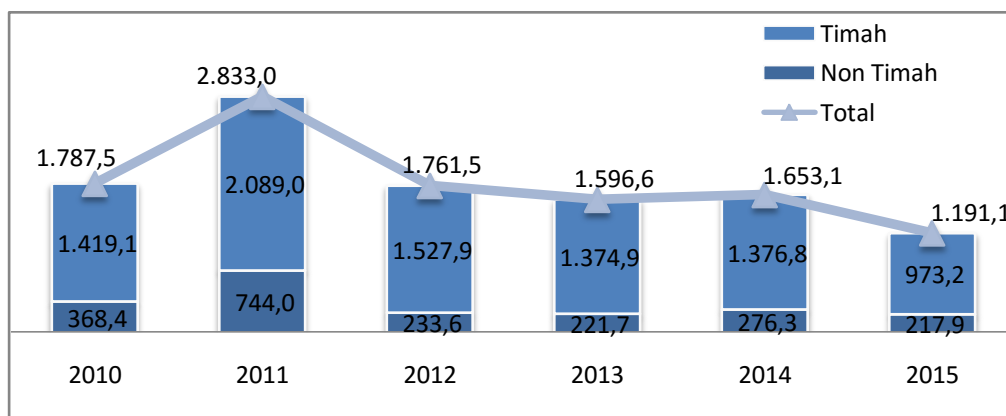
adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.1.9 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Total ekspor tertinggi sebesar US\$ 2.833,0 Juta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahun 2011 baik dari ekspor logam timah yang sebesar US\$ 2.089,0 Juta maupun ekspor non logam timah yang sebesar US\$ 744,0. Pada tahun 2015 total ekspor bulan Januari s.d. Desember 2015 sebesar US\$ 1.191,1 Juta mengalami penurunan sebesar 27,95 persen dibandingkan Januari s.d. Desember 2014 sebesar US\$ 1.653,12 juta. Penurunan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh turunnya ekspor timah hingga 29,31 persen dari US\$ 1.376,78 Juta menjadi US\$ 973,19 Juta dan ekspor non timah sebesar 21,16 persen dari US\$ 276,34 Juta menjadi US\$ 217,87 juta.

Ringkasan mengenai perkembangan ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010 s.d. 2015, sebagaimana tersaji pada gambar III.6 dan gambar III.7 berikut:

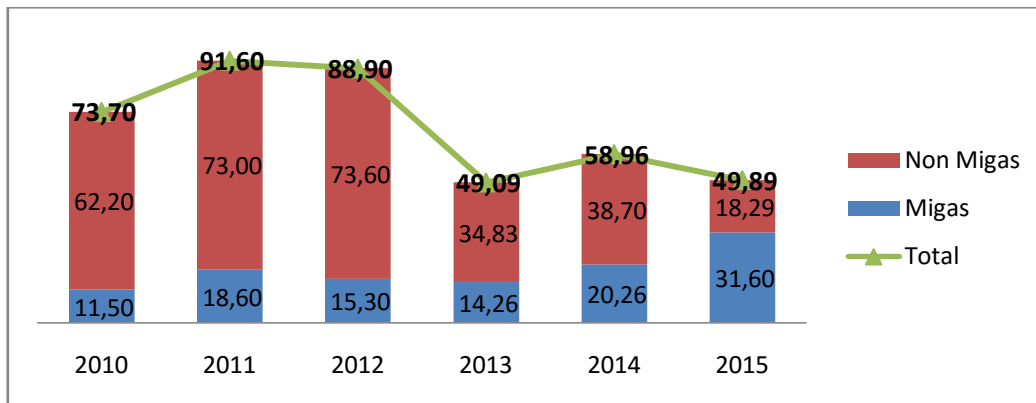
Gambar III. 6
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010- 2015 (dalam juta US\$)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Total nilai impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar US\$ 91,60 Juta dimana impor non migas sebesar US\$ 73,00 Juta dan impor Migas sebesar US\$ 18,60 Juta. Pada tahun 2015 total impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga bulan Desember 2015 sebesar US\$ 49,89 juta turun 15,38 persen dibandingkan Januari s.d. Desember 2014 yang sudah mencapai US\$ 58,96 juta. Penurunan nilai impor tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor non migas hingga mencapai 52,75 persen yaitu US\$ 38,70 juta menjadi sebesar US\$ 18,29 juta dan impor migas mengalami peningkatan sebesar 56,01 persen yaitu US\$ 20,26 juta menjadi sebesar US\$ 31,60 juta.

Gambar III. 7
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2015(dalam juta US\$)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

3.1.2.1 Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2014. TPT pada 2014 sebesar 5,14 persen menjadi 6,29 persen pada 2015. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini.

Tabel III.11
Angka Tingka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012–2017

Kegiatan Utama	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49	3,70	5,14	6,29	5.50	5.10

Sumber: 2012 – 2015 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)

*) 2016 -2017 Proyeksi (Bappeda Prov. Kep. Babel)

Pada tahun 2016 dan 2017, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakuan UU tentang Minerba yang melarang ekspor *raw materials* akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh berkembang yang akhirnya akan berimbas bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru.

3.1.2.2 Kemiskinan

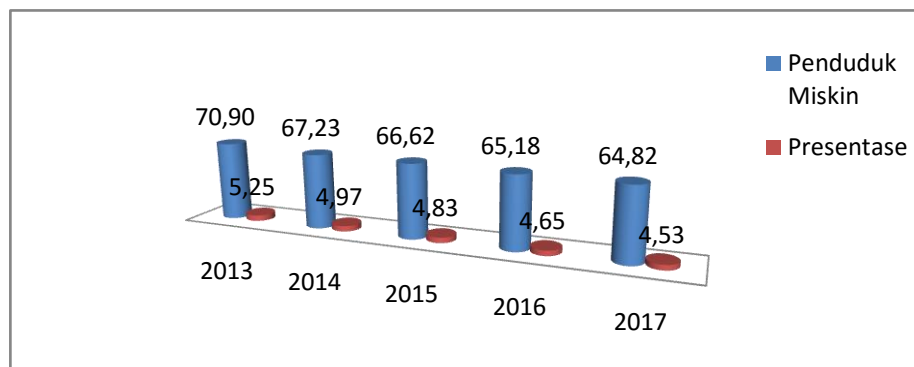
Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 67,23 ribu jiwa dengan persentase 4,97 persen sementara pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin turun menjadi 66,62 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 4,83 persen.

Gambar III.8

Diagram Penduduk Miskin Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017



Sumber: 2010 – 2015 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)

*) 2016-2017 (Proyeksi Bappeda)

Pada tahun 2016 dan 2017, angka kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat di Kepulauan Bangka Belitung, angka kemiskinan tertinggi terjadi di daerah perdesaan.

3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williams dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:

Besarnya IW adalah $0 < IW < 1$

Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,

Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,

IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 berfluktuasi sepanjang tahun 2011-2015 dan kembali ke angka 0,291 pada tahun 2015.

Berdasarkan angka ini, dimana angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, maka pembangunan wilayah semakin mendekati merata. Seperti sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.12. Penurunan angka indeks setiap tahunnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2016 IW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat turun menjadi sebesar 0,288, hal ini diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel III.12
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011–2016)

Tahun	Indeks Ketimpangan Williamson
(1)	(2)
2011	0,291
2012	0,284
2013	0,304
2014	0,294
2015 *)	0,291
2016 *)	0,288

Sumber: 2011-2014 (BPS.Ri)

*) 2015-2016 (Proyeksi Bappeda)

3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table III.14, pada tahun 2013 adalah sebesar 0,31, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,30. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatan koefisien gini pada tahun 2014 perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2015 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,27, angka tersebut merupakan paling dan pada tahun 2016 diperkirakan turun menjadi 0,29 yang artinya pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata..

Secara lengkap, perkembangan angka koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel III.13.

Tabel III.13
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010–2017)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2010	0,30
2011	0,30
2012	0,29
2013	0,31
2014	0,30
2015	0,27
2016*)	0,268
2017*)	0,265

Sumber: 2010-2015 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2015
2015-2016*) Proyeksi Bappeda

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2016 dan 2017

Tantangan perekonomian global diperkirakan akan berasal dari pelemahan ekonomi China. Dengan pelemahan negara tirai bambu tersebut akan mengurangi permintaan barang dari Indonesia.

Ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan masih belum seutuhnya terlepas dari tantangan pada 2016. Lantaran, harga minyak dunia belum bisa diprediksi.

Namun demikian, melemahnya perekonomian global mendapatkan response yang positif bagi perekonomian Indonesia. Bergesernya status Indonesia sebagai Negara tujuan investasi dunia, tentu berimplikasi positif bagi pengembangan industri dalam negeri. Tetapi, di sisi lain perlu diwaspadai bahwa dampak negatif dari melemahnya perekonomian dunia dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam menjawab tantangan perekonomian global, Indonesia perlu menentukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat perekonomian domestik. Faktor integral yang menentukan kekuatan ekonomi domestik Indonesia antara lain adalah: 1) pengelolaan konsumsi yang efektif; 2) pengetuan sektor pangan; 3) penggunaan energi yang efisien; 4) Investasi dan perdagangan Internasional. Keempat faktor tersebut bersifat komplementer, sehingga penanganannya harus simultan dan terkoordinasi dengan baik. Pada intinya, kelemahan –kelemahan di sektor daya saing, rendahnya kapasitas produksi pangan, minimnya penguasaan R&D dan inovasi serta faktor politis yang terkait dengan kepemimpinan dan efektivitas implementasi kebijakan perlu segera di benahi. Sementara kekuatan yang dimiliki Indonesia berupa semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah, momentum untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang cukup tinggi, serta aspek demografis serta kemajemukan bangsa, perlu terus dipertahankan guna mendorong berbagai kebijakan di bidang energi, moneter, fiskal, pangan dan kerjasama internasional berjalan efektif.

3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung 2016 dan 2017

Pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Terdapat beberapa isu yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dan 2017, yaitu:

1. Belum pulihnya perekonomian global;
2. Harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. Faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung;
4. Depresiasi Nilai Tukar Rupiah terus menerus;
5. Kapasitas pengolahan CPO yang ada di Bangka Belitung masih sangat terbatas.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan. Gangguan pasokan bahan makanan baik dari sisi produksi maupun distribusi yang disebabkan gangguan cuaca dan faktor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilukada Gubernur juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lainnya terkait dengan pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 terutama dalam persaingan ekonomi regional yang saat ini telah berlangsung mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Laju peningkatan ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya laju impor, sehingga neraca perdagangan selama kurun waktu tersebut terus mengalami penurunan. Apabila kondisi daya saing produk tidak segera ditingkatkan, maka dalam era perdagangan bebas kedepan dengan masuknya berbagai produk dari luar dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih terjangkau akan membuat produk dalam daerah akan semakin terpinggirkan.
- 2) Laju Inflasi. Karakteristik provinsi kepulauan yang dimiliki oleh Bangka Belitung menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia. Angka inflasi yang tinggi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian daya saing daerah yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.
- 3) Pengembangan sektor unggulan Bangka Belitung harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor-sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN. Di antaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao dan karet). Industri produk olahan ikan, industri TPT, industri makanan minuman serta industri logam.
- 4) Daya saing Sumber Daya Manusia. Mobilitas tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra ASEAN akan diberlakukan pada beberapa sektor, oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level ASEAN. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga asing yang masuk ke daerah.

- 5) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi, utamanya sektor produksi dan bagi pasar.
- 7) Disparitas pembangunan antara wilayah di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan tersendiri untuk dijadikan pemicu dalam meningkatkan daya saing antara wilayah, Upaya mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sangat diperlukan dalam memperkuat jaringan distribusi produk-produk unggulan daerah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan agar daya saing setiap wilayah dapat terus ditingkatkan.
- 8) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-privatepartnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Mulai pulihnya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekspor Babel yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 antara lain adalah:

- 1) Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian global menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 dan 2017.
- 2) Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
- 3) Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur

yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.

- 4) Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian yang relatif baik pada tahun 2015 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Bangka Belitung pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan investasi yang terus berlanjut dan pertumbuhan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian diperkirakan akan semakin menonjol dan memainkan peranan penting dalam perekonomian Bangka Belitung dimasa yang akan datang, di samping sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2014-2019, kebijakan pembangunan diarahkan kepada pembangunan Infrastruktur dalam rangka menungjung perekonomian sesuai dengan Nawacita Presiden RI yang memprioritas pembangunan tahun 2017 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 2) Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan;
- 3) Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil,fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).
- 4) Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- 5) penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat;
- 6) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).
- 7) Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah degan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulanmasing-masing kabupaten/kota tersebut.
- 8) Pengembangankemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta terutama peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Prioritas-prioritas pembangunan dalam RPJP, RPJM dan RKPD inilah yang akan menentukan alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal lainnya.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2017 di Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscalsustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2012-2017.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai yang tertuang pada Tabel III.14.

Tabel III.14

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015 (N-1)	Proyeksi / Target 2016 (N)	Proyeksi / Target 2017 (N+1)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan asli daerah	558.971.218.953,54	560.134.530.225,53	650.176.726.390,22	677.565.341.209,25
1.1.1	Pajak daerah	500.844.014.371,82	500.844.014.371,82	533.369.350.313,00	560.037.817.828,65
1.1.2	Retribusi daerah	8.445.970.286,00	9.061.667.223,45	14.402.946.067,50	15.123.093.370,88
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.500.00.00,00	7.500.00.00,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	42.181.234.295,72	50.228.848.630,26	96.404.430.009,72	96.404.430.009,72
1.2	Dana perimbangan	1.179.487.500.000,00	1.263.220.635.000,00	1.500.068.042.258,14	1.387.118.902.030,72
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	226.155.287.000,00	226.155.287.000,00	226.155.287.000,00	233.247.494.030,72
1.2.2	Dana alokasi umum	897.887.443.000	905.526.208.000,00	1.025.567.555.258,14	905.526.208.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	55.444.770.000,00	131.539.140.000,00	248.345.200.000,00	248.345.200.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	179.626.400.000,00	184.626.400.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.626.400.000,00	179.626.400.000,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 +1.2+1.3)		1.918.085.118.953,54	2.007.981.565.225,53	2.155.244.768.648,36	2.069.684.243.239,96

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 yang merupakan potensidaerah dan sebagai penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- 1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- 2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- 3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
- 5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- 7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah:

1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan SamsatOutlet;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.

2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
 - c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semipemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
 - e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti Program Satam Emas dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
 - g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
- a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.15.

Tabel III.15

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah			
		Proyeksi / Target 2015 (N-2)	Proyeksi / Target 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,74	1.305.793.509.996,34	1.307.498.009.163,85	1.075.475.361.976,13
2.1.1	Belanja pegawai	329.023.179.838,35	406.293.417.508,42	648.517.515.180,72	454.906.815.993,00
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	3.000.000.000,00	-	-
2.1.4	Belanja hibah	284.091.950.000,00	278.268.677.250,00	288.066.600.000,00	258.498.752.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.008.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	280.474.272.314,38	245.671.793.237,92	256.069.793.983,13	256.069.793.983,13
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	256.078.694.72,00	369.559.622.000,00	103.836.100.000,00	100.000.000.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,74	1.305.793.509.996,34	1.307.498.009.163,85	1.075.475.361.976,13
2.2	Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.133.389.648.682,00	1.219.092.879.892,00	1.151.518.637.490,00
2.2.1	Belanja pegawai	91.216.604.900,00	111.621.354.600,00		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	575.987.487.344,50	680.980.654.172,00		
2.2.3	Belanja modal	310.690.288.316,00	340.787.639.910,00		
C	Jumlah Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.133.389.648.682,00	1.219.092.879.892,00	1.105.790.768.400,00
D	Total Jumlah Belanja	2.130.562.476.885,23	2.439.183.158.678,34	2.526.590.889.055,85	2.181.266.130.376,13

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2017 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:”Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD,
 - d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
- 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2012-2017, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.16, diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2017;
- 2) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel III.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015 (N-2)	Proyeksi / Target 2016 (N-1)	Proyeksi / Target 2017 (N)	Proyeksi / Target 2018 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	372.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	372.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	372.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	5.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	227.501.516.638,72	423.700.774.136,92	367.625.640.407,49	111.581.887.136,161
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkala (SILPA)	227.501.516.638,72	-	-	-



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

BAB IV

**PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

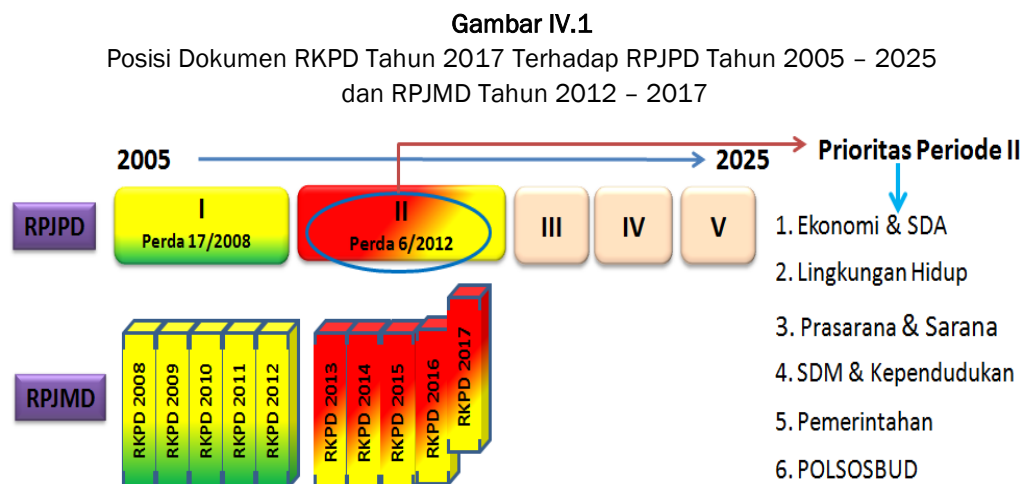
4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun II (2012–2017) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun II (2012–2017) adalah Ekonomi dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, Prasarana dan Sarana, SDM dan Kependudukan, Pemerintahan, dan Sosial, Budaya dan Politik.



2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi yaitu "Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan" maka pembangunan Daerah tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka:

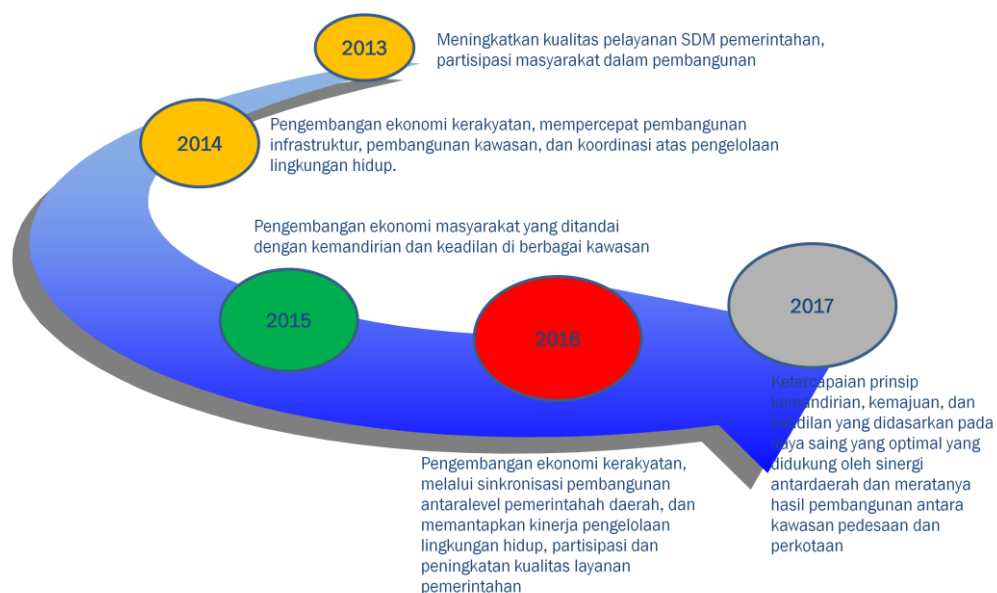
- a. Pemantapan Sistem Perkotaan
- b. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
- c. Rencana Pola Ruang
- d. Perwujudan Kawasan Strategis

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017

Arah Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang merupakan tahun kelima atau terakhir dari RPJMD Tahun 2012-2017 difokuskan untuk mencapai target kinerja program-program pembangunan, memantapkan ekonomi kerakyatan yang merata di semua kawasan, sinkronisasi pembangunan antaralevel pemerintah daerah, dan memantapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, dan kualitas layanan pemerintahan yang semakin baik.

Gambar IV.2

Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012 – 2017



4. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Mencakup hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015, dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yang direncanakan dalam RPJMD (sebagaimana telah diuraikan pada bab II). Dengan memperhatikan kedua *point* tersebut, maka isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- **EKONOMI**
 - Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi
 - Menurunnya daya beli masyarakat
 - Inflasi yang tidak terkendali
 - Masih adanya disparitas dalam hal pengembangan kawasan strategis dan belum berdasarkan azas berkeadilan
 - Komoditas unggulan dan koperasi komoditi belum berkembang sesuai harapan
- **SOSIAL BUDAYA**
 - Meningkatnya angka pengangguran
 - Peningkatan kualitas pendidikan yang mengalami stagnasi
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah

- LINGKUNGAN HIDUP
 - Menurunnya kualitas lingkungan hidup
 - Restorasi lahan kritis dan lahan eks tambang masih minim
 - Meningkatnya anomali perubahan iklim
 - Pemanfaatan ruang belum tertata dan terkelola dengan baik
- INFRASTRUKTUR
 - Kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan, SDA masih rendah
 - Ketersediaan pasokan listrik rendah
- PEMERINTAHAN
 - Tingkat pelayanan publik masih dalam kategori sedang
 - Adanya pemilukada serentak
 - Masih rendahnya sinergi antarsektor, antarpemerintahan dalam pengembangan wilayah

5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah RI tahun 2017 merupakan satu kesatuan rencana pembangunan nasional, yang mengangkat tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” melalui pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 adalah **“Mewujudkan kemandirian, kemajuan, keadilan, daya saing dan pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan”**

Makna tema:

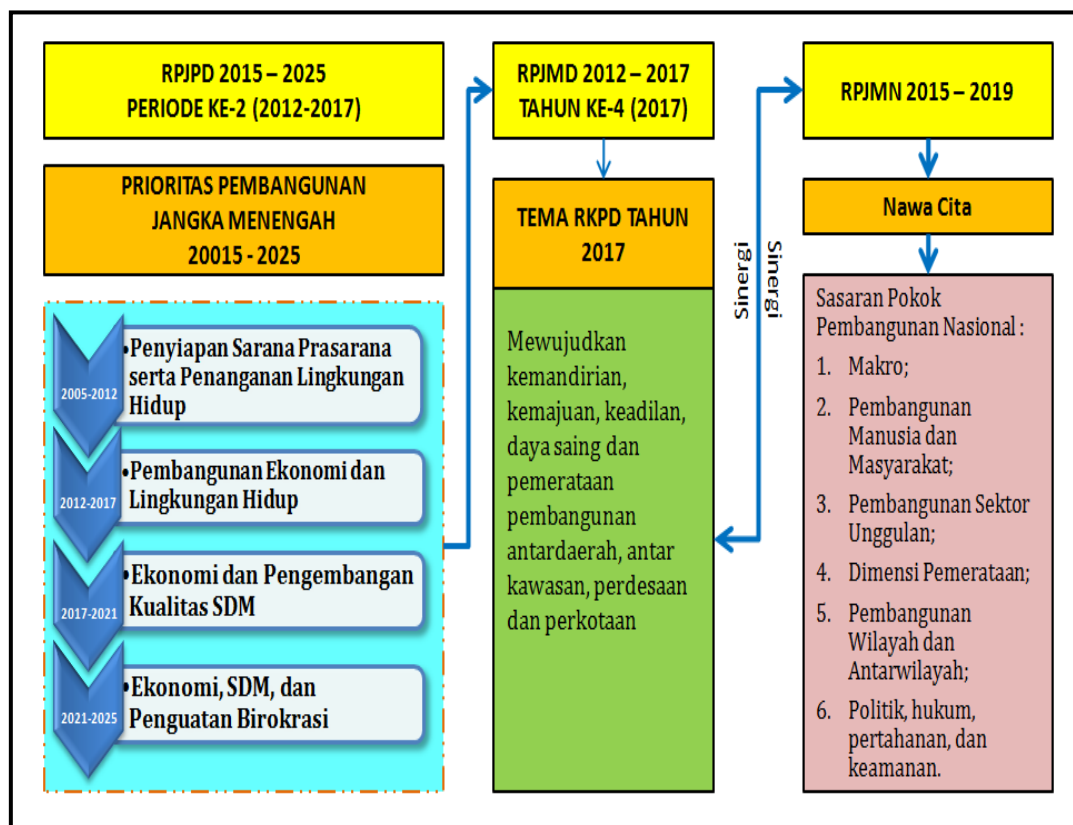
1. **Mandiri** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.
2. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain

di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance)

3. **Berkeadilan** adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra - sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.
4. **Sinergitas dan konektivitas** dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
5. **Daya saing** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Gambar IV.3

Posisi Tema Pembangunan RKPD Tahun 2017 Terhadap Nasional dan
RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



4.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, maka pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahun kelima juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan.

Hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 2012-2017 disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

Visi : *“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan”.*

Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
Misi I: Mengembangkan ekonomi kerakyatan	1) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah	1) Memperkuat kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
	2) Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung	2) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
		3) Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.
		4) Meningkatkan daya beli masyarakat
		5) Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran
Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	3) Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan	6) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
	4) Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia.	7) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
		8) Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat
		9) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
Misi III : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	10) Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 11) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
	6) Memperkuat kemitraan dan partisipasi aktif antar stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.	12) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Misi IV : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7) Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.	13) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
	8) Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.	14) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
Misi V : Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government	9) Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	15) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017 akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi yang diharapkan dapat mencapai 8 (delapan) tujuan yang ditandai dengan 13 (tiga belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Sumatera dan Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2
Target Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dan 2017

Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Nasional	Babel	Nasional	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	6,0-6,2	7,1	6,8
Tingkat Kemiskinan %	9-10	3,59	8,5-9,5	3,3
Tingkat Pengangguran %	5,2-5,5	3,05	5,0-5,3	3,0
Gini Ratio	0,39	0,294	0,38	0,28
IPM	75,3	69,21	75,7	69,92
Laju Inflasi (%)	3-5	4,0-5,0	4,0	4,0-4,5

Sumber: RKP 2016, RKP 2017, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016, RPJMD-P Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Tahun 2017 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan target sasaran tahun 2017 yang akan dicapai, disajikan pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3
Matriks Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2017
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	54.320.131
Meningkatnya konsumsi masyarakat	Daya Beli Masyarakat (Rp)	12.399
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	18.282.358
Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67.08
	Persentase Wirausaha Baru (%)	1,00
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0.265
	Indeks Williamson	0.285
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	77.32
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka melek huruf	98.50
	Angka rata-rata lama sekolah	8.11
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.90

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2017
(1)	(2)	(3)
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.00
Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57
Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100.00
Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	98.00
	Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%)	100.00
	Rasio Elektrifikasi (%)	97.75
Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)	17.24
	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	1.00
Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Opini Audit BPK	WTP
	Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)	70,00 (B)
	Indeks Reformasi Birokrasi	65.00
Terwujudnya pemerintahan yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	76.50

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan Perubahan RPJMD 2012-2017 untuk tahun 2017.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

- 1) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
- 2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
- 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2017. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, yaitu:

1. **Pengembangan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi**, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan ekonomi kerakyatan).
2. **Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata**, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
3. **Penguatan *rural urban linkages***, prioritas ini dipilih untuk menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
4. **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. **Program SATAM EMAS** (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

6. **Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun**, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf, angka lama sekolah, angka partisipasi murni (APM) pendidikan, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk memenuhi kapasitas dan kualitas pendidikan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
7. **Peningkatan pelayanan kesehatan**, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk memenuhi kapasitas dan kualitas kesehatan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
8. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).
9. **Fasilitasi reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang**, melalui pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).
10. **Pengendalian pemanfaatan ruang**, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).
11. **Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah**, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).
12. **Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil**, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD

(mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).

13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menguatkan tata kelola pemerintah daerah. Hal ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 5 RPJMD (Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean goverment*).

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2017;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

4.2.1. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 (RPJMN 2015-2019): **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 6,5 persen; Jawa-bali sebesar 7,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,6 persen; Kalimantan sebesar 6,1 persen; Sulawesi sebesar 8,2 persen; Maluku sebesar 7,8 persen dan Papua sebesar 16,0 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 8,8 persen; Jawa-bali sebesar 8,6 persen; Nusa Tenggara sebesar 15,1 persen; Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,1 persen; Maluku sebesar 12,0 persen dan Papua sebesar 25,1 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-bali sebesar 5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,4 persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 4,5 persen; Maluku sebesar 5,4 persen dan Papua sebesar 3,4 persen; dan
4. Laju inflasi 4,0.

Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam tabel IV.4 dibawah.

Tabel IV.4

Keselarasn target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017

Indikator	Tahun 2017		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	6,5	6,8
Tingkat Kemiskinan %	8,5-9,5	8,8	3,3
Tingkat Pengangguran %	5,0-5,3	5,0	3,0
Laju Inflasi (%)	4,0	*	4,0-4,5

*) data tidak tersedia

Sumber: RKP 2017, RPJMD-P Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPd dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 harus diselarasn untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Penyelarasn 3 (tiga) dimensi pembangunan dengan 13 (tiga belas) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.5.

Tabel IV.5

Keselarasannya antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017

Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017)	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
(1)	(2)	(3)
1. Dimensi pembangunan manusia	1. Revolusi Mental	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
		Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Menguatnya tata kelola pemerintah daerah
	2. Pembangunan Pendidikan	Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun
		Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
	3. Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan
	4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Program SATAM EMAS
		Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan	1. Kedaulatan Pangan	Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi
		Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya konsumsi masyarakat Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat
	2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil
		Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh
	3. Kemaritiman dan Kelautan	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil
	4. Pariwisata	Pengembangan pariwisata
		Meningkatnya pendapatan masyarakat
	5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil
		Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan	1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	Penguatan rural urban linkages
		Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
		Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
		Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
		Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang
		Meningkatnya fungsi dan produktivitas lahan kritis dan lahan eks tambang sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat

Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017)	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
(1)	(2)	(3)
2. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
	Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam
		Pencegahan kerusakan lingkungan

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka terlihat bahwa satu prioritas daerah dapat didukung beberapa sasaran daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

Tabel IV.6
Program Prioritas RKPD Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2017

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
I	DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.	<u>Revolusi Mental</u>		
	• Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik • Reformasi Birokrasi Pemerintahan • Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa • Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa • Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik	Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Budaya Koordinasi pelaksanaan pilpres, Pemilu DPRD, dan PemiluKada Pendidikan Politik Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat PD yang melaksanakan fungsi pengawasan PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			masyarakat
		Peningkatan demokrasi	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilu Kades	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pemeliharaan Kamtibmas dan Tindak Kriminal	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
		Kemitraan Kamtibmas	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
		Peningkatan Penguatan Satuan Polisi Pamong Praja	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
		Kemitraan Kamtibmas	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Bantuan Hukum	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Pelaksanaan legislasi Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
		Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Penataan dan Dokumentasi Hukum	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan	PD yang melaksanakan



No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan dan perluasan pelayanan public dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan dan PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Sumberdaya
		Peningkatan Kerjasamaantar Pemerintah Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Penataan Daerah Otonomi Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peningkatan KapasitasAparatur PemerintahanKecamatan, Desa dan Kelurahan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Koordinasi PelaksanaanPilpres Pemilu DPRD danPemilukada	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peningkatan pelayanan edinasan Kepala Daerah/wakil kepaladaerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Perencanaan dan penganggaran resposif gender	Seluruh Perangkat Daerah
		PerencanaanPembangunanPemerint ahan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Pengembangan Data danInformasi	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perencanaan Pembangunan Daerah	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Pemberdayaan Jasa Konstruksi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Fasilitasi Peningkatan SDMBidang Komunikasi dan Informatika	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penataan Daerah Otonomi Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Pemberdayaan Jasa Konstruksi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan keuangan daerah pada PD Kesekretariatan DPRD	Sekretariat DPRD
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan
		Pembangunan sistem pendaftaran pertanahan	PD yang melaksanakan urusan pertanahan
		Penyelesaian-penyelesaian konflik pertanahan	PD yang melaksanakan urusan pertanahan
		Pengembangan sistem informasi pertanahan	PD yang melaksanakan urusan pertanahan
2.	Pembangunan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
	• Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah • Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel • Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru • Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan • Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini • Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pendidikan Non Formal	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pendidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Manajemen Layanan Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pendidikan Non Formal	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
3. Pembangunan Kesehatan			
• Memperkuat upaya promotif dan preventif • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Mempercepat perbaikan gizi masyarakat • Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Obat dan Perbekalan Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kesehatan,	
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Upaya Kesehatan Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Peningkatan Kesehatan Pelayanan Anak Balita	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Peningkatan Kesehatan Lansia	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
	Perbaikan Gizi Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Pengembangan Lingkungan Sehat	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Standarisasi pelayanan kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan,
		Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Labkes	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	PD yang melaksanakan urusan kesehatan,
		Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	PD yang melaksanakan urusan kesehatan,
		Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
4. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman			
	- Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai - Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi - Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset	Pengembangan Perumahan	PD yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
		Pengelolaan Area Pemakaman	
		Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
	- Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat - Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi		
II DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
1. Kedaulatan Pangan			
	Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN	Peningkatan Ketahanan Pangan	PD yang melaksanakan urusan pangan
		Peningkatan Ketahanan Pangan/Perkebunan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	PD yang melaksanakan urusan pertanian

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/ Lapangan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pengembangan Perikanan Budidaya	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan Perikanan Tangkap	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Peningkatan dan Pengembangan ekspor	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan		Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi	Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Perbaikan Gizi Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan			
	Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, Pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM)	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi	Peningkatan keanekaragaman sumberdaya energi alternatif berbasis lokal	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati	Peningkatan keanekaragaman sumberdaya energi alternatif berbasis lokal	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG	Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO)	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran	Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
3. Kemaritiman dan Kelautan			
	- Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya - Pengaturan dan pengendalian ALKI - Penguatan lembaga pengawasan laut - Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
	Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Peningkatan Pelayanan Angkutan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan	Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
	Percepatan pengembangan ekonomi kelautan	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Pengembangan Perikanan Budidaya	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan Perikanan Tangkap	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
	Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, dayadukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
	Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan iptek kelautan	Pengembangan Destinasi Pariwisata	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
4. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)			
	- Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa - Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengembangan industri kecil dan menengah	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	- Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) - Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA: (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata	Perencanaan Tenaga Kerja	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Pemerintah Daerah	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur	Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			penataan ruang
		Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Peningkatan Pelayanan Angkutan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	• Pengembangan SDM dan IPTEK	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Revitalisasi BLKI	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	• Pengembangan regulasi dan kebijakan	Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	• Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	PD yang melaksanakan urusan penanaman

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			modal
		Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
5.	Pariwisata		
	- Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara - Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri - Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran - Pembangunan kelembagaan pariwisata: membangun SDM pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Pengembangan destinasi pariwisata Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	PD yang melaksanakan urusan pariwisata PD yang melaksanakan urusan kebudayaan PD yang melaksanakan urusan pariwisata PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
III	DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN		
1.	Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			desa
	Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas	Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pengembangan ekonomi produktif:		
	- Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro - Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha - Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha	Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui:		
	- Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana - Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif:		
	- Efektivitas program Bidik Misi - Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS - Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH	Rehabilitasi Sosial	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Raskintis	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin	PD yang melaksanakan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			urusan kesehatan
	2. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan		
	Pembangunan Perdesaan:		
	• Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
	• Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	• Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian
	• Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan keuangan desa	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan Data/Informasi/Statistik Daerah	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
	• Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian
		Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	• Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/transmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perencanaan Tata Ruang	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
	Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota	Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pembangunan Perkotaan:		
	- Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional - Penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi)	Perencanaan Tata Ruang	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Perencanaan Kota-kota Besar dan Menengah	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Pengembangan Wilayah Perbatasan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
	Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana	Pengelolaan ruang terbuka hijau	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Peningkatan Pengendalian Polusi	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Peningkatan Kualitas serta akses informasi SDA dan LH	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Perencanaan dan Pengembangan Hutan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Penyediaan logistik/peralatan tanggap darurat penanggulangan bencana	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan Turap/Talud/bronjong	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Peningkatan Pelayanan Angkutan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Pengendalian sarana dan prasarana perhubungan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
	Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal	Pengembangan Nilai Budaya	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pengelolaan Keragaman Budaya	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pembinaan Seni dan Perfilman	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pembinaan Generasi Muda	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan



No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			olahraga
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, Sekretariat Korpri
		Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Peningkatan Peran dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarustamaan Gender	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No	Arah Kebijakan RKP 2017	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

4.2.2. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 korelasi prioritas RPJMD dan prioritas pembangunan untuk tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel IV.7

Tabel IV.7
Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012-2017 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

Prioritas Tahun 2012-2017 (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2017
(1)	(2)
1. Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan koperasi komoditi	1. Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan koperasi komoditi
2. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata	2. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
3. Penguatan <i>rural urban linkages</i>	3. Penguatan <i>rural urban linkages</i>
4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
5. Program SATAM EMAS	5. Program SATAM EMAS
6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	6. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Prioritas Tahun 2012-2017 (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2017
(1)	(2)
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
9. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang	9. Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang
10. Pengendalian pemanfaatan ruang	10. Pengendalian pemanfaatan ruang
11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Berdasarkan Tabel IV.4 di atas, prioritas RPJMD sama dengan prioritas RKPD, hal ini dikarenakan periode RPJMD akan habis masa berlakunya pada tahun 2017 sehingga seluruh target kinerja yang telah ditetapkan harus dicapai pada akhir tahun 2017.

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain itu beberapa kegiatan bidang pendidikan yang diselaraskan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
 - b) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
 - c) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB
 - d) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
 - e) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK
 - f) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB
- b. Bidang Kesehatan
- 1) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
 - 2) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
 - 3) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - 4) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - 5) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
 - 6) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
 - 7) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
 - 8) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - 9) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - 10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
 - 11) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
 - 12) Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar.
- Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain sebagai berikut:
- a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - b) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
 - c) Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat
 - d) Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja
 - e) Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
 - f) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - g) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

- h) Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- i) Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih
 - 2) Setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antarlain sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketahanan air.
- b) Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku.
- c) Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air.
- d) Peningkatan kinerja layanan irigasi.
- e) Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air.
- f) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air.
- g) Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA.
- h) Peningkatan potensi energi dari sumber-sumber air.
- i) Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai.
- j) Penyediaan tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan.
- d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni. Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Nasional, dengan luasan kawasan kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penanganan kawasan permukiman kumuh akan fokus pada:
 - a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat
 - b) penguatan kelembagaan di level nasional dan daerah terkait perumahan dan permukiman
- 2) Data dan profil perumahan di daerah;
- 3) Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai *universal access* melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses

dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah.

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar.
- 2) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan.
- 3) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar.
- 4) Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan).
- 5) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum.
- 6) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 adalah penanganan konflik sosial, antara lain, meliputi:

- a) Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik.
- b) Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional.
- c) Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini.
- d) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- e) Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
- f) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan(Ormas).
- g) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin.
- h) Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.
- i) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan forum kerukunanutmatberagama(FKUB).
- j) Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing.
- k) Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.
- l) Pelaksanaan revolusi mental.

f. Bidang Sosial (Pemerintah Provinsi)

- 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga; setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 2) Rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 3) Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga.
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang sosial yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (fisik, mental, sensorik, intelektual) dalam panti dan luar panti.
- b) Rehabilitasi sosial penyandang anak (anak balita, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus) dalam panti dan luar panti.
- c) Rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia dalam panti dan luar panti.
- d) Rehabilitasi sosial tuna social (gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang) dalam panti dan luar panti.
- e) Pemberian bantuan jaminan hidup bagi warga komunitas adat terpencil.
- f) Pemberian bantuan bahan bangunan rumah bagi warga komunitas adat terpencil.
- g) Pemberian bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga dan Bibit Tanaman.
- h) Membangun sistem pelayanan sosial terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa.
- i) Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu

perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Review peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah;
- b) Dukungan pelaksanaan pilkada serentak;
- c) Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d) Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah;
- e) Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah;
- f) Evaluasi jabatan perangkat daerah;
- g) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah;
- h) Penyusunan dan Evaluasi mandiri terhadap LPPD;
- i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh pemerintah provinsi; dan
- j) Penyusunan dan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 juga memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilu agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;
- b) Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- c) Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- d) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

- e) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- f) Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP), peningkatan angka kelahiran total (TFR) dengan menurunkan tingkat putus pakai dan meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun), serta penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).
- b) Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi, sesuai Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
- c) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB, terkait; 1) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan; 2) Menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh keluarga; 3) Perencanaan kehamilan; 4) Penggerakan Pelayanan KB (MKJP) dan konseling Kesehatan Reproduksi; 5) Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader); dan 6) Pembangunan Keluarga/peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dan Generasi Berencana (GenRe);
- d) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
- e) Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah, Pendistribusian alokon disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan di dalam Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (Bantuan Operasional KB/BOKB), menjadi 3 wilayah yaitu: 1) Daerah yang masuk wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas); 2) Daerah yang masuk non galciltas; dan 3) Daerah yang masuk wilayah perkotaan.

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di bidang urusan administrasi kependudukan maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- b) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
- c) Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- d) Kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional;
- e) Kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) di daerah maupun Data Center Kependudukan secara Online;
- f) Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menyusun kegiatan dalam RKPD tahun 2017 dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;
- b) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah;

- d) Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut;
- e) Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK;
- f) Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis kementerian/lembagayang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- g) Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- h) Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, perumusan kegiatan RKPD tahun 2017 memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun sebagai berikut:

- a) Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
- b) Peningkatan kapasitas aparat pemerintahandesa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di perdesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotongroyong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;
- d) Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- e) Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;
- f) Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP);

- g) Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;
- h) Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa; dan
- i) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah.
- b) Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang menargetkan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019 adalah sebanyak 80% untuk pemerintah Provinsi, 60% untuk Pemerintah Kabupaten dan 65% untuk Pemerintah Kota.
- c) Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dipercepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d) Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- e) Pengawasan Dana Desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan Dana Desa dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- f) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan

kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.

- g) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. Hal ini sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- h) Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan *Whistle Blower System*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- i) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan;
- c) Pembentukan lembaga sertifikasi profesi pemerintahan daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
- d) Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; dan
- e) Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

10. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi

Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; dan
- b) Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional penelitian pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan.

11. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- b) Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;
- c) Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;
- d) Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- e) Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah;
- f) Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED);
- g) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012;
- h) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK), antara lain melalui perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD); dan
- i) Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

12. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner. Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak Kekayaan Intektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;
- b) Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan
- d) Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.

13. Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan.
- b) Pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya serta fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya.
- c) Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.
- d) Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah.
- e) Penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.
- f) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

14. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- b) Akreditasi lembaga pelatihan;
- c) Pengembangan balai latihan kerja yang kredibel (BLK);
- d) Pengembangan LPKS yang kredibel;
- e) Pengembangan instruktur yang kompeten;
- f) Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro di provinsi dan kabupaten/kota;
- g) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- h) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- i) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- j) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;

- k) Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);
- l) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; dan
- m) Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan.

15. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- b) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- c) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi ;
- f) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi:
 - 1) Perluasan akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam dan luar negeri;
 - 2) Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi
- h) Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui; Bintel dan Fasilitasi Standarisasi Sertifikasi KUKM; dan
- i) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah

16. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
- b) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- c) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

- d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
- e) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
- f) Memperkuat sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
- g) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

17. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial.
- b) Pengembangan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil.
- c) Peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layananane-Gov yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) nasional.
- d) Penyusunan daftar putih yang aman digunakan untuk sekolah, pesantren, tempat pendidikan dan masyarakat.
- e) Penyediaan dan pengembangan infrastruktur & layanan telekomunikasi & penyiaran.

18. Penyelenggaraan Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b) Pembuatan peta potensi investasi provinsi;
- c) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- d) Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu:
 - 1) Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan
 - 2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- e) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- f) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi

19. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi;
- b) meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan
- c) meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga.
- d) memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.

20. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dalam rangka pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi, melalui penyediaan permukiman transmigrasi yang sarana dan prasarannya berkembang dan berfungsi;
- b) Pendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan; dan
- c) Pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi melalui tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.

21. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Optimalisasi Produksi Energi Fosil; Meningkatkan potensi dan/atau cadangan produksi energi fosil keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum.
- b) Peningkatan akses dan infrastruktur energi; meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi; meningkatkan prioritas penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri dan pertanian dan mengembangkan infrastruktur energi dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut, dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan.
- c) Diversifikasi energi; percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan; pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat; mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya; serta mempertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan faktor keselamatan secara ketat, pemanfaatan energi

terbarukan dari jenis energi, air, panas bumi, arus laut dan angin diarahkan untuk ketenagalistrikan.

- d) Konservasi energi dan pengurangan emisi; pengurangan emisi dan kebijakan dalam perlindungan kelestarian hidup pada kegiatan usaha hulu, hilir, dan pemanfaatan energi serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global.
- e) Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan; mendorong manfaat optimal produk pertambangan sehingga tidak diekspor hanya dalam bentuk barang mentah (*raw material*).

22. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada area segitiga terumbu karang (*Coral Triangle Initiative*) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/290/III/Bangda tentang Tindaklanjut Hasil *World Ocean Conference* (WOC) dan *Coral Triangle Initiative* (CTI);
- b) Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya untuk mendorong optimalisasi produk kelautan dan perikanan sehingga memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor;
- c) Penguatan daya saing hasil kelautan dan perikanan
- d) Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- e) Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

23. Peningkatan Pelayanan Ketahanan Pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan terkait dengan penyediaan lumbung pangan;
- b) Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c) pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan;
- d) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- e) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- f) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
- g) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
- h) Peningkatan produksi bibit ternak
- i) Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan

- j) Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian
- k) Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian, tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan
- l) Fasilitasi sarana pasar tani, pasar ternak, sub terminal agribisnis, unit pemasaran poktan/gapoktan
- m) Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian
- n) Peningkatan produksi pakan ternak.

24. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyusunan perda tentang RPPLH untuk menjamin tersedianya rencana pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- b) Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- c) Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- e) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
- f) Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (SNPEM);
- g) Penertiban izin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer, dan lahan gambut sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- h) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM), penguatan fungsi komisi irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

- i) Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- j) Pelaksanaan Inventarisasi GRK untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

25. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- b) Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- c) Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
- d) Implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
- f) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

26. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, kementerian/lembaga dan lembaga berbadan hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
- b) Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;

- c) Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

27. Pembangunan Prasarana Pemerintahan

Pembangunan prasarana pemerintahan dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan harus berpedoman pada Peraturan Perundangan.

28. Program Pengembangan Perpustakaan

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan jenis perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan, menambah koleksi, dan koleksi kekhasan daerah serta pelestarian hasil warisan budaya bangsa.

29. Program Kearsipan

Pembinaan kepada instansi pencinta arsip di provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan serta penerapan e-arsip dan sistem informasi kearsipan nasional.

Dengan memperhatikan RKP tahun 2017 dan pencapaian SPM diatas Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2017 tertuang dalam Tabel IV.8 dibawah.

Tabel IV.8

Memperhatikan RKP tahun 2017 dan pencapaian SPM korelasi antara strategi dan arah kebijakan dalam RKPD Tahun 2017

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penerapan iptek, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis pengembangan produk dan pemasaran, kemudahan berinvestasi dan berusaha, dan optimalisasi fungsi pasar tradisional, peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis, mitigasi gangguan terhadap komoditas pangan dan komoditas strategis, peningkatan kesejahteraan petani.	Pengembangan dan Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya.	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Perluasan dan peningkatan aksesibilitas permodalan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya.	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan Promosi dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama usaha dan perdagangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan, PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha	PD yang melaksanakan urusan perdagangan, PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis dalam mendukung kedaulatan pangan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan bahan pokok	Peningkatan ketahanan, aksesibilitas, keamanan dan keanekaragaman pangan daerah	PD yang melaksanakan urusan pangan
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	PD yang melaksanakan urusan pangan, PD yang melaksanakan urusan pertanian, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Meningkatkan partisipasi dan daya serap tenaga kerja	Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja, PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Pengelolaan Iklim kerja yang kondusif	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3 serta penegakan hukum	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan wirausaha baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah	Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional;	PD yang melaksanakan urusan pariwisata, PD yang melaksanakan urusan perhubungan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Pengembangan Desa Wisata	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Pengembangan destinasi wisata unggulan	
	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah	Pembentukan dan Pengembangan OVOP	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, PD yang melaksanakan urusan perdagangan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Komoditi	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan Kawasan integrasi ternak dan tanaman pertanian	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pengembangan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Pembangunan dan Pengembangan desa mandiri energi dan pulau-pulau terkecil berbasis energi baru terbarukan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Peningkatan Perekonomian dari Sektor Pertambangan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Non kayu	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pengembangan Rantai Pasokan Produk Unggulan Daerah	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Meningkatkan kapasitas dan peluang usaha calon wirausaha baru	Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan UMKM dan Koperasi	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan calon wirausaha	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Pengembangan dan Pelestarian kebudayaan daerah	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pembentukan karakter jiwa kepemimpinan pemuda dan pembinaan generasi muda	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, Sekretariat Korpri
		Peningkatan olahragawan yang berprestasi	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Rehabilitasi Pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS	PD yang melaksanakan urusan sosial, PD yang melaksanakan urusan kesehatan, PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja, PD yang melaksanakan urusan perdagangan)

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	PD yang melaksanakan urusan pertanian (Bakorluh)
		Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Penurunan kesenjangan peran gender dalam pembangunan	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan	Pengentasan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, PD yang melaksanakan urusan sosial, PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja, PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, PD yang melaksanakan urusan kesehatan, PD yang melaksanakan urusan pendidikan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan	Penyediaan layanan pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Peningkatan sarana dan prasarana sekolah	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Peningkatan manajemen dan pengembangan inovasi proses pembelajaran	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Percepatan Penyelesaian Pengentasan buta aksara	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pengembangan budaya membaca dan menulis serta pembinaan perpustakaan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Pengendalian angka kelahiran	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan kualitas gizi masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Standarisasi pelayanan kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan sistem pengembangan manajemen dan pemberdayaan SDM kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan korban penyalahgunaan narkoba	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Pengelolaan suberdaya alam berkelanjutan.	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup, PU, PD yang melaksanakan urusan kehutanan, PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
Meningkatkan Pengamanan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan serta melakukan konservasi dan optimalisasi penanggulangan bencana		Konservasi hutan lahan dan air	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral, PD yang melaksanakan urusan kehutanan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan pengamanan kawasan hutan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	PD yang melaksanakan urusan sosial, PD yang melaksanakan urusan kesehatan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan sosial
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang		Peningkatan fungsi dan peran PD yang melaksanakan urusan panganRD dalam penyelenggaraan penataan ruang	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemanfaatan dan Penyelesaian permasalahan lahan dan perbatasan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, Sekretariat Korpri, PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
		Percepatan penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing		Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Peningkatan penyediaan air bersih	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan kualitas sanitasi	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Pemerataan akses Energi, teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika, PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Peningkatan fasilitas broadband dikawasan strategis	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
Mempercepat pengembangan kawasan strategis		Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan;	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
			pariwisata
		Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka.	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung).	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota.	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Pengembangan Bandara Depati Amir dan H.A.S. Hanandjoeddin untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan.	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat)	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah.	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal;	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan, PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan urusan perhubungan, PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi , PD yang melaksanakan urusan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
			pertanian, PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, PD yang melaksanakan urusan pendidikan, PD yang melaksanakan urusan kearsipan, PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi, PD yang melaksanakan urusan pertanian, PD yang melaksanakan urusan pangan, PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, PD yang melaksanakan urusan pendidikan, PD yang melaksanakan urusan kearsipan, PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum;	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
		Penguatan Peran dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penegakan perda	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
		Peningkatan intensitas dan kualitas peran Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menjaga Kamtibmas	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	PD yang melaksanakan urusan perdagangan, PD Kesekretariatan DPRD
	Menata perangkat daerah dan aparatur yang efektif dan efisien.	Penataan Perangkat Daerah dan peningkatan ketatalaksanaan yang efisien	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Peningkatan kapasitas dan penempatan aparatur serta pemberian <i>reward and punishment</i>	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan, PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan, PD yang melaksanakan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
			Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender	Seluruh Perangkat Daerah
		Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan, PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, PD yang melaksanakan fungsi pengawasan, PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Peningkatan keterbukaan informasi publik	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika, PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis AKRUAL	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, PD yang melaksanakan fungsi pengawasan, PD Kesekretariatan DPRD, PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
		Peningkatan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, PD yang melaksanakan fungsi pengawasan
		Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan
		Peningkatan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip daerah	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran lembaga demokrasi serta partai politik dalam mewujudkan pembangunan demokrasi	Peningkatan Partisipasi dan kesantunan masyarakat dalam berdemokrasi	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
			perlindungan masyarakat, PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat, PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan pengetahuan kepemimpinan, pemerintahan dan politik kepada masyarakat	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan
		Peningkatan peran pemerintah, partai politik, DPRD dalam penyelenggaraan pilpres, pemilu, dan pemilu legislatif	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Pembangunan melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Dengan adanya perubahan paradigma penganggaran dari prinsip *money follow fuction* menjadi *money follow priority programme* dan upaya percepatan pencapaian indikator sasaran pembangunan (IKU Provinsi) melalui 13 Prioritas Pembangunan 2012-2017, maka pada tahun 2017 dilakukan pendekatan pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial dalam proses perencanaan.

Dalam hal mengimplementasikan pendekatan holistik – tematik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan 13 prioritas provinsi menjadi fokus. Sementara itu, pada pendekatan integratif, telah dilakukan proses identifikasi sasaran dan indikator sasaran pembangunan yang mendukung setiap prioritas tersebut yang diikuti dengan proses identifikasi dan inventarisasi program dan Perangkat Daerah penanggungjawab program sebagai fokus pendekatan.

Selanjutnya pada pendekatan spasial, telah dilakukan identifikasi terhadap lokasi dari pelaksanaan aktivitas/kegiatan dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud.

Adapun poses dan tahapan implementasi pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial yang dilakukan didalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, adalah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

4.4.1. Prioritas Pengembangan *One Village One Product* (OVOP) dan Koperasi Komoditi

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.9 berikut:

Tabel IV.9

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* dan Koperasi Komoditi

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penerapan iptek, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis pengembangan produk dan pemasaran, kemudahan berinvestasi dan berusaha, fungsi pasar tradisional, peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis, mitigasi gangguan terhadap komoditas pangan dan komoditas strategis, peningkatan kesejahteraan petani: 1. Pengembangan dan Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya 2. Perluasan dan peningkatan aksesibilitas permodalan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya 3. Penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi 4. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha 5. Peningkatan Promosi dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama usaha dan perdagangan 6. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha 7. Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis dalam mendukung kedaulatan pangan
2. Meningkatnya konsumsi masyarakat	Daya Beli Masyarakat (Rp) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan bahan pokok: 1. Peningkatan ketahanan, aksesibilitas, keamanan dan keanekaragaman pangan daerah 2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
3. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Persentase Wirausaha Baru (%)	Meningkatkan partisipasi dan daya serap tenaga kerja: 1. Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja 3. Pengelolaan Iklim kerja yang kondusif 4. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3 serta penegakan hukum 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa 6. Peningkatan wirausaha baru

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.10 berikut:

Tabel. IV.10

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* dan koperasi komoditi

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi sehat, berkualitas, dan aktif	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Prioritas
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM	Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Prioritas
	meningkatnya sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (%)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Prioritas
	Persentase masyarakat miskin yang mendapat akses pemodalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Prioritas
	Persentase yang mendapat akses pemodalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Prioritas
Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal	Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Prioritas
Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	Pangkalpinang	Prioritas
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Pendukung
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya asosiasi UMKM (%)	PD yang melaksanakan urusan perindustrian	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan penggunaan teknologi industri (%)	PD yang melaksanakan urusan perindustrian	Kab. Bangka	Prioritas
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah (US \$)	PD yang melaksanakan	Provinsi Kep. Bangka	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		urusan perdagangan	Belitung	
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%)	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kab/Kota	Pendukung
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok (%)	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kab/Kota	Pendukung
Peningkatan iklim investasi dan Promosi	Jumlah minat (calon investor) Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal	Provinsi DKI Jakarta, Manado, Bangka Belitung dan Provinsi lain	Prioritas
Penyiapan potensi investasi produk unggulan daerah	Persentase peningkatan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Jumlah Sektor Perizinan dan Non Perizinan Usaha	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal	7 kabupaten/kota	Prioritas
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan(%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat	Prioritas
	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		
	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan/ peternakan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Prov Kep Bangka Belitung dan Kab/Kota	Prioritas
	Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur	Pendukung
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	7 Kab/Kota	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	6 Kab	Prioritas
	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Prioritas
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa		Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
	Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa		Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	Persentase desa yang mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
	Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang			
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)	PD yang melaksanakan urusan pariwisata	Bangka Belitung, Jawa, Sumatera, Bali	Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan pangan (%)	PD yang melaksanakan urusan pangan	Provinsi dan 7 Kab/Kota	Prioritas
	Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pangan		
Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Irigasi dalam kondisi baik (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok (%)	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kab/Kota dan Luar Daerah	Pendukung
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%)	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kab/Kota	Pendukung
Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah (US \$)	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kab/Kota dan Luar Daerah	Pendukung
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Irigasi dalam kondisi baik (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Perencanaan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosial budaya	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Pendukung
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output)	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja		Pendukung
Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase pemeriksaan perusahaan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Pendukung
	Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output)	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja		Pendukung
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan & Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Jumlah pemuda yang Berhasil Mengembangkan Wirausaha Mandiri	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Aceh	Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani	PD yang melaksanakan		Belum di bahas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kelompok tani (%)	urusan pertanian		(Perangkat Daerah tidak hadir)
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan(%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Belum di bahas (Perangkat Daerah tidak hadir)
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja		Prioritas
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja		Prioritas
	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja		Prioritas
	Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja		Prioritas

4.4.2. Prioritas Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.11 berikut:

Tabel IV.11
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Meningkatnya pendapatan PDRB Perkapita masyarakat		Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah: 1. Pengembangan destinasi wisata unggulan 2. Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional 3. Pengembangan Desa Wisata

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.12 berikut:

Tabel IV.12

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Objek wisata terkelola baik (%)	PD yang melaksanakan urusan pariwisata	Pulau Bangka & Pulau Belitung	Prioritas
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)	PD yang melaksanakan urusan pariwisata	Bangka Belitung, Jawa, Sumatera, Bali	Prioritas
Pengembangan Kemitraan	Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%)	PD yang melaksanakan urusan pariwisata	Pangkalpinang	Prioritas
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas

4.4.3. Prioritas Penguatan Rural Urban Linkages

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.13 berikut:

Tabel IV.13

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Penguatan Rural Urban Linkages

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah: 1. Pembentukan dan Pengembangan OVOP 2. Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Komoditi 3. Pengembangan Kawasan integrasi ternak dan tanaman pertanian 4. Pengembangan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan
	Indeks Williamson	Meningkatkan kapasitas dan peluang usaha calon wirausaha baru: 1. Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan UMKM dan Koperasi 2. Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
		dan kewirausahaan calon wirausaha 3. Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.14. berikut:

Tabel. IV.14

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Penguatan Rural Urban Linkages

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa	Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDDes	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial (%)	PD yang melaksanakan urusan perindustrian	Pangkalpinang	Prioritas
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%)	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kab/Kota	Prioritas
Peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah (US \$)	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kab/Kota dan Luar Daerah	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	Persentase peningkatan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%) Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Prov Kep Bangka Belitung dan Kab/Kota	Prioritas
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur	Prioritas
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan (%) Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat	Pendukung
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	7 Kab/Kota	Pendukung
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani (%) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	6 Kab	Pendukung
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Perangkat Daerah tidak Hadir
Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Perangkat Daerah tidak Hadir
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Objek wisata terkelola baik (%)	PD yang melaksanakan urusan pariwisata	Pulau Bangka & Pulau Belitung	Perangkat Daerah tidak Hadir

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)	PD yang melaksanakan urusan pariwisata	Bangka Belitung, Jawa, Sumatera, Bali	Perangkat Daerah tidak Hadir
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan e-Government	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase elektrifikasi (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	7 Kab/kota dan Luar daerah	Pendukung
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah	Prioritas
Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah	Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	7 Kab/Kota	Prioritas
Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (rekomendasi)	PD yang melaksanakan urusan kehutanan	7 Kab/Kota dan Jakarta	Perangkat Daerah tidak Hadir
Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan	terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan (%)	PD yang melaksanakan urusan kehutanan	7 Kab/Kota	Perangkat Daerah tidak Hadir
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah Masterplan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	5 Kabupaten/Kota	Pendukung
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah dan koperasi	Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan Persentase pemuda di wilayah KTM yang mendapat pelatihan wirausaha Persentase pemuda miskin yang mendapat pelatihan wirausaha	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perangkat Daerah tidak Hadir
Pendidikan Menengah dan Tinggi	APK Pendidikan Menengah APM Pendidikan Menengah Nilai rata-rata UN SMA IPA Nilai rata-rata UN SMK Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kep. Babel Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas

4.4.4. Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.15 berikut:

Tabel IV.15

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan: 1. Pengembangan dan Pelestarian kebudayaan daerah 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa 3. Pembentukan karakter jiwa kepemimpinan pemuda dan pembinaan generasi muda 4. Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi 5. Peningkatan olahragawan yang berprestasi 6. Rehabilitasi Pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS 7. Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi 8. Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9. Penurunan kesenjangan peran gender dalam pembangunan 10. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.16 berikut:

Tabel. IV. 16

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Nilai Budaya	Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan	Pangkalpinang dan Bangka Barat	Pendukung
	Dokumen pendukung pengembangan dengan kawasan kota tua muntok	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan		
Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang di apresiasi	PD yang melaksanakan	Pangkalpinang dan Jakarta	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	masyarakat	urusan kebudayaan		
Pembinaan Generasi Muda	Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah	Pendukung
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Pangkalpinang	Prioritas
Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah	Prioritas
Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial	PD yang melaksanakan urusan sosial	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	PD yang melaksanakan urusan sosial	7 KabKota (KSB Pangkalpinang)	Prioritas
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	PD yang melaksanakan urusan sosial	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	PD yang melaksanakan urusan sosial	Provinsi Kep. Bangka Belitung /Luar daerah	Prioritas
Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rasio lansia yang mendapat pelayanan olah raga dengan kecamatan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah	Prioritas
Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Utara/ Sumatera Barat	Pendukung
Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM)	Persentase masyarakat miskin yang mendapat akses pemodalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	Provinsi kep. Bangka Belitung, Jakarta dan wilayah Surabaya	Tidak hadir tetapi program tersedia
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan keuangan desa	Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapat peningkatan ekonomi keluarga	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
	Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
	Persentase Kelompok Usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
	Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		

4.4.5. Prioritas SATAM EMAS

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.17 berikut:

Tabel IV.17
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas SATAM EMAS

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan: 1. Pengentasan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.18 berikut:

Tabel. IV.18
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas SATAM EMAS

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	PD yang melaksanakan urusan sosial	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah	Prioritas
Raskintis	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%-95%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendidikan menengah dan tinggi	Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
	Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin			
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda miskin yang mendapat pelatihan wirausaha	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Penyediaan dan pengelolaan air baku	Persentase masyarakat miskin yang memiliki akses air bersih	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan kualitas hidup perempuan	Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapat peningkatan ekonomi keluarga	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM	Persentase masyarakat miskin yang mendapat akses pemodal	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	Provinsi kep. Bangka Belitung, Jakarta dan wilayah Surabaya	Prioritas

4.4.6. Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.19 berikut:

Tabel IV.19

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan
Wajib Belajar 12 Tahun

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka rata-rata lama sekolah	Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan 1. Penyediaan layanan pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat 2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah 3. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan 4. Peningkatan manajemen dan pengembangan inovasi proses pembelajaran
	Angka melek huruf	1. Percepatan Penyelesaian Pengentasan buta aksara 2. Pengembangan budaya membaca dan menulis serta pembinaan perpustakaan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.20 berikut:

Tabel. IV.20

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan
Wajib Belajar 12 Tahun

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD Sederajat	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
	APM SD Sederajat			
	APK SMP Sederajat			
	APM SMP Sederajat			
	Rata-rata nilai UAS SD Sederajat			
	Rata-rata nilai UN SMP Sederajat			
	Persentase SD sederajat akreditasi minimal B			
	Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B			
Pendidikan Non Formal	Angka Buta Aksara	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill			
	APK Pendidikan Menengah	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
	APM Pendidikan Menengah			
	Nilai rata-rata UN SMA IPA			
	Nilai rata-rata UN SMK			
	Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B			
Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kep. Babel			
	Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	7 Kab/Kota	Pendukung
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan aktif (%)	PD yang melaksanakan urusan kearsipan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
	Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi	PD yang melaksanakan urusan kearsipan		

4.4.7. Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.21 berikut:

Tabel IV.21

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat: 1. Pengendalian angka kelahiran 2. Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 4. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita 5. Peningkatan kualitas gizi masyarakat 6. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat 7. Standarisasi pelayanan kesehatan 8. Peningkatan sistem pengembangan manajemen dan pemberdayaan SDM kesehatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan 10. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan korban penyalahgunaan narkoba

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.22 berikut:

Tabel. IV.22

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Pesentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	7 Kab/Kota	Prioritas
	Tingkat Prevalensi peserta KB aktif	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana		
Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7 Kabupaten/kota	Tidak hadir

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular	Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%-98%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
	Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menular 100%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan		
Bencana Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan Lingkungan sehat	Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Pendukung
Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan Kesehatan Pelayanan Anak Balita	angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 35-28	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Pendukung
Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%-40%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Pendukung
		PD yang melaksanakan urusan pertanian (Bakorluh)		Penyuluhan tanaman keluarga
		PD yang melaksanakan urusan pertanian		Penyediaan Benih
	Persentase PAUD di daerah tertinggal yang di intervensi PMTAP (pemberian makan tambahan anak PAUD)	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat		

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan desa		
		PD yang melaksanakan urusan pangan		Penyediaan sayuran & buah-buahan sehat
Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100%	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
		PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang		Pendukung
		PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup		Pendukung
		PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral		Pendukung
	Perencanaan sosial budaya	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan		Pendukung
Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan di provinsi dan kab/kota	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional	PD yang melaksanakan urusan kesehatan		
		PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup		Pengawasan
		PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja		K3
		PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral		Listrik Rumah Sakit
		PD yang melaksanakan urusan perdagangan		Tera

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
	Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ)	PD yang melaksanakan urusan kesehatan		
Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP	PD yang melaksanakan urusan kesehatan		
	Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP)	PD yang melaksanakan urusan kesehatan		
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes	Persentase sarana dan prasarana labkes yang dibangun	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Pendukung
Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSUP	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Prioritas
Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Pendukung

4.4.8. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.23 berikut:

Tabel IV. 23

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	2. Pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan
Pencegahan kerusakan lingkungan	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	Meningkatkan Pengamanan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan serta melakukan konservasi dan optimalisasi penanggulangan bencana 1. Konservasi hutan lahan dan air 2. Peningkatan pengamanan kawasan hutan 3. Penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan 4. Optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.24 berikut:

Tabel. IV.24

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup	7 Kabupaten/Kota	Prioritas
	Peningkatan Pengendalian Polusi	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup	7 Kabupaten/Kota	Prioritas
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup	7 Kabupaten/Kota	Prioritas
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Pangkalpinang	tidak hadir
	Peningkatan Kualitas serta akses	PD yang	7	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	informasi SDA dan LH	melaksanakan urusan lingkungan hidup	Kabupaten/kota	
	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan		tidak hadir
	Peningkatan Data/Informasi/Statistik Daerah	PD yang melaksanakan urusan kehutanan		tidak hadir
Pencegahan kerusakan lingkungan	Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Pangkalpinang	Prioritas
	Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral		Perangkat Daerah lain (Pol PP)
	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	PD yang melaksanakan urusan kehutanan		tidak hadir
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan		tidak hadir
	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang		tidak hadir
	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan		tidak hadir
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	PD yang melaksanakan urusan kehutanan		tidak hadir
	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	PD yang melaksanakan urusan sosial		tidak hadir
	Penyediaan logistik/peralatan tanggap darurat penanggulangan bencana	PD yang melaksanakan urusan sosial		tidak hadir
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	PD yang melaksanakan urusan sosial		tidak hadir
	Bencana Bidang Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan		tidak hadir

4.4.9. Prioritas Fasilitas Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.25 berikut:

Tabel IV.25

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Fasilitas Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya fungsi dan produktivitas lahan kritis dan lahan eks tambang sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat	Persentase lahan kritis dan lahan eks pertambangan yang direklamasi	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari 2. Pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan
	Pertumbuhan jumlah usaha yang memanfaatkan lahan kritis dan lahan eks tambang	
	Pertumbuhan jumlah kemitraan masyarakat dan swasta dalam memanfaatkan lahan kritis dan lahan eks tambang untuk usaha produktif	

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.26 berikut:

Tabel. IV.26

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Fasilitas Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks. Tambang

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah	prioritas
	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral		prioritas
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penurunan Luas Lahan Kritis (%)	PD yang melaksanakan	Provinsi Kepulauan	tidak hadir

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		urusan kehutanan	Bangka Belitung	
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan (Ha)	PD yang melaksanakan urusan kehutanan	7 Kab/Kota	tidak hadir
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l)	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup	7 Kabupaten/Kota	Prioritas
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq)	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup		Prioritas
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		pindah ke prioritas OVOP
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian /Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Prov Kep Bangka Belitung dan Kab/Kota	Prioritas
	Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		pindah ke prioritas kawasan strategis
	Rasio luas lahan lada dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		pindah ke prioritas kawasan strategis
	Meningkatnya produksi pertanian (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Prioritas
Program Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat	Prioritas
	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Prioritas
	Tingkat penerapan teknologi pertanian/perkebunan oleh kelompok tani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Prioritas
Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	tidak hadir
Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal	Koperasi komoditi aktif (%)	PD yang melaksanakan		tidak hadir

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		urusan koperasi, usaha kecil dan menengah		
Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah	meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase)	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	7 Kab/Kota	tidak hadir
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah	Prioritas
	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral		Prioritas
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Pangkalpinang	tidak hadir
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	tidak hadir

4.4.10. Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.27 berikut:

Tabel IV.27

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang Pemanfaatan dan Penyelesaian permasalahan lahan dan perbatasan Percepatan penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K)

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat

dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.28 berikut:

Tabel. IV. 28
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap RPJMD	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan		Prioritas
Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Pangkalpinang	tidak hadir
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam		PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup		tidak hadir
	Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan (Ha)	PD yang melaksanakan urusan kehutanan	7 Kab/Kota	tidak hadir
Perencanaan Tata Ruang	Persentase meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan		Prioritas
	Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis provinsi	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang		tidak hadir
	Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang		tidak hadir
Pemanfaatan ruang	Tertib pemanfaatan ruang (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan		PU tidak hadir

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Pangkalpinang	PU tidak hadir
Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya lahan / tanah untuk pembangunan gedung dan mess PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang representatif	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta		prioritas
	Terlaksananya penata usahaan tanah sebagai asset tetap daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		tidak hadir
Pembangunan sistem pendaftaran pertanahan	Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinventarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil	PD yang melaksanakan urusan pertanahan		Prioritas
Penyelesaian-penyelesaian konflik pertanahan	Peningkatan Pemahaman aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan	PD yang melaksanakan urusan pertanahan		Prioritas
Pengembangan sistem informasi pertanahan	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Keop. Babel	PD yang melaksanakan urusan pertanahan		Prioritas
Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas

4.4.11. Prioritas Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.29 berikut:

Tabel IV.29

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%) Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing: 1. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil 2. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi 3. Peningkatan penyediaan air bersih 4. Peningkatan kualitas sanitasi 5. Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau 6. Pemerataan akses Energi, teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil 7. Peningkatan fasilitas broadband dikawasan strategis 8. Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.30 berikut:

Tabel. IV.30

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Bangka	Pendukung
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Pembangunan Turap/Talud/bronjong		PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Pangkalpinang	Prioritas
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angka Pelanggaran lalu lintas (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan		Prioritas
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	Bandara H.AS. Hanadjoeddin - Tg.Pandan dan Bandara Depati Amir	Prioritas
Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase elektrifikasi (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kualitas SDM	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas

4.4.12. Prioritas Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.31 berikut:

Tabel IV.31

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(4)
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, dikembangkan (%) wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Persentase Kawasan Strategis yang	Mempercepat pengembangan kawasan strategis 1. Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan 2. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka 4. Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur 5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung) 6. Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota 7. Peningkatan Status Bandara Depati Amir dan H.A.S. Hanandjoeddin menjadi Bandara Internasional 8. Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat) 9. Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah 10. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal 11. Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang 12. Percepatan pembangunan jembatan dan kawasan industri perikanan Teluk Kelabat
	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.32 berikut:

Tabel. IV. 32

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerjasama Pembangunan	kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Dalam dan luar Provinsi Babel	Prioritas
Perencanaan Kota-kota Besar dan Menengah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap RPJMD	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Pangkalpinang	Prioritas
Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Terlaksananya pembayaran 5x luran APPSI, 3 X luran BKS serta 10 Dokumen Kerjasama daerah dan Peningkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pangkalpinang dan Luar Bangka Belitung	Perangkat Daerah tidak hadir
Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi	Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan)	Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka	Perangkat Daerah tidak hadir
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	Bandara H.AS. Hanadjoeddin - Tg.Pandan dan Bandara Depati Amir	Prioritas
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Irigasi dalam kondisi baik (%)	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah	Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	7 Kab/Kota	Prioritas
Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase elektrifikasi (%)	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Prov Kep Bangka Belitung dan Kab/Kota	Pendukung
	Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Pendukung
	Rasio luas lahan lada dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Pendukung
	Meningkatnya produksi pertanian (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Pendukung
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur	Pendukung
	Rasio Jumlah ternak dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Pendukung
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat	Pendukung
	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tingkat penerapan teknologi pertanian/perkebunan oleh kelompok tani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		Pendukung
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Provinsi dan daerah penyelenggara event	
Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam (%)	PD yang melaksanakan urusan perindustrian	Kab. Batang dan Kab. Bangka	Prioritas
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis komoditi kerajinan (%)	PD yang melaksanakan urusan perindustrian	Pangkalpinang dan 2 Desa Wisata (desa sungai daeng kab babar da desa tanjung bingak Kab belitung)	Prioritas
Perencanaan Pembangunan Ekonomi		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	Luar Daerah dan Dalam Daerah	Pendukung
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan	Pangkalpinang dan Kab. Bangka Barat	Perangkat Daerah tidak hadir
	Rasio Dokumen pendukung pengembangan dengan kawasan kota tua muntok	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan		Perangkat Daerah tidak hadir
	Rasio Dokumen pendukung pengembangan dengan kawasan situs kota kapur	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan		Perangkat Daerah tidak hadir

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	Persentase desa yang mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
	Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa		Pendukung
Pendidikan Menengah dan Tinggi	APK Pendidikan Menengah	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
	APM Pendidikan Menengah			
	Nilai rata-rata UN SMA IPA			
	Nilai rata-rata UN SMK			
	Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B			
	Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kep. Babel			
	Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan			
	Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi			
	Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin			
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan aktif (%)	PD yang melaksanakan urusan kearsipan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
	Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi	PD yang melaksanakan urusan kearsipan		
	Rasio jumlah buku di perpustakaan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan kearsipan		
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase pemuda di wilayah KTM yang mendapat pelatihan wirausaha	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga		
	Persentase pemuda miskin yang mendapat pelatihan wirausaha	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga		
Pembangunan prasarana dan perhubungan	Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Prov Kep Bangka Belitung dan Kab/Kota	Pendukung
	Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		
	Rasio luas lahan lada dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		
	Meningkatnya produksi pertanian (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian		
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur	Pendukung
	Rasio Jumlah ternak dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pertanian		
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		PD yang melaksanakan urusan pertanian	Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat	Pendukung
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)	PD yang melaksanakan urusan pertanian	6 Kab	Pendukung
Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%)	PD yang melaksanakan urusan pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Padang	Perangkat Daerah tidak hadir
	Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang	PD yang melaksanakan urusan pangan		Perangkat Daerah tidak hadir
Pendidikan Menengah dan	APK Pendidikan Menengah	PD yang	Kepulauan Bangka	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tinggi		melaksanakan urusan pendidikan	Belitung	
	APM Pendidkan Menengah			
	Nilai rata-rata UN SMA IPA			
	Nilai rata-rata UN SMK			
	Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B			
	Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kep. Babel			
	Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan			
	Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melanjutkan keperguruan tinggi			
	Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin			
	Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang			
Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton)	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial (%)	PD yang melaksanakan urusan perindustrian	Pangkalpinang	Pendukung

4.4.13. Prioritas Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.33 berikut:

Tabel IV.33

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Opini audit BPK	- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas: - Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas - Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum - Penguatan Peran dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penegakan perda - Peningkatan intensitas dan kualitas peran Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menjaga Kamtibmas - Peningkatan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat - Menata perangkat daerah dan aparatur yang efektif dan efisien - Penataan Perangkat Daerah dan peningkatan ketatalaksanaan yang efisien - Peningkatan kapasitas dan penempatan aparatur serta pemberian <i>reward and punishmen</i> - Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan - Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender - Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah - Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Peningkatan keterbukaan informasi publik - Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis AKRUAL - Peningkatan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah - Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan - Peningkatan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip daerah
	2. Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)	
	3. Indeks Reformasi Birokrasi	
Terwujudnya pemerintahan yang demokratis	4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran lembaga demokrasi serta partai politik dalam mewujudkan pembangunan demokrasi: - Peningkatan Partisipasi dan kesantunan masyarakat dalam berdemokrasi - Peningkatan pengetahuan kepemimpinan, pemerintahan dan politik kepada masyarakat - Peningkatan peran pemerintah, partai politik, DPRD dalam penyelenggaraan pilpres, pemilukada dan pemilu legislatif - Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2017 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.34 berikut:

Tabel. IV.34

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Catatan hasil pemeriksaan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Pangkalpinang dan Indonesia	Prioritas
Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Pangkalpinang	-
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel	Pendukung
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal		PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal		satpol pp	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Pangkalpinang	Prioritas
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Menurunnya tingkat kenakalan remaja di Prov. Kep. Bangka Belitung	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan perlindungan masyarakat		
Kemitraan Kamtibmas		PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Bantuan Hukum	Persentase lansia yang mendapat bantuan hukum	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Palembang, Medan dan Jakarta	
Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota	Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7 Kabupaten/Kota	Pendukung
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	Prov. Kep. Bangka Belitung dan Luar Daerah	Pendukung
Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	Pangkalpinang	Prioritas
Penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah Pemprov. Kep. Babel dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien.	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7 Kab/Kota	Prioritas
Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Pendukung
Penguatan tata kelola Perangkat Daerah dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Tertatanya manajemen pengelolaan Perangkat Daerah serta nomenklatur, struktur, kewenangan dan tupoksi Perangkat Daerah	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Pendukung
Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam	Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa	PD yang melaksanakan	Pangkalpinang	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
rangka penguatan reformasi birokrasi	jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Penerapan SPM dan SOP untuk meningkatkan pelayanan public	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Prioritas
Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Terkoordinirnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RB	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Pangkalpinang	Prioritas
Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah	meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Prioritas
Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembayaran 5x luran APPSI, 3 X luran BKS serta 10 Dokumen Kerjasama	PD yang melaksanakan Fungsi	Pangkalpinang dan Luar Bangka Belitung	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	daerah dan Peninkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah	Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sebanyak 9 Urusan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Pendukung
Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7 Kabupaten/Kota	Pendukung
Perencanaan dan penganggaran resposif gender		Seluruh Perangkat Daerah	Pangkalpinang	
Perencanaan Pembangunan Daerah		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Pangkalpinang	
Pengembangan Data dan Informasi		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Pangkalpinang	
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase/Jumlah Rekomendas, kajian dan data tentang pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai kebijakan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	Pangkalpinang	Prioritas
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		PD yang melaksanakan penunjang urusan	Pangkalpinang	

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perencanaan		
Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 bimtek	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung	
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Optimalnya pelaksanaan kegiatan pada APBD yang sesuai target dan tepat waktu	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan kemampuan/ketrampilan dengan mengikuti pelatihan/pendidikan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan karir aparatur serta penempatan aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Disiplin Aparatur		PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian	Prov. Kep. Bangka Belitung	
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Pangkalpinang	Prioritas

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		PD yang melaksanakan fungsi pengawasan	7 Kab/Kota, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan DKI Jakarta	Prioritas
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal	7 kabupaten/kota	
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Catatan hasil pemeriksaan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Provinsi Kep Bangka Belitung dan Indonesia	Prioritas
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah pada PD Kesekretariatan DPRD	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD melalui mekanisme dan tata cara penyusunan APBD dan APBD-P	PD Kesekretariatan DPRD	Pangkalpinang	Prioritas
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prioritas
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	Asset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya (%)	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Pangkalpinang	Prioritas
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (Perangkat Daerah)	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan	Pangkalpinang	Pendukung
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	7 kabupaten/ Kota di Provinsi Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	Pangkalpinang	Pendukung
Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan		PD yang melaksanakan urusan kearsipan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip		PD yang melaksanakan	Provinsi Kepulauan	

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah		urusan kearsipan	Bangka Belitung	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan		PD yang melaksanakan urusan kearsipan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan		PD yang melaksanakan urusan kearsipan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase/Jumlah Rekomendasi, Kajian dan Data Tentang Peningkatan Promosi dan Investasi yang digunakan sebagai kebijakan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	7 Kabupaten/Kota	Prioritas
Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kuantitas aparatur yang memiliki kompetensi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat di bidang Hukum	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas
Pengembangan Wawasan Kebangsaan		PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Bangka Barat	Pendukung
Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya	Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
		PD yang melaksanakan fungsi pengawasan		

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Fasilitasi Peningkatan demokrasi		PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prioritas
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Set. DPP Korpri Prov.Kep.Babel	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara	Jakarta	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		PD Kesekretariatan DPRD	Pangkalpinang	Prioritas
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Pendukung
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan		Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemerintah Daerah		
Penataan Daerah Otonomi Baru		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)		Pendukung
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Pendukung
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Pendukung
Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Pendukung
Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Penataan Daerah Otonomi Baru		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)		Pendukung
Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	7 kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendukung

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan)	Prov. Kep. Bangka Belitung	Pendukung
Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi	Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	5 Kabupaten/Kota	Pendukung
Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7 Kabupaten/kota	Pendukung
Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	7 Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Utara/ Sumatera Barat	Prioritas
Pembinaan kerukunan umat beragama	terwujudnya kerukunan umat beragama	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	Pangkalpinang	Prioritas

A. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs

Setelah pelaksanaan *Millenium Development Goals (MDGs)* periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat top down, saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu *Sustainability Development Goals (SDGs)* sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh *MDGs*. *SDGs* memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan *SDGs* untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) *SDGs* tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *MDGs* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen *MDGs* yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) *SDGs* akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) *SDGs* akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*enviromtent development*). Sampai dengan saat ini, konsep *SDGs* akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat

ini masih dalam proses perumusan akhir. Berikut ini tabel IV.5 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Tabel IV.35.
Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam Merespon Program SDGs

No.	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017
(1)	(2)	(3)
1.	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan	• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi • Penguatan rural urban linkages • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan • Program SATAM EMAS
2.	Mengentaskan kelaparan ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan <i>agriculture</i> berkelanjutan	• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan • Program SATAM EMAS
3.	Menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua dan segala usia	• Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan • Penguatan rural urban linkages
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	• Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun • Penguatan rural urban linkages
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.	• Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan • Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
6.	Menjamin ketersediaan dan manajemen air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	• Pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7.	Menjamin akses energy yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
8.	Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi • Penguatan rural urban linkages • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan • Program SATAM EMAS
9.	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	• Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah

Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017		
No.	Tujuan Pembangunan SDGs	
(1)	(2)	(3)
10.	Mengurangi kesenjangan di dalam dan luar negeri	• Penguatan rural urban linkages • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan • Program SATAM EMAS • Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
11.	Membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	• Penguatan rural urban linkages • Pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kualitas lingkungan hidup
12.	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi • Penguatan rural urban linkages
13.	Membuat langkah aksi untuk menghadapi perubahan iklim dan dampaknya	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan • Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
14.	Melakukan konservasi dan pemanfaatan laut, samudra dan sumberdaya maritime yang berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Pengendalian pemanfaatan ruang • Fasilitasi reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
15.	Melindungi, mengembalikan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, manajemen hutan yang lestari, memerangi kekeringan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Pengendalian pemanfaatan ruang • Fasilitasi reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang • Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah • Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
16.	Melindungi kedamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk semua tingkatan.	• Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.
17.	Penguatan moi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	• Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah • Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.

4.5. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Dokumen perencanaan pemerintah akan memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah. Pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang juga sebagai upaya untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.4

Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal

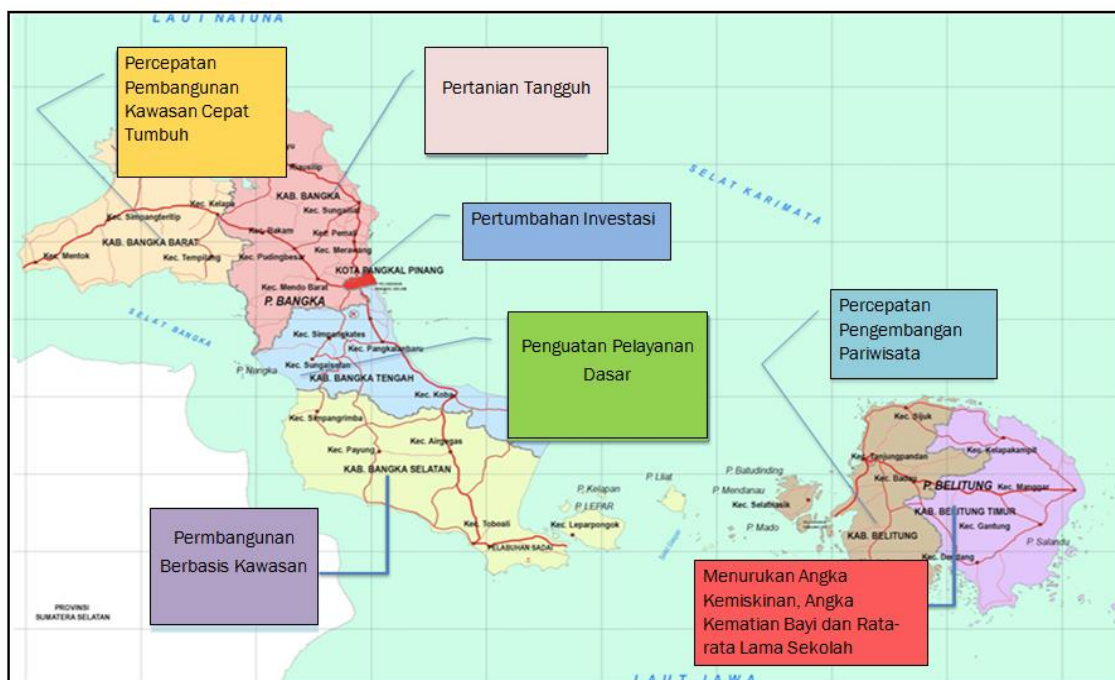


Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Pengembangan potensi unggulan diarahkan pada upaya untuk mewujudkan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari potensi sumberdaya yang ada.

Gambar IV.5

Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012/2013



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)

Berdasarkan Gambar IV.5 dan Gambar IV.6, maka prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 diarahkan pada:

1. Kota Pangkalpinang

Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2017 diarahkan pada penguatan pertumbuhan investasi melalui promosi dan regulasi investasi, pemantapan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan pekerjaan umum yaitu pembangunan fasilitas umum.

2. Kabupaten Bangka

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2017 diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pertanian tangguh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan perhubungan yaitu pengadaan kendaraan angkutan desa dan urusan pekerjaan umum yaitu peningkatan jalan kabupaten.

3. Kabupaten Bangka Barat

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 diarahkan pada percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh, peningkatan daya saing dan kualitas masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan energi dan sumber daya mineral yaitu pemasangan jaringan instalasi listrik, urusan kelautan dan perikanan yaitu pengembangan perikanan tangkap.

4. Kabupaten Bangka Tengah

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan pekerjaan umum yaitu pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan urusan pemuda dan olahraga yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

5. Kabupaten Bangka Selatan

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah berbasis kawasan menuju Bangka Selatan mandiri, maju, sejahtera dan berdaya saing sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan pekerjaan umum yaitu pembangunan jalan, urusan tenaga kerja yaitu pelatihan pengembangan dan produktivitas tenaga kerja, dan urusan perdagangan yaitu pembangunan pasar rakyat.

6. Kabupaten Belitung

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2017 diarahkan pada percepatan pengembangan pariwisata Kabupaten Belitung, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan kawasan industri prioritas / kawasan ekonomi khusus Belitung, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan koperasi, usaha mikro kecil menengah yaitu pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dan urusan komunikasi dan informatika yaitu pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

7. Kabupaten Belitung Timur

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2017 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain urusan pendidikan antara lain adalah pada urusan kesehatan yaitu pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit, urusan komunikasi dan informatika yaitu pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dan peningkatan pengembangan sistem informasi.

Gambar IV.6

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Terhadap Fokus dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

4.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan Strategis.

a) Rencana Pola Ruang

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi :

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. kawasan suaka alam,
5. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;
6. kawasan rawan bencana alam.

b) Rencana Struktur Ruang Wilayah

- A. Rencana Sistem Perkotaan
- B. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.
- C. Rencana Sistem Jaringan Energi
- D. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
- E. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

c) Rencana Kawasan Strategis

- A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi:
- B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
- C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

4.5.2. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Bahwa dalam perencanaan pembangunan, diharuskan adanya suatu keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan spasial. Oleh karenanya, didalam dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan sektoral harus mengacu kepada dokumen RTRW yang merupakan dokumen perencanaan spasial sehingga dapat dihasilkan perencanaan yang berorientasi pada kesesuaian antara sektoral dan spasial.

Adapun indikasi program dan kegiatan utama didalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang didalam Tabel IV.36

Tabel IV.36

Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pemantapan Sistem Perkotaan												
A1	Perwujudan PKNP Pangkal Pinang	Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pengembangan inner ringroad dan outer ring road	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan taman kota	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)									APBD Kokab	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi	Dinas Budpar									APBD Kokab	Dinas Budpar
		Peningkatan terminal	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
A2	Perwujudan PKW Muntok	Pemantapan tata batas kawasan kota tua	BPN										BPN

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan RDTR Kota tua	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah	Dinas Pekerjaan Umum									APBN/APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Badan Lingkungan Hidup Daerah									APBD Kokab	Badan Lingkungan Hidup Daerah
A3	Perwujudan PKW Tanjung Pandan	Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu	Disperindag									APBD Prov	Disperindag
		Pengembangan kawasan wisata	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau)	Disperindag									APBD Prov	Disperindag
		Pembangunan museum bahari	Disbudpar									APBD Prov	Disbudpar
		Pembangunan terminal tipe B	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BHLD									APBD Kokab	BHLD
A4	Perwujudan PKW Manggar	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BHLD									APBD Prov/ APBD Kokab	BHLD
		Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/ APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
A5	Perwujudan PKL Kelapa	Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan masterplan kawasan perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Pembangunan fasilitas wisata air panas	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan industri pengolahan sawit	Diperindag									APBD Prov/ APBD Kokab	Diperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A6	Perwujudan PKL Puding Besar	Pembangunan fasilitas rest area	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A7	Perwujudan PKL Sungai Selan	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU										Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A8	Perwujudan PKL Payung	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A9	Perwujudan PKL Sungailiat	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan terminal tipe C	Dishub									APBD Kokab	Dishub
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Dibudpar									APBD Kokab	Dibudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU										Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A10	Perwujudan PKWp Koba	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dishub									APBD Kokab	Dishub
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
A11	Perwujudan PKWp Toboali	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Kokab	BLHD
B	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah												
B1	Perwujudan Sistem Transportasi												
a	Sistem Transportasi Darat	Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer	Dinas PU									APBN	Dinas PU
		Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
b	Sistem Transportasi Laut	Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang (Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok), Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan), Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar)	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
c	Sistem Transportasi Udara	Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan fasilitas pendukung bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
B2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik	Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik	PLN									APBN/APBD Prov/Masyara kat	PLN
		Pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyara kat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyara kat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyara kat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyara kat	Dinas Pertambangan dan Energi

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B3	Perwujudan Sistem Telekomunikasi	Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional	Dinas Kominfo									APBN/APBD Prov/Swasta	Dinas Kominfo
		pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong penggunaan menara bersama antara operator (<i>join operation</i>)	Dinas Kominfo									Swasta	Dinas Kominfo
		pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan.	Dinas Kominfo									APBN/Swasta	Dinas Kominfo
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha	Dinas Kominfo									APBN/ Swasta	Dinas Kominfo
B4	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air	Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air mimun	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut	Dinas PU										Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan cekdam pada hulu sungai	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
B5	Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL)	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3)	BLHD									APBN/APBD Prov	BLHD
		Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan.	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
C	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
C1	Perwujudan Kawasan Lindung												
	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatk an fungsi lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kerhutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengawasan kawasan lindung.	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengamanan kawasan lindung	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
	Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;	Dinas PU									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas PU
		Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
	Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Rehabilitasi dan penghijauan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan atau lembaga masyarakat	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/Masyara kat	BLHD
	Pengelolaan kawasan cagar budaya	(penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok)	-									-	-
	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia	BLHD									APBN/APBD	BLHD
		Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
		Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
	Pengelolaan kawasan lindung lainnya	pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
C2	Perwujudan Kawasan Budidaya												

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
a	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pembangunan jalan produksi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
b	Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Melakukan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan jalan produksi dean inspeksi	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
c	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultur	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultur dan atau perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
d	Perwujudan Sentra Perikanan	Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
e	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pemantapan tata batas wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR)	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, terutama pertambangan rakyat	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi									APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
f	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag
		Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag
		Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan	Dinas Perindag									APBN	Dinas Perindag
		Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.	Dinas Perindag									APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
g	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masya rakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata (<i>trip</i>)	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masya rakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
h	Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Penyusunan masterpal perencanaan kota yang ditetapkan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningaktan kualitas lingkungan permukiman (desa/kota)	Dinas PU									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masya rakat	Dinas PU
D	Perwujudan Kawasan Strategis												
D1	Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian	Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya.	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag
D2	Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
D3	Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Legalisasi kawasan ekonomi khusus tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
D4	Perwujudan KTM Batu Betumpang	Penyusunan RDTR KTM Batu Betumpang	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan sarana sosial budaya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
D5	Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengesahan kawasan minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan industri pengolahan ikan	Dinas Kelautan &Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan &Perikanan
D6	Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik	Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan tambak ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias)	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D7	Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perindag/PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag/PU
		Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik)	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
D8	Perwujudan Kawasan Kota Terpadu Mandiri	Penyusunan RDTR KTM Gantung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BHLD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BHLD
D9	Perwujudan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyiapan lahan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan askes	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur penunjang	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan)	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pembangunan prasarana penunjang lainnya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D10	Perwujudan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang	Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan lahan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan infrastruktur pendukung Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengadaan kapal penumpang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan sistem air baku dan air minum	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D11	Perwujudan Kota Tua Muntok	Identifikasi dan klasifikasi lokasi dan jenis bangunan <i>heritage</i>	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Nasional, <i>Asian Herritage</i> dan diupayakan menjadi <i>World Heritage</i>	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penataan kawasan dan restorasi bangunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan heritage (nasional/dunia)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan heritage map dan promosi kawasan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan agenda tahunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D12	Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim	Pengembangan kawasan pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		pembangunan sarana penunjang pendidikan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam										APBN/APBD Prov/APBD Kokab	
		pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
D14	Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung); dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)	Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Perbaikan fasilitas penunjang	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Peningkatan fasilitas karantina hewan											

Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010

Berdasarkan indikasi program yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 tentunya korelasi perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2014-2020 harus menjadi acuan khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Indikasi program kegiatan yang mendukung Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, sebagaimana yang disajikan pada Tabel IV.37

Tabel IV.37
Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pengembangan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan kawasan wisata unggulan provinsi	Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata unggulan sesuai tema yang ditetapkan							
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan provinsi	Penentuan pusat pertumbuhan pariwisata pada setiap kawasan wisata unggulan							
		Penyusunan rencana detil pengembangan pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan							
2. Pengembangan Produk Wisata	Pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang memunculkan keunikan/ identitas lokal dan berdaya saing sebagai tema pengembangan pariwisata	Penyusunan pedoman perencanaan dan pengelolaan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang spesifik Kepulauan Bangka Belitung							
		Penataan ruang dan pengelolaan daya tarik wisata bahari dan pulau-pulau kecil yang menjadi unggulan							
	Pengembangan daya tarik wisata difokuskan pada daya tarik wisata yang mendukung tema pengembangan kawasan wisata unggulan yang berkelanjutan	Sosialisasi tema pengembangan pariwisata provinsi dan kawasan wisata unggulan							
		Pengemasan budaya pesisir dan budaya etnis Cina sebagai daya tarik wisata							
	Pengembangan wisata buatan yang mendukung tema pengembangan pariwisata provinsi dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah	Penelitian mengenai pengembangan bekas galian tambang menjadi wisata buatan yang mendukung tema wisata bahari dan pulau-pulau kecil							
		Pengembangan program interpretasi pariwisata pada lahan-lahan bekas penambangan timah							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan wisata terpadu antar kawasan wisata unggulan dan dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kep. Bangka Belitung	Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu antara kawasan wisata unggulan							
		Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kepulauan Bangka Belitung							
3. Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur	Peningkatan aksesibilitas ke kawasan wisata unggulan provinsi	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan antar kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyediaan angkutan umum menuju dan antar kawasan wisata unggulan yang aman dan nyaman							
	Peningkatan kemudahan aksesibilitas antar provinsi dan antar kota, khususnya yang mendukung aksesibilitas antara ibukota provinsi, PKW, PKL, dan kawasan wisata unggulan	Peningkatan kapasitas dan jumlah lalu lintas penumpang dengan menggunakan moda transportasi udara dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (antara lain melalui perpanjangan landasan pacu (runway)).							
		Pengkajian terhadap permintaan perjalanan dengan berbagai moda transportasi bagi wisatawan ke dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							
		Peningkatan dan perbaikan kondisi fisik dan pelayanan pelabuhan laut untuk kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan.							



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perencanaan pengembangan transportasi terpadu yang memperhatikan pola pergerakan dan kebutuhan perjalanan.							
	Peningkatan aksesibilitas antar daya tarik wisata unggulan disetiap kawasan wisata unggulan provinsi	Peningkatan kualitas pelayanan jalan antar daya tarik wisata unggulan dan daya tarik wisata pendukung disetiap kawasan wisata unggulan							
		Penyediaan angkutan wisata yang menghubungkan daya tarik wisata unggulan disetiap kawasan wisata unggulan provinsi							
	Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih dan listrik untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan wisata unggulan	Pengkajian analisis kebutuhan air bersih dan penyediaan sumber air bersih di kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyediaan pemenuhan kebutuhan jaringan listrik di daerah tujuan wisata melalui penambahan jaringan dan atau pengembangan sumber-sumber tenaga listrik yang potensial untuk dikembangkan							
4. Pengembangan Pasardan Pemasaran	Pengembangan pasar wisnus dengan memanfaatkan masyarakat Kep. Bangka Belitung sebagai sumber pasar utama dan menjaring wisnus dari daerah sumber pasar terdekat	Penelitian profil dan preferensi wisnus Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Jambi terhadap produk wisata Kepulauan Bangka Belitung							
	Pengembangan pasar wisman dengan menjaring wisman dari daerah sumber pasar terdekat	Penelitian profil dan preferensi wisman yang datang ke Kepulauan Bangka Belitung							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penelitian profil dan preferensi potensi wisman yang berkunjung ke daerah sumber pasar terdekat							
	Pengembangan pasar wisatawan yang memiliki ketertarikan dengan budaya pesisir dan budaya/ etnis Cina	Penelitian profil dan preferensi potensi pasar dan pasar wisata waneksisting terhadap budaya pesisir dan etnis Cina							
	Maupun kabupaten/kota, antara lembaga pemerintah dg swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kep. Bangka Belitung	Penyelenggaraan forum koordinasi rutin untuk pengembangan pariwisata Kep. Bangka Belitung							
	Pengembangan kemitraan/kerjasama dengan negara-negara tetangga, organisasi dunia, maupun ahli-ahli dalam negeri dalam pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil serta pengembangan bekas penambangan timah untuk menjadi daya tarik wisata	Pembuatan MoU dengan negara-negara maupun organisasi dunia tentang pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung							
		Penyelenggaraan forum diskusi internasional tentang pengembangan lahan bekas penambangan timah menjadi daya tarik wisata							
		Pengadaan kerjasama dengan negara-negara yang berpengalaman dalam pemanfaatan bekas penambangan dan ahli-ahli lingkungan dan pariwisata Indonesia							
	Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata sebagai pencetak SDM pariwisata yg kompeten/berkualitas dan sesuai dg tuntutan pasar	Pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata yang berkualitas dan sesuai tuntutan pasar							
		Pengembangan kurikulum pendidikan kepariwisataan yang sesuai dengan tuntutan pasar							



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Pengelolaan Lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran lingkungan, termasuk membatasi kegiatan penambangan	Perumusan peraturan daerah mengenai pengendalian kegiatan penambangan timah inkonvensional							
		Perumusan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung							
	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan	Pembentukan tim pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung							
		Penyelenggaraan forum koordinasi rutin antara instansi terkait dalam pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan							
	Peningkatan upaya pengelolaan permasalahan lingkungan di kawasan wisata unggulan dan sekitarnya	Pembinaan sadar lingkungan pada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyelenggaraan gerakan cinta lingkungan di kawasan wisata unggulan provinsi							



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

BAB V

**RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DAERAH DAN PAGU INDIKATIF**

BAB V**RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF****5.1. Rencana Program Prioritas**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. Program yang dilaksanakan setiap SKPD:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

B. Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- b. Program Pendidikan Non Formal
- c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- d. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Urusan Kesehatan

- a. Program Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- j. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- k. Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- l. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- m. Program Sumber Daya Kesehatan

- n. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes
- o. Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya
- p. Program Bencana Bidang Kesehatan
- q. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- r. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- s. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- t. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- u. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- v. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- w. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya
- h. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
- i. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- k. Program Pengendalian Banjir
- l. Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
- m. Program Perencanaan Tata Ruang
- n. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pengembangan Perumahan

5. Urusan Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

7. Urusan Pertanahan

- a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- b. Program Penataan Administrasi Kependudukan

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- c. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

11. Urusan Sosial

- a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Pant
- e. Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Pant
- f. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- g. Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- h. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

12. Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Pengembangan HI dan Jamsostek
- b. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
- d. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah dan koperasi
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- d. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM sektor Lembaga dan Wilayah
- e. Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM

14. Urusan Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi
- b. Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

15. Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- c. Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya
- d. Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama
- e. Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- d. Program Pembinaan Generasi Muda

17. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- c. Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi
- d. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- e. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya
- f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- h. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- j. Program Kemitraan Kantibnas
- k. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- l. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- m. Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- n. Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilu Pilkada

18. Urusan Persandian

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

19. Urusan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa
- b. Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa
- d. Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG
- e. Program Raskintis

21. Urusan Statistik

- a. Program Pengembangan Data/Informasi

22. Urusan Kearsipan

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah
- c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

23. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- d. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

24. Urusan Perpustakaan

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

25. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

- a. Program Kerjasama Pembangunan
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
- g. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
- h. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

2) Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Serta Pendapatan Lain-Lain
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3) Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- a. Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
- d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif Terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota
- g. Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- i. Program Penataan Kelembagaan SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - j. Penguatan Tata Kelola SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - k. Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - l. Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - m. Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - n. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
 - o. Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah
 - p. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - q. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - r. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan
 - s. Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada
 - t. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - u. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - v. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - w. Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama
 - x. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - y. Program Kepedulian Terhadap Masyarakat
 - z. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan APBD
- 4) Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia**
- a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan**
- a. Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah

C. Urusan Pilihan

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

2. Urusan Kehutanan

- a. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- c. Perlindungan dan Konservasi SDA
- d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
- c. Program Penelitian / Pengembangan Esdm dan Air Tanah
- d. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

4. Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Program Pengembangan Kemitraan
- c. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengembangan Pengolahan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
- d. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan

6. Urusan Perdagangan

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- c. Program Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri

7. Urusan Perindustrian

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan
- d. Program Penataan Struktur Industri
- e. Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro)
- f. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

8. Urusan Transmigrasi

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Tabel V.1
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									430.467.096.883	451.990.451.727		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									195.954.859.083	205.752.602.037		
BELANJA LANGSUNG									234.512.237.800	246.237.849.690		
BELANJA RUTIN									74.391.382.500	78.110.951.625		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			72.031.380.000	75.632.949.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	16.500.000	17.325.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Tersedianya jasa sumberdaya listrik dan Komunikasi	12 Bln	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Tersedianya PA, PPK, PP, PPHP, BP, PPTK dan Penatausahaan keuangan	12 Bln	338.460.000	355.383.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan dan keamanan kantor	12 Bln	36.000.000	37.800.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	160.000.000	168.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.1100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya Barang Cetakan berbentuk Spanduk, barang cetakan dan penjilidan	12 Bln	43.000.000	45.150.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.1500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Tersedianya Majalah, koran dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	12.000.000	12.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.1700	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor	12 Bln	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.1800	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Pangkalpinang			Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	12 Bln	500.000.000	525.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi			Pangkalpinang			Tersedianya tenaga honorer	51 Org	429.000.000	450.450.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
1.01.01.8800	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			Pangkalpinang			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bln	250.000.000	262.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PLA			Pangkalpinang			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD PLA	12 Bln	1.021.380.000	1.072.449.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota Pangkalpinang			Pangkalpinang			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota PKP	12 Bln	6.064.180.000	6.367.389.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka			Kab. Bangka			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka	12 Bln	12.467.460.000	13.090.833.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	PPeningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka Barat			Kab. Babar			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Barat	12 Bln	7.984.980.000	8.384.229.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PendidikanKab.Bangka Tengah			Kab. Bateng			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Tengah	12 Bln	5.702.580.000	5.987.709.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Bangka Selatan			Kab. Basel			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Selatan	12 Bln	14.877.180.000	15.621.039.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Belitung			Kab. Belitung			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Belitung	12 Bln	9.929.480.000	10.425.954.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.01.XXXX	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab.Belitung Timur			Kab. Beltim			Terlaksanya Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Beltim	12 Bln	12.009.180.000	12.609.639.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.274.660.000	1.338.393.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.02.1300	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur	4 Jenis	1.020.600.000	1.071.630.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.02.2200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bln	192.800.000	202.440.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.02.2400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 Bln	33.260.000	34.923.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.02.2500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bln	28.000.000	29.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100%			712.877.500	748.521.375	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			Pangkalpinang			Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	2 Jenis	63.727.500	66.913.875	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
2	Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan di Bidang Pendidikan			Pangkalpinang					439.260.000	461.223.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Bintek dan Penilaian Angka Kredit JFT			Pangkalpinang			Terlaksanya Penilaian Angka Kredit JFT	100%	209.890.000	220.384.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.02.03.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	391.088.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
URUSAN WAJIB									160.120.855.300	168.126.898.065		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kepulauan Bangka Belitung	Tersedianya data	116.26%			16.419.952.500	17.240.950.125	Sedang	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
					APM SD Sederajat	97%						
					APK SMP Sederajat	98%						
					APM SMP Sederajat	84%						
					Rata-rata nilai UAS SD Sederajat	6.75						
					Rata-rata nilai UN SMP Sederajat	7						
					Persentase SD sederajat akreditasi minimal B	90%						
					Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B	90%						
1	Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal			Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan PAUD Non formal	6 Kegiatan	1.255.798.500	1.318.588.425	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
1	Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI			Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya lomba-lomba tingkat SD	3 Kegiatan	3.504.750.000	3.679.987.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
2	Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs			Pangkalpinang			Terlaksananya Lomba Siswa SMP Tingkat Provinsi	5 Jenis	5.109.471.000	5.364.944.550	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
3	Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus			Pangkalpinang			Terselenggaranya Implementasi Kurikulum 2013, Pengembangan Pendidikan Khusus, Lomba-lomba Pendidikan Khusus	9 SLB	1.803.933.000	1.894.129.650	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang			Pangkalpinang			Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Pangkalpinang	195 Sis	1.365.000.000	1.433.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat			Bangka			Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Sungailiat	88 Sis	616.000.000	646.800.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok			Bangka Barat			Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan PendidikanKhusus di SLB N Muntok	77 Sis	539.000.000	565.950.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba			Bangka Tengah			Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Koba	47 Sis	329.000.000	345.450.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali			Bangka Selatan			Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Toboali	74 Sis	518.000.000	543.900.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan			Belitung			Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Tanjungpandan	107 Sis	749.000.000	786.450.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar			Belitung Timur			Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Manggar	90 Sis	630.000.000	661.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
Program Pendidikan Non Formal		Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kepulauan Bangka Belitung	Angka Buta Aksara	3,00%			3.940.571.000	4.137.599.550	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
					Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill	25,00%						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan			Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung			Terlaksananya lomba pendidikan kesetaraan	6 Cabang	1.873.188.000	1.966.847.400	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara			Pangkalpinang			Terlaksananya lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi	16 cabang	2.067.383.000	2.170.752.150	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan				1.240.670.000	1.302.703.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan			7 Kab/Kota			Terlaksananya koordinasi pendataan dan penyebaran informasi pendidikan	7 Kab/Kota	1.240.670.000	1.302.703.500		PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kepulauan Bangka Belitung	APK Pendidkan	89%			138.116.571.800	145.022.400.390	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
					APM Pendidkan Menengah	75%						
					Nilai rata-rata UN SMA IPA	7.5						
					Nilai rata-rata UN	7.3						
					Persentase SMA sederajat terakreditasi	85%						
					Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah ke perguruan tinggi	10,00%						
					Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan	25%						
					Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melanjutkan keperguruan tinggi	25%						
					Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin	25%						
					Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang	25,00%						
	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA			Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya lomba-lomba, Diklat dan UN tingkat SMA/MA	16 kegiatan	10.443.695.000	10.965.879.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK			Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Jenis Lomba Ketingkat Nasional	6 Jenis	25.269.166.800	26.532.625.140	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
							Jumlah Pembinaan Kesiswaan	3 jenis				
							Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih	465 guru dan Tenaga Kependidikan				
				Belitung Timur			Jumlah bengkel Produktif Bidang teknologi Kendaraan Ringan yang di bangun Beserta Sarana dan Prasarannya	1 Paket				
							Jumlah Ruang multimedia dan Meubelair	12 Ruang				
							Jumlah peralatan CBT berikut instalasinya	1080 Unit (27 Sekolah)				
				Tanjungpandan			Jumlah bengkel Produktif Bidang pariwisata yang di bangun Beserta Sarana dan Prasarannya	1 paket				
				Parittiga Jebus			Jumlah peralatan praktik bidang otomotif sepeda motor	1 paket				
				KTM Batu Betumpang			Jumlah peralatan praktik bidang pertanian	1 paket				
				Selat Nasik Belitung			Jumlah peralatan praktik bidang perikanan	1 paket				
	Pembinaan bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi			7 Kabupaten/Kota			Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa	1.321 org	7.824.710.000	8.215.945.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pangkalpinang	800 ORANG	2.160.000.000	2.268.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Pangkalpinang	1500 ORANG	4.050.000.000	4.252.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMK Negeri 3 Pangkalpinang	650 ORANG	1.755.000.000	1.842.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMK Negeri 4 Pangkalpinang	500 ORANG	1.350.000.000	1.417.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMK Negeri 5 Pangkalpinang	360 ORANG	972.000.000	1.020.600.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangk	1120 ORANG	3.024.000.000	3.175.200.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	660 ORANG	1.782.000.000	1.871.100.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	300 ORANG	810.000.000	850.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	250 ORANG	675.000.000	708.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	250 ORANG	675.000.000	708.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	1100 ORANG	2.970.000.000	3.118.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	800 ORANG	2.160.000.000	2.268.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	450 ORANG	1.215.000.000	1.275.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Badau, Belitung	500 ORANG	1.350.000.000	1.417.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	135 ORANG	364.500.000	382.725.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	650 ORANG	1.755.000.000	1.842.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	525 ORANG	1.417.500.000	1.488.375.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	600 ORANG	1.620.000.000	1.701.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	350 ORANG	945.000.000	992.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	650 ORANG	1.755.000.000	1.842.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	350 ORANG	945.000.000	992.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	125 ORANG	337.500.000	354.375.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	260 ORANG	702.000.000	737.100.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	100 ORANG	270.000.000	283.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	370 ORANG	999.000.000	1.048.950.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	450 ORANG	1.215.000.000	1.275.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	700 ORANG	1.890.000.000	1.984.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	675 ORANG	1.822.500.000	1.913.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	875 ORANG	2.362.500.000	2.480.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	150 ORANG	405.000.000	425.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	620 ORANG	1.674.000.000	1.757.700.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	450 ORANG	1.215.000.000	1.275.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	220 ORANG	594.000.000	623.700.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	175 ORANG	472.500.000	496.125.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1, Pangkalpinang	729 SISWA	1.822.500.000	1.913.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMA Negeri 2, Pangkalpinang	668 SISWA	1.670.000.000	1.753.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMA Negeri 3, Pangkalpinang	729 SISWA	1.822.500.000	1.913.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang			Pangkalpinang			JUMLAH SISWA SMA Negeri 4, Pangkalpinang	506 SISWA	1.265.000.000	1.328.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	208 SISWA	520.000.000	546.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	473 SISWA	1.182.500.000	1.241.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	469 SISWA	1.172.500.000	1.231.125.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	120 SISWA	300.000.000	315.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	372 SISWA	930.000.000	976.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	723 SISWA	1.807.500.000	1.897.875.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	480 SISWA	1.200.000.000	1.260.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	215 SISWA	537.500.000	564.375.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka			Bangka			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	800 SISWA	2.000.000.000	2.100.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	599 SISWA	1.497.500.000	1.572.375.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	563 SISWA	1.407.500.000	1.477.875.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	514 SISWA	1.285.000.000	1.349.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	239 SISWA	597.500.000	627.375.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	489 SISWA	1.222.500.000	1.283.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka			Bangka Barat			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	312 SISWA	780.000.000	819.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	569 SISWA	1.422.500.000	1.493.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	314 SISWA	785.000.000	824.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	400 SISWA	1.000.000.000	1.050.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	277 SISWA	692.500.000	727.125.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	290 SISWA	725.000.000	761.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah			Bangka Tengah			JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	504 SISWA	1.260.000.000	1.323.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka Selatan	422 SISWA	1.055.000.000	1.107.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	183 SISWA	457.500.000	480.375.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	155 SISWA	387.500.000	406.875.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	538 SISWA	1.345.000.000	1.412.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	28 SISWA	70.000.000	73.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	346 SISWA	865.000.000	908.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	721 SISWA	1.802.500.000	1.892.625.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan			JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	482 SISWA	1.205.000.000	1.265.250.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	456 SISWA	1.140.000.000	1.197.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	452 SISWA	1.130.000.000	1.186.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, KabupatenBelitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	677 SISWA	1.692.500.000	1.777.125.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung			Belitung			JUMLAH SISWA SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	654 SISWA	1.635.000.000	1.716.750.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	196 SISWA	490.000.000	514.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	549 SISWA	1.372.500.000	1.441.125.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	388 SISWA	970.000.000	1.018.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	575 SISWA	1.437.500.000	1.509.375.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur			Belitung Timur			JUMLAH SISWA SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	364 SISWA	910.000.000	955.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Manajemen Aparatur	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis		Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS	Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota			403.090.000	423.244.500		PD yang melaksanakan urusan pendidikan
01.20.113.0100	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28 Sekolah	403.090.000	423.244.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan

Tabel V.2
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									254.204.381.860	265.500.991.653		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									16.181.710.230	16.990.795.742	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									29.121.492.610	30.577.567.241	RSJ	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									28.299.527.620	29.714.504.001	RSUP	
BELANJA LANGSUNG									180.601.651.400	188.218.124.670		
BELANJA RUTIN									4.076.757.000	3.889.506.600		
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			3.370.992.000	3.539.541.600	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.010	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Terdistribusinya surat menyurat	12 Bulan	48.000.000	50.400.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.020	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	312.000.000	327.600.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.060	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	4 Mobil dan 7 Motor	230.420.000	241.941.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.070	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Tersedianya jasa pengelola administrasi perkantoran	54 Orang	276.720.000	290.556.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.100	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	82.150.000	86.257.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.110	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya barang pengadaan cetakan dan penggandaan	30 Paket	173.510.000	182.185.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.120	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya komponen jaringan listrik Dinas Kesehatan dan Balai	8 Paket	40.000.000	42.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.150	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Tersedianya surat kabar lokal/nasional dan buku peraturan perundang-	3 Paket	11.760.000	12.348.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.170	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makan minum tamu dan snack rapat pegawai	12 Bulan	34.110.000	35.815.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.01.1800	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	400.000.000	420.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Tersedianya pelayanan operasional kantor (cleaning service,	37 Orang	1.137.400.000	1.194.270.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.01.8100	Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	4 Paket	50.000.000	52.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah			Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	4 Paket	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Labkes			Pangkalpinang			Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	4 Paket	424.922.000	446.168.100	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhihnya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasara aparatur	100%			256.200.000	269.010.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.02.0700	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Perlengkapan gedung kantor	6 Paket	56.300.000	59.115.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.02.2200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Perawatan dan rehab gedung kantor	6 Paket	135.800.000	142.590.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.02.2800	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			Pangkalpinang			Pemeliharaan peralatan kantor	153 Unit	35.100.000	36.855.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.02.0000	Pengadaan Meubelair			Pangkalpinang			Tersedianya meubelair kantor	1 Paket	29.000.000	30.450.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhihnya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Presentasi peningkatan disiplin aparatur	100%			77.100.000	80.955.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.02.01.03.0200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Pangkalpinang			Tersedianya pakaian batik cual bagi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Laboratorium	148 Orang	77.100.000	80.955.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.06.1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	138.078.000		PD yang melaksanakan urusan kesehatan
1.06.1.06.02.06.0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200	baru	PD yang melaksanakan urusan kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000	baru	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
BELANJA RUTIN									6.549.346.950	7.160.073.248		
1.02.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			3.324.605.950	3.490.836.248	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah materi yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan	45 buah buku cek, 685 lbr materai Rp.6000, 365 lbr materai Rp.3000, belanja pengiriman surat selama 1 thn	7.387.500	7.756.875	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Pemakaian Telephone, air dan listrik yang dibayar	pemakaian Telephone, air dan listrik selama 1 thn	317.625.000	333.506.250	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Tenaga administrasi keuangan yang dilaksanakan	38 orang Tenaga Administrasi keuangan	224.520.000	235.746.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Tenaga Kebersihan yang dilaksanakan dan Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibeli	13 orang tenaga cleaning service, alat kebersihan dan bahan pembersih	218.925.000	229.871.250	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara	16 Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara	145.200.000	152.460.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli	ATK selama 1 tahun	231.000.000	242.550.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang dibeli	Cetak dan penggandaan selama satu tahun	252.700.000	265.335.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	Alat Listrik dan Elektronik selama 1 tahun	76.610.000	80.440.500	Sedang Berjalan	RSJ

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah surat kabar dan buku peraturan Perundang-undangan yang dibeli	Jumlah surat kabar selama 1 Tahun	30.000.000	31.500.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah tabung gas, Peralatan dapur dan air isi ulang yang dibeli	tabung gas , Peralatan Dapur dan air isi ulang selama 1 tahun	141.234.000	148.295.700	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Makan Minum rapat dan tamu	Jumlah makan Minum rapat dan tamu Selama satu tahun	69.990.000	73.489.500	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun	500.000.000	525.000.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.19	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan administrasi Perkantoran			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah tenaga penunjang Pengelola administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Tenaga penunjang pengelola administrasi perkantoran	915.464.500	961.237.725	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.51	Pengelolaan Website			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah data dan informasi yang dipublikasikan	Jumlah data dan informasi yang dipublikasikan selama 1 tahun	43.949.950	46.147.448	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.01.88	Koordinasi,Konsolidasi ke dalam daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilaksanakan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.615.016.000	1.902.616.800	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	28 unit	301.140.000	316.197.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	25 unit	173.930.000	182.626.500	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.02.10	Pengadaan Mebeulair			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Mebeulair yang dibeli	75 unit	297.360.000	312.228.000	Sedang Berjalan	RSJ

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	Kendaraan Dinas/Operasional	445.986.000	468.285.300	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.02.31	Pembangunan Gardu Listrik			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Gardu Listrik yang di beli	Gardu Listrik	199.500.000	209.475.000		RSJ
1.02.03.02.33	Pemeliharaan rutin/berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Taman ,tempat parkir dan halaman kantor yang terpelihara	Taman,tempat parkir dan halaman kantor	197.100.000	206.955.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			197.000.000		Sedang berjalan	RSJ
1.02.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Pakaian Dinas 380 stell	197.000.000	206.850.000		RSJ
1.02.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			1.175.960.000	1.628.542.200	Sedang berjalan	RSJ
1.02.03.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Informal			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Pendidikan dan Pealtihan informal yang diikuti	Workshop, diklat dan Bimtek untuk 1 thn	495.000.000	519.750.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.05.9919	Pelaksanaan Kegiatan Personal Development			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Kegiatan Personal developmet yang dilaksanakan	230 orang peserta laki-laki dan perempuan	680.960.000	715.008.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.06.1.06.02.06 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			236.765.000	138.078.000		RSJ
1.06.1.06.02.06 .0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	108.915.000	117.628.200		RSJ
1.06.1.06.02.06 .0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000		RSJ
BELANJA RUTIN									8.948.234.000	8.089.865.700		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			5.529.070.000	5.805.523.500	Sedang berjalan	RSUP
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya materiail dan buku cek	1 paket	4.000.000	4.200.000	Sedang berjalan	RSUP
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	12 bulan	1.961.000.000	2.059.050.000	Sedang berjalan	RSUP
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	317.770.000	333.658.500	Sedang berjalan	RSUP
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	370.800.000	389.340.000	Sedang berjalan	RSUP
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Peralatan kerja	12 bulan	650.000.000	682.500.000	Sedang berjalan	RSUP
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya Alat tulis kantor	12 bulan	424.000.000	445.200.000	Sedang berjalan	RSUP
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	249.900.000	262.395.000	Sedang berjalan	RSUP
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Komponen listrik dan elektronik	12 bulan	250.000.000	262.500.000	Sedang berjalan	RSUP
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya peralatan kantor	12 bulan	60.000.000	63.000.000	Sedang berjalan	RSUP
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya surat kabar, majalah sebagai sarana informasi	12 bulan	50.000.000	52.500.000	Sedang berjalan	RSUP
13	Penyediaan Makanan dan Minuman			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	741.600.000	778.680.000	Sedang berjalan	RSUP
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	350.000.000	367.500.000	Sedang berjalan	RSUP
15	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	RSUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.725.100.000	505.575.000	Sedang berjalan	RSUP
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya peralatan dapur gizi dan rumah tangga	12 bulan	570.000.000	598.500.000	Sedang berjalan	RSUP
2	Pengadaan Peralatan Kantor			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya peralatan kantor	1 paket	439.140.000	461.097.000	Sedang berjalan	RSUP
2	Pengadaan Meubelair			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya mebelair kantor dan rumah sakit	1 paket	42.360.000	44.478.000	Sedang berjalan	RSUP
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terlaksananya operasional kebersihan kantor	12 Bulan	673.600.000	707.280.000	Sedang berjalan	RSUP
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			296.360.000	311.178.000	Sedang berjalan	RSUP
1	Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus dan Hari-Hari			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Pakaian Pasien dan Seragam Dinas Pegawai	1.070 stel pakaian pegawai dan 20 pakaian pasien	296.360.000	311.178.000	Sedang berjalan	RSUP
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			1.025.239.000	1.076.500.950	Sedang berjalan	RSUP
1	Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terlaksananya bimbingan teknis	27 orang	827.956.000	869.353.800	Sedang berjalan	RSUP
2	Peningkaan kapasitas aparatur tenaga kesehatan RSUPD			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terlaksananya bimbingan teknis	27 orang	197.283.000	207.147.150	Sedang berjalan	RSUP
1.02.03.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	391.088.250	Sedang berjalan	PD Kesekretariatan RSUP
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	RSUP
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Lapora n	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	RSUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN WAJIB									38.258.886.750	40.171.831.088		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%			303.990.000	319.189.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			1. Tersedianya dokumen laporan penggunaan obat rasional	1 dokumen	303.990.000	319.189.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	1 paket				
							3. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi farmasi di fasyankes	1 dokumen				
							4. Tersedianya dokumen pengawasan kefarmasian di PBF dan PAK	1 dokumen				
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	62%			150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			1. Tersedianya dokumen HKN	1 dokumen	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya dokumen gerakan sayang ibu dan anak	1 dokumen				
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75%	75%			243.663.000	255.846.150	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Promosi Kesehatan			Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			1. Tersedianya informasi kesehatan melalui pameran, media cetak dan media elektronik dalam rangka promosi kesehatan	media cetak 4000 lbr, poster 1000 lbr, 1 kali pameran	243.663.000	255.846.150	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Terkoordinasinya program kesehatan melalui saka bhakti husada	35 orang				
							3. Terlaksananya penilaian institusi dalam upaya promotif dan preventif	21 institusi				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Tersosialisasinya program kesehatan di institusi pendidikan (sekolah)	100 org per Kab/Kuta				
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3%	30%			389.597.900	409.077.795	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Terlaksananya kelas edukasi PMBA	200 org (20 kelompok)	389.597.900	409.077.795	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Terlaksananya seminar gizi masyarakat	150 org				
							3. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani	140 org dan 7 paket				
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100%	100%			1.110.476.000	1.165.999.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1.Tersedianya dokumen orientasi STBM	7 dokumen	1.110.476.000	1.165.999.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2.Tersedianya data kualitas air minum	68 sarana air minum				
							3.Tersedianya Dokumen monev, dokumen pertemuan	3 dokumen				
							4.Tersedianya data sanitasi Tempat-tempat Umum (pontren, sekolah dan pasar sehat)	1 dokumen				
							5. Tersedianya dokumen pemantauan limbah medis	1 dokumen				
							6. Tersedianya dokumen hasil studi dampak radioaktifitas	1 dokumen				
							7. Iokakarya pengolahan air					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra ~~42%-98%~~	84%			3.259.523.000	3.422.499.150	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
					Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menular ~~100%~~	100%						
	Peningkatan teknis laboratorium klinis dan kesmas			Provinsi Kep.Bangka Belitung			Petugas mampu melakukan pemeriksaan laboratorium klinis sesuai standar	20 org	147.895.000	155.289.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Pengendalian Penyakit Menular			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Terlaksananya koordinasi terpadu program P2P dan PL	209 orang	2.420.098.000	2.541.102.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya dokumen Rakor P2PL	1 dokumen				
							3. Tersedianya laporan pemantauan dalam rangka tata laksana pengobatan malaria	1 dokumen				
							4. Terlatihnya petugas lab.malaria dalam tata laksana pengobatan malaria	70 orang				
							5. Tersedianya laporan pengendalian vektordi breeding place pada daerah dengan kasus tinggi malaria	1 dokumen				
							6. Tersosialisasinya program pengendalian kusta terhadap petugas	30 orang				
							7. Tersedianya dokumen pemantauan pasca pengobatan kusta	1 dokumen				
							8. Tersedianya bahan RDT dan peralatan penunjang	3000 sampel dan 1 paket				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Terlaksananya laporan pemantauan hepatitis dan Deteksi Dini Hepatitis B dan C Pada Bumil dan Nakes	2 dokumen				
							10. Terlaksananya evaluasi data TB MDR	1 dokumen				
							11. Terlaksananya dokumen pemantauan pasien TB MDR	1 dokumen				
							12. Terkoordinasinya program pengendalian penyakit filariasis	12 orang				
							13. Tersedianya dokumen pemantauan TAS filariasis dan bimtek filariasis	2 dokumen				
							14. Tersedianya dokumen laporan Mass Blood Survey	7 dokumen				
							15. Tersedianya laporan Gerakan Masyarakat PSN 3M PLUS 1 RUMAH 1 JUMANTIK	7 dokumen				
							16. Tersedianya dokumen laporan hari TB sedunia	1 dokumen				
							17. Tersedianya petugas yang mempunyai kemampuan dalam tata laksana kasus KIPi	35 orang				
							18. Tersedianya petugas dalam pengelolaan vaksin baru	70 orang				
							19. Tersedianya sarana prasarana program imunisasi	5 paket				
							20. Tersedianya dokumen monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Imunisasi	7 dokumen				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko PTM			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Terlaksananya diseminasi informasi Penyakit Tidak menular (PTM)	200 orang	691.530.000	726.106.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya bahan habis pakai PTM	1 paket				
							3. Tersedianya dokumen pemantauan PPTM dan koordinasi ke Kemenkes	2 dokumen				
							4. Terkoordinasinya penyelenggaraan koordinasi haji	34 orang				
							5. Tersedianya dokumen koordinasi pendampingan jemaah haji ke embarkasi Palembang	1 dokumen				
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional	0%			1.029.661.000	1.081.144.050	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Tersedianya dokumen laporan SPM	1 dokumen	1.029.661.000	1.081.144.050	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya dokumen laporan BLUD	1 dokumen				
							3. Tersedianya dokumen laporan PPI	1 dokumen				
							4. Tersedianya dokumen laporan ASPAK	1 dokumen				
							5. Tersedianya dokumen laporan SPGDT	1 dokumen				
							6. Tersedianya dokumen laporan BPRS	1 dokumen				
							7. Tersedianya dokumen rapat BPRS	4 dokumen				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Tersedianya dokumen OJT PONEK	5 dokumen				
							9. Tersedianya dokumen laporan tim BPRS	1 dokumen				
							10.Tersedianya dokumen laporan monev akreditasi rumah sakit	14 dokumen				
							11.Tersedianya dokumen laporan monev BLUD	7 dokumen				
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%-95%	95%			25.707.567.850	26.992.946.243	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Ke. Bangka Belitung			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Tersedianya biaya Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	79.251 peserta	25.707.567.850	26.992.946.243	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya dokumen kesepakatan Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen				
							3. Tersedianya dokumen pemantauan dan Evaluasi Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota	2 dokumen				
							4. Tersedianya laporan Koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan	1 laporan				
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	angka kematian bai per 1000 kelahiran hidup 35-28	28			205.519.800	215.795.790	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Pengembangan Kesehatan Anak			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Terpilihnya pemenang lomba Balita Sehat dan Sejahtera	14 orang	205.519.800	215.795.790	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya buku raport kesehatanku	62.000 buku				
							3. Tersedianya buku KIA	10.000 buku				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhihina kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%-40%	40%			310.797.900	326.337.795	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan			Provinsi Kep.Bangka Belitung			Terbinanya petugas kesehatan dengan kemampuan pengelolaan TPM (laki-laki 34 org, perempuan 33 org)	67 orang	310.797.900	326.337.795	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhihina kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98%	27%			720.212.000	756.222.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
					Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 35-27	26%						
	Penurunan AKI dan AKB	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhihina kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Terlatihnya Petugas kesehatan dalam tata laksana asfiksia dan BBLR	200 orang	720.212.000	756.222.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersosialisasinya program kesehatan bagi anak sekolah	47 orang				
							3. Teradvokasinya program peduli kematian anak dan ibu	160 orang				
							4 Terkoordinasinya program kesehatan ibu dan anak	110 orang				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase ketersediaan bank data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100%	100%			298.150.000	313.057.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4	100%						
					Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen	100%						
	Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Tersedianya dokumen kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	6 dokumen	298.150.000	313.057.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Tersedianya bank data	8 bank data				
	Program Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	100%			2.257.900.000	2.370.795.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Terlatihnya Tenaga Kesehatan dalam jabatan fungsional Bidan	60 orang	2.000.000.000	2.100.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Terlatihnya tenaga kesehatan dalam Jabfung Penyuluh Kesehatan	30 orang				
							3. Tersedianya dokumen peningkatan SDM Dinas Kesehatan	1 dokumen				
							4. Tersedianya dokumen tim MTKP	1 dokumen				
							5. Tersedianya dokumen tim akreditasi pelatihan	1 dokumen				
							6. Tersedianya dokumen laporan tugas belajar	1 laporan				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Tersedianya jasa penunjang pelayanan kesehatan (10 org di klinik provinsi & 14 org bidan PTT Kab/kota)	24 tenaga kesehatan				
							8. Tersedianya dokumen tim penilaian Jabfung	1 dokumen				
							9. Terpilihnya tenaga medis teladan	4 orang				
	Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium			Provinsi Kep.Bangka Belitung			Tersertifikasinya petugas teknis pelayanan laboratorium	14 orang	257.900.000	270.795.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	persentase sarana dan prasarana labkesda	100%			897.156.000	942.013.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Sarana Prasarana Balai Laboratorium Kesehatan			Provinsi Kep.Bangka Belitung			Tersedianya sarana prasarana laboratorium dengan kondisi baik sesuai dengan standar	1 paket	897.156.000	942.013.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas	90%			993.272.300	1.042.935.915	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Tersedianya dokumen kesepakatan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota	2 dokumen	887.968.200	932.366.610	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Terlaksananya bimbingan teknis pelayanan kesehatan dasar di kab/kota	3 dokumen				
							3. Tersedianya dokumen laporan FKTP berprestasi	1 dokumen				
							4. Tersedianya dokumen komitmen pelaksanaan Perkesmas	1 dokumen				
							5. Tersedianya dokumen ASPAK dan kalibrasi alkes Puskesmas di kab/kota	1 dokumen				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Tersedianya dokumen konsultasi program	2 dokumen				
							7. Tersedianya dokumen rencana tindak lanjut IPWL	1 dokumen				
							8. Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak dan pemberdayaan masyarakat dan kader di DTPK	1 dokumen				
							9. Tersedianya dokumen akreditasi FKTP	7 dokumen				
							10. Tersedianya dokumen Gerakan Fit For School	1 dokumen				
							11. Tersedianya dokumen sarasehan lansia sehat	1 dokumen				
	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan			Provinsi Kep.Bangka Belitung			Tersedianya dokumen pelaporan pelayanan kesehatan	1 dokumen	105.304.100	110.569.305		PD yang melaksanakan urusan kesehatan
	Program Bencana Bidang Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100%	100,00%			381.400.000	400.470.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
					Persentase kab/kota yang diintervensi dengan kesiapsiagaan penanggulangan bidang kesehatan	25,00%						
	Penanggulangan Krisis kesehatan			Provinsi Kep.Bangka Belitung			1. Tersosialisasi dan terdiseminasinya penanggulangan krisis kesehatan terhadap petugas	100 orang	381.400.000	400.470.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
							2. Terlaksananya supervisi/investigasi penanggulangan krisis kesehatan	2 dokumen				
							3. Tersedianya mobil penanggulangan krisis kesehatan	1 mobil				
							4. Tersedianya perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan	3 tenda dan 80 palbet				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 URUSAN WAJIB									21.371.044.000	22.439.596.200		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%			1.832.049.800	1.923.652.290	Sedang berjalan	RSJ
	Penyusunan Formularium Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah dokumen Formularium obat yang tersusun	1 dokumen Formularium obat dan perbekalan kesehatan	32.050.000	33.652.500	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan RSJ
	Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang di beli	66 jenis obat generik dan non generik, 1 paket perbekalan kesehatan	1.799.999.800	1.889.999.790	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan RSJ
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	100%			5.273.009.900	5.536.660.395	Sedang berjalan	RSJ
	Jambore Kesehatan Jiwa			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Rehabilitan dan Pendamping yang diikuti	40 orang Rehabilitan dan Pendamping	324.679.900	340.913.895	Sedang Berjalan	RSJ
	Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home visit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah kunjungan puskesmas dan jumlah pasien home visite	56 kunjungan puskesmas dan 126 orang pasien home visite	242.130.000	254.236.500	Sedang Berjalan	RSJ
	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah tenaga penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	3 orang tenaga kontrak dokter spesialis PNS dan 96 Non PNS	3.011.200.000	3.161.760.000	Sedang Berjalan	RSJ
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah pasien 50.900 porsi per pasien, 20.640 orang pegawai, 1.755 orang pegawai (bulan puasa)	50.900 porsi per pasien, 20.640 orang pegawai, 1.755 orang pegawai (bulan puasa)	1.400.000.000	1.470.000.000	Sedang Berjalan	RSJ
	Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah kunjungan pasien, jenis terapi dan kendaraan operasional pada Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial	2.880 kunjungan pasien, 6 jenis terapi dan 2 kendaraan operasional	295.000.000	309.750.000	Sedang Berjalan	RSJ

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhiya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ	100%			508.479.600	533.903.580	Sedang berjalan	RSJ
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ	100%						
					Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ)							
	Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Survey Simulasi dan Sertifikat Akreditasi	1 dokumen Laporan survey simulasi dan 1 dokumen sertifikat akreditasi	348.999.950	366.449.948	Sedang Berjalan	RSJ
	Audit Asuhan Keperawatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Audit asuhan keperawatan di rawat inap dan rawat jalan	2 dokumen laporan audit asuhan keperawatan di rawat jalan inap dan rawat jalan	47.679.900	50.063.895		RSJ
	Penyusunan Standar Etik Profesi Keperawatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Buku Standar Etik Profesi Keperawatan	1 Buku Standar Etik Profesi Keperawatan	44.850.000	47.092.500		RSJ
	Penyusunan Standar Prosedur Operasional Keperawatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Buku Standar Prosedur Operasional Keperawatan	4 buku Standar Prosedur Operasional Keperawatan	66.949.750	70.297.238		RSJ
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhiya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara	100%			7.251.239.200	7.613.801.160	Sedang berjalan	RSJ
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah gedung rumah sakit yang terawat	1 tahun pemeliharaan gedung rumah sakit	658.239.750	691.151.738	Sedang berjalan	RSJ
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,II dan III)			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah ruang rawat inap yang terawat	1 tahun pemeliharaan ruang rawat inap	249.559.950	262.037.948	Sedang berjalan	RSJ

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Alat-alat kesehatan yang terpelihara	1 paket pemeliharaan alat-alat kesehatan	79.999.800	83.999.790	Sedang berjalan	RSJ
	Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilaksanakan	1 paket pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	91.919.800	96.515.790	Sedang berjalan	RSJ
	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terpelihara	1 tahun pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	171.519.900	180.095.895	Sedang berjalan	RSJ
	Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan Gedung Kantor Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Gedung Kantor dan Gedung Poliklinik yang direhabilitasi	1 paket rehabilitasi gedung poliklinik dan gedung kantor	6.000.000.000	6.300.000.000	Sedang berjalan	RSJ
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		100%			4.500.211.800	4.725.222.390	Sedang berjalan	RSJ
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Pelayanan yang terealisasi	12 bulan	4.500.211.800	4.725.222.390	Sedang berjalan	RSJ
1.02.03.26	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ	100%			2.006.053.700	2.106.356.385	Sedang berjalan	RSJ
1.02.03.26.1800	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli	1 paket perbekalan kesehatan dan alat kesehatan inventaris yang dibeli	900.000.000	945.000.000	Sedang Berjalan	RSJ
1.02.03.26.2200	Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien, laundry,ruang tunggu dan lain-lain)			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli	1 paket perlengkapan rumah tanggarumah sakit	431.194.000	452.753.700		RSJ
1.02.03.26.2700	Pengadaan Pagar Ruang Rawat Inap			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Pagar beton Gedung Pelayanan Rehabilitasi NAPZA dan Pagar Beton ruang rawat inap	1 paket pagar beton gedung rehabilitasi NAPZA dan pagar ruang rawat inap rumah sakit	499.999.800	524.999.790		RSJ
1.02.03.26.2900	Pengadaan SIM Rumah Sakit			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah data dan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit	1 paket data base SIM Rumah Sakit	174.859.900	183.602.895		RSJ

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.03.26.3300	Pengadaan Gedung Rawat Jalan (DAK)			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					-	-		RSJ
1.02.03.26.3300	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK)			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					-	-		RSJ
1.02.03.26.3400	Pengadaan Alat Kesehatan IGP (DAK)			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					-	-		RSJ
1.02.03.26.3500	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap (DAK)			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					-	-		RSJ
URUSAN WAJIB									101.397.382.700	106.467.251.835		
E	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%			4.152.880.000	4.360.524.000	Sedang berjalan	RSUP
1	Pengadaan Obat dan Pebekalan Kesehatan			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Obat-obatan generik, obat-obatan non generik, reagen dan perbekalan kesehatan	3paket bahan habis pakai kesehatan, 2paket obat, 6paket reagen laboratorium	4.152.880.000	4.360.524.000	Sedang berjalan	RSUP
F	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	100%			12.678.286.000	13.312.200.300	Sedang berjalan	RSUP
1	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak	12 bulan	12.407.920.000	13.028.316.000	Sedang berjalan	RSUP
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terbayarnya jasa tenaga medis, paramedis, non medis dan non paramedis	12 bulan	270.366.000	283.884.300	Sedang berjalan	RSUP
G	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSUP	90%			250.000.000	262.500.000	Sedang berjalan	RSUP
1	Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Event, Pameran dan Media Cetak			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Penyebaran Informasi melalui Media Promosi	2 Paket	250.000.000	262.500.000	Sedang berjalan	RSUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
H	Program Strandarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP	100%			797.652.000	837.534.600	Sedang berjalan	RSUP
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP	100%						
					Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP)							
1	Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Persiapan RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dalam penetapan akreditasi Versi 2012	15 dokumen	456.412.000	479.232.600	Sedang berjalan	RSUP
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis dan Clinical Pathway			RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO			Tersusunnya Standar operasional prosedur (SOP) medis dan Clinical Pathway	1 Dokumen	71.680.000	75.264.000	Sedang berjalan	RSUP
3	Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD			RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO			Terlaksananya Penilaian BLUD	1 dokumen	269.560.000	283.038.000	Sedang berjalan	RSUP
I	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	100%			80.357.484.700	84.375.358.935	Sedang berjalan	RSUP
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Rumah Sakit			RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO			Sepeda Motor dan Lift	Lift 3 unit	2.486.564.000	2.610.892.200	Sedang berjalan	RSUP
2	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1 Paket	2.497.977.000	2.622.875.850	Sedang berjalan	RSUP
4	Penyediaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit			Pangkalpinang			Tersedianya bahan logistik rumah sakit	1 Paket	152.260.000	159.873.000	Sedang berjalan	RSUP
5	Pembangunan Pos Jaga dan Portal Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Pos jaga dan Portal	Portal 1 unit, pos jaga 1 paket	256.380.000	269.199.000	Sedang berjalan	RSUP
6	Pembangunan Gedung B Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Gedung B	1 gedung	74.964.303.700	78.712.518.885	Baru	RSUP
J	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara	100%			3.161.080.000	3.319.134.000	Sedang berjalan	RSUP
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Pemeliharaan gedung RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO	12 bulan	598.000.000	627.900.000	Sedang berjalan	RSUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Pemeliharaan rutin/berkala instalasi listrik RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO	12 bulan	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	RSUP
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit	12 bulan	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	RSUP
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan			Pemeliharaan Alat Kesehatan	12 bulan	1.707.080.000	1.792.434.000	Sedang berjalan	RSUP
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambulance/jenazah			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah	12 bulan	176.000.000	184.800.000	Sedang berjalan	RSUP
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Oksigen Sentral			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Pemeliharaan instalasi oksigen sentral	12 bulan	200.000.000	210.000.000	Sedang berjalan	RSUP
7	pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terpeliharanya Kebersihan linen Rumah Sakit	12 bulan	130.000.000	136.500.000	Sedang berjalan	RSUP
8	Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Air Rumah Sakit			Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang			Terpeliharanya instalasi pengolahan air	Terlaksananya service dan pemeliharaan instalasi pengolahan air RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	RSUP

Tabel V.3
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	
5	TOTAL BELANJA								300.394.377.313	329.043.352.758		
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG								21.066.988.313	22.230.651.258		
5	BELANJA LANGSUNG								279.327.389.000	306.812.701.500		
1	BELANJA RUTIN								5.243.574.000	5.327.931.400		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Infratraktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.855.814.000	3.141.395.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersediannya perangko, materai dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa surat menyurat	1583 buah (1450 Materai, 133 Kilat khusus)	10.000.000	11.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Tersediannya rekening telepon dan listrik	12 Bulan	250.000.000	275.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Tersediannya administrasi keuangan kantor	12 Bulan	299.040.000	328.944.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Tersediannya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	39.000.000	42.900.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersediannya alat tulis kantor yang dapat melayani administrasi kantor	12 Bulan	72.000.000	79.200.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersediannya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran	12 Bulan	65.000.000	71.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Meningkatnya penerangan bangunan kantor	12 Bulan	25.000.000	27.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi	12 Bulan	24.624.000	27.086.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	20.200.000	22.220.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	12 Bulan	75.000.000	82.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Luar daerah bangka belitung			Terlaksananya Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	500.000.000	550.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Tersedianya Honorer Tidak Tetap	20 Orang	580.000.000	638.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)			Belitung			Tersedianya operasional rutin kantor UPTD	12 Bulan	795.950.000	875.545.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah			Bangka Belitung			Terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	12 Bulan	100.000.000	110.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Infratraktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.356.060.000	1.051.666.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Pangkalpinang			Tersedianya peralatan kerja	1 Paket	562.250.000	618.475.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan (8 roda 4, 3 roda 2)	333.810.000	367.191.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Pemeliharaan Peralatan kantor	12 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC)	60.000.000	66.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Rehabilitasi gedung kantor			Pangkalpinang					400.000.000	440.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Infratraktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			114.500.000	125.950.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Pangkalpinang			Pakaian dinas beserta perlengkapannya	225 stel	114.500.000	125.950.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Infratraktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			170.000.000	187.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Luar dan Dalam Daerah			meningkatnya kapasitas aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel	40 Orang	170.000.000	187.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Infratraktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			747.200.000	821.920.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan			Bangka Belitung			Tersedianya informasi data harga satuan upah dan bahan provinsi	1 Dokumen	253.495.000	278.844.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Workshop sinkronisasi program infrastruktur			Pangkalpinang			Terlaksananya Workshop sinkronisasi program infrastruktur	1 Dokumen	121.240.000	133.364.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	269.076.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output						
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Bangka Belitung			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	140.635.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
1	URUSAN WAJIB									274.083.815.000	301.484.770.100		
	URUSAN PEKERJAAN UMUM									272.528.650.000	299.781.515.000		
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Infratraktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94,50%			122.976.970.000	135.274.667.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
1	Perencanaan Pembangunan Jalan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan	2 Dokumen				PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
	Amdal LARAP Trans Bangka												
	Amdal LARAP Trans Belitung												
1	Pembangunan Jalan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	20 KM	81.439.960.000	89.583.956.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
	Peningkatan Jalan Pd. Besar - Saing - Kota Waringin			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya pembangunan jalan	20 KM			Sedang berjalan		
	Peningkatan Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya pembangunan jalan	21 KM			Sedang berjalan		
	Peningkatan Jalan Parit Tiga - Tg. Ru			Kab. Bangka Barat			Terlaksananya pembangunan jalan	22 KM			Sedang berjalan		
	Peningkatan Jalan Sangku - Dam III - Saing			Kab. Bangka Barat			Terlaksananya pembangunan jalan	23 KM			Sedang berjalan		
	Peningkatan Jalan Junction - Membalong			Kab. Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	24 KM			Sedang berjalan		
	Peningkatan Jalan Badau - Gantung (Kab. Belitung)			Kab. Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	25 KM			Sedang berjalan		
	Peningkatan Jalan Perawas - Km. 50			Kab. Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	26 KM			Sedang berjalan		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Jalan Tanjung Pandan - Sp. Empat			Kab. Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	27 KM			Sedang berjalan	
	Peningkatan Jalan Badau - Gantung (Kab. Belitung Timur)			Kab. Belitung Timur			Terlaksananya pembangunan jalan	28 KM			Sedang berjalan	
	Peningkatan Jalan Km. 50 - Manggar			Kab. Belitung Timur			Terlaksananya pembangunan jalan	29 KM			Sedang berjalan	
	Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin; Sangku - DAM III - Saing			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	30 KM			Sedang berjalan	
	Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur; Simpang Pulau Bangka - Sampur			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	31 KM			Sedang berjalan	
	Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	32 KM			Sedang berjalan	
	Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Junction - Membalong; Tanjung Pandan - Simpang Empat			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	33 KM			Sedang berjalan	
	Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Badau - Gantung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	34 KM			Sedang berjalan	
	Konsultansi Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Perawas - KM.50; KM. 50 - Manggar			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembangunan jalan	35 KM			Sedang berjalan	
1	Perencanaan pembangunan jembatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan	2 Dokumen	542.400.000	596.640.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	DED Jembatan Ruas Perawas - Km.50 - Manggar			Kab. Belitung/Belitim			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan	2 Dokumen			Sedang berjalan	
				Kab. Belitung/Belitim			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan	3 Dokumen			Sedang berjalan	
1	Pembangunan jembatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	2 Unit	40.994.610.000	45.094.071.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Pembangunan Jembatan Keretak			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	2 Unit			Sedang berjalan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lampur - Air Bara			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	3 Unit			Sedang berjalan	
1	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Proivnsi Kepulauan Bangka Belitung	panjang drainase yang terhubung dengan sungai (km)				2.218.850.000	2.440.735.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			Bangka Belitung			Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	5600 Meter	2.218.850.000	2.440.735.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Proivnsi Kepulauan Bangka Belitung	panjang garis pantai pada wilayah sungai yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik				5.088.780.000	5.597.658.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Perencanaan turap/talud/brojong			Bangka Barat			Terlaksananya Perencanaan turap/talud/brojong	2 Dokumen	732.360.000	805.596.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pembangunan turap/talud/bronjong			Bangka Belitung			Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong	14000 m'	4.356.420.000	4.792.062.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Proivnsi Kepulauan Bangka Belitung	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94,50%			106.936.410.000	117.630.051.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Bangka Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliha raan Jalan	31,05 km 784,64 Km	104.345.780.000	114.780.358.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pulau Bangka			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliha raan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar - Sungailiat			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliha raan Jalan	31,05 km 784,64 Km				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Timur			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Rebo - Tg. Pesona - Jelitik - Sp. Perahu			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ibul - Parit Tiga			Kab. Bangka Barat			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Sp. Katis - Sungai Selan			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Namang - Puput - Sp. Katis			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Puput - Lampur (Sp. Gedong)			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Koba - Lubuk Besar			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai Selan - Lampur - Air Bara			Kab. Bangka Selatan			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung - Payung			Kab. Bangka Selatan			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Pulau Bangka			Pulau Bangka			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Timur; Rebo-Tanjung Pesona-Jeliti-Simpang Perahu; Puding Besar-Sungailiat			Kab. Bangka			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Ibul - Parit Tiga			Kab.Barat			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang-Simpang Katis-Sungai Selan; Namang-Puput-Simpang Katis; Puput-Lampur (Sp. Gedong); Sungai Selan-Lampur			Pangkalpinang, Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Koba - Lubuk Besar			Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung			Bangka selatan			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang-Batas Kota (Sp. Katis); A. Yani; Sp. Semabung-Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Ketapang-Pasir Padi; PPI; Sp. Pulau Bangka -Sampur			Pangkalpinang			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kompleks Perkantoran Perkantoran Prov. Kep. Babel; Alexander			Pangkalpinang			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Sungailiat			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tg. Pesona - Jeliti - Sp. Perahu			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung			Kab. Bangka Induk			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin jalan Ibul - Parit Tiga			Kab. Bangka Barat			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru			Kab. Bangka Barat			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang; Sangku - Dam III - Saing; Sp. Tempilang - Sangku			Kab. Bangka Barat			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Sp. Katis; Sp. Katis - Sungai Selan			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Sp. Katis; Puput - Lampur (Sp. Gedong); Sungai Selan - Lampur			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Penagan; Penagan - Tanjung Tedung			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tg. Berikat			Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Lampur - Air Bara			Kab. Bangka Selatan			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas - Bedengung			Kab. Bangka Selatan			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Bedengung - Batu Betumpang; Bedengung - Payung			Kab. Bangka Selatan			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandang; Tanjung Pandan - Simpang Empat			Kab. Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Junction - Membalong			Kab. Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - Km. 50			Kab. Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat - Pesarakan - Buding			Kab. Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Badau - Gantung; Bantan - pelulusan			Kab. Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Badau - Gantung			Kab. Belitung			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Renggiang - Gantung; Gantung - Sp. Padang			Kab. Belitung Timur			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
	Pemeliharaan Rutin Jalan Km. 50 - Manggar			Kab. Belitung Timur			Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	31,05 km 784,64 Km				
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan			Kab. Belitung Timur			Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1 Unit	591.230.000	650.353.000		PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan baturusa II			Pangkalpinang			Terlaksananya Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	1 Unit	1.999.400.000	2.199.340.000		PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)				405.530.000	446.083.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat			Pangkalpinang			Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat berat	1 Tahun	366.880.000	403.568.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan			Pangkalpinang			Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	1 Tahun	38.650.000	42.515.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Irigasi dalam kondisi baik (%)				397.000.000	436.700.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pemberdayaan Petani Pemakai air			Bangka Belitung			Terlaksananya kebersihan jaringan irigasi dengan melibatkan P3A	4 Gapoktan	397.000.000	436.700.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
1	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih				1.070.840.000	1.177.924.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku						Sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan	2 Lokasi	1.070.840.000	1.177.924.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Embung, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%)				2.121.530.000	2.333.683.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	5000 m'	2.121.530.000	2.333.683.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%)				3.151.350.000	3.466.485.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pengembangan distribusi air minum			Bangka Belitung			Terlaksananya Pengembangan distribusi air minum	26500 m'	3.151.350.000	3.466.485.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Pengendalian Banjir	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase daerah rawan banjir (%)				25.267.780.000	27.794.558.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali			Bangka Belitung			Terlaksananya Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	15000 m'	23.781.340.000	26.159.474.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
1	Perencanaan Pengendalian Banjir			Bangka Belitung			Terlaksananya Perencanaan Pengendalian Banjir	15 Dokumen	1.486.440.000	1.635.084.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Program Perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaaan	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%)				2.893.610.000	3.182.971.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan			Bangka			Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	1200 m	2.893.610.000	3.182.971.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	PENATAAN RUANG								1.555.165.000	1.703.255.100		
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis provinsi	4 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi			1.183.845.000	1.302.229.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
					Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP	3 Dokumen KLHS RTR KSP						
1	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP			Bangka Belitung			Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP	3 Dokumen	706.550.000	777.205.000		PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			Bangka Belitung			Terlaksananya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	1 Dokumen	477.295.000	525.024.500		PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1.06.1.06.02.23	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap tataruang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	100%			371.320.000	401.025.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1.06.1.06.02.23.xxx	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang			Pangkalpinang			Rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	10 Kali rakor dan 5 Advice planning	371.320.000	401.025.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

Tabel V.4
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
5	TOTAL BELANJA								2.963.880.000	3.260.268.000		
5	BELANJA LANGSUNG								2.963.880.000	3.260.268.000		
1	URUSAN PERUMAHAN								2.963.880.000	3.260.268.000		
1	Program pengembangan perumahan	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pengembangan perumahan				2.963.880.000	3.260.268.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat			Bangka Belitung			Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	49 unit	2.963.880.000	3.260.268.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Tabel V.5
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									36.064.559.040	37.862.154.896		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									5.475.416.310	5.749.187.126	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									11.069.400.790	11.622.870.830	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat	
BELANJA LANGSUNG									19.519.741.940	20.490.096.941		
BELANJA RUTIN									2.013.300.080	2.214.630.088		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			1.362.980.080	1.499.278.088	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman	1 paket	12.500.000	13.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya Jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	12 bulan	145.000.080	159.500.088	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3.	Penyediaan Jasa Peralatan Kerja			Pangkalpinang			Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	37.400.000	41.140.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	82.610.000	90.871.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya operasional kebersihan kantor	12 bulan	45.000.000	49.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	65.800.000	72.380.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	50.000.000	55.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	25.000.000	27.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi	1 paket	43.480.000	47.828.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya bahan Logistik Kantor	1 paket	20.000.000	22.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 paket	42.900.000	47.190.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
12.	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	1 paket	300.000.000	330.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
13.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak	12 orang	343.290.000	377.619.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
14.	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	1 paket	150.000.000	165.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			361.720.000	397.892.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	120.000.000	132.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil, 10 unit motor	173.720.000	191.092.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 paket	34.000.000	37.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 paket	34.000.000	37.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedia			78.600.000	86.460.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis	meningkat	78.600.000	86.460.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				210.000.000	231.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1 kegiatan	Terlaksananya Rakor Perencanaan Badan Kesbangppol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44 orang	110.000.000	121.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Pengelolaan administrasi perencanaan urusan kesbangpol	Terlaksananya monev dan Evaluasi Program/Kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/Kota	100.000.000	110.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
BELANJA RUTIN									8.574.639.400	8.696.716.770		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			5.757.240.650	6.045.102.683		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
1	Penyediaan jasa surat menyurat			Pangkalpinang			tersedianya materi dan paket pengiriman	materai 6000=350 lembar, materi 3000=250 lembar, pengiriman barang/surat 1 paket	5.850.000	6.142.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik			Pangkalpinang			tersedianya belanja telpon, faximili, dan tv berbayar	12 bulan	12.600.000	13.230.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan			pangkalpinang			terbayarnya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	156.930.000	164.776.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Pangkalpinang			tersedianya peraltan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	11.710.200	12.295.710	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
5	Penyediaan alat tulis kantor			Pangkalpinang			tersedinya alat tulis kantor	12 bulan	104.428.500	109.649.925	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	cetak 1 paket dan belanja fotokopy 1 paket	27.999.950	29.399.948	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Pangkalpinang			tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	1 paket	10.000.000	10.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Pangkalpinang			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bel lonceng besar 5 unit, lampu lalin 120 unit, senter besar 10 unit, senter 10 unit, life jacket 100 buah, tabung pemadam kebakaran 7 unit, AC 3 unit, komputer PC 3 unit, laptop 3 unit, printer 3 unit, white board 17 unit, papan mading 2 unit, jam digital+bel 1 paket, TV 1 paket, proyektor + screen 1 paket	164.392.000	172.611.600	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pangkalpinang			tersedianya surat kabar lokal, nasional, publikasi media cetak, dan buku peraturan	surat kabar lokal + nasional selama 12 bulan, publikasi 2 kali, buku peraturan 1 paket	26.960.000	28.308.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
10	Penyediaan bahan logistik kantor			Pangkalpinang			tersedianya isi ulang tabung gas elpiji dan air minum galon	isi ulang elpiji tabung gas 12 kg dan 3 kg @ 12 kali, dan air galon selama 12 bulan	20.280.000	21.294.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
11	Penyediaan makanan dan minuman			Pangkalpinang			tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Satpol PP	makanan minum rapat 1 paket, dan makanan dan minuman tamu 1 paket	48.000.000	50.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Pangkalpinang			terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	250.000.000	262.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
13	Penyediaan jasa penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pangkalpinang			tersedianya honorarium/gaji dan tunjangan khusus pol pp	12 bulan untuk 120 orang	4.584.090.000	4.813.294.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
14	Koordinasi bidang tibumtranmas, dan penegakkan perda (Satpol PP)			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah	12 bulan	184.000.000	193.200.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
15	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya koordinasi dan konsolidasi di dalam daerah	12 bulan	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			637.600.000	669.480.000		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
1	Pengadaan meubelair			Pangkalpinang			tersedianya meubelair dan partisi ruangan	meja 1 biro= 5 unit, meja 1/2 biro= 10 unit, kursi kerja= 20 unit, kursi pimpinan 1 unit, kursi 1 biro= 6 unit, lemari besi 2pintu= 5 unit, filing cabinet= 6 unit, 1 paket partisi ruangan	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Pangkalpinang			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket selama 12 bulan	31.500.000	33.075.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Pangkalpinang			terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	jasa service, pergantian suku cadang, BBM, STTB, ban, dan accu untuk 12 motor dan 8 mobil	436.100.000	457.905.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Pangkalpinang			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.000.000	21.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	12 bulan			546.824.950	574.166.198		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Pangkalpinang			tersedianya PDH, PDL, dan jaket	masing-masing untuk 204 orang	355.150.000	372.907.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
2	Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Babel			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya razia kedisiplinan PNS dan non PNS	12 bulan	169.379.950	177.848.948	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
4	Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya pendisiplinan internal anggota Satpol PP	12 bulan dan 12 laporan	22.295.000	23.409.750	Baru	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74,70%			1.541.666.800	1.312.095.540		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
1	Pembinaan mental dan spritual			Pangkalpinang			terlaksananya pembinaan mental dan spritual	4 kali kegiatan	53.800.000	56.490.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Bimtek penyuluhan bagi Satpol PP se Kab/Kota se Provinsi Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya bimtek penyuluhan	1 kali kegiatan diikuti 40 orang	77.352.000	81.219.600	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
3	Pengiriman peserta diklat dan pendidikan PPNS peningkatan kompetensi aparatur			Indonesia			terlaksananya fasilitasi pengiriman peserta diklat	20 orang	239.280.000	251.244.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
4	Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol PP Prov. Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya instruktur upacara dan kesemaptaan	12 bulan	115.100.000	120.855.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
5	Pelatihan pengendalian massa/unjuk rasa			Pangkalpinang			terlaksananya pelatihan pengendalian massa/unjuk ras	1 kali kegiatan diikuti 60 orang	88.341.900	92.758.995	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
6	Bimtek PPNS penegak perda se Provinsi Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya bimtek PPNS penegak perda	1 kali kegiatan diikuti 40 orang	74.202.000	77.912.100	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
7	Latsar (Diklat Dasar) Pol PP			Pangkalpinang			terlaksananya diklat dasar pol pp 2 angkatan (pola 150 jam dan pola 50 jam)	1 kali pola 150 jam diikuti 80 orang, dan 1 kali pola 50 jam diikuti 12 orang pejabat eselon III	414.223.000	434.934.150	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
8	Pelatihan rutin kemampuan bela diri dan Senam anggota Satpol PP			Pangkalpinang			terlaksananya pelatihan kemampuan beladiri dan senam	12 bulan	166.939.900	175.286.895	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
9	Bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP Pemprov Kep. Babel TA. 2017			Pangkalpinang			terlaksananya bimtek penyusunan dan penilaian angka kredit Satpol PP	1 kali kegiatan diikuti 60 orang	20.376.000	21.394.800	Baru	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
12	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional tertentu satpol pp provinsi,Kabupaten/Kota			Pangkalpinang			Terlaksananannya uji kompetensi	200 peserta	292.052.000	306.654.600	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			91.307.000	95.872.350		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
1	Rapat koordinasi Satpol PP se Provinsi Kep. Babel dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya rakor Satpol PP dengan PPNS	1 kali kegiatan diikuti 70 orang	91.307.000	95.872.350	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
1	URUSAN WAJIB								8.931.802.460	9.578.750.083		
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terwujudnya Pemerintahan yang Demokratis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	100%			1.093.500.000	1.202.850.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan			pangkalpinang		100%	Terbentuknya Kepengurusan PPWK se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/Kota	300.000.000	330.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila			Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	jumlah masyarakat dan pemuda yang mengikuti Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	200 orang	310.000.000	341.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3	Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara			Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	Jumlah Generasi muda dan Pelajar yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara	50 Orang	58.500.000	64.350.000	lama	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4	Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan			7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	perseorangan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan desa/kel	70 orang	275.000.000	302.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5	Pelatihan Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan			pangkalpinang		100%	Tersedianya Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan	40 Orang	150.000.000	165.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terwujudnya Pemerintahan yang Demokrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik	1			471.500.000	518.650.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Verifikasi penyaluran bantuan keuangan Partai Politik			Pangkalpinang		100%	Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 (sebelas) Partai Politik	40.000.000	44.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Pelajar SLTA			7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	Jumlah pelajar yang telah mengikuti bimtek tentang pendidikan budaya politik	350 orang	300.000.000	330.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah			7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	terpantaunya perkembangan situasi politik dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan dan terselesaikannya masalah politik dan Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	131.500.000	144.650.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3	Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	terwujudnya Pemerintahan yang Demokrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%			175.000.000	192.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	peningkatan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia.			Pangkalpinang		100%	Tim Kelompok Kerja IDI	Hasil IDI 2015 dan 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	175.000.000	192.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Angka kriminalitas (menurun)	0,00207			600.000.000	660.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol			Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	Terlaksananya Fungsi Intelijen Kesbangpol	100%	300.000.000	330.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Penguatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		100%	Terlaksananya Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	100 Orang	300.000.000	330.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial lainnya	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terwujudnya Pemerintahan yang Demokratis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama, 2. terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi, 3. meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat	100%			220.000.000	242.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Penigkatan Fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama			Propinsi Kep. Bangka Belitung		100%	terfasilitasinya kegiatan FKUB	33 Orang	120.000.000	132.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Forum Koordinasi Peran Pemda dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah			Propinsi Kep. Bangka Belitung		100%	Terlaksananya Forum Koordinasi antar Pemda dan Ormas	50 Orang (Ormas dan aparatur)	100.000.000	110.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terwujudnya Pemerintahan yang Demokrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat				215.000.000	236.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Daerah			Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel		100%	Meningkatkan Wawasan Aparatur dalam menganalisa suatu bentuk potensi ancaman	100%	105.000.000	115.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Prov. Kep. Babel			Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	tersedianya data orang asing, lembaga asing dan tenaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40 orang	110.000.000	121.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7	Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tumbuhnya Rasa Solidaritas antar Sesama Umat dalam berkehidupan berbangsa	1			190.000.000	209.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Bangka Barat		100%	terlaksananya rapat kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/kota	190.000.000	209.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman				505.650.000	556.215.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman			Pangkalpinang		100%	Meningkatkan Wawasan Aparatur yang siap menghadapi segala potensi ancaman	40 Orang	115.650.000	127.215.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2	Simulasi Penanganan Konflik			Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	tersedianya Aparatur yang siap menghadapi konflik	100 Orang	190.000.000	209.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3	Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Kab/Kota Prov. Kep. Babel		100%	tersedianya Aparatur dan Masyarakat untuk mengatasi radikal terorisme	210 Orang	200.000.000	220.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terwujudnya Pemerintahan yang Demokratis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Menurunnya tingkat kenakalan remaja di Prov. Kep. Bangka Belitung	100%			216.500.000	238.150.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		100%	Jumlah masyarakat, ormas dan aparatur yang memahami tentang penyalahgunaan narkotika	200 Orang	216.500.000	238.150.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
10	Program Kemitraan Kamtibmas	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					320.000.000	352.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)			Provinsi Kep. Bangka Belitung		100%	Terwujudnya konsolidasi antara unsur pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan pemerintah daerah	40 Orang	120.000.000	132.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pemetaan Daerah Rawan Konflik			Provinsi Kep. Bangka Belitung		100%	tersedianya Peta Konflik	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
VI	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Angka kriminalitas (menurun)	0,00207			2.702.082.700	2.837.186.835		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
					Cakupan penegakkan perda	100%						
1	Pengamanan/pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya pengamanan/penga walan pimpinan daerah	12 bulan	266.440.000	279.762.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
2	Penertiban terhadap pelanggaran perda yang berdampak terhadap peningkatan PAD			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya penertiban terhadap pelanggaran perda	12 bulan dan 12 kali	64.150.000	67.357.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
3	Penyelidikan, Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perda di Provinsi Kep. Babel,			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya penindakan yustisi terhadap pelanggar perda	12 bulan atau 12 kali pemeriksaan, dan 3 kasus penyidikan	190.184.000	199.693.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
5	Penatakelolaan sekretariatan PPNS			Pangkalpinang			terlaksananya koordinasi PPNS se SKPD Pemprov Kep. Babel	12 kali atau 12 bulan	59.664.000	62.647.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
6	Patroli			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya patroli	12 bulan	60.000.000	63.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
7	Pengamanan unjuk rasa			Pangkalpinang			terlaksananya pengamanan unjuk rasa	12 bulan	136.584.750	143.413.988	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
8	Pengamanan aset Pemprov Kep. Babel			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya pengamanan aset pemprov kep. Babel	12 bulan	1.662.799.950	1.745.939.948	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
9	Penyelenggaraan koordinasi penyidikan, pemeriksaan, penertiban Satpol PP ke kab/kota			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan	12 bulan	37.700.000	39.585.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
10	Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum			Pangkalpinang			terlaksananya gelar pasukan	1 kali kegiatan	178.210.000	187.120.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
12	Tim pemantauan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017			Provinsi Kep. Babel			terlaksananya pemantauan Pilgub 2017	7 kali di 7 kab/kota	46.350.000	48.667.500	Baru	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3%			372.872.000	391.515.600		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Bimtek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang trantib swakarsa			Pangkalpinang			terlaksananya bimtek pemberdayaan satlinmas	1 kali diikuti 100 orang linmas	158.330.000	166.246.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
2	Pelatihan penanggulangan bencana banjir bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya penaggulangan bencana banjir bagi satlinmas	1 kali diikuti 100 orang linmas	107.451.000	112.823.550	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
3	Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran bagi Satlinmas se Provinsi Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya penaggulangan bencana kebakaran bagi satlinmas	1 kali diikuti 50 orang linmas	107.091.000	112.445.550	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
VIII	Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Peningkatan Manajemen Manajemen dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12 bulan (204 orang)			1.746.737.760	1.834.074.648		PD yang melaksanakan perlindungan masyarakat
1	Pengadaan makanan tambahan bagi anggota Satpol PP			Pangkalpinang			tersedianya makanan tambahan	12 bulan untuk 204 orang	1.746.737.760	1.834.074.648	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan perlindungan
1.20.03.097	Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah	100%			102.960.000	108.108.000		PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1.20.03.097.01 00	Koordinasi penyelenggaraan pilgub 2017	ah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	7 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur.	7 Kabupaten/Kota	102.960.000	108.108.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

Tabel V.6
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									43.444.361.930	45.224.280.977		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									11.561.116.560	12.139.172.388		PD yang melaksanakan urusan sosial
BELANJA TIDAK LANGSUNG									5.345.709.320	5.612.994.786		PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
030	BELANJA LANGSUNG								26.537.536.050	27.472.113.803		
URUSAN SOSIAL												
030	BELANAJA RUTIN								5.667.879.750	5.547.800.738		
1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel, dan Efisien		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			2.930.619.750	3.077.150.738	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman	3500 materai/benda pos lainnya dan 150 kali jasa pengiriman	24.000.000	25.200.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Tersedianya biaya dan jasa penggunaan listrik/telekomunikasi/infor masi kantor	12 bulan	205.160.000	215.418.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			Pangkalpinang			Keterlaksanannya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	18 roda 4 dan 13 roda 2	791.440.000	831.012.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/administr asi kantor	14 orang	201.900.000	211.995.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Operasional Kebersihandan keindahan Kantor	12 bulan	44.840.000	47.082.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	140.000.000	147.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Terlaksananya kegiatan pencetakan dan Penggandaan bahan/laporan	12 bulan	37.499.750	39.374.738	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.13.01.12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan Listrik	12 bulan	27.000.000	28.350.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi	12 bulan	30.000.000	31.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan kebutuhan logistik kantor	12 bulan	12.180.000	12.789.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Terlaksanya pengadaan kebutuhan Makanan dan Minuman rapat / tamu	12 bulan	30.000.000	31.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Daerah			Terlaksananya Perjalanan dinas Luar daerah	12 bulan	350.000.000	367.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.19	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Terpenuhinya kebutuhan tenaga honorer dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kantor	28 Orang	886.600.000	930.930.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.01.80	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Dalam Daerah			7 Kabupaten/Kota			Tercapainya koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial kabupaten/kota	12 Bulan	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel, dan Efesien		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.141.850.000	1.198.942.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Peralatan komputasi dan peralatan kantor lainnya	46 unit	172.000.000	180.600.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.02.10	Pengadaan Meubelair			Pangkalpinang			Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas	1 Paket	97.550.000	102.427.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Optimalnya Perawatan Perlengkapan Gedung /Kantor	12 Bulan	37.300.000	39.165.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Optimalnya Perawatan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	40.000.000	42.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.13.02.	Pengadaan Tempat Parkir			Pangkalpinang			Tersedianya tempat parkir kendaraan yang memadai	8 mobil dan 20 motor	150.000.000	157.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.02.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan			Pangkalpinang			Optimalnya Perawatan peralatan khusus lapangan dan kesiapsiagaan petugas Penanggulangan Bencana	12 Bulan	495.000.000	519.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel, dan Efisien		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Pegawai	100%			383.500.000	402.675.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pakaian kerja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	303 Stel	64.600.000	67.830.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.03.26	Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos			Luar dan Dalam Daerah			Tersedianya anggaran kontribusi dan pengiriman aparatur mengikuti berbagai kepentingan dinas	15 orang	125.000.000	131.250.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.03.85	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir, dan Halaman Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Perawatan Tempat Parkir Mobil kantor/ Motor Pegawai dan keindahan taman halaman kantor	kantor dinas kesejahteraan sosial	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.03.27	Pengelolaan Arsip Kantor			Pangkalpinang			Terkelolanya arsip kantor dengan baik	1 kantor	93.900.000	98.595.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.06.1.06.02.06 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	134.242.500		PD yang melaksanakan urusan sosial
1.06.1.06.02.06 .0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750		PD yang melaksanakan urusan sosial
1.06.1.06.02.06 .0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	134.242.500		PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.13.07	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan		Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial	80%			839.445.000	734.790.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.07.04	Penyuluhan Sosial			Desa ADES			Terlaksananya berbagai program pembangunan bidang kesos di berbagai lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial	20 desa	149.800.000	157.290.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
								6 kabupaten/1 kota				
								420 orang				
1.13.07.05	Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos			Kabupaten/Kota			Jumlah PMKS dan PSKS yang terintegrasi melalui sistem informasi PMKS	26 PMKS dan 12 PSKS	139.645.000		Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.07.06	Pemetaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Adopsi Desa Sosial/ADES)			Desa			Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES)	20 desa	400.000.000	420.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.27.07	Pendampingan dan penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)			Kabupaten/Kota			Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggaknya	1115 debitur	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
BELANJA RUTIN									2.821.650.000	2.973.906.450		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			1.603.780.000	1.683.969.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya Perangko, materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman	1 paket	10.000.000	10.500.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	92.880.000	97.524.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	136.680.000	143.514.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksanya Operasional Kebersihan Kantor	12 Bulan	23.000.000	24.150.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 paket	56.000.000	58.800.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya Barang Fcetakan Dan Penggandaan	1 paket	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Daya Listrik dan Peralatan Listrik	1 paket	6.000.000	6.300.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Tersedianya Surat Kabar, Majalah sebagai Sarana Informasi	12 Bulan	18.000.000	18.900.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 paket	17.000.000	17.850.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya Makan dan Minum Rapat	1 paket	39.220.000	41.181.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan
11	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Pangkalpinang			Terlaksanya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 paket	300.000.000	315.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Terbayarnya Tenaga Honoror dan Kontrak	62 orang (6 pegawai wanita dan 56 pegawai pria)	715.000.000	750.750.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
13	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah			Pangkalpinang			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 paket	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			799.605.000	839.585.250	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	1 paket	143.700.000	150.885.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 paket	46.000.000	48.300.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	54.000.000	56.700.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional	33 unit	555.905.000	583.700.250	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Pangkalpinang	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur pegawai	100%			45.800.000	48.090.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
18	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja beserta Perlengkapannya			Pangkalpinang			Tersedianya Pakaian Dinas/Pakaian Kerja beserta Perlengkapannya	1 paket	45.800.000	48.090.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
1.06.1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	402.262.200		PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.06.0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200	Baru	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000	Baru	PD Kesekretariatan Penanggulangan Bencana
URUSAN WAJIB									9.296.762.500	9.761.600.625		
1.13.26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	2785 Orang			1.691.339.500	1.775.906.475	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
					Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	25%						
1.13.26.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam		Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan	7 KabKota (KSB Pangkalpinang)			Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan	1 lokasi	382.850.000	401.992.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah SDM (relawan bencana) yang memperoleh pelatihan dan pembekalan dalam melakukan pendampingan sosial	30 orang				
							Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam	50 KK				
1.13.26.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial		Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan	7 Kab/Kota			Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial	100 KK	283.700.000	297.885.000		PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial					
							Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial	10 lokasi				
1.13.26.03	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	7 Kab/Kota			Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial	25 orang	199.999.800	209.999.790	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)					
							Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis	25 orang				
1.13.26.04	Jaminan Kesejahteraan Sosial		Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	7 kab/kota			Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial	3.150 orang	395.560.000	415.338.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola / pelaksana program askessos					
							Bantuan iuran peserta askessos	7 lembaga				
1.13.26.06	Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH)		Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	7 Kab/Kota			Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH baik provinsi dan kabupaten/kota dalam memfasilitasi program PKH	7 kabupaten/kota	429.229.700	450.691.185	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.27	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan				Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	2450 Orang			4.826.435.000	5.067.756.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.27.01	Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkalpinang			Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	1500 KK	2.500.000.000	2.625.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelatihan dan keterampilan teknis berusaha	250 KK				
							Jumlah pendamping sosial yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis	60 orang				
1.13.27.03	Pemberdayaan Warga Purna Bina Sosial	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat			Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) purna bina yang memperoleh bantuan usaha dan pembinaan sosial	70 KK	349.000.000	366.450.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu	4 paket				
1.13.27.04	Pemberdayaan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	7 kab/kota			Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	200 Keluarga	299.935.000	314.931.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelatihan/pembekala n dan bimbingan teknis usaha					
				7 kab/kota				7 LK3				
1.13.27.05	Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan	Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses	Kabupaten/Kota			Jumlah TMP yang dapat dipelihara dengan baik	25 orang	936.100.000	982.905.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
				Bangka Tengah			Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya	1 TMPN				
							Tersantunnya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan					
1.13.27.06	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan	Bakti Sosial KT (Belitung)			Jumlah Orsos yang dapat dibina dan diberdayakan	9 Orsos	491.400.000	515.970.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan	42 PSM				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Seluruh kabupaten/kota			Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	43 KT				
							Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR	10 dunia usaha				
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif	47 TKSK				
1.13.27.07	Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Pangkalpinang dan Luar Daerah			Jumlah kepesertaan yang terlibat dalam peringatan hari pahlawan dan hari HKSN	200 orang	250.000.000	262.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.28	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja		Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1475 Orang			2.635.888.000	2.767.682.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.28.01	Pelayanan Sosial Lanjut Usia			7 Kab./Kota			Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan bantuan stimulan/santunan sosial	500 orang	492.800.000	517.440.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah lembaga pelayanan lanjut usia yang dapat dibina dan dikembangkan	2 lembaga				
1.13.28.02	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak			Kabupaten/Kota			Jumlah pelayanan dan bantuan sosial yang diberikan kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	215 anak	438.758.000	460.695.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diberdayakan	7 LKSA				
1.13.28.03	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA			Kabupaten/Kota			Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	100 orang	250.000.000	262.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis usaha					
1.13.28.04	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina	40 orang	550.000.000	577.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.28.05	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan	5 paket	279.435.000	293.406.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.28.06	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan			7 Kab/Kota			Jumlah orang dengan kecacatan yang memperoleh pelayanan, rehabilitasi & perlindungan sosial	600 orang	496.320.000	521.136.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
							Jumlah tenaga pendampingan sosial yang memperoleh pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis	20 orang				
1.13.28.07	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			7 Kab/Kota			Jumlah penyandang tuna sosial yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa bantuan usaha dan bimbingan teknis usaha	40 orang	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.28.08	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja	30 orang	28.575.000	30.003.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.29	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja		Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20%			113.100.000	118.755.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.29.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina	40 orang	113.100.000	118.755.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.13.30	Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja		Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia	20%			30.000.000	31.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
1.13.30.01	Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial			Provinsi Kep. Bangka Belitung /Luar daerah			Jumlah klien yang dapat dipulangkan	20 orang	30.000.000	31.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan sosial
URUSAN WAJIB									8.751.243.800	9.188.805.990		
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	100%			710.150.000	745.657.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
24	Mitigasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan	7 Kab/Kota			Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan	700 Orang	440.660.000	462.693.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan sosial
28	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Data Base Peta Potensi Bencana Di Kab/Kota Prov.Kep. Bangka Belitung.		Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Babel			Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana	7 Dokumen dan peta Kab/Kota	269.490.000	282.964.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan sosial
	Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			Persentase ketersediaan Logistik dan Peralatan terhadap kejadian Bencana.	100%			4.441.094.000	4.663.148.700	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
29	Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Prov. Kep. Bangka Belitung			Tersedianya buffer stock logistik penanggulangan bencana untuk korban bencana	80%	250.000.000	262.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
30	Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang			Terbiayainya pengadaan peralatan penunjang bencana alam	80%	980.050.000	1.029.052.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
31	Pemeliharaan / Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang			Tersedianya tempat penyimpanan logistik dan peralatan serta terawatnya logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana	100%	211.000.000	221.550.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
32	Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang			Terlaksananya operasional kegiatan Posko TRC BPBD	12 Bln	2.146.880.000	2.254.224.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
33	Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang dan Bangka Tengah			Terlaksananya pelatihan penguatan TRC BPBD	4 Kegiatan	158.652.000	166.584.600		PD yang melaksanakan urusan sosial
34	Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang			Terlaksananya penyediaan perlengkapan tanggap darurat TRC	55 Orang	193.097.000	202.751.850		PD yang melaksanakan urusan sosial
35	Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang dan Jakarta			Tersedianya logistik serta diterimanya bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana dari BNPB/Pusat	100%	131.200.000	137.760.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
36	Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat BPBD		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang dan Bangka Tengah			Terlaksananya peningkatan kualitas SDM TRC BPBD	2 Kegiatan	214.215.000	224.925.750		PD yang melaksanakan urusan sosial
37	Pengerahan dan Mobilisasi TRC Dalam Tanggap Darurat		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pengerahan dan mobilisasi TRC pada masa tanggap darurat bencana	12 Bln	156.000.000	163.800.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			Persentase daerah rawan bencana yang diintervensi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	50%			3.599.999.800	3.779.999.790	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	Pengembangan Jembatan Portable			Prov. Kep. Bangka Belitung					3.599.999.800	3.779.999.790	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
	3.1. Jembatan Portable Bailey						jembatan portable bailey	3 unit untuk P.Bangka & 2 unit untuk P.Belitung	3.600.000.000	3.780.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan sosial
	3.2. Jembatan Portable Besi Siku						jembatan portable besi siku	1 unit	-	-		PD yang melaksanakan urusan sosial
	3.3. Penunjang jembatan portable dan logistik						1. truck bak terbuka/dump truck	1 unit	-	-		
							2. Excavator PC100	1 unit	-	-		
							3.Mobil Operasional RR	2 unit	-	-		
							4. Equipment safty	1 Paket	-	-		
							5. Equipment alat angkat	1 Paket	-	-		
							5. Equipment alat angkat	1 Paket	-	-		
							7. Equipment install	1 Paket	-	-		
							8. Peralatan Penunjang lainnya	1 Paket	-	-		
39	Pelatihan dan pengerahan Install dan bongkar Jembatan Portable		Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Prov. Kep. Bangka Belitung			pemasangan jembatan portabel bailey dengan cepat	30 orang	-	-		PD yang melaksanakan urusan sosial
							pemasangan jembatan portabel besi siku dengan cepat	17 orang	-	-		
40	Peningkatan kapasitas aparatur Penanggulangan Bencana Pasca Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota			Prov. Kep. Bangka Belitung				50 Orang	-	-		PD yang melaksanakan urusan sosial
41	Pengadaan Peralatan Survey Daerah Pasca Bencana (Drone, Kamera Foto, Kamera Video, GPS, Personal Computer, UPS, HDD Eksternal, Handy Talky, Alat Komunikasi dan Senter)		Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Prov. Kep. Bangka Belitung				1 Paket	-	-		PD yang melaksanakan urusan sosial

Tabel V.7
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Tenaga Kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	TOTAL BELANJA								29.551.331.100	29.859.695.985		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG								15.762.254.200	16.550.366.910		
	BELANJA LANGSUNG								13.789.076.900	13.309.329.075		
	URUSAN KETENAGAKERJAAN								13.789.076.900	13.309.329.075		
2	BELANJA RUTIN								7.315.819.000	6.486.289.950		
2.1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			4.749.209.000	4.441.882.200	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BLKI			UPTD BLKI			Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BLKI	12 Bulan	595.130.000	624.886.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Hyperkes			UPTD Hyperkes			Terlaksananya operasional perkantoran UPTD Hyperkes	12 Bulan	118.970.000	124.918.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BPPD			UPTD			Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BPPD	12 bulan	89.890.000	94.384.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			Disnakertrans			Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	41.941.000	44.038.050	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi			Disnakertrans			Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Non PNS	12 bulan	1.773.290.000	1.861.954.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik			Disnakertrans			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	168.000.000	176.400.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Disnakertrans			tersedianya surat kabar, majalah dan buku bacaan sebagai sarana	12 bulan	35.405.000	37.175.250	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor			Disnakertrans			Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	12 bulan	67.382.000	70.751.100	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Disnakertrans			Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000	15.750.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Disnakertrans			Tersedianya ATK	12 bulan	174.400.000	183.120.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Disnakertrans			jumlah materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan	700 lembar materai, 30 buku cek dan belanja jasa pengiriman	15.500.000	16.275.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			Luar Daerah			Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	600.000.000	630.000.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Disnakertrans			Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	19.740.000	20.727.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat			Disnakertrans			Tersedianya makan dan minum tamu	12 bulan	60.000.000	63.000.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penilaian Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Provinsi			Disnakertrans			terlaksananya pelayanan teknis dan administrasi TPAK fungsional di bidang Ketenagakerjaan	12 bulan	70.925.000	74.471.250	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor			Disnakertrans			Terlaksananya operasional kebersihan kantor	12 bulan	44.791.000	47.030.550	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah			Disnakertrans			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	340.000.000	357.000.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Disnakertrans			Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	244.260.000	256.473.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pameran Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian						Terlaksananya kegiatan pameran	100%	274.585.000	288.314.250	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.264.230.000	1.327.441.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Rehab Gedung Kantor UPTD Hyperkes			Disnakertrans			Terlaksananya rehab gedung kantor	100%	459.105.000	482.060.250	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Disnakertrans			Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	245.900.000	258.195.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor			Disnakertrans			terlaksananya perawatan/Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	200.000.000	210.000.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Disnakertrans			Terlaksananya pengadaan sarana Pengadaan perlengkapan kantor	12 Bulan	359.225.000	377.186.250	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			460.060.000	483.063.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Aparatur			Bangka Belitung			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	12 Bulan	460.060.000	483.063.000	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase peningkatan disiplin aparatur Pegawai	100%			90.575.000	95.103.750	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pengadaan Pakaian dinas dan Atribut			Bangka Belitung			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atribut	153 PNS	90.575.000	95.103.750	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
2.5	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Bangka Belitung	Persentase kesesuaian antar perencanaan dan penganggaran	80%			379.280.000	138.799.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Meningkatnya	Bangka Belitung			Terlaksananya penyusunan dokumen PTK	35 Buku	132.190.000	138.799.500	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Sosialisasi Database Ketenagakerjaan		Terciptanya sistem pelaporan dan capaian kinerja	Bangka Belitung			Terlaksananya kegiatan sosialisai database ketenagakerjaan	30 Buku	117.090.000	122.944.500	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Bangka Belitung			Terlaksananya Dokumentasi dan Publikasi SKPD	Media Cetak, Elektronik Lokal & Nasional	130.000.000	136.500.000	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
1.06.1.06.02.06 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	138.078.000		PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
1.06.1.06.02.06 .0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200		PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
1.06.1.06.02.06 .0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000		PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	URUSAN WAJIB								6.473.257.900	6.823.039.125		
	URUSAN KETENAGAKERJAAN								6.473.257.900	6.823.039.125		
3.1	Program Pengembangan HI dan Jamsostek	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	70%			870.611.000	940.259.880	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
					Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (Output)	60%						
	Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan			Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan	100%	322.441.000	348.236.280	sedang berjalan	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja
	Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK			Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK	100%	548.170.000	592.023.600	Lanjutan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
3.3	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%			4.015.112.900	4.215.868.545	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
					Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							
					Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0%						
					Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25%						
					Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25%						
	Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Produktif		Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka	Prov. Kep. Bangka belitung			Terlaksananya pelatihan motivasi kewirausahaan	50 Orang	277.010.000	290.860.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sertifikasi Tenaga Kerja		Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka	Prov. Kep. Bangka Belitung			Pengakuan Atas kompetensi yang dimiliki	128 orang	279.575.000	293.553.750	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Sosialisasi Pemagangan		Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran	Prov. Kep. Bangka Belitung			Pemahaman perusahaan dan masyarakat tentang manfaat pemagangan	60 Orang	55.185.000	57.944.250	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja		Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran	Prov. Kep. Bangka Belitung			Pemahaman calon tenaga kerja dan pengguna Tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi	120 orang	80.810.000	84.850.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya sosialisasi pemahaman sistem akreditasi Lembaga pelatihan kerja (LPK)	0%	79.505.000	83.480.250	baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pembinaan Desa Produktif		Terciptanya Tenaga kerja yang siap pakai	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Pelatihan tenaga kerja pedesaan Berbasis masyarakat	140 Orang	370.165.000	388.673.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota		Terciptanya Tenaga kerja yang siap pakai	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan mampu serta handal	22 pkt/ 12 bulan	2.500.612.900	2.625.643.545	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pelatihan Kewirausahaan Produktif		Terciptanya Tenaga kerja yang siap pakai	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pelatihan Wirausaha Produktif	80 Orang	372.250.000	390.862.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
3.4	Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prosentase pemeriksaan perusahaan	30%			931.316.000	977.881.800	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
					Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output)	45%						
	Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			Bangka Belitung			Terlaksananya apel hari K3 Nasional	0%	149.350.000	156.817.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS			Bangka Belitung			Terlaksananya pemeriksaan peserta BPJS Ketenagakerjaan	86 Perusahaan	121.330.000	127.396.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan			Bangka Belitung			Terlaksananya pengujian peralatan kerja di tempat kerja	12 alat	168.430.000	176.851.500	Lanjutan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pengujian Lingkungan Kerja (UPTD Hyperkes)			Bangka Belitung			Terlaksananya Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja	14 Perusahaan 7 Kab/Kota	81.968.000	86.066.400	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja (UPTD Hyperkes)			Bangka Belitung			Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja	175 Tenaga Kerja di perusahaan	91.800.000	96.390.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja
	Pemantauan Faktor risiko lingkungan kerja (UPTD Hyperkes)			Bangka Belitung			Terlaksananya pemantauan resiko lingkungan kerja	7 Perusahaan di 7 Kab/Kota	81.968.000	86.066.400	sedang berjalan	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja
	Pemeriksaan cholinestrase pada tenaga kerja penyemprot Pestisida(UPTD Hyperkes)			Bangka Belitung			Terdeketesinya cholinestrase pada darah tenaga kerja	120 Tenaga Kerja di 6 kabupaten	109.350.000	114.817.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja
	Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja sektor UMKM (UPTD Hyperkes)			Bangka Belitung			Terciptanya tenaga kerja yang sehat dan produktif dan terciptanya Lingkungan kerja yang sehat dan kondusif di UMKM/Perusahaan	140 Tenaga Kerja dan 14 UMKM	127.120.000	133.476.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja
3.5	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	50%			656.218.000	689.028.900	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
	Pemberdayaan Tenaga kerja Disabilitas		Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Pemberdayaan Disabilitas	30 orang	351.930.000	369.526.500	baru	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui terapan teknologi tepat guna		Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Pelatihan Penerapan TTG	90 orang	127.432.500	133.804.125	sedang berjalan	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja
	Pelayanan kesempatan kerja melalui kios 3 in 1		Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan dan akuntabel	UPTD BLKI			Terlaksananya operasional pelayanan kios 3 in 1	0%	176.855.500	185.698.275	sedang berjalan	PD yang melaksanakan uruasan tenaga kerja

Tabel V.8
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									11.018.489.470	11.316.403.694		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									6.097.379.470	6.402.248.444		
BELANJA LANGSUNG									4.921.110.000	4.914.155.250		
BELANJA RUTIN									1.997.660.000	1.844.532.750		
1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			1.332.605.000	1.399.235.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.01.010	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			1. Belanja Materai	1450 Lembar	6.000.000	6.300.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	0						2. Belanja Paket Pengiriman	1 Paket				
1.11.01.01.020	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya			Pangkalpinang			1. Belanja Telepon	12 Bulan	15.600.000	16.380.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	0						2. Belanja Internet					
1.11.01.01.070	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	143.280.000	150.444.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	0											
1.11.01.01.080	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Belanja Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	24.000.000	25.200.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	0											
1.11.01.01.090	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pangkalpinang			Service Mesin Tik, Komputer, Mesin Fotocopy dan Laptop	1 Paket	27.025.000	28.376.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	0											
1.11.01.01.100	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Belanja Alat Tulis Kantor	1 Paket	60.200.000	63.210.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	0											

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.01.01.110	Penyediaan Barang Cetakan dan 0 Penggandaan			Pangkalpinang			Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	32.980.000	34.629.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.01.130	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 0 Kantor			Pangkalpinang			Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	155.800.000	163.590.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.01.150	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0 Perundang-undangan			Pangkalpinang			Belanja Surat Kabar dan Lainnya	1 Paket	14.520.000	15.246.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.01.170	Penyediaan Makanan dan Minuman 0			Pangkalpinang			Belanja Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat	1 Paket	60.000.000	63.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.01.180	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 0 Luar Daerah			Luar Daereah			Belanja Perjalanan dinas	1 Paket	300.000.000	315.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.01.190	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan 0 Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Belanja Honorarium Tenaga Kontrak	13 Bulan	343.200.000	360.360.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.01.880	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah 0			7 Kab/Kota			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Paket	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			133.340.000	140.007.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.02.210	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0			Pangkalpinang			Belanja telepon, listrik dan internet rumah dinas	12 Bulan	12.000.000	12.600.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.01.02.240	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 0 Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			1. Kend. Roda 4 2. Kend. Roda 2	2 Unit 6 Unit	121.340.000	127.407.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			26.300.000	27.615.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.03.020	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 0 Perlengkapannya			Pangkalpinang			Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	54 Paket	26.300.000	27.615.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			76.000.000	79.800.000	Sedang berjalan	Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
1.11.01.05.030	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 0 Perundang-undangan			Pangkalpinang			Peserta Bimbingan Teknis	10 Orang	76.000.000	79.800.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.06.1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	138.078.000		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.06.1.06.02.06.0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200	baru	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000	baru	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.07	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan		Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%			56.950.000	59.797.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.01.07.910	Pengembangan Sistem Informasi 0 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui Website	144	56.950.000	59.797.500		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
URUSAN WAJIB									2.923.450.000	3.069.622.500		
1.11.01.20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	55,81% (24 dari 43 SKPD)			372.253.000	390.865.650	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
					Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	23,3% (10 dari 43 SKPD) & 7 Instansi Vertikal						
					Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender							
1.11.01.20.010	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan 0 Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung	Prov. Kep. Bangka Belitung			Jumlah Peserta Rakor	100 Orang	76.332.000	80.148.600		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.20.020	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan 0 Anak		Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung	Prov. Kep. Bangka Belitung			Tersusunnya Buku Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	120 Buku	139.031.000	145.982.550		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.20.040	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE 0 tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi institusi media massa		Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi mengenai peranan LSM dan Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan di Prov. Kep. Bangka Belitung	60 Org	84.260.000	88.473.000		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.20.050	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 0 dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan	Prov. Kep. Bangka Belitung			Jumlah peserta pertemuan yang paham tentang kapasitas lembaga masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	40 Org	72.630.000	76.261.500		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.01.22	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit	100%			1.034.060.000	1.085.763.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
					Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100%						
					Persentase Data terpilah terkait kesejahteraan anak	100%						
					Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)						
					Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional	15,58% (12 dari 77 Anak)						
1.11.01.22.010	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan	Pangkalpinang, Daerah Asal Korban			Jumlah Penanganan korban kekerasan dan korban perdagangan orang	5 Kasus	224.850.000	236.092.500		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.22.030	Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung	Pangkalpinang, Daerah Asal Korban			Jumlah Buku profil Kesejahteraan Perlindungan anak Prov. Kep. Bangka Belitung	50 Buku	59.800.000	62.790.000		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.22.040	Pembinaan Partisipasi Hak Anak		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan	Prov. Kep. Bangka Belitung			1. Peserta Forum Anak daerah tingkat provinsi	77 Orang	224.600.000	235.830.000		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
							2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia	12 Orang				
1.11.01.22.110	Workshop Kebijakan Kab/Kota Layak Anak		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pemerintah	Pangkalpinang			Jumlah peserta workshop dan fasilitasi kebijakan Kab/Kota Layak Anak	40 Orang	75.000.000	78.750.000		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.01.22.130	Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan dan Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pemerintah	7 Kab/Kota			Jumlah Peserta sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PkDRT) dan UU Perlindungan Anak	280 Orang	146.070.000	153.373.500		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.22.170	Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan dan Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pemerintah	7 Kab/Kota			Kelancaran Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 Kegiatan	303.740.000	318.927.000		PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.01.21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapat peningkatan ekonomi keluarga	100%			1.517.137.000	1.592.993.850	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
					Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	14,56% (45 Klmp dari 309 Klmp)						
					Persentase Kelompok Usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	30,30%						
					Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	37,00%						
					Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37,00%						
1.11.01.21.010	Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA		Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Pangkalpinang			Jumlah Peserta	40 Orang	69.890.000	73.384.500		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.01.21.030 0	Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia		Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	7 Kab/Kota			Terlaksananya seleksi nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia	7 Kategori	283.097.000	297.251.850		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.11.01.21.050 0	Pameran Hasil Karya Perempuan		Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	Lokasi Pameran			Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pameran Hasil Karya Perempuan	7 Kab/Kota	223.586.000	234.765.300		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.11.01.21.090 0	Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung		Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung	12 Bulan	522.055.000	548.157.750		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.11.01.21.170 0	Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan		Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	Pangkalpinang			Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	180 Orang	288.196.000	302.605.800		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.11.01.21.180 0	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup Perempuan		Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja	Pangkalpinang			Terbentuknya Forum PKHP Prov. Kep. Babel	1 Forum	130.313.000	136.828.650		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
							Kebijakan bidang PKHP	1 Dokumen				
							Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1 Dokumen				

Tabel V.9
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									11.279.949.315	11.428.078.531		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									5.011.385.315	5.261.954.581		
BELANJA LANGSUNG									6.268.564.000	6.166.123.950		
URUSAN KETAHANAN PANGAN												
BELANJA RUTIN									2.472.134.850	2.179.873.343		
1.21.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			1.336.609.850	1.403.440.343	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.010 0	Penyediaan jasa surat menyurat			Pangkalpinang			Terlaksananya Pelayanan dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos	1 Tahun	15.000.000	15.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.030 0	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pangkalpinang			Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Tahun	114.270.000	119.983.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.040 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumder Daya Air dan listrik			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi berupa jaringan Telepon dan Internet, Penyediaan Sumber Daya Air Bersih Kantor dan Penambahan Beban Daya Listrik Kantor	1 Tahun	75.000.000	78.750.000		PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.080 0	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Pangkalpinang			Tersediannya Peralatan Kebersihan Kantor, Terlaksananya Kebersihan Ruangan Kerja dan Lingkungan Kantor	1 Tahun	50.000.000	52.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.090 0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Pangkalpinang			Terlaksanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor beupa Perbaikan AC, Komputer, Laptp, Telepon, dan Instalasi Air/Ledeng	1 Tahun	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.21.02.01.1000	Penyediaan alat tulis kantor			Pangkalpinang			Tersedianya alat tulis kantor berupa Kertas HVS, Amplop, Map, Toner Printer, Pensi, Binder, dan ATK Lainnya	1 Tahun	68.600.000	72.030.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.1100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya Blanko, Kop Surat, Amplop, Lembaran Disposisi Surat, Buku Ekspedisi Surat, Buku Memo, Buku Surat Masuk/Keluar dan Bahan Cetakan/Perbanyakan Naskah Kantor	1 Tahun	99.999.850	104.999.843	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.1200	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik seperti Pembuatan Jaringan/Terminal Kabel Listrik disetian Ruangan Kerja Kantor, Lampu Penerangan Bangunan Kantor dan Lingkungan/ Halaman Perkantoran	1 Tahun	45.000.000	47.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.1500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan bahan Bacaan seperti Koran/Surat Kabar, Majalah dan Buku-buku Pertanian	1 Tahun	20.000.000	21.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.1700	Penyediaan makanan dan minuman			Pangkalpinang			Tersedianya Makan Minum Rapat baik Makan Minum Rapat Intern maupun Makan Minum Tamu	1 Tahun	60.000.000	63.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.01.01.1800	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Pangkalpinang			Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Undangan Rapat ke Luar Daerah	1 Tahun	341.340.000	358.407.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.01.8800	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah			Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsolidasi Pembangunan Ketahanan Pangan ke Kab/Kota	7 Kab/Kota	150.000.000	157.500.000		PD yang melaksanakan urusan pangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.21.02.01.1900	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran			Pangkalpinang			Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Pengamanan Lingkungan Perkantoran	13 bulan	257.400.000	270.270.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			622.880.000	654.024.000	Sedang Berjalan	Badan Ketahanan Pangan
1.21.02.02.1300	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	148.600.000	156.030.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.02.2400	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Badan Ketahanan Pangan	12 Bulan	234.280.000	245.994.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Rehabilitasi Sedang atau Berat Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya Perawatan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan	12 Bulan	200.000.000	210.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya sarana dan prasarna kerja perkantoran	1 Paket	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			116.580.000	122.409.000		PD yang melaksanakan urusan pangan
	Peningkatan dan pelatihan formal						Jumlah Pendidikan dan Pelatihan BKP	15 PNS	116.580.000	122.409.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21.02.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%			23.600.000	24.780.000		PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pengadaan Pakaian Dinas						Tersedianya Pakaian Adat Daerah Seluruh Pegawai BKP	49 Orang (40 Orang PNS, 9 Honorer)	23.600.000	24.780.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
1.21	URUSAN WAJIB								3.796.429.150	3.986.250.608		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%)	35%			3.796.429.150	3.986.250.608		PD yang melaksanakan urusan pangan
					Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang	35%						
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000 KG	580.745.000	609.782.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	3 Kab yaitu Bangka Barat, bangka tengah dan Belitung Timur			Terlaksanya peningkatan) Meningkatnya modal, tabungan masyarakat, dan jaringan pemasaran; b) Perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas Pangan; c) Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan; dan d) Meningkatnya layanan kesehatan dan gizi masyarakat	90 desa mandiri pangan (reguler dan kepulauan)	617.225.000	648.086.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pengembangan Pangan Lokal	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	4 Kab/Kota			TerOptimalisasinya Pekarangan Kelompok dan terdistribusinya alat peniris minyak	10 kelompok wanita dan 3 unit alat peniris minyak	375.000.000	393.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	2 Kab yaitu Bangka Barat, Bangka Selatan			terlaksananya bantuan ayam sebagai sumber pangan hewani di 2 kelompok masyarakat	2 kab	103.400.000	108.570.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	7 Kab/Kota			1)Terlaksananya penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan Sistem Kerawanan pangan dan Gizi (SKPG) serta tersalurkannya bantuan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung 2) Tersalurkannya bantuan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung	7 Kab/Kota	240.110.000	252.115.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Belinyu, Payung, Jebus dan Pangkalpinang			Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok di Belinyu, Payung, Jebus dan Pangkalpinang	4 lokasi (Belinyu, Payung dan Pangkalpinang	132.310.000	138.925.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat			Terlaksananya sosialisasi dan analisis pangan penduduk pada desa rawan pangan	2 desa di kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat	96.585.000	101.414.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	7 Kab/Kota			Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan	10 buku	90.570.000	95.098.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	5 Kab yaitu Basel, Bateng, Bangka Induk, Babar dan Belitung			Terlaksananya Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	23 kelompok lumbung pangan	119.495.000	125.469.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya pengujian pangan segar yang aman di konsumsi	1 tahun	183.760.000	192.948.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplly pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	7 Kab/Kota			Terlaksananya survey pola konsumsi RT	189 desa	215.722.500	226.508.625	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pangkalpinang			Jumlah event koordinasi Dewan Ketahan Pangan	1 kali rakor DKP dan 3 kali rapat pokja	111.215.000	116.775.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pangkalpinang dan Nasional			Terlaksananya Lomba Cipta Menu di Provinsi	Pangkalpinang dan Nasional	146.950.000	154.297.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pangkalpinang			Terlaksananya permohonan sertifikasi produk prima 3	2 permohonan	179.340.000	188.307.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pengkajian Makanan Tradisional	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Bangka tengah dan bangka selatan			Terlaksananya pengujian kandungan gizi ttepung ubi jalar dan sirup rosela dan sirup nanas	3 Komoditi	50.148.500	52.655.925	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Promosi Pangan Lokal	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Provinsi dan Padang			Terlaksananya promosi pangan daerah melalui pameran hari pangan sedunia dan pameran pangan nusantara	2 pameran	190.237.500	199.749.375	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Penyusunan Data base Ketahanan Pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Provinsi dan 7 Kab/Kota			jumlah buku data base ketahanan pangan	10 buku	81.450.650	85.523.183	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pel. Pangkalbalam (Pangkalpinang), Pel. Sungai Selan (Bangka Tengah), Pel. Sadai (Bangka Selatan), Pel. Muntok (Bangka Barat), Pel. Tj. Ru (Belitung), Pel. Tj. Pandan (Belitung)			Terlaksananya pemantauan Pasokan Pangan di 6 pelabuhan untuk 5 komoditi pangan (Beras, Bawang Merah, Cabe Merah Keriting, Daging Ayam dan Daging Sapi)	6 Pelabuhan dan Pedangan Grosir di kab/kota	112.425.000	118.046.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Sosialisasi & Promosi Keamanan Pangan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	7 Kab/Kota			Terlaksananya sosialisasi dan promosi keamanan pangan ke petugas, masyarakat/pelaku usaha	7 Kab/Kota	41.940.000	44.037.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan
	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	7 Kab/Kota			Terawasinya Peredaran Produk pangan segar dan Olahan yang Bermutu dan Berkualitas, Tersedianya Alat Pengujian Pangan Segar dan Olahan	7 Kab/Kota	127.800.000	134.190.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pangan

Tabel V.10
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pertanahan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
5	TOTAL BELANJA								106.710.000	112.045.500		
5	BELANJA LANGSUNG								106.710.000	112.045.500		
1.09.16.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah				Terlaksananya penata usahaaan tanah sebagai asset tetap daerah	100%	Terwujudnya kepastian hukum atas tanah	100%	106.710.000	112.045.500		PD yang melaksanakan urusan pertanahan
0500	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang	Pangkalpinang, Bangka dan Bangka Tengah			Terlaksanya proses sertifikasi tanah	30 bidang	106.710.000	112.045.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan pertanahan

Tabel V.11
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Lingkungan Hidup

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									15.343.890.794	16.163.744.834		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									7.628.699.044	8.010.133.997		
BELANJA LANGSUNG									7.715.191.750	8.153.610.838		
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												
BELANJA RUTIN									3.891.541.750	4.086.118.838		
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat Transparan Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			1.801.083.050	1.891.137.203	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman	12 Bulan	45.500.000	47.775.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Layanan Jasa Telepon dan Listrik	12 Bulan	246.480.000	258.804.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
3	Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Honorarium Jasa Adminitrasi Keuangan	12 Bulan	128.328.000	134.744.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	36.000.000	37.800.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	104.000.000	109.200.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Spanduk, Barang Cetakan dan Fotocopy	12 Bulan	106.100.050	111.405.053	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Pengganti Komponen Yang Rusak	12 Bulan	18.000.000	18.900.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	17.280.000	18.144.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Isi Ulang Tabung Gas, Isi Ulang air Galon dan Bahan Bakar Genset	12 Bulan	29.097.000	30.551.850	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
10	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	105.000.000	110.250.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Indonesia			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lingkungan hidup Ke Luar Daerah	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Jumlah Penyediaan Honorarium Arsiparis, Caraka, Tukang Kebun, Jasa Keamanan Kantor dan Sopir	12 Bulan	515.298.000	541.062.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
13	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah			7 Kabupaten /Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ke Kabupaten/Kota	12 Bulan	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat Transparan Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			653.380.000	686.049.000		PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
14	Penambahan Daya Dan Perbaikan Instalasi Listrik			Pangkalpinang			Jumlah penambahan daya dan instalasi listrik	20 KVA	42.950.000	45.097.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	79.000.000	82.950.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	208.960.000	219.408.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	49.250.000	51.712.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	209.850.000	220.342.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
19	Pengadaan Sumur Bor			Pangkalpinang			Jumlah unit Pengadaan Sumur Bor	1 Paket	63.370.000	66.538.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat Transparan Akuntabel dan Efisien	Pangkalpinang	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			50.600.000	53.130.000		PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
20	Pengadaan Pakaian Dinas			Pangkalpinang			Tersedianya pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil	95 Pegawai	50.600.000	53.130.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat Transparan Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			167.879.950	176.273.948		PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan	12 Bulan	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
22	Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup			Pangkalpinang			Jumlah Aparatur yang mendapat penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan	10 Orang	17.879.950	18.773.948	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat Transparan Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.218.598.750	1.279.528.688		PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
23	Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Terlaksananya operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi	12 bulan	797.370.000	837.238.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
24	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Lapora n	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
24	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta Evaluasi laporan SLHD Kabupaten/Kota			Pangkalpinang			Jumlah Laporan SLHD dan Evaluasi Laporan SLHD kabupaten/Kota	1 Laporan	48.763.750	51.201.938	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
URUSAN WAJIB									3.823.650.000	4.067.492.000		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam		Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	10%			220.848.000	231.890.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	7 Kab/Kota			Jumlah Kelompok masyarakat yang terlatih untuk mengelola sampah rumah tangga	35	220.848.000	231.890.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
B.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam		Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l)	v v v < 50 < 5,00 < 29,0			915.317.500	961.083.375	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq)	15, 449 Gg CO2 Eq						
1	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			7 Kabupaten/Kota	Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l)	v v v <50 < 5,00 < 29,0	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	50 Usaha/Kegiatan	350.000.000	367.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
2	Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)			7 Kabupaten/Kota	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq)	15, 449 Gg CO2 Eq	Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi dan penilaian program adipura	300 titik pantau	116.330.000	122.146.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
3	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota			7 Kabupaten/Kota	Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l)	v v v <50 < 5,00 < 29,0	Terlaksananya pembinaan komisi penilai Amdal	7 Komisi Penilai Amdal	60.105.000	63.110.250	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
4	Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup			7 Kabupaten/Kota	Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l)	v v v <50 < 5,00 < 29,0	jumlah pengaduan yang verifikasi	10 kasus	82.750.000	86.887.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
5	Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 Kabupaten/Kota	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO2 Eq)	15, 449 Gg CO2 Eq	Tersusunnya profil tahunan GRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	75.335.000	79.101.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
6	Rencana Aksi Pengelolaan Sungai terpadu			7 Kabupaten/Kota	Penurunan Pencemaran air Sungai : TSS(mg/l), BOD(mg/l), COD(mg/l)	v v v <50 < 5,00 < 29,0	Tersusunnya dokumen daya tampung daya dukung dan Rencana Aksi Pengelolaan Sungai rangkui	2 dokumen	230.797.500	242.337.375	Baru	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
C.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam		Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter)	26			1.392.204.500	1.461.814.725	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
1	Surveilan, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium			Pangkalpinang			Jumlah parameter yang terakreditasi	30	66.545.000	69.872.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
2	Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 Kabupaten/kota			Terlaksananya kegiatan penilaian sekolah Adiwiyata	28 Sekolah	99.220.000	104.181.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
4	Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Contrl Chat			7 Kabupaten/kota			Jumlah Dokumen Uji Profesiensi, uji banding antar laboratorium dan control chart	4 dokumen	126.439.500	132.761.475	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
5	Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi kepulauan Bangka Belitung			7 Kabupaten/kota			Tersusunnya Dokumen RPPLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	700.000.000	735.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
6	Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022			7 Kapubaten/Kota			Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	400.000.000	420.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
D.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam		Indeks kualitas udara perkotaan	7 Kab/Kota			242.090.000	254.194.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
1	Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien			7 Kabupaten/Kota		CO ₂ = 10.000 µg/m ³ SO ₂ = <365µg/m ³ NO ₂ = 150µg/m ³ PM ₁₀ = 150µg/m ³	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien	7 Parameter Udara Ambien	242.090.000	254.194.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luas ruang terbuka hijau (%)				1.053.190.000	1.158.509.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penataan RTH			Pangkalpinang			Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Lokasi	1.053.190.000	1.158.509.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup

Tabel V.12
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									723.080.000	759.234.000		
BELANJA LANGSUNG									723.080.000	759.234.000		
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									723.080.000	759.234.000		
1.20.03.099	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Manajemen Aparatur	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis		Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online	Peningkatan pemahaman SDm aparatur dan masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 85%			723.080.000	759.234.000		PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1400	Rakor Administrasi Kependudukan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung			Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan	2 kali rakor	107.341.000	112.708.050	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1600	Pendayagunaan Data Kependudukan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	7 Kabupaten/kota			Tersusunnya database kependudukan tingkat provinsi	7 Kabupaten/kota	265.099.000	278.353.950	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1000	Pengembangan Bank Data Kependudukan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya database kependudukan tingkat Provinsi	1 Database	172.500.000	181.125.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1300	Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se- prov babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	7 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	178.140.000	187.047.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel V.13
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									30.633.836.240	31.907.867.802		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									7.188.501.390	7.547.926.460		
BELANJA LANGSUNG									23.445.334.850	24.359.941.343		
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA												
1	BELANJA RUTIN								3.164.530.000	3.065.096.250		
1.22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.063.360.000	2.161.878.000		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya paket pengiriman	550 surat	30.000.000	31.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya jasa listrik, komunikasi dan informasi	12 Bln	93.000.000	93.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Terbayarnya honorarium bagi pengelola keuangan SKPD	12 Bln	22.778.000	23.916.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya operasional kebersihan kantor	12 Bln	43.992.000	46.191.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pangkalpinang			Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 Bln	20.000.000	21.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	75.500.000	79.275.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya peralatan listrik	12 Bln	25.000.000	26.250.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi	5040 koran	36.000.000	37.800.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan Makanan Dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya Makan dan minum rapat	12 Bln	59.000.000	61.950.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Luar Daerah			Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah	12 Bln	500.000.000	525.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran			Pangkalpinang			Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak 30 orang	13 Bln	858.090.000	900.994.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			Dalam Daerah (6 kabupaten)			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	6 Kab	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			377.315.000	396.180.750		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Pangkalpinang			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Pkt	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya gedung kantor	1 Pkt	66.000.000	69.300.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pengadaan Meubelair			Pangkalpinang			Tersedianya Meubelair kantor	1 Pkt	58.925.000	61.871.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Paket	152.390.000	160.009.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
1.06.1.06.02.06 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	138.078.000		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
1.06.1.06.02.06 .0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Tercapainya target kinerja anggaran setiap tahun	Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BPMPD	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BPMPD	100%			351.390.000	368.959.500		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Survey Dan Pengumpulan Data bidang pemberdayaan masyarakat dan desa			Pangkalpinang			Terlaksananya pendataan Desa/Kelurahan	309 desa, 78 Kelurahan	76.390.000	80.209.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Penyelenggaraan Kehumasan pada BPMPD			Pangkalpinang			Terselenggaranya penyebaran Informasi Buletin, Konten SKPD di lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel	7 Kab/Kota	125.000.000	131.250.000	Kegiatan Baru	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan bagi aparat BPMPD	30 PNS BPMPD	150.000.000	157.500.000	Kegiatan Baru	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
1.22	URUSAN WAJIB								20.280.804.850	21.294.845.093		
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes	100%			1.026.937.300	1.078.284.165		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan			Pangkalpinang			Jumlah Aparatur Desa yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya	70 org (1 angkatan)	126.609.800	132.940.290	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Rakor Tupoksi Kerja Tentang Pemerintahan Desa 309 Kades dan BPMPD 6 Kabupaten se- Provinsi Kep. Bangka Belitung			6 Kabupaten			Terlaksananya Rakor Kepala Desa dan BPD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	309 org Kades	617.780.000	648.669.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelatihan Bendahara dan pengelola asset desa dalam pelaksanaan pemahaman terhadap LKPP Desa dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Desa			Pangkalpinang, bangka, belitung			Jumlah Aparatur BPMPD daan Kepala Desa yang terkoordinasi	54 Bendahara (1 angkatan)	182.547.500	191.674.875	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pembinaan Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mandiri dan Kelurahan Mandiri Percontohan			Prov.Babel			Jumlah desa/kelurahan yang di monitoring bantuan keuangannya	6 kabupaten dan 1 Kabupaten	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan	5% 						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Monitoring PMTAS			Prov.Babel			Jumlah siswa penerima program makanan tambahan yang sehat dan bergizi	3050 Siswa penerima	894.445.750	939.168.038	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat			Prov.Babel			Jumlah desa yang berperan serta dalam budaya gotong royong di masyarakat	3 Desa	238.789.800	250.729.290	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUMDes Prov. Bangka Belitung (Bimtek, Pembinaan Monev, dan Bantuan Keuangan)			Pangkalpinang			Penetapan dan pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antar desa	25%	208.170.000	218.578.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pendampingan teknis pengelolaan pasar desa			Pangkalpinang			Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa	48 orang, 12 pasar Desa	89.659.500	94.142.475	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)			7 Kab/Kota			Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK	7 Kab/Kota	1.503.656.800	1.578.839.640	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pendampingan dan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)			6 Kab			Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintahan desa di Kabupaten yang terbentuk	6 Kab	84.549.500	88.776.975	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pembinaan dan Pendampingan Pokjanal Posyandu			7 Kab/Kota			Terlaksananya Rakor Sekretariat dan fasilitasi pembinaan Pokjanal Posyandu	7 Kabupaten	155.646.750	163.429.088	Kegiatan Baru	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pengembangan Tradisi dan Adat Istiadat Provinsi Kep. Babel			Pangkalpinang			Terselenggaranya Bimtek bagi operator adat dan budaya Nusantara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	54 orang (7 Kab/Kota, 47 Kec)	125.070.000	131.323.500	Kegiatan Baru	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	1.Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Persentase desa yang mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP	10%			608.734.500	639.171.225		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
			2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka kemiskinan		2. Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang	20%						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)			Prov.Kep.Babel			Terlaksananya kegiatan Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi	7 Kab/Kota, luar daerah	343.199.000	360.358.950	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek			Pkp			Terlaksananya operasionalisasi pengelolaan Posyantek di tingkat kecamatan	4 kecamatan	77.204.950	81.065.198	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir			Prov.Babel			Terl selenggaranya Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir	35 orang	97.319.750	102.185.738	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa			Prov.Babel			Terlaksananya fasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa	6 Kabupaten	91.010.800	95.561.340	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Program Raskintis	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat miskin	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis	100%			14.644.429.950	15.376.651.448		PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra)			Prov.Babel			Terlaksananya Rakor penyaluran Bantuan sosial Subsidi Rastra	7 Kab/Kota	144.429.950	151.651.448	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
	Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra) Gratis			Prov.Babel			Terlaksananya Bantuan sosial Subsidi Rastra	41.635 RTS-PM di 7 Kab/Kota	14.500.000.000	15.225.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa

Tabel V.14
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									1.022.613.000	1.073.743.650		
BELANJA LANGSUNG									1.022.613.000	1.073.743.650		
1.11.01.23	Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100%			1.022.613.000	1.073.743.650	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
					Tingkat prevalensi peserta KB aktif	81,80%						
					Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	10,69%						
1.11.01.23.020	Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan	7 Kab/Kota	Terlaksananya Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	100%	Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan KB di 5 Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1000	610.000.000	640.500.000		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1.11.01.23.030	Peningkatan Kualitas Keluarga (Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS))		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan	Penilaian lomba di 7 Kab/Kota. Hari Keluarga Tk. Prov. Di Kab. Bangka Selatan dan HARGANAS di Banten		100%	Jumlah pemenang lomba dalam rangka Hari Keluarga	7 Kategori	412.613.000	433.243.650		PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Tabel V.15
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Perhubungan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									54.099.514.520	56.804.490.246		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									6.272.984.520	6.586.633.746		
BELANJA LANGSUNG									47.826.530.000	50.217.856.500		
URUSAN PERHUBUNGAN												
BELANJA RUTIN									4.240.740.000	4.452.777.000		
1 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.144.200.000	2.251.410.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos serta Paket Pengiriman	1080 lbr Materai @6000, 720 lbr Materai @3000 dan Paket pengiriman 120 kali	6.600.000	6.930.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya Jasa Listrik dan Telepon	12 bulan	624.000.000	655.200.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Terselenggaranya Jasa Admiistrasi Keuangan Perkantoran	12 bulan	168.000.000	176.400.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Peralatan Kebersihan dan Bahan-bahan Pembersihan Kantor	12 bulan	18.000.000	18.900.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 0900	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja			Pangkalpinang			Jasa Perbaikan dan servis peralatan kerja	AC 23 buah, Laptop 17 unit , Printer 22 unit, Komputer 26 unit dan peralatan operasional	63.000.000	66.150.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 1000	Penyediaan Alat Tulis kantor			Pangkalpinang			Alat tulis Kantor	12 bulan	113.600.000	119.280.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 1100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			Barang Cetakan dan penggandaan	Penggandaan 33.300 lembar dan 12 bulan cetakkan SPM, BKU, Kwitansi, SPP dll	62.790.000	65.929.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 07 01 01 1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Kantor	Lampu 60 buah, Kable 12 gulung, Batterie AA 50 buah, Batere AAA 50 buah, Batterie Kering Penerang Lampu Taman, 20 Terminal Listrik dan 45 Colokan Listrik.	65.150.000	68.407.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 1500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Surat Kabar dan Buku Perpustakaan	12 bulan Surat Kat	15.000.000	15.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 1600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran dan Pengisian Air Galon (air minum dalam kemasan cup)	5 Tabung Pemadam Kebakaran, 240 galon dan 480 dus air mineral cup	12.660.000	13.293.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 1700	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Makanan dan Minuman Rapat serta Makan dan Minuman Tamu	1080 orang makan minum rapat dan makan minum 328 orang	95.000.000	99.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 1800	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar daerah			Pangkalpinang			Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	350.000.000	367.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 8800	Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah			Pangkalpinang			Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 01 1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi			Pangkalpinang			Terselenggaranya Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 orang	400.400.000	420.420.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan rural urban linkages	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			261.020.000	274.071.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 02 2400	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Pangkalpinang			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	6 unit Kendaraan Roda 4 dan 6 unit Kendaraan Roda 2	261.020.000	274.071.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			35.100.000	36.855.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 07 01 02 2400	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			Pangkalpinang			Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	PNS 59 Honorer 14	35.100.000	36.855.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan rural urban linkages	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			1.427.955.000	1.499.352.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 05 0100	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Pangkalpinang			Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	15 orang	55.000.000	57.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 05 9932	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)			Pangkalpinang			Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2017 dan Beasiswa bagi Taruna/i STTD Tahun 2014,2015 dan Tahun 2016 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71 orang	1.372.955.000	1.441.602.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penguatan rural urban linkages	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien		Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			372.465.000	391.088.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 06 0100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 06 0100	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
URUSAN WAJIB									43.585.790.000	45.765.079.500		
1 07 01 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah		Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	100%			3.082.390.000	3.236.509.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 15 1700	Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ	4 kali pertemuan (30 orang)	45.600.000	47.880.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 15	Pengumpulan dan Analis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	30 Buku	50.000.000	52.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 07 01 15	Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data Base Angkutan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30 Buku	732.250.000	768.862.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data tentang Kebutuhan Perlengkapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi	30 Buku	300.000.000	315.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau Kabupaten Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data tentang Kelayakan Pulau Mendanau Kab. Belitung	6 Dokumen	332.690.000	349.324.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Bangka Selatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data Pengembangan Pelabuhan Gresik Bangka Selatan	6 Dokumen	332.690.000	349.324.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Buku Limau Kabupaten Belitung Timur			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data untuk Pembangunan Pelabuhan Buku Limau Belitung Timur	6 Dokumen	332.690.000	349.324.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar di Kabupaten Bangka Selatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data untuk Pembangunan Pelabuhan Pulau Lepar di Bangka Selatan	6 Dokumen	319.090.000	335.044.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten Bangka Selatan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data untuk Pembngunan Pelabuhan Pulau Liat di Bangka Selatan	6 Dokumen	319.090.000	335.044.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data untuk Pembngunan Pelabuhan Pulau Nangka di Bangka Tengah	6 Dokumen	318.290.000	334.204.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 16	Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ	Penguatan rural urban linkages	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah		Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%)	75%			150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 16 0500	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transporatasi			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8 unit APILL, 35 unit LPJU, 16 unit WL dalam 7 Kabupaten/Kota	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penguatan rural urban linkages	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah		Angka Pelanggaran lalu lintas (%)	1.20%			449.225.000	471.686.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 07 01 17 0500	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			terselenggaranya pemeriksaan surat surat kendaraan dan penimbangan kelebihan muatan	400 unit Kendaraan	99.700.000	104.685.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 17 1500	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan			Pangkalpinang			Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudi/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	20 orang (7 Kab/Kota)	62.125.000	65.231.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 17 2601	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Pangkalpinang			Terselenggaranya Pemilihan Duta Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas tingkat provinsi	30 orang (7 Kab/Kota)	80.000.000	84.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 17 2700	Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terselenggaranya Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) pada Kabupaten/Kota	7 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58.000.000	60.900.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 17 4200	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Angkutan di Terminal, Bandara dan Pelabuhan pada hari-hari besar keagamaan	3 peringatan hari besar keagamaan	80.000.000	84.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 17 4300	Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terselenggaranya Sosialisasi Lingkup Stake Holder Pengguna Jasa Kepelabuhananan	40 orang	69.400.000	72.870.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektifitas antar wilayah	meingkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%)	30%			39.904.175.000	41.899.383.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 18 2700	Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir			Bandara Depati Amir			Terselenggarannya Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP di Terminal baru Bandara Depati Amir Pangkalpinang	1 unit Gedung	14.790.350.000	15.529.867.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 07 01 18 5300	Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanandjoeddin			Bandara H.AS. Hanadjoeddin - Tg.Pandan			Terselenggaranya Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara dan Shoulder Bandara H.AS. Hanandjoeddin	70.232 M3	12.587.175.000	13.216.533.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 18	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat X-Ray Walkthrough			Bandara Depati Amir			Tersedianya Fasilitas Keselamatan di Bandara Depati Amir	1 unit X-Ray Walkthrough	2.526.650.000	2.652.982.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
1 07 01 18	Pengadaan Tanah Bandar Udara Depati Amir			Bandara Depati Amir			Terselenggaranya pengadaan lahan untuk Bandara Depati Amir	60.000 M2	10.000.000.000	10.500.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

Tabel V.16
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									20.532.344.187,96	21.558.961.397,36		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									6.310.321.037,96	6.625.837.089,86		
BELANJA LANGSUNG									14.222.023.150,00	14.933.124.307,50		
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
BELANJA RUTIN									4.763.626.800,00	5.001.808.140,00		
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			4.115.061.800,00	4.320.814.890,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0100.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	1560 Buah Materai dan Kegiatan Belanja Paket/ Pengiriman	9.775.000,00	10.263.750,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0200.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan internet berlangganan	12 Bulan	1.910.886.800,00	2.006.431.140,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0600.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya belanja jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM, Pembayaran STNK, Belanja ban dan ACCU Kendaraan	6 Unit Kendaraan Roda Empat, 13 Unit kendaraan Roda Dua	373.350.000,00	392.017.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0700.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan sebanyak 20 orang	20 Orang Selama 12 Bulan	130.830.000,00	137.371.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0800.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya belanja peralatan kebersihan kantor	Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan	18.000.000,00	18.900.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0900.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya jasa perbaikan peralatan berupa komputer, laptop, mesin fotocopy, printer, telepon dan dispenser	10 Komputer, 11 Laptop, 1 Mesin Fotocopy, 6 Printer, 4 Telepon/Fax, dan 4 Dispenser	15.000.000,00	15.750.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1000.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	ATK Selama 12 Bulan	93.800.000,00	98.490.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1100.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja Cetak dan Belanja Penggandaan Selama 1 Tahun	30.000.000,00	31.500.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja komponen instalasi listrik	25.000.000,00	26.250.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1300.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		491.530.000,00	516.106.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1500.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Berupa Surat Kabar Harian Lokal dan Nasional, Majalah Komputer Bulanan dan Majalah Mingguan Nasional	Surat Kabar Harian Lokal 1 Paket, 1 Paket Surat Kabar Harian Nasional, 24 Buku Majalah Komputer Bulanan dan 48 Buku Majalah Bulanan Nasional	40.000.000,00	42.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1600.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Berupa Isi Air Mineral dan Isi Ulang Tabung Gas	Air Mineral Isi Ulang Sebanyak 800 Galon, Obat-Obatan 1 Paket, dan Isi Ulang Gas Sebanyak 12 Tabung Selama 1 Tahun	11.000.000,00	11.550.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1700.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan	44.000.000,00	46.200.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1800.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Melalui Perjalanan Dinas	12 Bulan	300.000.000,00	315.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1900.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Tenaga Jasa Penunjang Administrasi	13 Orang Tenaga Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	371.890.000,00	390.484.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8800.	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 bulan	250.000.000,00	262.500.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%			237.000.000,00	248.850.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terpeliharanya gedung kantor	100%	50.000.000,00	52.500.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0500	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					187.000.000,00	196.350.000,00		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Terwujudnya disiplin aparatur	100%			39.100.000,00	41.055.000,00		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0200.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	12 bulan	39.100.000,00	41.055.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
02.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000,00	391.088.250,00		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
02.22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000,00	256.845.750,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0500	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000,00	134.242.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
URUSAN WAJIB									9.458.396.350,00	9.931.316.167,50		
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan		Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	100%			4.280.483.850,00	4.494.508.042,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0800.	Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Operasional titik-titik hotspot di 7 kab/kota	12 titik hotdpot di 6 kabupaten	394.570.000,00	414.298.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2101.	Pengelolaan Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksanannya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada publik selama 1 (satu) tahun.	7 Kab/Kota	255.000.000,00	267.750.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
8000.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bangka Belitung melalui TVRI	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya penyebaran informasi program-program pembangunan daerah, edukasi dan hiburan kepada masyarakat melalui TVRI Bangka Belitung	Informasi pembangunan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung	634.630.000,00	666.361.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
2100.	Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah secara langsung melalui info radio	7 Kab/Kota	515.500.000,00	541.275.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
5800.	Peningkatan fungsi pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Daerah Prov. Kep. Babel dan Sekretariat KID	7 Kab/kota dan di luar Prov. Kep. Babel	695.559.850,00	730.337.842,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
5900.	Seleksi Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terseleksinya anggota KID	5 (lima) anggota KID	134.500.000,00	141.225.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
11.	Pembangunan & Pengembangan Portal Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Bertambahnya jumlah website pemerintah dan konten di Prov. Kep. Babel	40 portal	86.800.000,00	91.140.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
13.	Peguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya media akses komunikasi data di Prov. Kep. Babel	45 paket	389.930.000,00	409.426.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
15.	Pengadaan & Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Perangkat lunak dasar umum pemerintahan	10 aplikasi	285.720.000,00	300.006.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1100	Fasilitasi Penyelenggaraan bidang Pos dan Filateli	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pos dan filateli	Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pos dan filateli di provinsi kep. Bangka Belitung	57.936.000,00	60.832.800,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1200	Pengelolaan dan Operasional Mobile Community Access Point (M-CAP)	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Operasional M-CAP ke kab/kota	4 kali ditiap kab. di pulau Bangka dan 2 kali ditiap kab. di pulau Belitung	195.428.000,00	205.199.400,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0600.	Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Diskominfo se-Babel	Rakor 2 Hari 50 Peserta	100.000.000,00	105.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)									534.910.000,00	561.655.500,00		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan		Terwujudnya kualitas SDM	Informasi dan publikasi bidang kesejahteraan			752.205.000,00	789.815.250,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
0702.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintah bidang komunikasi	1 kali pelatihan 20 Jam bagi aparatur pemerintah	100.545.000,00	105.572.250,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1300.	Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah dalam mengelola TIK yang berkaitan dengan pemerintahan	50 peserta	93.075.000,00	97.728.750,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1400.	Penilaian Jabatan Fungsional Komputer	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Penetapan angka kredit (AK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK)	Aparatur Fungsional Komputer	204.860.000,00	215.103.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1401.	Penilaian Jabatan Pranata humas	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pranata Humas	Aparatur Fungsional Pranata Humas	80.000.000,00	84.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1500.	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Rakor KIM se Babel, pengelolaan Website KIM dan Pertemuan KIM sekaligus Pameran Tingkat Nasional	Rakor KIM, Pengelolaan Website KIM dan Pertemuan KIM se Babel serta Pameran Tingkat Nasional	273.725.000,00	287.411.250,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	100%			922.790.000,00	968.929.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1600.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pemerintahan melalui Media Cetak	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terjalinnnya Kerjasama dalam penyebaran Informasi pembangunan Daerah dan kegiatan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui koran dan baleho	Media Cetak, Spanduk, Baleho	522.970.000,00	549.118.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1700.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan kegiatan pemerintahan melalui Media Elektronik	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terjalinnnya kerjasama dengan media elektronik dan media online	Kerjasama dengan media massa elektronik dan online	399.820.000,00	419.811.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									3.502.917.500,00	3.678.063.375,00		
1.25.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Manajemen Aparatur	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis		Terwujudnya kualitas SDM	Informasi dan publikasi bidang kesejahataraan			2.458.917.500,00	2.581.863.375,00		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1.25.17.1900	Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan			Pangkalpinang			Terciptanya informasi akurat dan akuntabel	100%	50.000.000,00	52.500.000,00	Baru	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1.18.20.32.0100	Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Teralaksananya acara HUT RI 17 Agustus 2017	Kegiatan (1500 on	1.298.967.500,00	1.363.915.875,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1.18.20.32.0100	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Terlaksananya HUT Provinsi kepulauan bangka belitung (upacara, jalan santai,ramah tamah)	Kegiatan (1500 on	1.010.850.000,00	1.061.392.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1.18.20.32.0100	Sinkronisasi dan Informasi Bidang Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			tercapainya kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	99.100.000,00	104.055.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1.20.03.05	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government				1.044.000.000,00	1.096.200.000,00		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
1.20.03.05.7000	Publikasi dan Siaran			7 Kabupaten/Kota			Terlaksananya penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	975.100.000,00	1.023.855.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.20.03.05.	Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)			Pangkalpinang			Terlaksananya pelayanan fungsi PPID	12 Bulan	68.900.000,00	72.345.000,00	Baru	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika

Tabel V.17
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									12.652.643.957	12.917.357.905		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									5.728.397.957	6.014.817.855		
BELANJA LANGSUNG									6.924.246.000	6.902.540.050		
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
BELANAJA RUTIN									3.672.119.500	3.417.807.225		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			2.424.820.000	2.546.061.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar Kantor	1 Tahun	25.000.000	26.250.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Terlaksananya Jasa Komunikasi dan Listrik Perkantoran	1 Tahun	185.400.000	194.670.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Kegiatan Kantor	1 Tahun	128.130.000	134.536.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	1 Tahun	35.000.000	36.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Dinas dan 1 PLUT	1 Tahun	89.600.000	94.080.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Terlaksananya Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan Yang diperlukan	1 Tahun	100.000.000	105.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Tahun	30.000.000	31.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	15.000.000	15.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	37.000.000	38.850.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Pangkalpinang			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	300.000.000	315.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.19	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Administrasi Kantor	1 Tahun	1.029.690.000	1.081.174.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.01.88	Koordinasi, konsolidasi kedalam Daerah			7 Kab/Kota			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.1.15.01.01.7000	Peningkatan fungsi pelayanan UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran Untuk Operasional UPT. Balai Latihan Koperasi dan UMKM	1 Tahun	300.000.000	315.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bagi Aparatur	100%			734.434.500	771.156.225	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terbiayainya Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas	3 Paket	505.194.500	530.454.225	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terbiayainya Pemeliharaan 4 Unit Mobil dan 12 Motor Dinas Kantor	12 Bulan	209.240.000	219.702.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terbiayainya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	20.000.000	21.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			95.800.000	100.590.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Informal			Pangkalpinang			Terbiayainya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur	100%	95.800.000	100.590.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			44.600.000	46.830.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Pangkalpinang			terlaksananya Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100%	44.600.000	46.830.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
URUSAN PILIHAN									3.252.126.500	3.484.732.825		
	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)				581.434.000	610.505.700	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.1.15....	Pembinaan perizinan dan akses permodalan UMKM			Provinsi Kep. Bangka Belitung			Teridentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan UKM	1 pasar per Kab/Kota	581.434.000	610.505.700	baru	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah dan koperasi	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)	9 jenis			449.028.000	471.479.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.16...	Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM, Koperasi Berprestasi dan tokoh koperasi Tingkat Provinsi			7 Kab/Kota			Terbiayainya pelaksanaan penilaian dan penghargaan bagi usaha mikro dan kecil @5 Unit	10 UMKM 10 Koperasi	296.906.000	311.751.300	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.01.16...	Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)			3 Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pemberdayaan petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL)	6 PPKL di pangkalpinang, bangka, bangka selatan	152.122.000	159.728.100	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM	75%			1.363.897.000	1.432.091.850	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.17...	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan			Kab/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terbiayainya Sosialisasi Kepada KUMKM dan Instansi Terkait	245 KUMKM, 70 Pegawai Dinas sosialisasi dan BIMTEK	199.983.000	209.982.150	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.17...	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM)			Pangkalpinang			Terbiayainya Pertemuan Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM	2 kali @ 50 peserta	49.398.000	51.867.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.17...	Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online			Provinsi kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017 melalui media online	Situs promosi online produk OVOP	27.220.000	28.581.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.17...	Promosi Produk Unggulan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta			Jakarta			Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017	20 UMKM	586.578.000	615.906.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.17...	Promosi Produk Unggulan Khas Daerah Melalui Pameran Investment, Tourism and Trade Expo (Bali ITT Expo)			Diwilayah Surabaya			Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2017	4 UMKM	189.938.000	199.434.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.17...	Peningkatan Daya Saing Bagi UMKM			7 Kab/Kota			Terlaksananya Kegiatan Fasilitas peningkatan daya saing UMKM	210 UMKM	310.780.000	326.319.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Pengembangan Koperasi dan UMKM sektor Lembaga dan Wilayah	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase)				372.375.000	390.993.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.18...	Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi)			7 Kab/Kota		Jumlah Koperasi sehat, berkualitas, dan aktif	Terbiayainya Bimtek pelaksanaan RAT (Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi)	1 kali di 7 Kab/Kota (175 Koperasi)	155.580.000	163.359.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.18...	Pembuatan Akta Notaris Untuk Koperasi			7 Kab/Kota		Jumlah Koperasi sehat, berkualitas, dan aktif	mendorong tumbuhnya koperasi dari Lembaga keuangan mikro (LKM) yang berbadan hukum	35 Koperasi Yang Memiliki Akta Notaris	177.320.000	186.186.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.01.19...	Bimtek Validasi Data Koperasi			Pangkalpinang			Terlaksananya validasi data koperasi	1 dokumen	39.475.000	41.448.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)	110%			485.392.500	579.662.125	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.19.....	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015			Pangkalpinang	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dengan penerapan manajemen mutu standar ISO 9001 :		Jumlah SDM yang mampu menerapkan SOP	19 Org/3 Seksi	158.851.500	166.794.075	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.19.....	Pelatihan Kewirausahaan & AMT Bagi Koperasi dan UMKM			Pangkalpinang	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan & AMT bagi koperasi dan UMKM		Terbiayainya pelatihan kewirausahaan & AMT bagi koperasi dan UMKM sebanyak 4	60 orang 2 angkatan	152.617.000	160.247.850	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.19.....	Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam			Pangkalpinang	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi		Terlaksananya pelatihan pengelolaan koperasi simpan pinjam sebanyak 2	60 Koperasi/Orang	88.044.000	92.446.200	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
1.15.01.19.....	Pelatihan Study Kelayakan Usaha			Pangkalpinang	Terlaksananya kegiatan pelatihan study kelayakan usaha		Terbiayainya kegiatan pelatihan studi kelayakan usaha sebanyak 4 angkatan	60 orang	85.880.000	90.174.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

Tabel V.18
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Penanaman Modal

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									12.068.544.729	12.194.908.665		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									5.563.091.729	5.841.246.315		
BELANJA LANGSUNG									6.505.453.000	6.353.662.350		
URUSAN PENANAMAN MODAL												
1	BELANJA RUTIN								4.583.495.000	4.678.427.250		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			1.555.070.000	1.632.823.500		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman	12 bulan	18.300.000	19.215.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	12 bulan	153.000.000	160.650.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	119.240.000	125.202.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya operasional kebersihan kantor	12 bulan	36.000.000	37.800.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pangkalpinang			Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	46.950.000	49.297.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	89.600.000	94.080.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Terbayarnya honorarium pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	13 bulan	371.980.000	390.579.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	50.000.000	52.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	35.000.000	36.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi	1 Paket	25.000.000	26.250.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 paket	60.000.000	63.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Daerah			Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	400.000.000	420.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			7 kabupaten/kota			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	100%			2.622.760.000	2.753.898.000		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	2.300.000.000	2.415.000.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	3 unit mobil dan 13 unit motor	176.360.000	185.178.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	1 paket	146.400.000	153.720.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			33.200.000	34.860.000		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Pangkalpinang			Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	69 stel pakaian	33.200.000	34.860.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	256.845.750		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
URUSAN WAJIB									1.921.958.000	1.675.235.100		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Provinsi DKI Jakarta, Manado, Bangka Belitung dan Provinsi lain					695.761.000	730.549.050		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyelenggaraan Pameran Investasi			Jakarta, Solo, Manado dan Wilayah Sumatera			Jumlah Pameran di Dalam Negeri	4 Pameran (Jakarta, Solo, Manado dan Wilayah Sumatera)	500.000.000	525.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2017			Pangkalpinang			Penyusunan buku data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 buku	95.958.000	100.755.900	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal			7 kabupaten/kota			Pembinaan terhadap Pemegang Ijin usaha/Perusahaan	7 (tujuh) kab/kota	99.803.000	104.793.150	Baru	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan	85%			416.574.000	94.581.900		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal			Pangkalpinang			Terlaksananya Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	1 kali pertemuan	90.078.000	94.581.900	Baru	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah			7 kabupaten/kota			Terupdate data peluang investasi daerah dab bisnisplan sektor pariwisata	7 kabupaten/kota	326.496.000	342.820.800	Baru	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Usaha	13 Sektor			809.623.000	850.104.150		PD yang melaksanakan urusan penanaman modal

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 kabupaten/kota			Terlaksananya Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 tahun	664.677.000	697.910.850	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
	Rapat Koordinasi Forum PTSP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 kabupaten/kota			Terlaksananya Forum PTSP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Kali forum PTSP	144.946.000	152.193.300	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal

Tabel V.19
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									22.096.152.455	23.200.960.078		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									7.792.265.355	8.181.878.623		
BELANJA LANGSUNG									14.303.887.100	15.019.081.455		
BELANJA RUTIN									3.839.405.000	4.031.375.250		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.849.430.000	2.991.901.500		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1 Paket	16.600.000	17.430.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi	12 Bulan	263.400.000	276.570.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pangkalpinang			Terbayarnya Honorarium Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	162.720.000	170.856.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor	12 Bulan	72.000.000	75.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Pangkalpinang			Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	70.000.000	73.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)			Pangkalpinang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	89.600.000	94.080.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	80.450.000	84.472.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan Listrik	1 Paket	30.000.000	31.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71 Unit/1 Paket	149.000.000	156.450.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pangkalpinang			Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai	1 Paket	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11	Penyediaan bahan Logistik kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	14.140.000	14.847.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.12	Penyediaan makanan dan minuman			Pangkalpinang			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan tamu	1 Paket	38.720.000	40.656.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Pangkalpinang			Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	300.000.000	315.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.14	Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran			Pangkalpinang			Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak	48 Orang	1.372.800.000	1.441.440.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.15	Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah			Pangkalpinang			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Paket	150.000.000	157.500.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			517.610.000	543.490.500		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya Gedung Kantor	3 Gedung	308.000.000	323.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit dan 3 Unit Motor	209.610.000	220.090.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			99.900.000	104.895.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Bertambahnya Sumerb Daya Aparatur Dinas yang Terlatih	9 Orang	99.900.000	104.895.000		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.06.1.06.02.06 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	138.078.000		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
1.06.1.06.02.06 .0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200	baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000	baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
URUSAN WAJIB									10.464.482.100	10.987.706.205		
5	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina	7			1.371.140.050	1.439.697.053		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
5.1	Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Terlaksananya Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60 Laki-Laki dan 40 Perempuan	384.515.100	403.740.855	Baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
5.2	Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan (Empat Konsensus)			Pangkalpinang			Terlaksananya Sosialisasi Empat Pilar	1 Kegiatan	123.929.850	130.126.343	Baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
5.3	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			Pangkalpinang			Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) serta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	6 Orang KPA/KPN dan 5 Orang PPAN	356.390.100	374.209.605	Baru (gabungan)	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
5.4	Jambore Pemuda Daerah (JPD)			Pangkalpinang			Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD)	100 orang	445.000.000	467.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
5.5	Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor			Pangkalpinang			Terlaksanya Seleksi Pemuda Pelopor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan	61.305.000	64.370.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
6	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan	22			1.263.740.200	1.326.927.210		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
6.1	Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda	1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi komoditi 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatnya pendapatan Masyarakat 2. Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Data Base jumlah, Jenis dan Profil Wirausaha Muda,konsep pembentukan LPKP dan Pemilihan Wirausaha muda berprestasi	1 Dokumen/3 orang	225.290.050	236.554.553	Baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3. Program Satam Mas	3. Peningkatan Kesempatan Kerja Baqi Masyarakat 4. Menurunya Disparitas Pembangunan Antar Masyarakat dan Wilavah 5. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan									
6.2	Peningkatan Ekonomi Pemuda	1. Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan Koperasi komoditi 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 3. Program Satam Mas	1. Meningkatkan pendapatan Masyarakat 2. Meningkatnya Konsumsi Masyarakat 3. Peningkatan Kesempatan Kerja Baqi Masvarakat 4. Menurunya Disparitas Pembangunan Antar Masyarakat dan Wilavah 5. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Pemuda yang memiliki motivasi dalam bidang wirausaha sebagai langkah awal terjun ke dunia usaha	40 Org Laki-Laki dan 40 Org Perempuan	382.575.050	401.703.803	Baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	
6.3	Pemberdayaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3)	1. Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan Koperasi komoditi 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 3. Program Satam Mas	1. Meningkatkan pendapatan Masyarakat 2. Meningkatnya Konsumsi Masyarakat 3. Peningkatan Kesempatan Kerja Baqi Masvarakat 4. Menurunya Disparitas Pembangunan Antar Masyarakat dan Wilavah 5. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Terpilihnya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3)	10 Org Laki-Laki dan 10 Org Perempuan	655.875.100	688.668.855	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	
9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh Proses Pembangunan		Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan ~~POPNAS~~ Presentase Olahragawan Berprestasi dalam	- 11,39			5.905.076.700	6.200.330.535		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS	50						
					Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD	57.89						
9.1	Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terselenggaranya Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional	2 Cabang Olahraga	143.999.250	151.199.213	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.2	TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional ke Tingkat Nasional			Luar Daerah			Terselenggaranya TC dan Pengiriman kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional	30 Orang	176.000.000	184.800.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.3	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah			Cabang Olahraga yang dibina PPLP dan PPLPD	3 Cabor	1.316.165.100	1.381.973.355	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.5	Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pelajar VIII			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terseleksi Atlet Pelajar Berprestasi pada Kejurda VIII	70 Orang	845.925.100	888.221.355	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.6	Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terpilinya Atlet PelajarBerprestasi	15 Cabang Olahraga	949.622.100	997.103.205	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.7	Pengiriman Kontingen POPNAS XIV			Luar Daerah			Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPNAS XIV	170 Orang	1.203.959.900	1.264.157.895	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.8	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat melalui LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terpilihnnya Atlet Berprestasi Cabang Olahraga Sepakbola	36 Orang	436.150.250	457.957.763	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.9	Training Camp (TC) dan Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Tingkat Nasional			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah			Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	16 Orang	642.505.000	674.630.250	Alternatif	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
9.11	Pengiriman Kontingen Peparpenas/POPCANAS			Luar Daerah			Atlet Penyandang Disabilitas Berprestasi	18 Orang	190.750.000	200.287.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
11	Program Pembinaan Generasi Muda	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam		Prosentase partisipasi pemuda yang lolos seleksi	6			1.924.525.150	2.020.751.408		PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
					Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional	7						
11.1	Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang dan Luar Daerah			Terseleksinya Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tingkat Nasional	30 Orang Provinsi dan 2 Orang Tingkat Nasional	351.260.200	368.823.210	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.2	Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Terselenggaranya Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30 Orang	1.320.079.750	1.386.083.738	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
11.3	Kursus Pelatihan Dasar KWARDA Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pelatih Pramuka yang memiliki Kompetensi	70 Orang	253.185.200	265.844.460	Baru	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan

Tabel V.20
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Statistik

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									1.432.072.000	1.546.637.760		
BELANJA LANGSUNG									1.432.072.000	1.546.637.760		
URUSAN STATISTIK									1.432.072.000	1.546.637.760		
1.06.1.06.02.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80%			1.432.072.000	1.546.637.760	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan statistik
1.06.1.06.02.15	Instalasi dan Implementasi Aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional			Pangkalpinang			Instrument/Tools Software peralatan-peralatan yang menunjang implementasi Simpul Jaringan Nasional	1 Aplikasi Geoportal dan 3 paket peralatan berspesifikasi pengelolaan GIS	518.973.000	560.490.840	Baru	PD yang melaksanakan urusan statistik
1.06.1.06.02.15	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Pangkalpinang			Pengadaan aplikasi e-daley dan pengembangan aplikasi e-planning serta pengelolaan website bappeda.babelprov.g o.id	3 aplikasi	598.580.000	646.466.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan statistik
1.06.1.06.02.15	Forum Data Prov. Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya forum data Prov. Kep. Babel	6 kali FGD, 2 kali Rakor	314.519.000	339.680.520	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan statistik

Tabel V.21
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Persandian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									110.400.000,00	115.920.000,00		
BELANJA LANGSUNG									110.400.000,00	115.920.000,00		
URUSAN WAJIB									110.400.000,00	115.920.000,00		
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan		Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	100%			110.400.000,00	115.920.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan persandian
se	Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya sosialisasi kerawanan keamanan informasi dan komunikasi, Raker teknis dan Monev Jarkomsanda Prov. Kep.Babel dengan pihak/Dinas terkait	1 Kali Pelaksanaan sosialisasi keamanan informasi dan raker teknis serta Jarkomsanda ke 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.400.000,00	115.920.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan persandian

Tabel V.22
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Kebudayaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									24.925.759.700	26.172.047.685		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									6.907.592.000	7.252.971.600		
BELANJA LANGSUNG									18.018.167.700	18.919.076.085		
BELANJA RUTIN									3.535.297.500	3.712.062.375		
01 .	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			1.999.437.500	2.099.409.375		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Jumlah dokumen layanan administrasi umum, ketatalaksanaan, layanan informasi, hubungan antar lembaga (dokumen)	1 Tahun	24.600.000	25.830.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0200	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Layanan Adminitrasi Perkantoran	1 Tahun	321.000.000	337.050.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional			Pangkalpinang			Jumlah Layanan operasional perkantoran (bulan)	6 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	258.480.000	271.404.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Jumlah layanan Administrasi keuangan	1 Tahun	120.060.000	126.063.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran (bulan)	1 Tahun	30.000.000	31.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Layanan Adminitrasi Perkantoran	1 Tahun	92.800.000	97.440.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			Jumlah penyediaan barang cetakan (eksemplar) & penggandaan	1 Tahun	95.507.500	100.282.875	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1200	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Pangkalpinang			Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan)	1 Tahun	55.000.000	57.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1500	Penyediaan bahan bacaan dan Informasi			Pangkalpinang			Jumlah bahan bacaan yang tersedia (eksemplar)	1 Tahun	28.600.000	30.030.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1600	Penyediaan bahan Logistik kantor			Pangkalpinang			Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan)	1 Tahun	5.700.000	5.985.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1700	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan)	1 Tahun	117.200.000	123.060.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1800	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			Pangkalpinang			Jumlah Rakor dan Konsultansi ke luar daerah (kali)Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah)	1 Tahun	300.000.000	315.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
8800	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			Pangkalpinang			Jumlah Rapat Koordinasi dan Fasilitasi di daerah (kali) dan Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah)	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1900	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			tersediannya jasa penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	1 Tahun	400.490.000	420.514.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.043.795.000	1.095.984.750		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0700	Pengadaan Alat Studio			Pangkalpinang			Jumlah pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran	1 paket	200.000.000	210.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0900	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	15 unit	214.075.000	224.778.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
2200	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Jumlah peningkatan layanan gedung	1 paket	397.520.000	417.396.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
2600	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Rekondisi sarana prasarana Peralatan Gedung kantor	1 Tahun	232.200.000	243.810.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100%			34.600.000	36.330.000		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0500	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu			Pangkalpinang			Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan (stel)	44 stel pakaian PHL dan 60 stel pakaian PNS	34.600.000	36.330.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			85.000.000	89.250.000		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
4901	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah			luar daerah dan provinsi kepulauan bangka belitung			keikutsertaan aparatur daerah dalam mengikuti diklat teknis dan fungsional ke luar daerah	1 paket	85.000.000	89.250.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	391.088.250		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1	URUSAN WAJIB								14.482.870.200	15.207.013.710		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata	Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.		Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi	4			4.176.303.000	4.385.118.150		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
					Jumlah pergub pelestarian nilai budaya							
2600	Peningkatan pelestarian tradisi			provinsi kepulauan bangka belitung			Jumlah Kajian Seni Budaya	5 dokumen	355.087.000	372.841.350	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberian dukungan peghargaan dan kerjasama di Bidang Kebudayaan			provinsi kepulauan bangka belitung			terapresiasinya karya seni budaya dan pengabdian masyarakat di bidang seni dan budaya	5 orang	143.905.000	151.100.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya			provinsi kepulauan bangka belitung			terlaksananya internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan budaya	161 orang	441.670.000	463.753.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			7 Kab/Kota			Jumlah event budaya daerah yang difasilitasi	14 event	645.370.000	677.638.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
3300	Pembinaan Kesenian dan Perfilman			provinsi kepulauan bangka belitung			terlaksananya pengembangan budaya daerah melalui event festival daerah bertaraf nasional	1 Event / festival	1.047.950.000	1.100.347.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1900	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian)			Luar Daerah			terlaksananya pengembangan budaya daerah malalui event nasional	parede tari nusantara 2017, pawai budaya 2017, PPSS, seni pertunjukan, pesona anjungan	1.060.036.000	1.113.037.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya			provinsi kepulauan bangka belitung			jumlah fasilitasi pertgelaran seni budaya daerah tari sambut dan kesenian multi etnis dan multi seni	48 dan 20 kali tampil;	482.285.000	506.399.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata	Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Bangka belitung	Persentase cagar budaya yang dikelola				434.585.000	456.314.250		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah			Pangkalpinang			Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya	70 orang	86.540.000	90.867.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Pengelolaan Peninggalan Purbakala			Kab. Bangka Barat			meningkatnya pengelolaan terpadu cagar budaya	1 museum	71.700.000	75.285.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0500	Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai)			Pangkalpinang			Jumlah SDM yang difasilitasi	38 orang	199.000.000	208.950.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0501	Penyusunan Sastra Lisan Melayu Bangka Belitung			Pangkalpinang			jumlah buku sastra lisan melayu bangka belitung	350 buku	77.345.000	81.212.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata	Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.		Pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang di apresiasi masyarakat	50%			479.137.400	503.094.270		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
0100	Peningkatan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa			Pangkalpinang dan Jakarta			Terlaksananya kegiatan aubade dan sirinade 17 agustus / dan peserta gita bahana nusantara	2 kegiatan	479.137.400	503.094.270	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.03.047	Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	Peningkatan Manajemen Aparatur	IDI		Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan	25%			8.458.604.000	8.881.534.200		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.047.0100	Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Terlaksananya STQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan	995.495.000	1.045.269.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.047.0200	Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Prov. Kep. Bangka Belitung			Pangkalpinang, Kalimantan Utara/ Sumatera Barat			Terlaksananya pembinaan dan pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional	35 Kafilah	947.569.000	994.947.450	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.047.0400	Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan			Pangkalpinang			Terselenggara Nya Safari Ramadhan Prov. Kep. Bangka Belitung	7 Kab/ Kota	700.000.000	735.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.047.0500	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pada Hari Jum'at			7 Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung			Terselenggaranya Safari Jum'at di 7 Kab/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung	30 Masjid	478.490.000	502.414.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.047.0600	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji			7 Kab/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Lancarnya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	1100 Jamaah Haji	965.410.000	1.013.680.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.047.0700	Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji			Pangkalpinang, Belitung, Bangka Barat dan Palembang			Terfasilitasinya biaya transportasi domestik Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	913 Org	3.260.550.000	3.423.577.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.047.1000	Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung			7 Kab/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD	9 Org	665.030.000	698.281.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat			Bangka Barat, Pangkalpinang dan Belitung Timur			Terlaksananya ceramah agama bagi masyarakat	3000 orang	446.060.000	468.363.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.03.109	Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Manajemen Aparatur	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis		terwujudnya kerukunan umat beragama	peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota			276.336.000	290.152.800		PD yang melaksanakan urusan kebudayaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.20.109.0100	Peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama			Pangkalpinang			Terlaksananya peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama di Prov.Kep.Babel	1 Kegiatan	276.336.000	290.152.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengembangan Pariwisata	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Jumlah kegiatan penyelenggaraan pagelaran kesenian daerah	100%			657.904.800	690.800.040	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.08.16.0500	Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung			Anjungan TMII			Terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sanggar Tari dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung selama satu tahun anggaran 2017.	100%	45.169.900	47.428.395	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.04.0100	Pengadaan Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan			Jakarta			tersedianya Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan untuk di Anjungan Prov. Kep. Babel di TMII	100%	117.319.900	123.185.895	baru	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.17.1.20.08.16.	Bulan Promosi 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung			Jakarta			Terselenggaranya kegiatan bulan promosi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Prov. Kep. Babel yang dilaksanakan selama 7 bulan berturut-turut dalam satu tahun anggaran 2017.	100%	303.900.000	319.095.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
1.20.16.0100	Parade Kesenian dan Kebudayaan Daerah			Jakarta			Keikutsertaan pada acara Gelar Citra Budaya Tradisi, Acara Pawai Budaya, Parade Busana Daerah, Festival Kuliner, Ekpo Indonesia di TMII	100%	191.515.000	201.090.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan

Tabel V.23
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Perpustakaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									17.990.833.695,00	18.499.287.129,75		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									8.251.885.845,00	8.664.480.137,25		
BELANJA LANGSUNG									9.738.947.850,00	9.834.806.992,50		
URUSAN KEARSIPAN									9.738.947.850,00	9.834.806.992,50		
BELANJA RUTIN									8.271.155.000,00	8.293.624.500,00		
1.26.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.020.815.000,00	2.121.855.750,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Jumlah Materai Yang Dibeli dan Paket Pengiriman Yang Dilaksanakan	3.300 Materai dan Paket Pengiriman	15.300.000,00	16.065.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, dan Internet	12 Bulan	108.000.000,00	113.400.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Pembayaran Honorarium Pengelola Adminis-trasi Keuangan	12 Bulan	143.880.000,00	151.074.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	32.010.000,00	33.610.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pangkalpinang			Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	60.000.000,00	63.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	40.000.000,00	42.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	45.140.000,00	47.397.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	16.775.000,00	17.613.750,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	245.200.000,00	257.460.000,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	34.080.000,00	35.784.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.26.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Pengisian Tabung Gas	12 Bulan	10.080.000,00	10.584.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan	48.150.000,00	50.557.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Luar daerah			Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	300.000.000,00	315.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
	Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah			6 kabupaten			Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi dengan Kabupaten/kota	12 Bulan	150.000.000,00	157.500.000,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.01.19	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Tersedianya Tenaga Penunjang Pengelolaan Administrasi Kantor (28 orang)	12 Bulan	772.200.000,00	810.810.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			5.723.125.000,00	6.009.281.250,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Pemeli-haraan Gedung Kantor	1 Unit Gedung	100.000.000,00	105.000.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Terlaksananya Pemeli-haraan Kendaraan Dinas/Operasional (4 mobil, 2 motor)	12 Bulan	134.140.000,00	140.847.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.02.54.	Sewa Gedung Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Gedung Kantor Yang Disewa	1 Unit Gedung	150.000.000,00	157.500.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
	Pembangunan Gedung Depo Arsip BPAD Prov. Kep. Babel			Pangkalpinang			Terlaksananya Pembangunan Gedung Depo Arsip BPAD Prov. Kep. Babel	1 Unit Gedung	5.338.985.000,00	5.605.934.250,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Pangkalpinang	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			42.200.000,00	44.310.000,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya			Pangkalpinang			Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	(58 PNS, 36 Non PNS)	42.200.000,00	44.310.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.26.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			112.550.000,00	118.177.500,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	12 Bulan	112.550.000,00	118.177.500,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.06.1.06.02.06 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000,00	402.262.200,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.06.1.06.02.06 .0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000,00	264.184.200,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.06.1.06.02.06 .0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000,00	138.078.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
URUSAN WAJIB									1.467.792.850,00	1.541.182.492,50		
1.26.	URUSAN PERPUSTAKAAN								1.467.792.850,00	1.541.182.492,50		
1.26.01.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanqqulanqan	Meningkatnya Keperca-yaan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Persentase perpustakaan aktif (%) 2. Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi 3. Rasio jumlah buku di perpustakaan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang	85.73 500 Orang			1.467.792.850,00	1.541.182.492,50		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.09.	Pelayanan Perpustakaan Keliling			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Fasilitas Layanan Perpustakaan Keliling Bagi Masyarakat	4 Kabupaten	270.678.700,00	284.212.635,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya lomba menulis dan membaca tingkat SD., SMP, SMA dan Masyarakat	200 orang dan 20 kelompok	295.599.600,00	310.379.580,00		PD yang melaksanakan urusan perpustakaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.26.01.21.10.	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	600 Orang	67.799.800,00	71.189.790,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.27	Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Perpustakaan Yang Memiliki NPP	42 Perpustakaan	66.669.950,00	70.003.447,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.35.	Penilaian Angka Kredit Pustakawan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Penilai-an Angka Kredit Pustakawan	15 DUPAK	24.999.800,00	26.249.790,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.39	Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan			Pangkalpinang			Terlaksananya Bimtek Perpustakaan	3 Bimtek	298.409.850,00	313.330.342,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.42.	Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 kali	148.729.950,00	156.166.447,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.47.	Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Hasil Terbitan Daerah	55 KCKR	39.255.900,00	41.218.695,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.48.	Pengelolaan Layanan Website			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Website	250 Informasi	51.549.800,00	54.127.290,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.50.	Pembinaan dan Pendampingan Pengelo-laan Perpustakaan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terbinanya Pengelolaan Perpustakaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28 Perpustakaan	67.269.850,00	70.633.342,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.51.	Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tingkat Provinsi			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya pemilihan pustakawan terbaik	1 kali	76.779.850,00	80.618.842,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.....	Penyusunan Bibliografi Induk daerah & Katalog Induk Daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Data Koleksi Antar Perpustakaan Dalam Bentuk Katalog Induk	40 Buku	25.000.000,00	26.250.000,00	Baru	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
1.26.01.21.....	Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Perawa-tan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka	12 Bulan	35.049.800,00	36.802.290,00	Baru	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan

Tabel V.24
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Kearsipan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									1.011.811.950,00	1.062.402.547,50		
BELANJA LANGSUNG									1.011.811.950,00	1.062.402.547,50		
1.26.	BIDANG URUSAN KEARSIPAN								1.011.811.950,00	1.062.402.547,50		
1.24..01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan	250 Arsip			342.353.000,00	359.470.650,00		PD yang melaksanakan urusan kearsipan
	Penelusuran dan Pedataan Arsip Statis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten / Kota			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersusunnya dokumen/arsip statis	16 Dokumen	254.485.000,00	267.209.250,00		PD yang melaksanakan urusan kearsipan
	Penelusuran dan Pedataan Arsip Dinamis Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten / Kota			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersusunnya dokumen/arsip dinamis	16 Dokumen	87.868.000,00	92.261.400,00		PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.17.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Peningkatan Manajemen Manajemen Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Arsip yang terpelihara	100%			38.880.000,00	40.824.000,00		PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.17.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Pemeli-haran Arsip Daerah	200 Arsip	38.880.000,00	40.824.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan	24,19%			253.794.700,00	266.484.435,00		PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.18.05.	Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Layanan Sadar Arsip Bagi Masyarakat	5 Kabupaten/ Kota	73.699.700,00	77.384.685,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.18.07.	Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Tersedianya Informasi Tentang Arsip Statis Prov. Kep. Babel.	700 Pengunjung	30.095.000,00	31.599.750,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.18.11.	Pembinaan, Pengampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pemenang Lomba Desa/ Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota	9 Juara	150.000.000,00	157.500.000,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.24.01.....	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya	100%			376.784.250,00	395.623.462,50		PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.....	Penilaian Angka Kredit Arsiparis			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Penilai-an Angka Kredit Arsiparis	30 Orang Arsiparis	24.599.900,00	25.829.895,00	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.....	Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terpilihnnya Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi	30 Orang Arsiparis	14.599.950,00	15.329.947,50	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
	Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Pembina-an, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD	43 SKPD	119.899.900,00	125.894.895,00		PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.....	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terciptanya Pengelola Arsip Yang Memahami Pemberkasan dan Penyusutan Arsip	50 Orang	108.674.750,00	114.108.487,50	Baru	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
1.24.01.....	Pelaksanaan Penerapan e--Arsip			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Pelati- han Penerapan Kearsipan Elektronik	50 Orang	109.009.750,00	114.460.237,50	Baru	PD yang melaksanakan urusan kearsipan

Tabel V.25
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Kelautan dan Perikanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									31.847.012.520	33.439.363.146		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									16.708.778.520	17.544.217.446		
BELANJA LANGSUNG									15.138.234.000	15.895.145.700		
1,5	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	BELANJA RUTIN								5.945.051.000	6.242.303.550		
1.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			3.980.166.000	4.179.174.300	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.0100	Penyediaan jasa surat menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya Perangkat materai dan benda pos lainnya Paket/ pengiriman	1 Paket	15.390.000	16.159.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi	12 Bulan	244.800.000	257.040.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.0700	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pangkalpinang			Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	263.520.000	276.696.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.0800	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor	12 Bulan	32.056.000	33.658.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.0900	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Pangkalpinang			Terpeliharanya peralatan kerja	12 Bulan	90.000.000	94.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.1000	Penyediaan alat tulis kantor			Pangkalpinang			Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	185.000.000	194.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.1100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya barang cetakan, penggandaan	1 Paket	65.000.000	68.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.1200	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Pangkalpinang			Tersedianya peralatan listrik	1 Paket	15.000.000	15.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.1500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pangkalpinang			Tersedianya Surat Kabar Majalah Sebagai Sarana Informasi	1 Paket	7.920.000	8.316.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5.01.1700	Penyediaan makanan dan minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Paket	53.000.000	55.650.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.1800	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			7 Kab/Kota			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	300.000.000	315.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.1800	Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah			7 Kab/Kota			Terlaksananya koordinasi dan Konsolidasi ked dalam daerah	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.1900	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran			Pangkalpinang			Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak	26 Orang	744.680.000	781.914.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.	Penyediaan bahan logistik kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	15.000.000	15.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.3900	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali			Sungailiat			Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	12 Bulan	545.660.000	572.943.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.4000	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak			Tanjung Krasak, Toboali			Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIAP Tanjung Krasak	12 Bulan	344.700.000	361.935.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.4100	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa			Tanjung Rusa, Belitung			Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIL Tanjung Rusa	12 Bulan	539.570.000	566.548.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.01.4400	Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)			Pangkalpinang			Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional LPPMHP	12 Bulan	368.870.000	387.313.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.335.420.000	1.402.191.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.02.1300	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	208.940.000	219.387.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.02.2400	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor	12 Bulan	506.130.000	531.436.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor			Pangkalpinang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung kantor	12 Bulan	100.000.000	105.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali			Sungailiat			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali	12 Bulan	158.100.000	166.005.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak			Toboali			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak	12 Bulan	157.400.000	165.270.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP			Pangkalpinang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP	12 Bulan	204.850.000	215.092.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			82.000.000	86.100.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.03.0501	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			Pangkalpinang			Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	120 PNS dan 55 Orang Honoror	82.000.000	86.100.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			175.000.000	183.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.02.1300	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur			Dalam dan Luar Daerah			Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, workshop	15 Pegawai	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.5.07.3200	Penilaian Angka Kredit JFT			Pangkalpinang			Usulan Penetapan Angka Kredit JFT	27 orang	25.000.000	26.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1.02.03.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	391.088.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2	URUSAN PILIHAN								9.193.183.000	9.652.842.150		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.05.20	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Pengembangan <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih			2.370.865.000	2.489.408.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.20.10	Vaksinisasi Induk Lele	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	BBIS Pemali, Sungailiat			Terlaksananya Vaksinisasi induk lele	1 Kegiatan	96.000.000	100.800.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.20.01	Pengembangan Budidaya Kerang dan Percontohan Budidaya Udang Galah	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Bangka Barat dan Bangka Tengah			Terlaksananya kegiatan Pengembangan budidaya kerang dan Percontohan budidaya udang galah	23 Kelompok (69.000 kg benih Kerang) dan 2 Kelompok Udang Galah	425.170.000	446.428.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.20.01	Pengadaan Induk Ikan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Kab Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Belitung			Terlaksananya kegiatan pengadaan induk ikan	2 HSRT dan 1 BBIL Kab dan 3 UPR/BBI Lokal	257.985.000	270.884.250	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.20.01	Pengadaan Sapras Budidaya Ikan Laut	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Belitung			Terlaksananya Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE (High Density Polyethylene)	4 Unit KJA HDPE	1.094.100.000	1.148.805.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.20.01	Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Sungailiat			Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	1 Paket	168.370.000	176.788.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.20.01	Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	BBIAP Tanjung Krasak, Bangka Selatan			Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Air payau (BBIAP) Tanjung Krasak	1 Paket	136.140.000	142.947.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.20.01	Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Tanjung Rusa, Belitung			Tersedianya Sarana Produksi UPTD Balai benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	1 Paket	193.100.000	202.755.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	181,000 ton dan NTN = 111			299.250.000	314.212.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.21.01	Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	7 Kab/Kota			Tersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap	7 Kab/Kota	47.250.000	49.612.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.21.02	Pembinaan Penerapan Log Book Perikanan dan PIPP	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	7 Kab Kota			Terlaksananya Pembinaan Penerapan Log Book Perikanan dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) sebagai pendukung penerapan	1 Kegiatan	48.850.000	51.292.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.21.05	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	7 Kab/Kota			Terlaksananya Sosialisasi SeHat Nelayan	1 Kegiatan SEHAT nelayan, 40 orang	75.650.000	79.432.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.21.06	Pembinaan akses permodalan bagi wanita nelayan dan KUB Perikanan tangkap	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Bangka Barat			Terlaksananya Akses Permodalan dan peningkatan kualitas adm keuangan KUB	2 Kegiatan	127.500.000	133.875.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26	Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton)	Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan			2.262.419.500	2.375.540.475	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26.03	Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	7 Kab/Kota			Terselenggaranya Bazar Hasil Perikanan, Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional, Sapari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI serta FORIKAN	4 Kegiatan dan Pemanfaatan Mobil ATI	563.524.500	591.700.725	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.05.26.07	Pengembangan Pengolahan Perikanan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Pangkalpinang			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk olahan hasil perikanan	30 Orang (Pelaku Usaha dan Pembina Mutu Daerah)	168.375.000	176.793.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26.09	Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya sosialisasi sistem pelayanan dan penerbitan SKP dan dilakukannya pembinaan di kabupaten/kota kepada para pelaku usaha baik terhadap UPI skala besar maupun skala UMKM	30 Orang (Pelaku Usaha dan Pembina Mutu Daerah)	159.450.000	167.422.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26.1800	Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Dalam dan Luar Daerah Prov Kep. Babel			Terlaksananya Pameran Industri Kelautan dan Perikanan	100%	319.305.000	335.270.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26.02	Pengadaan Bantuan Alat Pengolah Hasil Perikanan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Pangkalpinang			Terlaksananya pemberian bantuan alat pengolah untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)	13 UMKM	217.910.000	228.805.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26.15	Peningkatan kapasitas Laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	LPPMHP Ketapang-Pangkalpinang			Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM dan Analisis	20 orang	306.070.000	321.373.500	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26	Monitoring Pengujian Mutu dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan terhadap Kandungan Mikrobiologi dan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan di 7 Kab./Kota se Prov. Kep. Bangka Belitung	540 Sampel	151.300.000	158.865.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.26.02	Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Bangka Barat, Bangka Tengah			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Pengeringan dan Perebusan Teri	40 Paket	376.485.000	395.309.250	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.27	Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Kelautan Perikanan	Pengendalian pemanfaatan ruang, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif	Kawasan Konservasi 550.000 Ha dan POKMASWAS Aktif 35 Kelompok			4.260.648.500	4.473.680.925	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.27.01	Peningkatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Bangka Barat dan Bangka			Terlaksananya Transplantasi Terumbu Karang	1 Kegiatan	161.798.500	169.888.425	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.05.27.03	Sekolah Pantai Indonesia	Pengendalian pemanfaatan ruang, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Belitung			Terlaksananya Sekolah Pantai Indonesia	1 Kegiatan	262.145.000	275.252.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.27.04	Sistem Informasi Mitigasi Bencana, Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL)	Pengendalian pemanfaatan ruang, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang, Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Belitung Timur, Bangka Selatan dan Bangka Barat			Tersedianya sistem SIMAIL, tersebarluasnya data dan informasi (Fishing Ground, Gelombang Pasang Surut, dll), terlatihnya operator dan pengelola	Sistem Informasi Elektronik di 3 Kab Kota	138.875.000	145.818.750	Baru	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.27.08	Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	7 Kab/Kota			Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	2.902.450.000	3.047.572.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.27.08.4200	Peningkatan Fungsi Boost Center			Pangkalpinang			Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Boost Center	1 Dokumen	156.880.000	164.724.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
2.05.27.08.9800	Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			7 Kab Kota			Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Pengawas	12 Bulan	638.500.000	670.425.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

Tabel V.26
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pariwisata

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									5.264.173.000	5.527.381.650		
BELANJA LANGSUNG									5.264.173.000	5.527.381.650		
URUSAN PILIHAN									5.264.173.000	5.527.381.650		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata			Objek wisata terkelola baik (%)				1.595.542.000	1.675.319.100		PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Pengadaan Sarana Pendukung Objek Wisata		- Pengembangan destinasi wisata unggulan	Bangka belitung			Tersedianya fasilitas sarana pendukung objek wisata dan terciptanya masyarakat yang mampu memahami sadar wisata dan sapta pesona	280 Org peserta 5 lokasi pemasangan landmark dan pembangunan MCK	327.093.000	343.447.650	baru	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata		Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Pulau Bangka & Pulau Belitung			Jumlah masyarakat yang mendapat penghargaan bagi pelaku pariwisata da terciptanya sumber daya manusia bidang pariwisata yang berkualitas	50 org pokdarwis dan desa wisata dan pemilihan putri pariwisata, putri indonesia serta duta wisata	1.019.119.000	1.070.074.950	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
2700	Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung)		Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.	Pulau Bangka & Pulau Belitung			Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	86 pelaku pariwisata dan 2 dokumen kesepakatan	106.566.000	111.894.300	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Perlombaan Usaha Wisata Kuliner		Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.				jumlah UMKM dan Industri kreatif bidang pariwista	50 pelaku usaha	142.764.000	149.902.200	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	Pengembangan destinasi wisata unggulan		Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%)	75%			500.000.000	525.000.000		PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Pendukung pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia)			Pangkalpinang			Jumlah SDM sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang)	5 Kegiatan	500.000.000	525.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)				3.168.631.000	3.327.062.550		PD yang melaksanakan urusan pariwisata
0501	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri		Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.	Jawa, Sumatera, Bali		Jumlah partisipasi direct promotion, event pariwisata di dalam dan luar daerah	4 event promosi dalam daerah, 6 event promosi luar daerah, roadshow, pariwisata dalam negeri dan dalam daerah		1.054.203.000	1.106.913.150	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung dan Sumatra					Jumlah ketersediaan website untuk informasi budpar (paket)	2 Website, 50 artikel, 70 halaman translasi		138.140.000	145.047.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Pengembangan Pasar Pariwisata (Fam Trip)					Jumlah Peserta Famtrip (Widyawisata Pengenalan)	20 Tour Operator, 15 Pers Tour, 15 Photographer 10 Jurnalis		340.578.000	357.606.900	baru	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
4100	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)		Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.	Pangkalpinang		jumlah media cetak, media elektronik, media ruang, media digital	7.000 leaflet, 5000 peta pariwisata, 10.000 dvd pariwisata, 9000 godie bag, 5000 souvenir, 10.000 booklet.		638.375.000	670.293.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
4001	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)		Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.	Bandara Depati Amir- Bangka dan Bandara Hanadjuddin - Belitung		tersediannya informasi destinasi pariwisata bangka belitung	2 Tourist Information Centre (TIC)		354.390.000	372.109.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Dukungan Event Promosi)		Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.	Luar dan Dalam Daerah		Jumlah Pendukung even seni, budaya dan pariwisata daerah	8 Event (Nasional) 7 Kab/Kota		642.945.000	675.092.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pariwisata

Tabel V.27
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Pertanian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									47.950.795.966	50.348.335.765		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									15.356.697.636	16.124.532.518		PD yang melaksanakan urusan pertanian
BELANJA TIDAK LANGSUNG									5.509.568.330	5.785.046.747		PD Koordinasi Penyuluh
BELANJA LANGSUNG									27.084.530.000	28.438.756.500		
URUSAN PERTANIAN												
BELANJA RUTIN									7.977.892.000	8.376.786.600		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			6.152.877.000	6.460.520.850	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal	1 Tahun	9.047.000	9.499.350	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik			Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	260.500.000	273.525.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa administrasi Keuangan	1 Tahun	235.760.000	247.548.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa Kebersihan kantor	1 Tahun	42.000.000	44.100.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	50.000.000	52.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	60.000.000	63.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan percetakan dan penggandaan	1 Tahun	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	20.000.000	21.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	15.000.000	15.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	1 Tahun	35.000.000	36.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah			Luar Daerah			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	1 Tahun	350.000.000	367.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah			Dalam Daerah			Rapat-rapat koordinasi konsolidasi ke dalam daerah	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	3.460.690.000	3.633.724.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Pertanian			Dusun Pelempang, Desa Air Buluh, Kec Mendo Barat, Kab Bangka			Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	507.880.000	533.274.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Proteksi Tanaman			Desa Kace, kec Mendo Barat, Kab Bangka			Peningkatan fungsi pelayanan Balai Proteksi Tanaman	1 Tahun	367.000.000	385.350.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi			Desa Kace, kec Mendo Barat, Kab Bangka			Peningkatan fungsi pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi	1 Tahun	200.000.000	210.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan			Pangkalpinang			Peningkatan fungsi pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan	1 Tahun	200.000.000	210.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.077.550.000	1.131.427.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	198.900.000	208.845.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	70.000.000	73.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan pemeliharaan untuk gedung/kantor	1 Tahun	200.000.000	210.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/peningkatan fungsi			Pangkalpinang			Penyediaan pemeliharaan bagi kendaraan dinas/peningkatan fungsi	1 Tahun	608.650.000	639.082.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Prov. Kep. Babel	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			125.000.000	131.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Luar Daerah			Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS	1 Tahun	100.000.000	105.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penilaian Angka Kredit						Terlaksana kegiatan peningkatan fungsi pejabat fungsional khusus di dinas pertanian perkebunan dan peternakan provinsi kepulauan bangka belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada masing - masing peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau setingkat eselon I	Pejabat fungsional sebanyak 37 org yang meliputi : Pengawas benih tanaman 10 orang, Pengawas mutu hasil pertanian 4 orang, Analisis pasar hasil pertanian 2 orang, Wastukan 2 org, Wasbitnak 6 org, Penyuluh pertanian 5 org, Paramedik veteriner 1 org, statisi 1 org, perencana 1 org, pranata komputer 1 org	25.000.000	26.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	90%			622.465.000	653.588.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
	Data dan Statistik Pertanian Perkebunan dan Peternakan			Dalam dan Luar Daerah			Penyediaan Data dan statistik sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Dokumen data dan statistik sektor pertanian perkebunan dan peternakan untuk tahun 2016 dan 2017	250.000.000	262.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
BELANJA RUTIN									2.145.423.000	2.252.694.150		
2.01.2.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang, Luar Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			1.277.568.000	1.341.446.400	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal	1 tahun	20.000.000	21.000.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 tahun	48.000.000	50.400.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01. Penyediaan jasa administrasi keuangan		Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa administrasi keuangan	1 tahun	102.960.000	108.108.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	18.000.000	18.900.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	45.000.000	47.250.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.01.04.01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	65.600.000	68.880.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan Pelayanan Percetakan dan Penggandaan	1 tahun	43.000.000	45.150.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan Pelayanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	24.000.000	25.200.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01.	Penyediaan bahan logistik kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan bahan logistik kantor	1 tahun	4.008.000	4.208.400	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	35.000.000	36.750.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Luar Daerah			Penyediaan akomodasi dan transportasi untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	1 tahun	350.000.000	367.500.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	7 Kabupaten/Kota			terlaksananya rapat koordinasi dankonsolidasi ke dalam daerah	1 tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.01.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan pelayanan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi	1 tahun	372.000.000	390.600.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang	Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			349.690.000	367.174.500	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.01.04.02.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan Pemeliharaan bagi kendaraan dinas/Operasiona	1 tahun	349.690.000	367.174.500	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			25.700.000	26.985.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.03.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Penyediaan Pakaian seragam dinas bagi aparatur	pakaian seragam dinas bagi 39 aparatur	25.700.000	26.985.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Luar Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			120.000.000	126.000.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.05.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Luar Daerah			Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil	10 PNS	120.000.000	126.000.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	391.088.250	Sedang berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
I	URUSAN PILIHAN								14.383.431.000	15.102.602.550		
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				Meningkatnya kesejahteraan petani (%)	Tinggi			718.180.000	754.089.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	4 Kab (kab. basel, bangka, babar & beltung)			Pelaksanaan SL-PHT pada 100 orang petani tanaman perkebunan (lada) di kabupaten	100 orang	394.217.500	413.928.375	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
1.2	Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	6 Kab			Pelaksanaan pelantikan SKE pada 300 orang petani tanaman perkebunan di 6 kabupaten	300 orang	323.962.500	340.160.625	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan (%)	100%			637.195.000	669.054.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
2.1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Provinsi dan daerah penyelenggara event			Penyediaan sarana promosi produk-produk dan hasil dari produksi sektor pertanian/ perkebunan	3 Kali Event Produk Unggulan Daerah (PENAS, Sektor Perkebunan dan Sektor Tanaman Pangan & Hortikultura)	350.000.000	367.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
2.2	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Petani dan perkebunan besar Se-Prov			Nilai indeks K dan harga TBS Prov.Kep. Bangka Belitung	1 Tahun	287.195.000	301.554.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan(%)	50%			821.990.000	863.089.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
3.1	Pengadaan Peralatan Pasca Panen Lada	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Belitung, Belitung Timur dan Bangka Selatan			Sarana Prasarana Pasca Panen Lada	3 Unit Bak Perendaman	295.880.000	310.674.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
3.2	Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat			Peralatan Pengolahan Limbah Ternak	5 Unit Peralatan Pengolah Limbah (biogas, biourine dan sarana pengelolah pupuk organik)	526.110.000	552.415.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan				Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	100%			10.622.726.000	11.153.862.300	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.1	Sertifikasi Bibit Pertanian/Perkebunan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	6 Kab	Penangkar/ petani/ produsen benih Se-Prov			Penyediaan bibit unggul pertanian/perkebunan yang bersertifikat	Terlaksananya sertifikasi bibit unggul 3 komoditi , Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan.	159.735.000	167.721.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4.2	Pengawasan Peredaran Benih	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	6 Kab	Petani penangkar benih Se-Prov			Pelaksana Pengawasan benih	36 penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan, 5 penangkar benih hortikultura serta 73 kios maupun toko pertanian	237.330.000	249.196.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4.3	Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Prov Kep Bangka Belitung dan Kab/Kota	Prov Kep Bangka Belitung dan Kab/Kota			Terlaksananya Penelitian kultivar komoditas unggul lokal daerah	Komoditi lada dan duren	277.986.000	291.885.300	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4.4	Demplot Tanaman Lada Ramah Lingkungan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Kab. Bangka Tengah			Terlaksananya pemeliharaan demplot budidaya tanaman lada ramah lingkungan di Prov.Kep. Bangka Belitung	2 Hektar	143.940.000	151.137.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4.5	Intensifikasi Tanaman Lada	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	6 kab			Terlaksananya intensifikasi tanaman lada	825 Hektar	4.057.075.000	4.259.928.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4.6	Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Balai benih pertanian			Berkembangnya perbanyak produksi benih sumber sektor pertanian	Terfasilitasi perbanyak benih/ bibit sumber sektor pertanian	2.000.000.000	2.100.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4.7	Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Pangkalpinang			Penyusunan kebijakan KP3 provinsi kepulauan bangka belitung, Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penyaluran pupuk bersubsidi 7 kab/kota, Penguatan kelembagaan alsintan	4 dokumen (1 dok RDKK, database alsintan, 1 dok pengawas pupuk & pestisida dan 1 dok pengawasan alsintan	305.100.000	320.355.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
4.9	Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Padi	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Bangka Selatan (KTM) dan Belitung			Terealisasinya pelaksanaan GP-PTT tanaman pangan (padi) di provinsi kepulauan bangka belitung	Padi 2 Kabupaten, 400 Hektar	2.944.300.000	3.091.515.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.10	Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	7 Kab Kota			Terlaksananya pengembangan komoditas hortikultura dan Teregisternya kebun dalam rangka mendukung sertifikasi produk pertanian	Bawang Merah 2 lokasi: 5 Ha,Cabe keritng 2 Lokasi : 2 Ha, register kebun 6 pelaku usaha 3-5%	497.260.000	522.123.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	0,50%			140.830.000	147.871.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
5.1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dan Zoonosis	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	7 Kab/Kota			Terfasilitasinya pengawasan dan pemantauan status kesehatan hewan/ternak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/Kota	140.830.000	147.871.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan				Meningkatnya daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	100%			1.442.510.000	1.514.635.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
6.1	Peningkatan Produksi Peternakan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur			Meningkatnya produksi (populasi) sapi dan unggas ternak di Prov.Kep. Bangka Belitung	600 ekor sapi sapi bunting	1.442.510.000	1.514.635.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan pertanian
URUSAN PILIHAN									2.577.784.000	2.706.673.200		
2.01.2.01.04.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja	Pangkalpinang, 7 kabupaten/Kota, Luar daerah	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani (%)	100%			2.426.884.000	2.548.228.200	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.15. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis		Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja	Pulau Bangka dan Pulau Belitung			Terlaksananya pertemuan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2kali	247.725.000	260.111.250	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.01.04.15.	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja	Pangkalpinang			Terpilihnnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel	19 kategori (Pertanian, Perikanan, Kehutanan)	424.850.000	446.092.500	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.15.	Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja	3 Lokasi (Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Belitung)			Terlaksananya magang penyuluh/Petugas dan pelaku utama pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Prov. Kep. Babel	600.000.000	630.000.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
	Keikutsertaan Pada Event Penyelenggaraan PENAS	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja	Aceh			Terlaksananya PENAS XV Petani Nelayan Tahun 2017 di Provinsi Nangro Aceh Darusallam yang lancar dan sukses	Peserta utama provinsi/KTNA provinsi 25 orang, peserta utama kab/kota/ KTNA kabupaten/Kota 295 orang, pendamping provinsi 25 orang, peninjau provinsi 25 orang	824.700.000	865.935.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
xxxx	Peningkatan pelayanan fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Penyusunan rekomendasi Komisi Penyuluhan perikanan, dan kehutanan kepada Pemerintah Provinsi	1 dokumen	100.292.000	105.306.600	Baru	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.20.	Penyusunan programa Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya pedoman kerja bagi penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan	1 (satu) pedoman	143.375.000	150.543.750	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.20.	Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kinerja Penyuluh dalam Penyelenggaraan Penyuluhan	Tersusunnya Hapak Penyuluh Provinsi sebanyak 13 Orang	25.000.000	26.250.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.20.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Pangkalpinang			Meningkatnya operasional Balai Penyuluhan Pertanian/Kecamatan, terlaksananya kegiatan sosialisasi data kelembagaan dan tersedianya data kelembagaan penyuluhan	1 (satu) kegiatan sosialisasi, data kelembagaan penyuluhan 7 kab./kota	60.942.000	63.989.100	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.01.04.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)	100%			150.900.000	158.445.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan
2.01.2.01.04.18. Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien	7 Kabupaten/Kota			Tersebar nya materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ke 7 kabupaten/kota melalui media elektronik dan website	7 Kabupaten/kota	150.900.000	158.445.000	Sedang Berjalan	Unit yang membidangi Penyuluhan

Tabel V.28
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Kehutanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									19.452.124.780	20.119.217.769		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									8.109.496.780	8.514.971.619		
BELANJA LANGSUNG									11.342.628.000	11.604.246.150		
URUSAN KEHUTANAN												
1	BELANJA RUTIN								4.793.145.000	4.727.289.000		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			3.545.560.000	3.722.838.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			Terlaksananya Pelayanan dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos	1 Tahun	30.000.000	31.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tahun	114.000.000	119.700.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Tahun	149.430.000	156.901.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	47.800.000	50.190.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			tersedianya ATK	1 Tahun	90.000.000	94.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	60.000.000	63.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			terpenuhi Komponen Instalasi Listrik	1 Tahun	30.000.000	31.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			terpenuhi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1 Tahun	7.200.000	7.560.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			tersedianya makan dan minum rapat makanan dan minum tamu	1 Tahun	34.700.000	36.435.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
9	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			tersedianya logistik untuk kantor	1 Tahun	12.840.000	13.482.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	350.000.000	367.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
11	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	7 Kab/Kota			terlaksananya rapat koordinasi dankonsolidasi ke dalam daerah	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
12	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pangkalpinang			terlaksanan pelayanan penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran	1 Tahun	286.090.000	300.394.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Kehutanan di Bangka Tengah dan bangka Selatan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bangka Tengah			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	1 Tahun	160.640.000	168.672.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka dan Bangka Barat	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bangka Barat			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	1 Tahun	160.640.000	168.672.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung dan Belitung Timur	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bangka Selatan			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	1 Tahun	260.640.000	273.672.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab.Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka dan Belitung Timur			Terlaksanaya operasionalisasi KPH	1 Tahun	1.561.580.000	1.639.659.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			643.620.000	675.801.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Pangkalpinang			terpeliharanya gedung kantor	10 bln	173.000.000	181.650.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Pangkalpinang			terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bln	335.620.000	352.401.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Pangkalpinang			tersedianya peralatan kantor berupa kamera foto, GPS, laptop,drone dan kulkas	1 unit kulkas, 1 unit kamera, 1 unit drone, 1 unit handycam, 1 paket CCTV dan 2 unit GPS	135.000.000	141.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
C	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			150.000.000	328.650.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pangkalpinang			terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan	aparatur/SDM kehutanan	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
D	Program Peningkatan Disiplin Daya Aparatur	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya konsumsi masyarakat		Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			81.500.000	85.575.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pangkalpinang			tersedianya pakaian dinas beerta perlengkapannya	78 orang x 1 stel pakaian dinas	81.500.000	85.575.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
URUSAN PILIHAN									6.549.483.000	6.876.957.150		
	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	5 (rekomendasi)			1.497.298.000	1.572.162.900	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
	Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	7 Kab/Kota			terslaksananya Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan		120.000.000	126.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI)	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	6 kabupaten dan Kota Pangkalpinang (sosialisasi)			Terselenggaranya Sosialisasi HTI	Pertemuan dengan aparat desa dan pembinaan ke perusahaan	127.180.000	133.539.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
2	Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	7 Kab/Kota			Terselenggaranya sosialisasi, verifikasi. Pendampingan dan ama Kelompok Tani Hutan -Hutan Tanaman Rakyat	10 Verifikasi KTH, 8 Tenaga Pendamping, 1 kalibimbingan teknis,	318.553.000	334.480.650	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
3	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Jakarta, Pangkalpinang,			Terlaksananya promosi produk-produk hasil hutan kayu dan bukan kayu	6 bln	384.910.000	404.155.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
4	Pengembangan Gaharu	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Bangka Tengah			Terfasilitasinya Bantuan Saran dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran HHBK	1 Gapoktan Gaharu dan Sarana Pengolahan HHBK	465.000.000	488.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
6	Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pangkalpinang			teridentifikasinya kendala dan masalah pembangunan HTI	8 IUPHHK-HTI	81.655.000	85.737.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	7 Kab/Kota	terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan				843.630.000	885.811.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
2	Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya kegiatan penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaatan SIG Kehutanan	10 bln	141.070.000	148.123.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
3	Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	6 Kab			Terlaksananya kegiatan yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan	40 KM trayek batas luar kawasan hutan dan 6 kali bimtek	122.770.000	128.908.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
4	Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pangkalpinang			Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan evaluasi bidang perpetaan kehutanan	30 orang	97.030.000	101.881.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
5	Monitoring dan Evaluasi zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	6 Kab			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan	3 Pemegang Izin	135.800.000	142.590.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se- Prov. Kep. Babel	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se- Provinsi Kep. Babel	7 Kab/Kota	184.780.000	194.019.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
7	Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pangkalpinang			Terlaksananya bibingan teknis terhadap IPPKH dan aparaturnya Kehutanan	40 Peserta	55.180.000	57.939.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
8	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pangkalpinang			Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi NSDH	1 dokumen	107.000.000	112.350.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
Perlindungan dan Konservasi SDA					Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan (Ha)	60 orang tenaga pengamanaan swakarsa dan 10 polisi kehutanan			1.516.875.000	1.592.718.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
1	Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (PamHut)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	7 Kab/Kota			Terselenggaranya Upaya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan	15 orang PamHut	464.320.000	487.536.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	6 Kabupaten			Terlaksananya Pertemuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan	1 Kali	180.800.000	189.840.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
3	Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	6 Kabupaten			Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	1 kali	190.420.000	199.941.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
4	Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	6 Kabupaten			Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu	6 Kab	188.720.000	198.156.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
5	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	7 Kab/Kota			Tersedianya Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	Terpilainya 3 Nominansi PKA Wana Lestari	145.330.000	152.596.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
6	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Prov. Kep. Babel	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	Bangka Tengah dan Kab.Belitung			Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Di Prov. Kep. Babel	2 Dokumen	135.825.000	142.616.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	Kab.Belitung			Tersusunnya Buku Potensi dan sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel	1 dokumen	131.910.000	138.505.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
8	Inventarisasi Ekosistem Esensial di Prov. Kep. Babel	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	Pulau Bangka			Tersedianya Data Ekosistem Essensial di Prov. Kep. Babel	1 Dokumen	79.550.000	83.527.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan					Penurunan Luas Lahan Kritis	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas			2.691.680.000	2.826.264.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
1	Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se- Prov. Kep. Babel	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	Kab. Bangka (2 IPPKH) dan Kab. Belitung Timur (1 IPPKH)			Terlaksananya Pengawasan terhadap Pemegang IPPKh se Provinsi dalam rangka pemenuhan kewajiban	3 Pemegang IPPKh	112.550.000	118.177.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
2	Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Prov. Kep. Babel	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	Bangka Barat, Bangka dan Kab Belitung Timur			Terpeliharanya Sumber Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang Bermutu baik dan bersertifikasi	3Tegakan Benih teridentifikasi dan 4 Pengada/Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan	211.000.000	221.550.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
3	Rehabilitasi Lahan Kritis di dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	6 Kabupaten			Terlaksananya Areal Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan	60 Ha	1.151.630.000	1.209.211.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
4	Penanaman dalam Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	Kab. Bangka			Telah terehabilitasi DAS seluas 70 Ha	70 Ha	685.500.000	719.775.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
5	Puncak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	Kab. Bangka Barat			Tercapai Jumlah Penghijauan/penanaman yang dilakukan provinsi	10 Juta Pohon	280.540.000	294.567.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
6	Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan kerusakan lingkungan	bangka tengah, belitung dan belitung timur			Terlaksananya Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatn (HKm) dan Hutan Desa	11 Kelompok HKm dan 1 HD	250.460.000	262.983.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan kehutanan

Tabel V.29
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output						
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
TOTAL BELANJA									21.110.443.905	22.296.723.600			
BELANJA TIDAK LANGSUNG									10.159.865.905	10.667.859.200			
02	BELANJA LANGSUNG									10.950.578.000	11.628.864.400		
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
1	BELANJA RUTIN									4.529.445.000	4.621.674.750		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan rural urban linkages	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			3.483.700.000	3.657.885.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Tersedianya Perangkat, materai dan benda post lainnya paket /	Perangko, materai dan benda pos lainnya	15.600.000	16.380.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Pangkalpinang			Terbayarnya Jasa listrik, Telekomunikasi dan Informasi	1 Tahun	108.000.000	113.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
3	Penyedia jasa administrasi keuangan			Pangkalpinang			Berkas administrasi keuangan	1 Tahun	228.810.000	240.250.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
4	Penyediaan jasa Kebersihan kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor	1 Tahun	18.000.000	18.900.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
5	Penyediaan alat tulis kantor			Pangkalpinang			Tersedianya ATK yang memadai	1 Tahun	168.000.000	176.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
6	Penyedia barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	Spanduk, Cetak Buku dan Fotocopy	66.000.000	69.300.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Pangkalpinang			Tesedianya peralatan listrik	Lampu, kabel dan komponen elektronik lainnya Selama 12 Bulan	6.500.000	6.825.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pangkalpinang			Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Peraturan Perundang-	Surat kabar/majalah dan buku selama 12 Bulan	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	
9	Penyediaan makan dan minum			Pangkalpinang			Tersedianya makan dan minum rapat	1 Tahun	39.300.000	41.265.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah			Terlaksananya perjalanan Dinas luar daerah	1 Tahun	300.000.000	315.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
11	Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran			Pangkalpinang			Terbayarnya Tenaga Honorer	Honorarium tenaga cleaning services 11 orang, petugas keamanan 6 orang, sopir 5 orang	543.490.000	570.664.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
12	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			7 Kab/Kota			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka			Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Menunggu P3D Selesai	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Tengah			Kabupaten Bangka Tengah			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Menunggu P3D Selesai	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Barat			Kabupaten Banggka Barat			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Menunggu P3D Selesai	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka Selatan			Kabupaten Bangka Selatan			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Menunggu P3D Selesai	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung			Kabupaten Belitung			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Menunggu P3D Selesai	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung Timur			Kabupaten Belitung Timur			Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Menunggu P3D Selesai	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan rural urban linkages	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			511.180.000	536.739.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	AC, Filling Cabinet, Rak arsip, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Sofa Tamu, Dispenser, Gelas, Tatakan Gelas, Piring, Sendok, Garpu, Cangkir, Mangkok dan Pisau	194.500.000	204.225.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor			Pangkalpinang			Perbaikan peralatan kerja	1 tahun	39.600.000	41.580.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	277.080.000	290.934.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
29	DED Pembangunan Laboratotrium			Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang			Tersedianya DED Gedung Kantor	2 DED	-	-	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penguatan rural urban linkages	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			62.100.000	65.205.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
37	Pengadaan Pakaian Dinas			Pangkalpinang			Pakaian Dinas yang memadai	190 Orang	62.100.000	65.205.000	Baru	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan rural urban linkages	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000	105.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
38	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Luar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Bertambahnya sumber daya aparatur dinas yang terlatih	10 aparatur	100.000.000	105.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	URUSAN PILIHAN								6.421.133.000	7.007.189.650		
F	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Persentase elektrifikasi (%)	2 PLTS Terpusat, 300 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,			4.436.922.000	4.658.768.100		PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.									
41	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Belitung, Bangka tengah, Belitung Timur dan Bangka			Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Tenaga Surya Dip Prov.Kep. Babel	4 Kab/Kota	3.799.167.000	3.989.125.350	Baru	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
42	Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya penyelenggaraan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan	1 Tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
43	Verifikasi dan validasi Program Pemasangan Listrik di Perdesaan			7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya data Verifikasi dan Validasi Pemasangan Listrik Perdesaan yang Tepat sasaran	7 Kab/Kota	100.000.000	105.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
44	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)			7 Kab/Kota			Terlaksananya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	1 Tahun	294.250.000	308.962.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
46	Sosialisasi Ketenagalistrikan untuk Operator Mesin Diesel			Pangkalpinang			Terlaksananya pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam Bidang Kelistrikan	35 Orang	50.000.000	52.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
3	Bimtek pengoperasian dan pemeliharaan PLTS			Pangkalpinang			terlaksanya bimtek tentang pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam Bidang Kelistrikan	1 kali Bimtek	43.505.000	45.680.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
G	Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi (%)	75%			140.985.000	148.034.250		PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
47	Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi FKDPM			7 Kab/kota dan Luar daerah			Pembahasan lifting dan DBH Migas, partisipasi dalam kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)/FKDPM dan Fasilitas Sektor Hulu Migas dengan Pemerintah Pusat/Pihak Terkait	DBH sektor MIGAS 3 Miliar / Tahun	140.985.000	148.034.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
D	Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah	Penguatan rural urban linkages	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah	60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidikan kebumian dan 40 laporan supervisi pengelolaan air tanah			1.471.556.000	1.545.133.800		PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.									
3	Survey Perizinan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 Kab/Kota			Tersedianya Data Perizinan Eksplorasin	7 Kab/Kota	67.474.000	70.847.700	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
50	Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 Kab/Kota			Tersedianya Data Hasil Penyelidikan Kebumian	data calon geopark, identifikasi air tanah dan peristiwa kebumian	226.209.000	237.519.450	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
51	Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 Kab/Kota			Terselenggaranya Pembinaan dan Supervisi pengelolaan air tanah yang baik	7 Kab/Kota	90.878.000	95.421.900	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
52	Penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral			7 Kab/Kota			Penyediaan informasi data Sumber Daya Mineral	data dan Peta	166.220.000	174.531.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
53	Kajian Pengelolaan Mineral Ikutan Timah			7 Kab/Kota			Tersedianya data tentang mineral ikutan timah	1 Dokumen Analisis Pengelolaan Mineral Ikutan	245.775.000	258.063.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
55	Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			7 Kab/Kota			Tersedianya data untuk menentukan pajak air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Data dan Laporan	675.000.000	708.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
I	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Penguatan rural urban linkages	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%)	120 izin usaha pertambangan dan 40 perusahaan pertambangan			371.670.000	655.253.500		PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang	Meningkatnya fungsi dan produktivitas lahan kritis dan lahan eks tambang sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat									
2	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum			Luar Daerah		100%	terlaksananya sosialisasi dan rekonsiliasi PNPB sumber daya minerba	3 Sosialisasi dan 8 rapat rekonsiliasi	144.120.000	151.326.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
57	Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan			7 Kab/Kota		100%	Tersedianya data di bidang kegiatan usaha pertambangan Babel	20 Perusahaan	70.000.000	73.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
58	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		100%	Terlaksananya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 Nominator	50.000.000	52.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
62	Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL)			7 Kab/Kota		100%	Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan	Dokumen	107.550.000	112.927.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral

Tabel V.30
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									24.263.363.745	25.271.330.432		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									16.417.744.745	17.238.631.982		
BELANJA LANGSUNG									7.845.619.000	8.032.698.450		
URUSAN PERINDUSTRIAN									7.845.619.000	8.032.698.450		
2.07 BELANJA RUTIN									3.234.853.000	3.191.394.150		
2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			2.165.390.000	2.273.659.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.0100	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	14.080.000	14.784.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.0200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	201.000.000	211.050.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.0700	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	141.570.000	148.648.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.0800	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	15.600.000	16.380.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.1000	Penyediaan alat tulis kantor	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	115.500.000	121.275.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.1100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	40.000.000	42.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.1200	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya penyediaan komponen instalas listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	14.000.000	14.700.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.1500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	26.000.000	27.300.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.1700	Penyediaan makanan dan minuman	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	65.150.000	68.407.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.1800	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Luar daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	410.000.000	430.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	972.490.000	1.021.114.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	7 Kab/Kota			Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi kedalam daerah	1 tahun	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
2.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pegawai	100%			519.870.000	340.662.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
02.XXX	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	3 mobil dan 11 motor	195.430.000	205.201.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
02.2200	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 tahun	118.440.000	124.362.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
01.1300	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	178.000.000	186.900.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
02.2800	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	1 tahun	28.000.000	29.400.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.07.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			75.600.000	79.380.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
03.0200	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	124 stel batik dan 34 stel seragam pegawai honorer	75.600.000	79.380.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
2.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			101.528.000	106.604.400	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
05.0100	Pendidikan dan pelatihan formal	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	15 Aparatur	80.000.000	84.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Penilaian Angka Kredit	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya nilai Angka Kredit Jafung Penyuluh perindag dan penguji mutu	16 Aparatur Pejabat fungsional tertentu	21.528.000	22.604.400	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
2.07.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan	100%			372.465.000	391.088.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
2.07 URUSAN WAJIB									4.610.766.000	4.841.304.300		
URUSAN PERDAGANGAN									4.610.766.000	4.841.304.300		
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok (%)	50%			531.150.000	557.707.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 Kab/Kota			Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	1 tahun	246.830.000	259.171.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pangkalpianang dan Sungailiat			Tersedianya Pos layanan Pengaduan Konsumen	8 Lokasi	35.380.000	37.149.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Luar daerah			Terselenggaranya Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	1 Kegiatan	53.990.000	56.689.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Pelayanan Online UPTD BSPM	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pangkalpinang			Peningkatan layanan kepada pelanggan UPTD BSPM	Eksportir Lada dan Pabrik CPO	52.000.000	54.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Akreditasi Laboratorium Kalibrasi UPTD BSPM	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pangkalpinang			Terlaksananya peningkatan layanan Laboratorium UPTD BSPM	1 Kegiatan	142.950.000	150.097.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah	20%			1.026.421.000	1.077.742.050	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Pangkalpinang			Terlaksananya peningkatan kapasitas laboratorium ekspor dan impor	100%	325.520.000	341.796.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Monitoring Mutu Lada Putih, CPO dan Karet	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	6 kab se provinsi kepulauan bangka belitung			terselenggaranya monitoring kualitas mutu, CPO dan karet	1 Kegiatan	145.990.000	153.289.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	pangkalpinang			terpeliharanya status akreditasi di UPTD BSPM disperindag	100%	61.120.000	64.176.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Verifikasi Data Ekspor dan Impor	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya verivikasi data ekspor impor	7 kab/kota	55.850.000	58.642.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Verifikasi Ekspor Timah	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 kab/kota			TerlaksananyaKegiat an Ekspor Timah Oleh Tim Verifikasi	7 kab/kota	406.370.000	426.688.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Pelatihan Prosedur Ekspor	Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Luar daerah			terbiayainya pelatihan prosedur ekspor terhadap 7 pelaku usaha	1 kali	31.571.000	33.149.550	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%)	7%			3.053.195.000	3.205.854.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Koordinasi Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Indeks Gini	7 Kab/Kota			terlaksananya Pengawasan dan monitoring bahan pokok dan strategis	1 kegiatan	57.027.000	59.878.350	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan data informasi perdagangan dalam negeri	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Menurunnya disparistas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	7 Kab/Kota			data informasi perdagangan daerah	10 buku	40.583.000	42.612.150	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	Subsidi barang Kebutuhan Pokok	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Indeks Gini	7 Kab/Kota			Terlaksananya subsidi barang Kebutuhan Pokok pada masyarakat	30.000 Kepala Keluarga	2.955.585.000	3.103.364.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan

Tabel V.31
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Perindustrian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									2.741.114.000	2.878.169.700		
BELANJA LANGSUNG									2.741.114.000	2.878.169.700		
URUSAN PERINDUSTRIAN									2.741.114.000	2.878.169.700		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					Meningkatnya asosiasi UMKM	75%			1.166.858.000	1.225.200.900	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pengembangan Furniture Batang Kelapa	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Kurau Kab. Bateng			Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Produk furniture berbahan baku batang kelapa	1 kali	166.570.000	174.898.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Diversifikasi Produk Olahan Gula Aren	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Kab Belitung Timur			Jumlah Pengrajin yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh terkait dengan pembuatan kecap dari air kelapa dan gula aren	1 Kegiatan	97.656.000	102.538.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Promosi Produk IKM di event nasional	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Jakarta dan Batam			bertambahnya produk IKM yang berdaya saing dan diperkenalkan baik secara nasional maupun internasional	2 event laur daerah	244.542.000	256.769.100	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pojok OVOP di Pasar Modern	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Kab Bangka Tengah			Tersedianya media penjualan atau pemasaran produk OVOP di Pasar Modern	13 IKM OVOP	65.070.000	68.323.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Sertifikasi Halal, Haki dan Uji Nutrisi dan Penyuluhan keamanan untuk PIRT	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 Kab/Kota			terfasilitasinya penyuluhan keamanan pangan, sosialisasi,sertifikasi halal dan uji nutrisi	50 IKM per masyarakat	147.850.000	155.242.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pemberdayaan Klinik Kemasan	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	pangkalpinang			Jumlah Design Produk IKM yang telah terfasilitasi dalam rangka pemberdayaan klinik kemasan di prov kep babel	120 Design produk IKM	267.435.000	280.806.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 Kab/Kota			Jumlah IKM yang terbinaanya dalam rangka memberikan informasi dan menciptakan sistem kerja yang lebih produktif oleh PFPP dan Shindanshi	224 IKM	103.550.000	108.727.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Kab. Bangka			Jumlah peserta yang selesai mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan nanas	25 peserta	74.185.000	77.894.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					Meningkatkan penggunaan teknologi industri (%)				77.813.000	81.703.650	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Keramik di Kabupaten Bangka	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Kab. Bangka			terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat	1 Kegiatan	77.813.000	81.703.650	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan					Meningkatnya nilai tambah industri berbasis komoditi kerajinan (%)				799.807.000	839.797.350	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Gelar Produk Kerajinan	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	pangkalpinang			meningkatnya jumlah perajin dalam memasarkan produk kerajinan	24 perajin	102.080.000	107.184.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Sekretariat Dekranasda	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	pangkalpinang			administrasi sekretariat dan showroom dekranasda prov kep babel	1 Kegiatan	504.202.000	529.412.100	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Rumah Rajutan	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	pangkalpinang			jumlah IKM /masyarakat yang mendapatkan layanan rumah rajutan	75 Masyarakat Pengrajin	91.510.000	96.085.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pelatihan Kerajinan di Desa Wisata	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Desa Wisata (desa sungai daeng kab babar da desa tanjung bingak Kab belitung)			jumlah IKM yang selesai mengikuti pelatihan kerajinan di desa wisata	30 peserta	102.015.000	107.115.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
Program Penataan Struktur Industri					Meningkatnya kelas struktur industri (%)		Tinggi		441.330.000	463.396.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pangkalpinang			diperolehnya dokumen RIPIP	1 paket	198.900.000	208.845.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembinaan Produk OVOP	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 Kab/Kota			terlaksananya fasilitasi pembinaan Produk OVOP	7 IKM di kab/Kota	141.940.000	149.037.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 Kab/Kota			Terlaksananya forum koordinasi	1 tahun	100.490.000	105.514.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro)					Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam	7%			215.291.000	226.055.550	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pengembangan Industri Berbasis Gaharu (Minyak Atsiri) di Kabupaten Bangka Tengah	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Kab. Bateng			terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat	1 Kegiatan	140.070.000	147.073.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kabupaten Bangka	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	kab. bangka			terlaksananya pembinaan keterampilan dan kualitas aparatur dan masyarakat	1 Kegiatan	75.221.000	78.982.050	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial					Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial	2%			40.015.000	42.015.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
	Pendataan Industri Besar/IAMT	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	pangkalpinang			diperolehnya data industri yang valida dan terbaru	1 paket	40.015.000	42.015.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan urusan perindustrian

Tabel V.32
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Urusan Transmigrasi

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									765.975.000	804.273.750		
BELANJA LANGSUNG									765.975.000	804.273.750		
4	URUSAN PILIHAN								765.975.000	804.273.750		
URUSAN KETRANSMIGRASIAN									765.975.000	804.273.750		
4.1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkat dan Meratanya Aktivitas Perekonomian di Kawasan-kawasan Desa	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan	600 KK			164.722.500	172.958.625	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
	Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi			KTM Batu Betumpang			Terlaksananya Rapat Pokja KTM	Terpenuhi	103.020.000	108.171.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
	Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi			Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor	2 MOU	61.702.500	64.787.625	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
4.2	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh Proses Pembangunan	Prov. Kep. Bangka Belitung	Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina	100%			601.252.500	631.315.125		PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
	Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi			Prov. Kep. Bangka Belitung		30 orang 5 kegiatan	Terlaksanya Binte/ Pelatihan Ternak Kecil, Pelatihan Pengembangan Pupuk Organik, Pelatihan Adaptasi Sosial, Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan Ternak	30 orang 5 kegiatan	173.355.000	182.022.750	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
	Gema Hari Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Prov. Kep. Bangka Belitung		100%	Terselenggaranya Peringatan Hati Bhakti Transmigrasi ke 67 Tahun 2017 di Prov. Kep. Bangka Belitung	100%	200.972.500	211.021.125	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
	Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi			UPT Jebus, Bangka barat		Bantuan Pupuk	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Bantuan Pupuk	155.070.000	162.823.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
	DED Sarana dan Prasarana Transmigrasi			KTM Batu Betumpang		DED KTM Batu Betumpang	Terlaksananya penyusunan DED Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	71.855.000	75.447.750	sedang berjalan	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi

Tabel V.33
Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2017
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
TOTAL BELANJA									363.667.565.066	389.067.002.127		
BELANJA TIDAK LANGSUNG									11.877.409.590	12.174.344.830	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									51.593.812.480	54.173.503.104	PD Kesekretariatan Daerah	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									10.262.621.635	10.775.752.717	PD Kesekretariatan DPRD	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									12.145.426.685	12.752.698.019	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									6.877.365.105	7.427.554.313	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									9.789.570.490	10.279.049.015	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									37.933.909.930	39.830.605.427	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									2.749.654.307	2.969.626.652	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									4.025.421.391	4.226.692.461	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara	
BELANJA LANGSUNG									216.412.373.452	234.457.175.590		
BELANJA RUTIN									5.768.695.000	5.966.006.400		
1.06.1.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.845.200.000	3.072.816.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.01.0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			Pembelian Perangko materai dan benda pos lainnya serta jasa pengiriman/paket	12 bulan	16.000.000	17.280.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Pembayaran jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	12 bulan	326.000.000	352.080.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.0700	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan			Pangkalpinang			Pembayaran honorarium Pengelolah keuangan	28 Orang (24 Pria dan 4 Wanita)	174.900.000	188.892.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pangkalpinang			Pembelian peralatan kebersihan kantor	12 bulan	30.000.000	32.400.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.0900	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pangkalpinang			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	190.000.000	205.200.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			Pembelian alat tulis kantor	1 Paket	120.000.000	129.600.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Pangkalpinang			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	213.000.000	230.040.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Pembelian komponen dan peralatan listrik	1 Paket	30.000.000	32.400.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pangkalpinang			Penyediaan Surat kabar, majalah	12 bulan	50.000.000	54.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	30.240.000	32.659.200	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1700	Penyediaan Makanan dan Minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makanan minuman rapat	12 bulan	100.000.000	108.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1800	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Daerah			Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	1 Tahun	650.000.000	702.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.1900	Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			Pembayaran Honorarium Tenaga honorer/Kontrak	25 Orang selama 13 Bulan (15 Pria dan 10 Wanita)	715.060.000	772.264.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.01.8800.	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah			6 Kabupaten			Terfasilitasinya perjanan dinas dalam daerah	1 Tahun	200.000.000	216.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.02 .	Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tupoksi	100%			2.503.130.000	2.703.380.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.02 .0700	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Pengadaan genset dan rumah genset	1 Unit dan 1 paket	800.000.000	864.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.01.02 .1300.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			Pengadaan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor	14 Paket	691.900.000	747.252.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.02 .2200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang			Pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	1 gedung	30.000.000	32.400.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.02 .2400.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang			Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	9 Unit roda 4 dan 19 unit roda 2	431.230.000	465.728.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.02 .3300	Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Tempat parkir dan Halaman Kantor			Pangkalpinang			Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor	1 Tahun	50.000.000	54.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.02 .xxxx	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	500.000.000	540.000.000	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.03 .	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Presentase peningkatan sarana penunjang disiplin aparatur	100%			47.900.000	51.732.000		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.03 .0501.	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			Pangkalpinang			Pakaian khusus hari-hari tertentu	101 stel Pakaian (60 Laki-Laki/41 Perempuan)	47.900.000	51.732.000		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.06 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	138.078.000		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.06 .0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
01.20.03	BELANJA RUTIN								108.686.220.400	114.819.228.267		
01.20.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			30.413.918.000	31.934.613.900		PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.01.00	Penyediaan jasa surat menyurat			Pangkalpinang			Jumlah capaian benda pos yg dibeli, jasa pengiriman dan pembayaran PBB	12 bln	329.926.000	346.422.300	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.02.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Pangkalpinang			Jumlah capaian pembayaran telepon, air, listrik dan langgaran faksimili/tv/internet	12 bln	4.722.300.000	4.958.415.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.03.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	920.000.000	966.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	569.556.000	598.033.800	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.08.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	690.000.000	724.500.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.09.00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	335.000.000	351.750.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.10.00	Penyediaan alat tulis kantor			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan alat tulis kantor	12 bln	700.000.000	735.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.11.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bln	650.000.000	682.500.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.12.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan alat listrik dan elektronik	12 bln	175.000.000	183.750.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.13.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.346.900.000	1.414.245.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
01.20.03.01.14.00	Penyediaan peralatan rumah tangga			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan peralatan kebersihan rumah jabatan	12 bln	192.000.000	201.600.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.15.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pangkalpinang			Jumlah penyediaan bahan bacaan dilingkungan setda	12 bln	618.720.000	649.656.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.16.00	Penyediaan bahan logistik kantor			Pangkalpinang			Jumlah capaian penyediaan bahan logistik kantor	'42 tbg pemadam kebakaran, 333 tabung gas dan 3000 galon air	108.345.000	113.762.250	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.17.00	Penyediaan makanan dan minuman			Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan aparatur	12 Bulan	3.080.000.000	3.234.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			Luar Bangka Belitung			Terlaksananya koodinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	4.000.000.000	4.200.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.19.00	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang dan Belitung			Terbayarnya honorarium pegawai non PNS	12 Bulan	5.731.746.000	6.018.333.300	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.22.00	Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah			Pangkalpinang dan Belitung			Jumlah capaian jasa pelayanan tamu pemerintah	35.000 orang	1.000.000.000	1.050.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.26.00	Rumah Dinas Gubernur			Pangkalpinang			Terlaksananya kegiatan kedinasan di gubernuran	12 Bulan	2.214.000.000	2.324.700.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.74.00	Biaya pengelolaan gedung Wisma Bougenville			Belitung			Terlaksananya pengelolaan wisma Bougenvile	12 Bulan	1.394.500.000	1.464.225.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.75.00	Pengelolaan Inventarisasi aset dilingkungan Setda			7 Kabupaten/Kota			Terlaksananya inventarisasi asset di Setda	1 Tahun	84.475.000	88.698.750	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.79.00	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan intern SKPD			Pangkalpinang			Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan dilingkungan setda	1 Kegiatan	51.450.000	54.022.500	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.01.80.00	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah			7 Kabupaten/Kota			Lancarnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	1.500.000.000	1.575.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tingkat pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	14.871.540.000	15.615.117.000		PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.07.00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	5 paket	493.600.000	518.280.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
01.20.03.02.08 00	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga rumah jabatan dan pengadaan sound system	2 Paket	298.440.000	313.362.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.09 00	Pengadaan peralatan gedung kantor			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	14 Unit	468.570.000	491.998.500	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.20 00	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Pangkalpinang			Terpeliharanya rumah jabatan	12 Bulan	750.000.000	787.500.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.22 00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Pangkalpinang			Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	1.500.000.000	1.575.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.23 00	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Pangkalpinang			Terpeliharanya kendaraan jabatan	12 Bulan	2.128.700.000	2.235.135.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.24 00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Pangkalpinang			Terpeliharanya kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6	90 unit roda 2, 48 unit roda 4 dan 5 unit roda 6	4.667.520.000	4.900.896.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.25 00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas			Pangkalpinang			Terpeliharanya Perlengkapan rumah jabatan dinas	12 Bulan	594.840.000	624.582.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.27 00	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender			Pangkalpinang			Terpeliharanya peralatan rumah jabatan dinas	12 Bulan	445.560.000	467.838.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.31 00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik			Pangkalpinang			Terpeliharannya peralatan dan jaringan listrik	7 unit	1.045.900.000	1.098.195.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.99 24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan	3 Paket	370.770.000	389.308.500	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.99 53	Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan			Pangkalpinang			Terpeliharanya kebersihan gedung yang dilakukan pemerliharan	12 Bulan	841.740.000	883.827.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.02.99 54	Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi			Pangkalpinang			Jumlah panjang jalan Milik Pemerintah Provinsi yang dipelihara	15.349 M	1.265.900.000	1.329.195.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			916.820.000	962.661.000		PD Kesekretariatan Daerah
01.20.03.03.02 00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Pangkalpinang			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, PNS, THL dan Humas Protokol	852 stel	665.250.000	698.512.500	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
01.20.03.03.12.00	Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov.			Pangkalpinang			Terlaksananya senam kesegaran jasmani setiap jum'at	11 Bulan	251.570.000	264.148.500	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
1.02.03.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	391.088.250		PD Kesekretariatan Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750	Sedang berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/Laporan	127.850.000	134.242.500	Sedang berjalan	PD Kesekretariatan Daerah
BELANJA RUTIN									13.665.179.700	14.758.394.076		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase pelayanan perkantoran	100%			10.274.019.700	11.095.941.276		PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya/pengiriman	12 bulan	22.800.000	24.624.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi		988.000.000	1.067.040.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terbayarnya jasa pemeliharaan perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional		1.899.030.000	2.050.952.400	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terbayarnya honorarium pengelola keuangan		209.640.000	226.411.200	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terlaksananya operasional kebersihan kantor		84.000.000	90.720.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terpeliharanya peralatan kerja		250.000.000	270.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya alat tulis kantor		246.230.000	265.928.400	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya barang cetak dan penggandaan		247.599.700	267.407.676	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya peralatan listrik		78.000.000	84.240.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan		259.920.000	280.713.600	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor		148.000.000	159.840.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya makanan dan minuman rapat		1.189.000.000	1.284.120.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah		300.000.000	324.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedia honorarium Pegawai kontrak yang menunjang kinerja PNS dan kesekretariatan	120 orang	3.231.800.000	3.490.344.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD dan keluarga	12 bulan	900.000.000	972.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tercapainya pelaksanaan konsolidasi dan koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	150.000.000	162.000.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya operasionalisasi rumah tangga dinas jabatan	12 bulan	70.000.000	75.600.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			2.739.470.000	2.958.627.600		PD Kesekretariatan DPRD
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya perlengkapan rumah dinas jabatan ketua DPRD	12 bulan	66.000.000	71.280.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya perlengkapan rumah dinas jabatan ketua DPRD	12 bulan	302.400.000	326.592.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang					869.400.000	938.952.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya penunjang kinerja melalui ketersediaan alat dan perlengkapan kantor	16 paket	722.000.000	779.760.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya Lingkungan kantor DPRD yang representatif	12 bulan	379.670.000	410.043.600	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
	Revitalisasi Saluran Air dan Pagar DPRD	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			tersedianya Lingkungan kantor DPRD yang representatif	1 paket	400.000.000	432.000.000	Baru	PD Kesekretariatan DPRD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%			365.690.000	394.945.200		PD Kesekretariatan DPRD
	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya pakaian dinas/kerja dan khusus tertentu bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	45 anggota DPRD dan 75 Pegawai	365.690.000	394.945.200	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			286.000.000	308.880.000		PD Kesekretariatan DPRD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang bersertifikat	286.000.000	308.880.000	Sedang Berjalan	PD Kesekretariatan DPRD
BELANJA RUTIN									3.232.465.000	3.491.062.200		
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Presentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.012.730.000	2.173.748.400	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.0100	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya Perangko,materai, dan benda pos lainnya serta paket/pengiriman	12 bulan	Rp 50.400.000	54.432.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.07.01.020 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Terbayarnya jasa listrik telekomunikasi dan informasi	12 bulan	Rp	264.000.000	285.120.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.060 0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Rp	325.450.000	351.486.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.070 0	Penyediaan jasa administrasi keuangan;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan	12 bulan	Rp	125.490.000	135.529.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.080 0	Penyediaan jasa kebersihan kantor;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Terlaksananya operasional kebersihan kantor	12 bulan	Rp	20.000.000	21.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.090 0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	Rp	25.000.000	27.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.190 0	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak	17 orang	Rp	460.090.000	496.897.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.01 .1000	Penyediaan alat tulis kantor;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	Rp	136.000.000	146.880.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.110 0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Rp	15.000.000	16.200.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.120 0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang		Tersedianya peralatan listrik 1 paket	1 paket	Rp	9.000.000	9.720.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output						
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	
1.20.07.01.150 0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi	1 paket	Rp	18.500.000	19.980.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.160 0	Penyediaan bahan logistik kantor;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya bahan logistik kantor	1 paket	Rp	21.800.000	23.544.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.170 0	Penyediaan makanan dan minuman;	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 paket	Rp	42.000.000	45.360.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.880 0	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	1 paket	Rp	150.000.000	162.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.01.180 0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	1 paket	Rp	350.000.000	378.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%			791.350.000	854.658.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
1.20.1.20.07.02 .0700	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya almari dan kursi tamu	4 unit kursi tamu 1 paket almari	Rp	88.700.000	95.796.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 .2200	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 gedung	Rp	63.000.000	68.040.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 .2600	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terpeliharanya secara baik perlengkapan gedung kantor	1 paket	Rp	36.600.000	39.528.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.07.02.2800	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terpeliharanya secara baik peralatan kantor	1 paket	Rp 46.600.000	50.328.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02.2900	Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya peralatan/perlengkap an gedung kantor	1 genset	Rp 556.450.000	600.966.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur:	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			55.920.000	60.393.600	SEDANG BERJALAN	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.03.0200	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	95 stel	Rp 55.920.000	60.393.600	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.06.1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	402.262.200		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.06.1.06.02.06.0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BELANJA RUTIN									2.568.778.000	2.774.280.240		
1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%			1.934.428.000	2.089.182.240	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.10.01.0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya paket/pengiriman	1 paket	20.400.000	22.032.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	12 bulan	108.000.000	116.640.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan	12 bulan	128.160.000	138.412.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			tersedianya operasional kebersihan kantor	12 bulan	36.000.000	38.880.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.0900	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	53.748.000	58.047.840	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			tersedianya alat tulis kantor	1 paket	120.000.000	129.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.1100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	169.640.000	183.211.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.1500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Meningkatnya pengetahuan Aparatur	12 Bulan	15.000.000	16.200.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.1300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	149.500.000	161.460.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.10.01.1600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung		tersedianya bahan logistik kantor	1 paket	9.690.000	10.465.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.01.1700	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung		tersedianya makanan dan minuman	1 paket	93.000.000	100.440.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.01.1800	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung		terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	1 paket	300.000.000	324.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.01.1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung		terbayarnya honorarium/upah pegawai honoror/tidak tetap	17 orang	486.290.000	525.193.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.01.5100	Pengelolaan Website	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung		terlaksananya penyediaan data dan informasi kepegawaian pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	12 bulan	95.000.000	102.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.01.0000	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung		terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	1 paket	150.000.000	162.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			214.925.000	232.119.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.02.2400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung		terpeliharanya kondisi dan tersedianya bahan bakar minyak kendaraan dinas dan operasional	4 mobil, 22 motor	214.925.000	232.119.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai			46.960.000	50.716.800		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.10.03.0200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Tersedianya pakaian dinas	143 stel (63 Stel pakaian dinas dan 80 pakaian hari tertentu)	46.960.000	50.716.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.06.1.06.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	402.262.200		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.06.1.06.02.06.0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	264.184.200		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	138.078.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
BELANJA RUTIN									10.733.649.300	11.270.331.765		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen	Terwujudnya Pemerintahan		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%			3.241.017.000	3.403.067.850		PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.0100	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya pelayanan administrasi surat-menyurat selama 12 bulan	Materai 4 paket, buku cek 10 buah pengiriman 1 paket	10.925.000	11.471.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	12 bulan jasa kantor yaitu : listrik, air, telepon/selular/sp eedy, TV berbayar, Internet, jasa instansi lainnya	556.400.000	584.220.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya pelayanan administrasi keuangan yang prima selama 12 bulan	honorarium pengelola keuangan 12 bulan	175.530.000	184.306.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.09.01.0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tercipta dan tersedianya pelayanan kebersihan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	peralatan dan bahan pembersih/pengharum ruangan dan jasa kebersihan 12 bulan	117.000.000	122.850.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya perlengkapan alat tulis kantor selama 12 bulan	alat tulis kantor 12 bulan	102.400.000	107.520.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.1100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya barang cetakan selama 12 bulan	50 buah spanduk, fotocopy 10.000 lbr, penjilidan selama 1 th, cetak formulir, blanko, kertas berlogo, kuitansi, kartu, stiker, amplop, jurnal/artikel, logo diklat,laporan, baleho, mapmikai/eks-banner, buku, poster,nomor kamar,	50.000.000	52.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya dan terciptnya penerangan lingkungan kantor lebih baik selama 12 bulan	6.000 liter solar genset, 4 unit accu genset, alat listrik dan elektronik lampu sorot, lampu emergency	219.000.000	229.950.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.09.01.1300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dalam mendukung operasional kantor	1 PT jam dinding, 4 buah box kunci, 1 PT umbul-umbul bendera dan bendera hias, 1 PT pigura/foto, 4 buah lambang burung Garuda 1 PT peralatan kerja, 243 set sprei single, 6 2 setrika,24 bh buah sprei double,set setrika,24 bh handuk,1 PT Cap stok Gantungan Baju asrama, 1 PT hanger Baju asrama, 1 PT gelas/cangkir dan Nampun asrama	72.000.000	75.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.1500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terciptanya informasi dan data pendukung selama 12 bulan	surat kabar 6.120 eks, majalah 120 eks	53.968.000	56.666.400	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan
1.20.1.20.09.01.1600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya logistik operasional kantor	isi ulang gas elpiji 4 buah dan tabung pemadam kebakaran 12 buah, bahan pertanian 1 paket, logistik rumah tangga 12 paket	11.060.000	11.613.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.1700	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya makanan dan minuman petugas, rapat dan tamu selama 1 tahun	air mineral 2.568 galon dan 48 dus,makanan dan minuman rapat/tamu V bahan makanan tambahan 12 petugas keamanan	57.044.000	59.896.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.1800	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pegawai yang melakukan perjalanan dinas	350.000.000	367.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.09.01.1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi selama 12 bulan	39 orang	1.315.690.000	1.381.474.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.01.8800	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah	pegawai yang melakukan perjalanan	150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.656.190.800	1.739.000.340		PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.02.1000	Pengadaan Meublair	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya meublair kantor yang lebih baik	150 unit kursi kerja, 6 unit sofa, 30 unit lemari pakaian	205.671.000	215.954.550	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.02.2200	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor	Gedung dan sarana badan diklat yg terpelihara	742.360.000	779.478.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.02.....	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya anggaran untuk pengadaan peralatan gdung kantor	Perlatan gedung kantor	181.200.000	190.260.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.02.2400	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan BBM mesin potong rumput	7 unit monbil 18 unit motor yang terpelihara	299.960.000	314.958.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.02.2800	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor	Peralatan diklat yg terpelihara	186.000.000	195.300.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.02.9980	Pengembangan dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi database	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya website dan sistem informasi kediklatan yang memadai	1 dokumen	40.999.800	43.049.790	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Disiplin Aparatur					Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			58.360.000	61.278.000		PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.03.0501	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Pakaian seragam pakaian diklat	 Stel	58.360.000	61.278.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan,Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			37.400.000	39.270.000		PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06.2500	Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja SKPD	Anggaran, Kegiatan, Kinerja SKPD	37.400.000	39.270.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
	Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				Prosentase pengembangan kualitas penyelenggara diklat yang mengikuti pelatihan	600			5.145.507.500	5.402.782.875		PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06.4.0500	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya diklat PIM tk. III selama 93 hari kerja (857 JP)	40 orang	876.445.000	920.267.250	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06.4.0600	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya diklat PIM tk. IV selama 103 hari kerja (893 JP)	40 orang	891.242.000	935.804.100	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06.4.0700	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. III	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Prajabatan CPNS Gol. III selama 33 hari, 319 JP (45 menit) atau 18 hari untuk pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja untuk pembelajaran non-klasikal	120 orang	400.530.000	420.556.500	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06.4.0701	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. II	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Prajabatan CPNS Gol. II selama 28 hari, 274 JP (45 menit) atau 13 hari untuk pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja untuk pembelajaran non-klasikal	120 orang	879.727.000	923.713.350	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06.4.....	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	30 orang	110.000.000	115.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06.4.....	Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Diklat Tata Naskah Dinas	30 orang	110.000.000	115.500.000	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.09.06 4.....	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Diklat Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur	30 orang	109.969.000	115.467.450	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 4.....	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan	30 orang	122.450.000	128.572.500	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 4.0900	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Diklat Bendahara Pengeluaran	30 orang	125.540.000	131.817.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 4.1300	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 orang	82.643.500	86.775.675	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 4.1600	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100 orang	31.896.000	33.490.800	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 4.4000	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan LAKIP	30 orang	110.000.000	115.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.05.....	Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terbiayainya pendidikan dan pelathan sosialisasi, bimbingan teknis bagi pegawai badan diklat	55 orang	150.000.000	157.500.000	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatian Training Officer Course (TOC)	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah						421.295.000	442.359.750	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Management of Traning (MOT)	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah						420.052.000	441.054.600	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF)	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah						303.718.000	318.903.900	Baru	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas	90%			595.174.000	624.932.700		PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.09.06 5.1401	Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	8 SKPD dilingkungan Prov.Kep. Babel	45.000.000	47.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 5.2901	Penyusunan Profil Kediklatan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Buku Profil, Kalender Pendidikan dan Leaflet	Buku Profil, KalenderPendidikan,dan Leaflet	69.050.000	72.502.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 5.3702	Evaluasi Pasca Diklat	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat	8 jenis diklat	49.229.000	51.690.450	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 5.4200	Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Widyaiswara	Jabatan fungsional Widyaiswara Badiklat	25.000.000	26.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 5.4701	Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Monev Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota	8 kegiatan	81.895.000	85.989.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 5.5600	Persiapan Pelaksanaan Re-akreditasi Badan Diklat	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya penilaian akreditasi 3 jenis diklat pada Badan Diklat Prov.Kep. Bangka Belitung	terakreditasi dengan 3 jenis diklat	250.000.000	262.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.1.20.09.06 5.7111	Rapat Koordinasi antar Kab./Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan baik	40 orang	75.000.000	78.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
BELANJA RUTIN									1.790.855.000	1.934.123.400		
1.20.1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kepegawaian	Sistem Birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			1.179.850.000	1.274.238.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan Jasa Surat menyurat			Pangkalpinang			surat menyurat terkirim	100%	12.000.000	12.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	42.000.000	44.100.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			pengelolaan keuangan daerah	100%	96.570.000	101.398.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor			Pangkalpinang			petugas kebersihan dan keamanan	terpenuhi	24.000.000	25.200.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja			Pangkalpinang			pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	30.000.000	31.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan alat tulis kantor			Pangkalpinang			alat tulis kantor	terpenuhi	54.000.000	56.700.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Pangkalpinang			barang cetakan dan penggandaan	terpenuhi	37.200.000	39.060.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pangkalpinang			adanya bahan bacaan bagi pegawai	surat kabar	10.000.000	10.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan bahan logistik kantor			Pangkalpinang			bahan logistik	100%	19.320.000	20.286.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan makanan dan minuman			Pangkalpinang			makan minum rapat dan tamu	100%	39.960.000	41.958.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Pangkalpinang			rapat koordinasi dan konsultasi	100%	200.000.000	210.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pangkalpinang			jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	514.800.000	540.540.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.01 .8800	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			Pangkalpinang			rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100.000.000	105.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kepegawaian	Sistem Birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur				163.220.000	176.277.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.11.02.0700	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Pangkalpinang		100%	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.800.000	24.990.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.02.0900	Pengadaan peralatan gedung kantor			Pangkalpinang		100%	tersedianya peralatan kantor	terpenuhi	45.000.000	47.250.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.02.2400	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Pangkalpinang		1 unit mobil dan 8 unit motor	pemeliharaan mobil dan motor dinas/ operasional	1 unit mobil dan 8 unit motor	94.420.000	99.141.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kepegawaian	Sistem Birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai				24.320.000	26.265.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.03.0200	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Pangkalpinang		100%	tersedianya pakaian dinas harian pegawai	terpenuhi	24.320.000	25.536.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian	Sistem Birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				51.000.000	55.080.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.20.1.20.11.05.0100	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Pangkalpinang		1 tahun	tersedianya aparatur yang berkualitas	100%	51.000.000	53.550.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.06.1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%			372.465.000	402.262.200		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.06.1.06.02.06.0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	134.242.500		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
BELANJA RUTIN									18.909.328.200	19.854.794.610		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			14.025.768.200	14.727.056.610		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pangkalpinang			perangko, materai dan benda pos lainnya, paket/pengiriman	12 bulan	119.000.000	124.950.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			sumber daya listrik, telekomunikasi dan informasi serta sumber daya air	12 bulan	1.350.000.000	1.417.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang			honorarium pengelolaan keuangan	12 bulan	595.740.000	625.527.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			peralatan dan bahan untuk kebersihan kantor	12 bulan	66.000.000	69.300.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			peralatan kerja yang baik	12 bulan	612.335.000	642.951.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang			alat tulis kantor	12 bulan	439.150.800	461.108.340	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan			Pangkalpinang			barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.228.800.000	1.290.240.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan gedung kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			peralatan listrik yang siap pakai	12 bulan	42.000.000	44.100.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			surat kabar dan majalah	12 bulan	32.000.000	33.600.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			bahan - bahan logistik kantor	12 bulan	156.442.000	164.264.100	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			makanan dan minuman rapat	12 bulan	94.280.000	98.994.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	800.000.000	840.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			honorarium bagi Pekerja Tidak Tetap pada DPPKAD	130 orang	3.718.000.000	3.903.900.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung			Pangkalpinang			sistem komputerisasi daftar gaji PNS yang berjalan dengan baik	12 bulan	120.245.000	126.257.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah			Luar daerah			perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	400.000.000	420.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Tengah			Kabupaten Bangka Tengah			operasional rutin kantor pada UPTD	12 bulan	528.752.800	555.190.440	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Selatan			Kabupaten Bangka Selatan			operasional rutin kantor pada UPTD	12 bulan	520.211.000	546.221.550	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Barat			Kabupaten Bangka Barat			operasional rutin kantor pada UPTD	12 bulan	529.381.100	555.850.155	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung Timur			Kabupaten Bangka Belitung Timur			operasional rutin kantor pada UPTD	12 bulan	578.060.500	606.963.525	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka			Kabupaten Bangka			operasional rutin kantor pada UPTD	12 bulan	656.000.000	688.800.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang			Pangkalpinang			operasional rutin kantor pada UPTD	12 bulan	645.320.000	677.586.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung			Kabupaten Belitung			operasional rutin kantor pada UPTD	12 bulan	625.620.000	656.901.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD			Provinsi Kep Bangka Belitung			Pengelolaan kehumasan DPPKAD	12 bulan	168.430.000	176.851.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			4.883.560.000	5.127.738.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang			perlengkapan gedung kantor	613 unit	1.405.970.000	1.476.268.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Pangkalpinang			peralatan geung kantor	282 unit	1.406.060.000	1.476.363.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Provinsi Kep Bangka Belitung			jasa pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	1.072.000.000	1.125.600.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Provinsi Kep Bangka Belitung			jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	504.870.000	530.113.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Rehabilitasi rumah dinas pada UPTD DPPKAD Kabupaten Bangka			Kabupaten Bangka			rehabilitasi rumah dinas pada UPT DPPKAD Kabupaten Bangka	1 paket	187.980.000	197.379.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor			Provinsi Kep Bangka Belitung			jasa pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor	12 bulan	306.680.000	322.014.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
BELANJA RUTIN									5.442.527.200	5.866.755.426		
1.20.1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			3.978.388.000	4.296.659.040	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jakarta			tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya/pengiriman	12 bulan	63.750.000	66.937.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jakarta			terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	12 bulan	224.400.000	235.620.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.0600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Jakarta			terbayarnya jasa pemeliharaan perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	10 unit mobil 13 unit motor	1.417.240.000	1.488.102.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.08.01.0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jakarta			terbayarnya honorarium pengelola keuangan	17 orang	112.080.000	117.684.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jakarta			terlaksananya operasional kebersihan kantor	12 bulan	45.600.000	47.880.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.0900	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jakarta			terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	70.000.000	73.500.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jakarta			tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	75.000.000	78.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jakarta			tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	78.520.000	82.446.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jakarta			tersedianya peralatan listrik	12 bulan	30.000.000	31.500.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jakarta			Tersedianya 1 paket bahan perlengkapan dan peralatan Kantor dan Mess	1 paket bahan perlengkapan dan peralatan Kantor dan Mess	29.220.000	30.681.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jakarta			tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	20.400.000	21.420.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jakarta			tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor	12 bulan	48.650.000	51.082.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1700	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jakarta			tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	300.000.000	315.000.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1800	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Jakarta			terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah	12 bulan	380.000.000	399.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Jakarta			Terpenuhinya pembayaran honorarium PHL Kantor Perwakilan	12 bulan	886.690.000	931.024.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.08.01.5100	Pengelolaan Website			Jakarta			Terkelolanya website kantor perwakilan	12 bulan	46.190.000	48.499.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01.8800	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah			Jakarta			Tercapainya pelaksanaan konsolidasi dan koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	75.000.000	78.750.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.01	Pengadaan Makanan Tambahan			Jakarta			tersedianya ekstra puding untuk pegawai keamanan	12 bulan	75.648.000	79.430.400	baru	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.029.584.200	1.111.950.936	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.02.0500	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Jakarta			Tersedianya tambahan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	5 unit kendaraan dinas roda dua	113.240.000	118.902.000	baru	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.02.2200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Jakarta			terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 paket belanja pemeliharaan	163.825.000	172.016.250	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Jakarta			Tersedianya pengadaan peralatan kantor	Tersedianya 4 unit AC Split, 1 buah papan neon box nama kantor, 1 unit mesin penghitung uang, 4 unit komputer/PC, 4 unit laptop, 1 unit printer, 4 unit UPS, 3 buah hardisk external	180.075.000	189.078.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Jakarta			Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya 2 buah lemari loker, 2 unit brankas, 4 unit TV LED, 1 unit mesin pompa air,	358.460.000	376.383.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.02	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor			Jakarta			Tersedianya Gudang dan Tangga di Kantor Perwakilan dan Gapura di Anjungan Babel	Tersedianya Gudang dan Tangga di Kantor Perwakilan dan Gapura di Anjungan Babel	213.984.200	224.683.410	baru	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%			62.090.000	67.057.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.20.1.20.08.03.0501	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			Jakarta			tersedianya seragam khusus dan hari-hari tertentu	152 stel dan 1 paket baju security serta 1 paket atribut security	62.090.000	65.194.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.06.1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%			372.465.000	391.088.250		PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.06.1.06.02.06.0500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD 2017	3 Dokumen	244.615.000	256.845.750		PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.06.1.06.02.06.0600	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semesteran Keuangan PD	5 Jenis Dokumen/ Laporan	127.850.000	134.242.500		PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
1.06	URUSAN WAJIB								10.319.941.000	10.791.468.030		
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN								8.134.202.000	8.496.442.080		
1.06.1.06.02.16	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten/kota), badan usaha dan swasta	80%			302.835.000	327.061.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.16.0200	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antardaerah			Dalam dan luar Provinsi Babel			Naskah perjanjian kerjasama	1 Naskah Kerjasama	302.835.000	327.061.800		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen prgogram dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi	80%			341.500.000	368.820.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.20.0600	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana			Luar Daerah			Jumlah/Jenis Diklat Teknis dan Fungsional/Bimtek/workshop yang diikuti	8 Jenis Diklat/Bimtek	341.500.000	368.820.000		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD	80%			4.652.873.000	5.025.102.840	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		SATAM EMAS	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam sleuruh proses pembangunan									
1.06.1.06.02.21.0600	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD			Pangkalpinang			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD 2017-2022 dan Forum Evaluasi Raperda RPJMD	2 Forum	763.300.000	824.364.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.0800	Penyusunan RKPD			Pangkalpinang			Dokumen RKPD 2018 dan Perubahan RKPD 2017	2 Dokumen	504.020.000	544.341.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.0900	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Pangkalpinang			Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Forum Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD 2017	3 Forum	794.032.000	857.554.560	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.1200.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)			Pangkalpinang			LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan	2 dokumen	556.049.000	600.532.920	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.1300	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			7 Kab/Kota			Laporan pengendalian perencanaan, kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana tahunan perangkat daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Laporan dari 36 SKPD dan 7 Kabupaten/Kota	506.106.000	546.594.480	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.1600	Penyusunan KUA PPAS			Pangkalpinang			KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan KUA PPAS Tahun 2017	4 Dokumen	450.550.000	486.594.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.21.3100.	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas			7 Kab/Kota			Pedoman Umum dan Juknis serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan SATAM EMAS	2 Dokumen dan 2 Laporan	325.530.000	351.572.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.3300.	Penyusunan RPJMD 2017-2022			Pangkalpinang			Dokumen RPJMD 2017-2022	1 dokumen	753.286.000	813.548.880	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya Konsumsi Masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD	80%			845.166.000	912.779.280	Sedang berjalan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.02.23.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Energi dan Sumber daya mineral			Pangkalpinang			Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, energi dan sumber daya mineral	6 FGD dan 2 kali rapat koordinasi	225.824.000	243.889.920	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.23.	Perencanaan Pembangunan Sub Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			Pangkalpinang			Koordinasi perencanaan pembangunan daerah dunia usaha, koperasi dan usaha kecil menengah	6 FGD dan 2 kali rapat koordinasi	225.574.000	243.619.920	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.23.xxxx	Penyusunan Increamental Capital Output Ratio (ICOR)			Pangkalpinang			Increamental Capital Output Ratio (ICOR)	1 Dokumen	393.768.000	425.269.440	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.23	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumberdaya alam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap RPJMD	80%			133.965.000	144.682.200	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.23.	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			Pangkalpinang			Koordinasi Program AMPL dan Sanitasi Nasional	3 kali Rakor, 1 kali lokakarya	133.965.000	144.682.200	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.22	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumberdaya alam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup	80%			204.490.000	220.849.200	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.22.xxxx	Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup			Pangkalpinang			Koordinasi perencanaan bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup	2 Rakor dan 6 FGD	204.490.000	220.849.200	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.21.16	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD				456.656.000	204.692.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.1600	Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)			Pangkalpinang			Penyusunan Rencana Zona Integritas ASN	1 Dokumen	189.530.000	204.692.400	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.02.21.xxxx	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Pangkalpinang			Koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4 Rakor	267.126.000	288.496.080	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.01.23	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sosial Budaya terhadap RPJMD	80%			447.972.000	483.809.760	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun	menurunnya disparitas pembangunan antarwilayah dan masyarakat									
		Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata	Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat									
		Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan										
1.06.1.06.01.23.3300	Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan	4 Sub Bidang	219.048.000	236.571.840	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.06.1.06.01.23.3400	Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia			Pangkalpinang			Koordinasi perencanaan bidang kependudukan dan sumber daya manusia	7 Sub Bidang	228.924.000	247.237.920	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									748.745.000	808.644.600		
1.06.1.06.02.34	Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan Sebagai Rekomendasi	83%			748.745.000	808.644.600	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan penelitian dan pengembangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.06.02.34. Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah				Pangkalpinang			Penelitian/Kajian tentang pembangunan daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	1 kajian	362.085.000	391.051.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan penelitian dan pengembangan
1.06.1.06.02.34. Penguatan Sistem Inovasi Daerah				Pangkalpinang			Dikumen kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 Dokumen	386.660.000	417.592.800	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan penelitian dan pengembangan
PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN									2.185.739.000	2.295.025.950		
1.20.03.25.	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama daerah.	100%			584.450.000	613.672.500		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.1.20.03.02 5.1800	Partisipasi kontribusi iuran dan keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama daerah	Luar Bangka Belitung			Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI	12 Bulan	198.800.000	208.740.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.1.20.03.02 5.2000	Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama daerah.	Luar Bangka Belitung			Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan	12 Bulan	224.760.000	235.998.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.1.20.03.02 5.	Pengembangan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birr	Pangkalpinang			Terlaksananya pertemuan pengembangan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Kali	160.890.000	168.934.500	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Persentase/Jumlah Rekomendas, kajian dan data tentang pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai kebijakan	27%			1.388.027.000	1.457.428.350		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.07 00	Koordinasi Program Corporate Social Responsibility (CSR)	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	7 Kabupaten/Kota			Terkoordinasinya pelaksanaan Program CSR di Prov. Kep. Babel	12 Bulan	205.480.000	215.754.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.03.104.02 00	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Luar Daerah dan Dalam Daerah			Terlaksananya Movev Penyertaan Modal Prov. Kep. Babel	5 Provinsi dan 2 Kabupaten	144.650.000	151.882.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.09 00	Koordinasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Pangkalpinang			Terlaksananya proses Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	3 Kali Rapat Tim	143.080.000	150.234.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bagian Perekonomian dan Koperasi	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Luar Daerah dan Dalam Daerah			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM	12 bulan	75.000.000	78.750.000	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.10 00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi Investasi	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi Potensi Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka	12 Bulan	99.650.000	104.632.500	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.10 00	Forum Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di	3 Kegiatan	102.890.000	108.034.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.06 00	Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Bangka	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	12 Bulan	200.000.000	210.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.11 00	Forum Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Pangkalpinang			Terlaksananya Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Prov. Kep. Bangka Belitung	3 Kegiatan	140.236.000	147.247.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.05 00	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas	12 Bulan	83.300.000	87.465.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1.20.03.104.	Monitoring, Evaluasi serta Koordinasi bidang Produksi Daerah	Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh	Kabupaten / Kota			Terlaksananya monitoring , evaluasi, koordinasi serta Rakor Bidang Produksi Daerah	12 Bulan	193.741.000	203.428.050	Baru	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.06.17.	Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi	Peningkatan Manajemen Aparatur	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis		Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi			213.262.000	223.925.100		PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
7800	Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kab/kota	Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur	terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang	5 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Proses Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota	5 kab/kota	93.800.000	98.490.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
8000	Perapatan dan Pemasangan Pilar batas Daerah antar Kab/kota	Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur	terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang	Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Tengah dan Kab Bangka			Terlaksananya pemasangan perapatan pilar batas daerah antar Kabupaten/Kota	4 Buah Pilar Batas	119.462.000	125.435.100	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
1	URUSAN WAJIB								107.726.153.052	119.637.947.323		
01.20.03.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta/luar Jakarta	95%			4.972.615.000	5.221.245.750		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
01.20.03.16.02.00	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri			Pangkalpinang dan Belitung			Terlaksananya pelayanan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 Bulan	1.488.250.000	1.562.662.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
01.20.03.16.05.00	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah			7 Kabupaten/Kota			Terlaksananya kunjungan kerja KDH dan WKDH dalam daerah	12 Bulan	994.840.000	1.044.582.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
01.20.03.16.25.00	Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel			Pangkalpinang			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel	12 Bulan	911.300.000	956.865.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
01.20.03.16.26.00	Dukungan Publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam dan Luar Daerah			Dalam dan Luar Babel			Terlaksananya liputan kegiatan kedinasan KDh dan WKDH	12 Bulan	582.840.000	611.982.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.03.16.0700	Rakor Gubernur dengan Bupati/walikota se-Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Kabupaten/Kota			Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota	2 Kali Rakor	399.880.000	419.874.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.03.16.2100	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. Kep. Babel 2016	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersusunnya LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan IKK LPPD	1 dokumen dan 50 orang	306.830.000	322.171.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.03.16.3200	Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota di Prov. Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota Prov. Kep. Babel	7 Kab/Kota	288.675.000	303.108.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.03.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Terlaksananya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah			917.600.000	963.480.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
1726	Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya Pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli masyarakat	Pangkalpinang			Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan se Prov. Kep. Bangka Belitung	2 Kali Rakor	97.250.000	102.112.500	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
7700	Verifikasi dan validasi Dana Hibah kepada Pemerintah/Pemerintahan Daerah lainnya dan BUMD	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya Pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli masyarakat	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Verifikasi dan Validasi pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD	1 Tahun	36.875.000	38.718.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
01.20.113.0200.	Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah			7 kabupaten/ Kota di Provinsi Bangka Belitung			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penerima bantuan sosial dan hibah	12 Bulan	304.275.000	319.488.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
1.20.113.0300	Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah			7 kabupaten/ Kota di Provinsi Bangka Belitung			Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	12 Bulan	274.400.000	288.120.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.113.0300	Sosialisasi Pemberian Dana Bantuan Sosialisasi dan Hibah			7 kabupaten/ Kota di Provinsi Bangka Belitung			Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pemberian dana Bansos dan Hibah	1 Kegiatan	204.800.000	215.040.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
01.20.03.020	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)				4.719.224.000	4.955.185.200		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1100	Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksannanya Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	12 Bulan	1.149.750.000	1.207.237.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2200	RAKERNAS LPSE	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	TANJUNGPANDA N, KABUPATEN BELITUNG			Terlaksananya Rakernas LPSE Provinsi se-Indonesia	1 kali rakernas	684.840.000	719.082.000	BARU	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3400	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	SUNGAILIAT, KABUPATEN BANGKA			Terlaksananya sinkronisasi percepatan pembangunan	1 kali pertemuan	110.850.000	116.392.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4000	Koordinasi Sistem E-MONEP	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya proses pemantauan realisasi fisik dan keuangan	12 Bulan	631.500.000	663.075.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4100	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksannanya Proses pengadaan barang/jasa	12 Bulan	2.019.134.000	2.120.090.700	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4300	Koordinasi Penyusunan RENSTRA/Revisi RENSTRA, Renja/Revisi Renja dan Anggaran	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Renstra/Revisi Renstra, Renstra/Revisi Renstra, RKPD dan Penyusunan Anggaran Lingkup	7 Biro	123.150.000	129.307.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)	84%			198.794.000	208.733.700		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan
1.20.1.20.03.	Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov. Kep. Babel Tahun 2017	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	43 Unit Kerja	198.794.000	208.733.700	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.03.02.6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan	100%			1.920.591.000	2.016.620.550		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.02.6.0900	Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	12 Raperda	460.864.000	483.907.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.02.6.	Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	Pangkalpinang dan Luar Daerah			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara eksekutif dengan legislatif	12 Raperda	319.096.000	335.050.800	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.02.6.1200	Bimbingan Teknik Legal Drafting	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	Pangkalpinang			Terlaksananya Bimtek Legal Drafting	1 Kegiatan	89.930.000	94.426.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.02.6.1400	Sosialisasi Perda	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Sosialisasi Perda	1 Kegiatan	96.550.000	101.377.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.02.6.1900	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	Pangkalpinang			Tersusunnya Produk Hukum Daerah	1400 PHD	278.506.000	292.431.300	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.03.02 6.3500	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	Tanjungpandan - Belitung			Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Biro Hukum Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Bagian Hukum Kabupaten/kota dan Instansi terkait lainnya	1 Kali Rakor	163.050.000	171.202.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.02 6.3700	Penyuluhan Hukum di 7 wilayah kabupaten/kota	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Penyuluhan Hukum di 7 wilayah Kabupaten/kota	7 Kab/kota	300.335.000	315.351.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.02 6.	Publikasi Produk Hukum Daerah di Media	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	Prov. Kep. Bangka Belitung			Tersampainya PHD Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Masyarakat Umum	15 PHD	212.260.000	222.873.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.03.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sebanyak 9 Urusan	1 Tahun			149.800.000	157.290.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.	Penataan Urusan/kewenangan di Prov. Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang			Terlaksananya Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9 Urusan	149.800.000	157.290.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.10 5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	100%			151.475.000	159.048.750		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.03.10 5.0200	Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	7 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota	10 Raperda	77.300.000	81.165.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.10 5.0100	Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	7 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Simplifikasi PHD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota	74.175.000	77.883.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.03.083	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database	100%			105.355.000	110.622.750		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.03.083	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang kecamatan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah	Pangkalpinang			Terlaksananya sosialisasi peraturan pemerintah tentang kecamatan	1 Kali	105.355.000	110.622.750	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.03.117	Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan	87%			683.550.000	717.727.500		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.11 7.0100	Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Prov. Kep. Babel tahun 2016	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersusunnya Buku Rumpun Jabatan Fungsional Pemprov. Kep. Babel	50 buku	75.000.000	78.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.03.11 7.	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Standarisasi Kompetensi Teknis PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel	47 buku kompilasi	110.000.000	115.500.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.11 7.0500	Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Kompilasi analisis beban kerja jabatan PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	47 Buku Kompilasi	118.277.000	124.190.850	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.11 7.0600	Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Kompilasi hasil penetapan evaluasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	50 Buku Kompilasi	140.273.000	147.286.650	sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.11 7.	Pembinaan bidang analisa jabatan Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			tersedianya dokumen analisi jabatan pada Pemprov. Kep. Babel	45 buku kompilasi	50.000.000	52.500.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.11 7.	Validasi dan Penetapan Hasil Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang/ Jakarta			Buku hasil Penetapan Analisis Jabatan di Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur	10 Buku	115.000.000	120.750.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.11 7.0200	Penyusunan Profil Aparatur Pemprov. Kep. Babel Tahun 2016	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	45 buku	75.000.000	78.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.03.091	Program Peningkatan Perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan	97%			573.546.002	5.050.801.457		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.09 1.0500	Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prov Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Optimalisasi Pencapaian dan Pelaporan SPM di Prov. Kep. Bangka Belitung	12 Bulan	105.576.002	110.854.802	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Pelaksanaan Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada Unit Pelayanan Terpadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (samsat Pangkalpinang)	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Unit Pelayanan Terpadu DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang (Samsat Pangkalpinang)	1 Unit Pelayanan	331.760.000	348.348.000	Kelanjutan Kegiatan Tahun 2015	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.09 1.	Audit Pengawasan (Surveillance Audit) Sertifikasi ISO 9001:2008 pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPPKAD Wilayah Kab. Bangka (Samsat Bangka) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit pelayanan	136.210.000	143.020.500	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
01.20.03.020	Program Bantuan Hukum	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Persentase lansia yang mendapat bantuan hukum				764.210.000	802.420.500		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan
2500	Penyelesaian Perselisihan/sengketa Perdata antara Pemda dengan Masyarakat secara litigasi/non litigasi	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	7 Kabupaten/Kota			Terlaksanakan Penyelesaian Sengketa Perdata antara Pemda dengan orang/masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	1 Kasus	150.250.000	157.762.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
2600	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	Pangkalpinang, Palembang, Medan dan Jakarta			Terlaksanakannya Penyelesaian Sengketa Perdata antara Pemda dengan orang/masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	1 Kasus	215.000.000	225.750.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3800	Pembinaan pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	7 Kabupaten/Kota			Terlaksanakannya Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Litigasi /Non Litigasi dan Bantuan Hukum akibat pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda	12 Bulan	104.655.000	109.887.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3900	Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksanakannya Monitoring Pelaksanaan Ranham di Wilayah Kabupaten/kota	12 Bulan	104.655.000	109.887.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Lansia Miskin yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	Dalam dan Luar Bangka Belitung			Terlaksanakannya Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang diberikan oleh LBH	2 LBH	189.650.000	199.132.500	baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.20.106	Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	100%			138.540.000	145.467.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.10 6.0100	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Pangkalpinang			Terlaksanakannya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Jaringan Website	60 PHD	43.010.000	45.160.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Himpunan PERDA dan PERGUB Tahun 2016	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Pangkalpinang			Terlaksanakannya penghimpunan Perda dan Pergub Tahun 2016	100 Buku	63.430.000	66.601.500		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.10 6.	Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2017	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Pangkalpinang			Terlaksanakannya pengumpulan dan penyusunan arsip PHD Tahun 2017	90 Buku	32.100.000	33.705.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.03.095	Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi				tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep. Babel dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien	85%			147.865.050	155.258.303		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Penyusunan Draft Rapergub tentang Pembentukan Unit Pelaksaana Teknis/cabang Dinas Pemerintah Prov.Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	7 Kab/Kota			Terlaksananya penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Draft Rapergub	147.865.050	155.258.303	Baru (penataan Kelembagaan peralihan P3D)	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.03.120.	Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi				Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD	85%			247.010.000	259.360.500		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.12.0.0100	Pembinaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota di Prov. Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/kota	125.260.000	131.523.000	Baru (penataan Kelembagaan peralihan P3D)	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.12.0.0200	Rakornis Biro/Bagian Organisasi se-Provinsi Kep.Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Pelaksanaan Rakornis Biro/ Bagian Organisasi Se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 x pelaksanaan rakor	121.750.000	127.837.500	sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.03.092.	Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Tertatnya manajemen pengelolaan SKPD serta nomenklatur, struktur, kewenangan dan tupoksi SKPD	75%			105.634.500	110.916.225		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.03.092.	Verifikasi dan Validasi (SOP) di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya verifikasi dan validasi SOP	43 Unit Kerja	105.634.500	110.916.225	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional	100%			298.225.000	313.136.250		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
01.20.03.05.99 54	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengguna Jasa Konstruksi	1 Bimtek	68.500.000	71.925.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
01.20.03.05.99 17	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pertemuan tim pembina jasa konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota	30 orang	160.950.000	168.997.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
01.20.03.05.99 91	Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Rapat Koordinasi	1 kali pertemuan	68.775.000	72.213.750	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.03.084	Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah	Peningkatan Manajemen Aparatur	Menguatnya tata kelola Pemerintah Daerah		meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	B			416.886.000	437.730.300		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.08 4.	Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Prov. Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			terlaksananya Bimtek Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAPKIN) Prov. Kep. Bangka Belitung	1 kali bimtek	125.996.000	132.295.800	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.08 4.0500	Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2016 Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Tersusunnya LAPKIN 2016 dan TAPKIN 2017	2 Dokumen	193.050.000	202.702.500	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.03.08 4.0600	Pembinaan Pelaksana Penyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Monev Perjanjian Kinerja dan LAPKIN	12 Bulan	97.840.000	102.732.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
URUSAN WAJIB									54.003.700.050	58.323.996.054		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%			378.000.000	408.240.000		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terselenggaranya pembahasan APBD dan APBD-P dalam Badan Anggaran DPRD	2 Pengesahan Perda APBD dan APBD-P	378.000.000	408.240.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
2	Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%			53.625.700.050	57.915.756.054		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terselenggaranya Pembahasan raperda usulan eksekutif dan raperda inisiatif DPRD	80% perda dari eksekutif dan 4 perda inisiatif DPRD disahkan	9.289.550.000	10.032.714.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Rapat-rapat Paripurna	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terselenggaranya rapat-rapat peripurna DPRD	15 Rapat Paripurna	209.000.050	225.720.054	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Reses	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terjaringnya aspirasi masyarakat bagi pembangunan daerah	3 reses	5.120.000.000	5.529.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terselenggaranya bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD	6 Bimbingan Teknis	4.244.000.000	4.583.520.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terselenggaranya fungsi pengawasan, koordinasi dan konsolidasi DPRD melalui kunjungan kerja	4 Komisi, 3 badan kelengkapan	32.000.000.000	34.560.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi antar pimpinan DPRD se Indonesia dalam forum ADPSI	6 Laporan pertemuan	236.250.000	255.150.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya tenaga ahli dan pakar dalam menunjang kinerja Fraksi dan Pimpinan DPRD	7 Tenaga ahli dan 4 pakar	729.600.000	787.968.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Tersedianya jaminan bantuan hukum bagi permasalahan hukum terkait kebijakan DPRD	2 Masalah hukum terselesaikan	200.000.000	216.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pangkalpinang			Terselenggaranya publikasi dan advetorial kegiatan-kegiatan DPRD pada masyarakat	12 bulan	1.597.300.000	1.725.084.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
URUSAN WAJIB									6.709.502.950	7.246.263.186		
1.20.07.020	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)	100,00%			5.348.058.100	5.775.902.748	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.20.010 0	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pemeriksaan secara berkala	120 LHP/LHPE	Rp 2.787.719.850	3.010.737.438	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.020.02 00	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan di lingkungan pemda	20 LHP	Rp 285.040.000	307.843.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.20 .0400	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pemeriksaan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	5 LHP	Rp 63.750.000	68.850.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 0.0600	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Provinsi Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI	43 Obrik di Lingkungan Pemprov Kep. Babel dan 28 Obrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota	Rp 159.851.750	172.639.890	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.20 .0700	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	7 Kab/Kota, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan DKI Jakarta			Terlaksananya rakorwasda dan rakorwasdan	1 PKPT	Rp 299.224.000	323.161.920	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.07.02 0.0800	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Percepatan Tindak Lanjut secara berkala di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	terhadap 43 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 28 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh 127 tim Pemantauan Evaluasi	Rp 936.599.950	1.011.527.946	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 0.4600	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya penagihan piutang daerah akibat TP-TGR	12 bulan	Rp 632.672.750	683.286.570	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.07.020.20 00	Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya penghitungan angka kredit JFA dan P2UPD pada Inspektorat	60 orang	Rp 25.000.000	27.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.20 .3800	Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien				Laporan Hasil Aksi PPK Daerah Tahun 2017	Lap. Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Aksi PPK Prov. Kep. Babel Tahun 2016 Triwulan	Rp 158.199.800	170.855.784	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 0	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)	100,00%			479.420.000	517.773.600	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 0.3100	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online	Laporan Penilaian PMPRB secara triwulan	Rp 329.600.000	355.968.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.09 4.0400	Peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan (upgrading)	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Penyempurnaan dan peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan	Upgrading sistem aplikasi	Rp 149.820.000	161.805.600	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.02 1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD)	100%			882.024.850	952.586.838	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
					a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD							
					b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output						
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	
1.20.1.20.07.02 1.0100	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur yg mengikuti diklat	86 orang	Rp 788.300.000	851.364.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
1.20.1.20.07.21 .0500	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien	Pangkalpinang			Terlaksananya PKS	55 orang (Laki-laki: 26, Perempuan: 29)	Rp 93.724.850	101.222.838	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
URUSAN WAJIB										8.049.054.100	8.692.978.428		
1.20.1.20.10.05 .	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan karir aparatur serta penempatan aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	80%			4.791.442.000	5.174.757.360	sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.1.20.10.05 .8900	Work Shop sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksanya Bimtek Sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian	2 kegiatan	97.347.000	105.134.760	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.10.065.25 00	Pengembangan Kompetensi PNS melalui kediklatan dan Bimtek	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pengembangan Kompetensi PNS Melalui Diklat dan Bimtek	90 Orang	750.100.000	810.108.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.1.20.10.65 .2701	Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksannya peningkatan Pendidikan Formal PNS Melalui Beasiswa Tugas Belajar PNS	57 orang	2.401.360.000	2.593.468.800	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.1.20.10.65 .5300	Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar	20 Orang	74.488.000	80.447.040	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	
1.20.1.20.10.05 .9960	Pendidikan Bela Negara	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara CPNS	75 Orang	325.840.000	351.907.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.10.05.8800	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian	2 kegiatan	110.000.000	118.800.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.05.9958	Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pembinaan Aparatur CPNS/PNS/PTT	10 kegiatan	165.750.000	179.010.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.05.9978	Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan	350 Orang Pelajar SLTA	205.958.000	222.434.640	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.65.7107	Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa Indonesia	130 orang	260.750.000	281.610.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.65.0200	Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Assement Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Aparatur Eselon III (laki-laki 70% dan perempuan 30%)	399.849.000	431.836.920	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.065.	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Prov. Kep. Bangka Belitung	terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan kemampuan/ ketrampilan dengan mengikuti pelatihan/ pendidikan	85%			2.927.612.100	3.161.821.068	sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.065.6200	Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			rekomendasi kenaikan pangkat, golongan, jabatan/dupak bagi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu yang telah memenuhi persyaratan	12 rekomendasi	100.000.000	108.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				1/2/3	1/2/3
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.10.065.6300	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya penyelesaian Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pensiun Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemprov dan PNS Golongan IV. A ke atas di BKD Kab/Kota	500 Berkas	137.714.900	148.732.092	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.065.6500	Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya pengambilan Sumpah dan Pelantikan	6 pelantikan	54.106.700	58.435.236	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.065.6600	Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Sidang Baperjakat	12 Sidang	122.961.600	132.798.528	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.05.8804	Pembuatan Buku Profil Kepegawaian	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Buku Profil Kepegawaian Pemprov. Kep. Babel	240 Buku	106.600.000	115.128.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.05.9941	Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			terlaksananya fasilitasi penyusunan regulasi bidang kepegawaian	5 Regulas	100.000.000	108.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.12.50600	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Tes Calon PNS	1 kegiatan	649.000.000	700.920.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.65.1201	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terpenuhinya Capra IPDN Prov. Kep. Babel	1 kegiatan	307.015.000	331.576.200	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.03.1000	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka oleh panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4 kegiatan	749.078.000	809.004.240	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.10.065.6600	Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Meningkatnya Kompetensi, wawasan serta Motivasi Analis Kepegawaian	12 Orang	25.000.000	27.000.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.05.8803	Penerbitan Buletin Kepegawaian	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			dihasilkannya Buletin Kepegawaian per semester dan tersebarnya berita/informasi kepegawaian ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	400 Buletin	75.079.900	81.086.292	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.12.5.0900	Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			terlaksananya rapat koordinasi program kepegawaian daerah antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota	1 kegiatan	111.200.000	120.096.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.65.7104	Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara	120 Formasi	164.856.000	178.044.480	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.01.1000	Monitoring dan Evaluasi SKP	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Evaluasi dann Pembinaan tata Cara pengisian SKP SKPD	42 SKPD	75.000.000	81.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.12.5.0510	Penyusunan Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung	Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok		Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2562 PNS	150.000.000	162.000.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.12.6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Prov. Kep. Bangka Belitung	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	85%			330.000.000	356.400.000	sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.10.12.6.0100	Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Penyelesaian permasalahan kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin	10 Kasus	120.000.000	129.600.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdava

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.26.1.20.10.12 6.0300	Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya Workshop Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Prakteknya	100 Orang	150.000.000	162.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.10.05.050 0	Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai	Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur	Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien	Prov. Kep. Bangka Belitung			Terlaksananya usulan penerbitan Karpeg dan Karis / Karsu, serta terlaksananya usulan penghargaan Satyalancana Karya Satya	200 kartu dan 150 piagam	60.000.000	64.800.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
URUSAN WAJIB									8.845.352.400	9.287.620.020		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah		Catatan hasil pemeriksaan	WTP			4.787.291.220	5.026.655.781		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Pangkalpinang			laporan keuangan semester I APBD TA 2017	1 laporan	68.485.220	71.909.481	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Indonesia			pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat	35 orang	221.600.000	232.680.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak			Provinsi Kep Bangka Belitung			terlaksananya kegiatan Rakor dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	1 kali	85.540.000	89.817.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang APBD			Pangkalpinang			perencanaan keuangan Pemerintah Daerah TA 2018	1 Raperda, 1 Rapergub	716.220.000	752.031.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan APBD			Pangkalpinang			perencanaan keuangan Pemerintah Daerah TA 2017	1 Raperda, 1 Rapergub	648.010.000	680.410.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD			Pangkalpinang			peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	100 peserta	201.947.000	212.044.350	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD			Pangkalpinang			Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018	100%	220.000.000	231.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pengembangan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)			Pangkalpinang			Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja	1 peraturan	260.000.000	273.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Pangkalpinang			Rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah	1 Raperda	300.000.000	315.000.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak			Prov. Kep. Babel			intensifikasi sumber-sumber pajak daerah	Dinas dan 7 UPTD	725.790.000	762.079.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Pangkalpinang			laporan realisasi APBD TA 2016	1 laporan	288.000.000	302.400.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D			Pangkalpinang			arsip SP2D TA 2017	36 SKPD	228.369.000	239.787.450	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD			Pangkalpinang			peserta yang mengikuti Bimtek	120 orang	245.000.000	257.250.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan Aplikasi SIPKD			Pangkalpinang			aplikasi SIPKD yang berjalan dengan baik	12 bulan	578.330.000	607.246.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah		Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%			732.810.180	769.450.689		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Evaluasi Raperda Kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD			Pangkalpinang			Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang Perubahan APBD TA 2017 dan Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/kota tentang APBD TA 2018	7 kab/kota	386.549.900	405.877.395	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Rapat Koordinasi Pembinaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Provinsi Kep Bangka Belitung			rapat koordinasi pembinaan keuangan dengan Pemerintah Kab/kota se Prov Kep Bangka Belitung	7 kab/kota	249.990.000	262.489.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD			Pangkalpinang			Raperda Kab/kota dan Peraturan Bupati/Ewalikota tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017	7 Keputusan Gubernur	96.270.280	101.083.794	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah		Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%			1.935.530.000	2.032.306.500		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Corner			Prov. Kep. Babel			Samsat Corner	12 bulan	77.000.000	80.850.000	Sedang berjalan	Lintas instansi
	Peningkatan fungsi pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah			Prov. Kep. Babel			sistem informasi pajak daerah yang berjalan baik	7 UPTD	578.000.000	606.900.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan fungsi pelayanan Samsat Keliling			Prov. Kep. Babel			Samsat Keliling	4 unit	501.940.000	527.037.000	Sedang berjalan	Lintas instansi
	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait			Prov. Kep. Babel			rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait	2 kali	90.000.000	94.500.000	Sedang berjalan	Lintas instansi
	Sosialisasi Pajak Daerah			Prov. Kep. Babel			sosialisasi pajak daerah	7 media massa lokal	74.000.000	77.700.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB			Prov. Kep. Babel			Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	3 pergub	92.000.000	96.600.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain			Prov. Kep. Babel			kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pada sumber-sumber retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	40 SKPD/Instansi/Pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	448.070.000	470.473.500	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain			Prov. Kep. Babel			Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	12 kali raker	74.520.000	78.246.000	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah		Asset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya (%)	100%			1.389.721.000	1.459.207.050		PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang			Pangkalpinang			peserta Pembinaan Teknis Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	100 orang	245.462.000	257.735.100	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang			Keputusan Gubernur tentang Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	1 keputusan	261.415.000	274.485.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
	Penghapusan Barang Milik Daerah			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	1 keputusan	164.315.000	172.530.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Pangkalpinang			Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2017	2 laporan	186.314.000	195.629.700	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah			Pangkalpinang			Pengamanan dan pengawasan terhadap barang milik Provinsi Kep Bangka Belitung	36 SKPD	212.215.000	222.825.750	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah			Pangkalpinang			permasalahan dan pemecahan masalah asset di seluruh Perintah Daerah di lingkungan Provinsi Kep Bangka Belitung	8 Pemerintah Daerah	110.000.000	115.500.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			Pangkalpinang			peserta sosialisasi	200 orang	110.000.000	115.500.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)			Pangkalpinang			Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)	1 buku	100.000.000	105.000.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
URUSAN WAJIB									1.950.359.000	2.106.387.720		
1.20.1.20.11.065	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	Sistem Birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien		Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP Korpri Prov. Kep. Bangka Belitung	90%			1.950.359.000	2.106.387.720	Sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.11.06 5.3800	Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Pangkalpinang		6 kegiatan	terlaksananya kegiatan bhakti sosial KORPRI dan masyarakat tahun 2015	6 kegiatan	250.000.000	262.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.11.06 5.4300	Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			terlaksananya pembinaan rohani bagi PNS/CPNS prov. Kep. Babel	PNS/CPNS Provinsi	149.999.000	157.498.950	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.11.06 5.4400	Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kep. Babel			Pangkalpinang			terlaksananya pengukuhan dan pelantikan DP Kab/kota KORPRI dan DP unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI kep. Babel	7 kab/kota, 37 unit provinsi dan 1 DPP KORPRI	135.360.000	142.128.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.11.65.600 0	Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Aparatur Kab/kota			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah anggota KORPRI yang ikut Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Aparatur Kab/kota	50 orang	75.000.000	78.750.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.11.65.580 0	Pembentukan Koperasi KORPRI Prov. Kep. Babel			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Terbentuknya satu unit Koperasi KORPRI prov. Kep. Babel	1 unit koperasi	100.000.000	105.000.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.11.06 5.6100	Rapat Kerja KORPRI Prov. Kep. Babel			Pangkalpinang			Terlaksananya Rapat Kerja	75 orang	90.000.000	94.500.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.065.7600	Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI tahun 2017			-			terpilihnya atlet KORPRI yang berprestasi	6 cabang olahraga	730.000.000	766.500.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.065.7700	Pertandingan Olahraga Antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			terlaksananya pertandingan olahraga antar unit KORPRI se Prov. Kep. Babel	6 cabang olahraga	300.000.000	315.000.000	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.065.7800	Pelatihan Instruktur Senam Bugar KORPRI di Lingkunga Pemerintah provinsi kep. Babel			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			terlaksananya pelatihan instruktur senam bugar KORPRI	PNS anggota KORPRI se- Provinsi Kep. Babel	120.000.000	126.000.000	Baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
URUSAN WAJIB									1.337.323.000	1.404.189.150		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2017	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1.20.1.20.08.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Menguatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah		Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta/luar Jakarta	100%			1.337.323.000	1.404.189.150	Sedang Berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.08.16.0100	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan			Jakarta			Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	1000 undangan	724.823.000	761.064.150	sedang berjalan	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
1.20.1.20.08.16	Penyelenggaraan Keprotokoleran di JABODETABEK			Jabodetabek			Terlayannya keprotokoleran pimpinan Provinsi Bangka Belitung di JABODETABEK	100%	312.500.000	328.125.000	baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan
1.20.1.20.08.16	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya			Jabodetabek			Terciptanya Pelayanan Kedinasan melalui Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	100%	300.000.000	315.000.000	baru	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

5.2. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel V.37 penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut “*money follow function*” akan tetapi berasaskan “*money follow priority programme*”.

Tabel V.34
Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

No.	Perangkat Daerah	Pagu Belanja Langsung 2017
(1)	(2)	(3)
1	PD yang melaksanakan urusan pendidikan	234.512.237.800
2	PD yang melaksanakan urusan kesehatan	180.601.651.400
5	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	279.327.389.000
6	PD yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	2.963.880.000
7	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	19.519.741.940
8	PD yang melaksanakan urusan sosial	26.537.536.050
9	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	13.789.076.900
10	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.921.110.000
11	PD yang melaksanakan urusan pangan	6.268.564.000
12	PD yang melaksanakan urusan pertanahan	106.710.000
13	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup	7.715.191.750
14	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	723.080.000
15	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa	23.445.334.850
16	PD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.022.613.000
17	PD yang melaksanakan urusan perhubungan	47.826.530.000
18	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika	14.222.023.150

No.	Perangkat Daerah	Pagu Belanja Langsung 2017
(1)	(2)	(3)
19	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah	6.924.246.000
20	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal	6.505.453.000
21	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga	14.303.887.100
22	PD yang melaksanakan urusan statistik	1.432.072.000
23	PD yang melaksanakan urusan persandian	110.400.000
24	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan	18.018.167.700
25	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan	9.738.947.850
26	PD yang melaksanakan urusan kearsipan	1.011.811.950
27	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan	15.138.234.000
28	PD yang melaksanakan urusan pariwisata	5.264.173.000
29	PD yang melaksanakan urusan pertanian	27.084.530.000
30	PD yang melaksanakan urusan kehutanan	11.342.628.000
31	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral	10.950.578.000
32	PD yang melaksanakan urusan perdagangan	7.845.619.000
33	PD yang melaksanakan urusan perindustrian	2.741.114.000
34	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi	765.975.000
36	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan	216.412.373.452
JUMLAH		1.219.092.879.892

5.3. Dukungan Rencana Program Terhadap Prioritas Provinsi

Memperhatikan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka salah satu arah kebijakan belanja keuangan daerah yang telah ditetapkan adalah dalam rangka mendukung 13 (tiga belas) prioritas pembangunan provinsi.

Adapun secara lengkap, gambaran mengenai dukungan anggaran terhadap masing-masing prioritas pembangunan provinsi dapat dilihat pada Tabel V.38 berikut:

Tabel V.35
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM	1.363.897.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	485.392.500	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	449.028.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	581.434.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan industri kecil dan menengah	1.166.858.000	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	77.813.000	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.026.421.000	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.053.195.000	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	531.150.000	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Peningkatan iklim investasi dan Promosi	695.761.000	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyiapan potensi investasi produk unggulan daerah	416.574.000	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	809.623.000	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	821.990.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	10.622.726.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	637.195.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.442.510.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	140.830.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	718.180.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	3.091.818.100	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	608.734.500	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.168.631.000	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Peningkatan Ketahanan Pangan	3.796.429.150	PD yang melaksanakan urusan pangan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengembangan Perikanan Budidaya	2.370.865.000	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan Perikanan Tangkap	299.250.000	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	397.000.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan Ketahanan Pangan	3.796.429.150	PD yang melaksanakan urusan pangan
		Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	2.262.419.500	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	531.150.000	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3.053.195.000	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Peningkatan dan Pengembangan ekspor	1.026.421.000	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	397.000.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.015.112.900	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Perencanaan Sosial Budaya	447.972.000	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	656.218.000	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	870.611.000	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	931.316.000	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan & Kecakapan Hidup Pemuda	1.263.740.200	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.426.884.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	150.900.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.015.112.900	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
JUMLAH			64.617.786.900	
2	Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.168.631.000	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Kerja sama Informasi dan Media Masa	922.790.000	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	4.390.883.850	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	550.320.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	138.116.571.800	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pengembangan Industri Kecil dan menengah Komoditi Kerajinan	799.807.000	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Pengembangan Industri Kecil dan	1.166.858.000	PD yang

No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menengah		melaksanakan urusan perindustrian
		Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif	449.028.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	1.363.897.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	657.904.800	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
JUMLAH			151.586.691.450	
3	Penguatan Rural Urban Linkages	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	3.091.818.100	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	700.715.000	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa	1.026.937.300	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	40.015.000	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.053.195.000	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	416.574.000	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	10.622.726.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.442.510.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	821.990.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	140.830.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	718.180.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pengembangan Perikanan Tangkap	299.250.000	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan Perikanan Budidaya	2.370.865.000	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.595.542.000	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.168.631.000	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Pengembangan Kemitraan	500.000.000	PD yang melaksanakan urusan pariwisata
		Pembangunan Jalan dan Jembatan	122.976.970.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.082.390.000	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	4.436.922.000	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	140.985.000	PD yang melaksanakan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				urusan energi dan sumber daya mineral
		Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	371.670.000	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah	1.471.556.000	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	1.497.298.000	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan	843.630.000	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pengembangan Wilayah Perbatasan	213.262.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan
		Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	449.028.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.263.740.200	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	138.116.571.800	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
JUMLAH			304.873.801.400	
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Pengembangan Nilai Budaya	4.176.303.000	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	434.585.000	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	479.137.400	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembinaan Generasi Muda	1.924.525.150	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.371.140.050	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.905.076.700	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Rehabilitasi Sosial	2.635.888.000	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.691.339.500	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti	113.100.000	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	4.015.112.900	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	8.458.604.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	700.715.000	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM)	1.363.897.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	3.091.818.100	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan keuangan	1.026.937.300	PD yang melaksanakan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		desa		pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	700.715.000	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	608.734.500	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	164.722.500	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	601.252.500	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarustamaan Gender		PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.517.137.000	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.034.060.000	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
JUMLAH			42.014.800.600	
5	SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar)	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	4.826.435.000	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Raskintis	14.852.599.950	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin	25.707.567.850	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Pemberdayaan Sosial Budaya	3.091.818.100	PD yang



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa		melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	4.015.112.900	PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja
		Pendidikan menengah dan tinggi	138.116.571.800	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1.263.740.200	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Penyediaan dan pengelolaan air baku	1.070.840.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan kualitas hidup perempuan	1.517.137.000	PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM	1.363.897.000	PD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
JUMLAH			198.977.069.800	
6	Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Pendidikan Menengah dan Tinggi	138.116.571.800	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pendidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	403.090.000	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.467.792.850	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
JUMLAH			139.987.454.650	
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	1.022.613.000	PD yang melaksanakan urusan pengendalian



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				penduduk dan keluarga berencana
		Penataan Administrasi Kependudukan	723.080.000	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular	3.259.523.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Bencana Bidang Kesehatan	381.400.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Lingkungan sehat	1.110.476.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.832.049.800	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSJ)
		Upaya Kesehatan Masyarakat	12.678.286.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSUP)
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.152.880.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSUP)
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	243.663.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Upaya Kesehatan Masyarakat	5.273.009.900	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSJ)
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	250.000.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSUP)
		Peningkatan Kesehatan Pelayanan Anak Balita	205.519.800	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Perbaikan Gizi Masyarakat	389.597.900	PD yang melaksanakan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				urusan kesehatan
		Pengembangan Lingkungan Sehat	1.110.476.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Standarisasi pelayanan kesehatan	1.029.661.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Standarisasi pelayanan kesehatan	508.479.600	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSJ)
		Standarisasi pelayanan kesehatan	797.652.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSUP)
		Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	2.257.900.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Labkes	897.156.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSJ)/RS Paru/RS Mata	82.450.701.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSUP)
		Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	2.006.053.700	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSJ)
		Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	3.161.080.000	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSUP)
		Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	7.251.239.200	PD yang melaksanakan urusan kesehatan (RSJ)
		Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	993.272.300	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
JUMLAH			133.985.769.200	
8	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	915.317.500	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan Pengendalian Polusi	242.090.000	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	220.848.000	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.053.190.000	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Peningkatan Kualitas serta akses informasi SDA dan LH	1.392.204.500	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	204.490.000	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.691.680.000	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2.121.530.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Perencanaan dan Pengembangan Hutan	843.630.000	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.516.875.000	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	710.150.000	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Penyediaan logistik/peralatan tanggap darurat penanggulangan bencana	4.441.094.000	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3.599.999.800	PD yang melaksanakan urusan sosial
		Bencana Bidang Kesehatan	381.400.000	PD yang melaksanakan urusan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kesehatan
JUMLAH			20.334.498.800	
9	Fasilitasi Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	371.670.000	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.691.680.000	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1.516.875.000	PD yang melaksanakan urusan kehutanan
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	915.317.500	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	10.622.726.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Program Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	821.990.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pengembangan Perikanan Budidaya	2.370.865.000	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.371.140.050	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.388.027.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan
JUMLAH			22.070.290.550	
10	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan ruang terbuka hijau	1.053.190.000	PD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	706.550.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				penataan ruang
		Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	4.260.648.500	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		JUMLAH	6.020.388.500	
11	Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.893.610.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.218.850.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan Turap/Talud/bronjong	5.088.780.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan Jalan dan Jembatan	122.976.970.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	106.936.410.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	405.530.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	150.000.000	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Peningkatan Pelayanan Angkutan	449.225.000	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.070.840.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				penataan ruang
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.151.350.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	39.904.175.000	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	4.436.922.000	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	752.205.000	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
JUMLAH			290.434.867.000	
12	Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kerjasama Pembangunan	302.835.000	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perencanaan Kota-kota Besar dan Menengah	133.965.000	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	122.976.970.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	584.450.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Pengembangan Wilayah Perbatasan	213.362.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.082.390.000	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.070.840.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	397.000.000	PD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	601.252.500	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	164.722.500	PD yang melaksanakan urusan transmigrasi
		Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah	1.471.556.000	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	4.436.922.000	PD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.442.510.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	821.990.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	637.195.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Pengembangan Perikanan Tangkap	299.250.000	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan
		Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	4.260.648.500	PD yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	215.291.000	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan	799.807.000	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.388.027.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	434.585.000	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
		Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	608.734.500	PD yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	138.116.571.800	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.467.792.850	PD yang melaksanakan urusan perpustakaan
		Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.263.740.200	PD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga
		Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.082.390.000	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.082.390.000	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.442.510.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	821.990.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	718.180.000	PD yang melaksanakan urusan pertanian



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan Ketahanan Pangan	3.796.429.150	PD yang melaksanakan urusan pangan
		Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	40.015.000	PD yang melaksanakan urusan perindustrian
JUMLAH			300.176.312.000	
13	Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.787.291.220	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.746.737.760	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP)
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	215.000.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal	600.000.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal	2.702.082.700	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP)
		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	372.872.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(Satpol PP)
		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	505.650.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	216.500.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Kemitraan Kamtibmas	320.000.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota	151.475.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.920.591.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	138.540.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	147.865.050	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	247.010.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	105.634.500	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	608.550.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	573.546.002	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	479.420.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	198.794.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	75.000.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	5.145.507.500	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah	416.886.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	584.450.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.972.615.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Penataan Daerah Otonomi Baru	149.800.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Daerah
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	105.355.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada	102.960.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Perencanaan Pembangunan Daerah	4.652.873.000	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	447.972.000	PD yang melaksanakan penunjang urusan perencanaan
		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	752.205.000	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.719.224.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	2.926.412.100	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.791.442.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan Disiplin Aparatur	46.960.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	595.174.000	PD yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.348.058.100	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	809.623.000	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD	378.000.000	PD Kesekretariatan DPRD
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	732.810.180	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain-lain	1.935.530.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	1.389.721.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	882.024.850	PD yang melaksanakan fungsi pengawasan
		Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	342.353.000	PD yang melaksanakan urusan



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kearsipan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	38.880.000	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	253.794.700	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	4.719.224.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.093.500.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya	220.000.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pendidikan Politik Masyarakat	471.500.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Fasilitasi Peningkatan demokrasi	175.000.000	PD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.950.359.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Korp Kepegawaian



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	657.904.800	PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penghubung di Ibukota Negara
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	53.625.700.050	PD Kesekretariatan DPRD
		Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	403.090.000	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	917.600.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Keuangan
		Penataan Administrasi Kependudukan	723.080.000	PD yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	8.458.604.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Pengembangan Nilai Budaya	168.590.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
		Pembinaan kerukunan umat beragama	276.336.000	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya



No	Prioritas	Program	Pagu Indikatif 2017	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	50.000.000	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan Informatika
JUMLAH			132.543.677.512	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149

Website : bappeda.babelprov.go.id

Email : bappeda.provbabel@yahoo.com